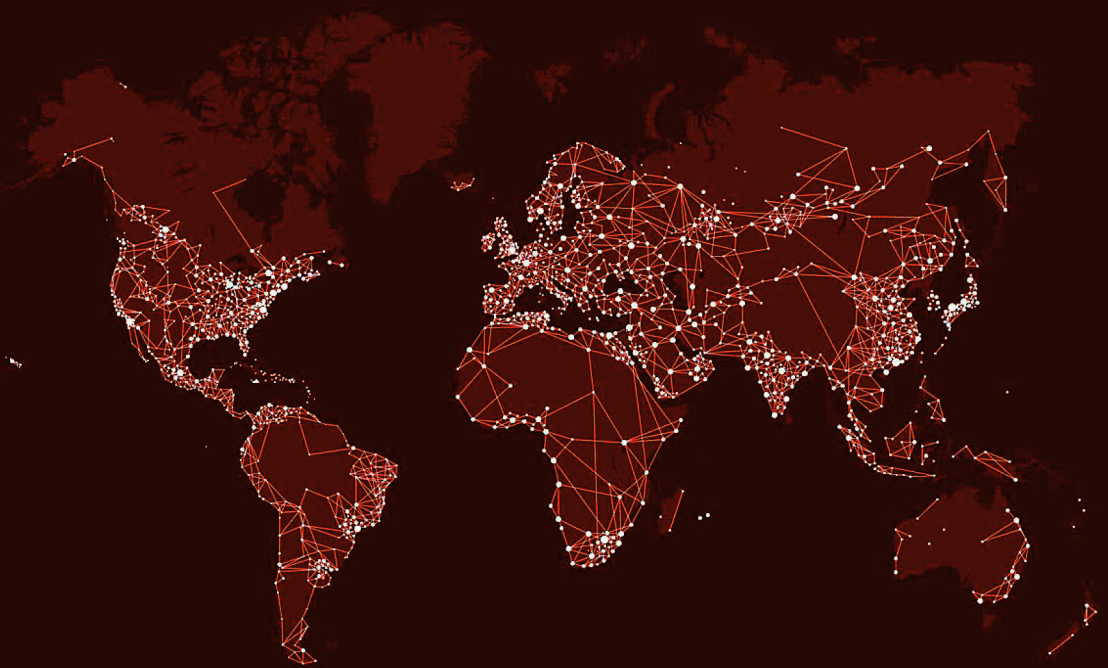


ISSN: 2776-208 4
Volume II Nomor 3, Maret 2022

Jurnal Kajian Manajemen & Stratejik

Journal of Management & Strategic Studies

Geopolitik, Geostrategik, dan Geoekonomi



Penerbit:

Yayasan Pembangunan Berkelanjutan bekerja sama dengan
ILUNI Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia

Jurnal Kajian Manajemen & Stratejik

Journal of Management & Strategic Studies

Geopolitik, Geostrategik, dan Geoekonomi

Penerbit:

Yayasan Pembangunan Berkelanjutan bekerja sama dengan ILUNI Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia

Penasehat:

Prof. Dr. Albertine Minderop
Dr. Hanief Saha Ghafur
Dr. Ir. Alfred Inkiriwang, MSi

Pemimpin Redaksi/ Editor in Chief:
Dr. Audrey G. Tangkudung

Wakil Pemimpin Redaksi:
Dr. Sidratahta Muchtar

Dewan Redaksi:

Dr. Chotib Hasan
Dr. Jerry Logahan
Dr. Henny Saptatia
Dr. Adipati Rahmat Gumelar
Dr. Riani Winter
Dr. Felly Ferol Warouw, SH.ST.M.Eng
Fajar Kurniawan, MSi.
Fera Belinda, MSi
Merdy Rumintjap, MSi
Afrianti Wulandari, MSi
Tio Sianipar, MSi
Rakhmayanti Novitasari, MSi
Utoyo Harjito

Administrasi:

Rizqita Oktorini
Dedeh Kurniasih

Penerbit:

Yayasan Pembangunan Berkelanjutan bekerja sama dengan
ILUNI Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia

Alamat Redaksi:

Jalan Salemba Raya, NO. 4 Jakarta Pusat
Gedung IASTH Lantai 5
Homepage: <http://sksg.ui.ac.id> Email: ilunisps@ui.ac.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga Jurnal Kajian Manajemen & Stratejik Volume II, Nomor 3, Maret 2022, dapat hadir di hadapan pembaca. Edisi ini menampilkan artikel yang bersumber dari berbagai kegiatan penelitian dan dari berbagai kalangan akademis.

Dinamika perubahan alam dan kehidupan manusia dalam tataran nasional dan global serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melaju dengan sangat cepat. Pesatnya laju perubahan dan perkembangan tersebut dijadikan dasar bagi kami untuk pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perubahan alam dengan segala isinya perlu diseimbangkan dengan ilmu pengetahuan, kebudayaan masyarakat, dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini dan mendatang. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan bagi kepentingan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Kajian Manajemen & Stratejik ini memuat berbagai artikel dalam menangani dan mengelola berbagai potensi, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra. Kegiatan pengabdian tersebut dikelola menjadi suatu kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemajuan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Jurnal ini merupakan salah satu wujud sumbangsih kami dalam upaya mengembangkan, memajukan, dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di dalamnya aplikasi ipteks bagi masyarakat. Redaksi menyadari bahwa dalam penerbitan jurnal perdana ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, artikel-artikel hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimuat dalam edisi perdana ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat pembaca.

Pemimpin Redaksi
Dr. Audrey G. Tangkudung

DAFTAR ISI

IDENTIFIKASI KONSEP DESAIN KAWASAN WISATA DI SEPUTARAN TONDANO, MINAHASA, SULUT YANG BERKELANJUTAN DAN TAAT PADA PROTOKOL KESEHATAN Sonny Davy. J Mailangkay, ST.MT1 , Antoinette Luciane Grace Katuuk, ST.MT2, Dr. Felly Ferol Warouw, Sh.ST.M.Eng3	8
ANALISIS PENYEBAB KURANGNYA STOK PETI KEMAS DI JAKARTA DAN DAMPAKNYA PADA EKSPOR DI SAMUDERA SHIPPING LINE JAKARTA TAHUN 2021 Alta Rega Pratama	16
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, HARGA TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN YANG BERDAMPAK PADA MINAT BELI ULANG PADA RESTORAN MUJIGAE CABANG SERPONG Astrid Zusana Logahan , Freddy J Rumambi, Ratna Prayogi , Jerry M. Logahan	42
PERKEMBANGAN GREEN CONSTITUTION DUNIA: MANFAAT DAN IMPLIKASI BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Eka Reza Khadowmi, Andi Hevriansyah, Audrey G Tangkudung	54
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI METODE JIGSAW DALAM MATA PELAJARAN IPA STUDI DI KELAS V SD NEGERI I POOPO, BOLMONG, SULUT Brianne Eucleysia Jo Komedi, Lady Grace Jane Giroth, Viktory Nicodemus Joufree Rotty, Felly Ferol Warouw	74
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ASURANSI TRISAKTI Ade Irma Hayati,S.E., M.M, Dr. Mardi Siswoyo, M.M, Dr. (C) Ir. Jones Zenas Rante, M.M	82
SONGKET PALEMBANG, A CAPTIVATING HERITAGE AS AN ACTUALIZATION OF NATIONAL IDENTITY IN INDONESIAN RESILIENCE AND DEFENSE MECHANISMS Rakhmayanti Novitasari Winata	94

PELUANG DAN TANTANGAN PERTANIAN PERKOTAAN SEBAGAI STRATEGI KETAHANAN PANGAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID 19 Audi P. Sebayang, Lita S Barus	104
EFEKTIVITAS PROGRAM REDD+ SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN PERUBAHAN IKLIM DALAM STUDI KERJA SAMA REDD+ INDONESIA-NORWEGIA Okvivio Vergina Gihoni	110
KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM Auderey G. Tangkudung, Jemmy Kaseger	117
KEBIJAKAN PEMBENDUNGAN AS TERHADAP TAIWAN: DIANTARA IDEOLOGI DEMOKRASI TAIWAN DAN KOMUNIS TIONGKOK Fajar Kurniawan	130
PENGARUH KARAKTERISTIK DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN JALUR SEPEDA JALAN SUDIRMAN DKI JAKARTA Utoyo Harjito	136
PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA (ENVIRONMENTAL DAMAGE PROBLEMS AT THE BEAUTIFUL BEACH OF KAPUK NORTH JAKARTA) Rizqita Oktorini	146
PEMANFAATAN SAMPAH MAKANAN DARI SUMBER RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGURANGI PENINGKATAN GAS RUMAH KACA Dedeh Kurniasih	158
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ASURANSI TRISAKTI Ade Irma Hayati,S.E., M.M , Dr. Mardi Siswoyo, M.M, Dr. (C) Ir. Jones Zenas Rante, M.M	168

IDENTIFIKASI KONSEP DESAIN KAWASAN WISATA DI SEPUTARAN TONDANO, MINAHASA, SULUT YANG BERKELANJUTAN DAN TAAT PADA PROTOKOL KESEHATAN

Sonny Davy. J Mailangkay, ST.MT1, Antoinette Luciane Grace Katuuk, ST.MT2, Dr. Felly Ferol Warouw, Sh.ST.M.Eng3

sonnymailangkay@unima.ac.id1, gracekatuuk@unima.ac.id2, ferolwarouw@unima.ac.id3
Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado

Abstrak

Tondano merupakan ibukota Kabupaten Minahasa memiliki penduduk yang ramah dan berdiri Universitas Negeri Manado. Penelitian ini merupakan upaya awal untuk identifikasi bentuk desain wisata di seputaran Tondano dan diobservasi menyangkut konsep desain yang dipakai dan apakah telah menerapkan protokol kesehatan sehubungan dengan adanya pandemi saat ini. Fokusnya adalah pengembangan kawasan wisata secara terpadu dan berkelanjutan yang artinya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan didahului dengan observasi bentuk desain jenis wisata yang ada di seputaran Tondano kemudian untuk dideskripsikan hubungan sebab akibat serta penerapan protokol kesehatan. Data terkini terkait kegiatan dan pariwisata diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan beberapa informan. Wawancara dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil observasi dideskripsikan melalui pendekatan konsep desain sesuai kaidah arsitektur berkelanjutan sebagai dasar untuk pengembangan ke depan. Hasil penelitian di seputaran Tondano terdapat wisata alam danau, wisata kuliner, wisata sejarah dan perdagangan. Selanjutnya dianalisis konsep desain wisata yang merupakan perpaduan antara modern, tradisional yang mengutamakan luasan ruang hijau. Hal ini sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan serta telah menerapkan standar kebijakan protokol kesehatan di semua area wisata tersebut. Secara umum, perlu dilakukan arahan dalam pengembangan kedepan agar konsep desain sesuai kearifan lokal dapat terus dipertahankan dan dilakukansosialisasi dan pengawasan agar upaya penerapan protokol kesehatan dapat terus terjaga sehingga peningkatan pengelolaan kawasan wisata dapat berjalan optimal guna mendukung keberlanjutan pariwisata di Tondano pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya.

Kata Kunci: Desain, Wisata, Tondano

1. Introduction

Dipenghujung tahun 2021 ini seiring dengan melandainya peningkatan kasus covid maka pariwisata kembali bergaung (Benjamin et al., 2020). Sejak tahun 2020 terjadi penutupan lokasi wisata akibat virus covid 19 namun di tahun 2021 kegiatan pariwisata kembali mulai dilaksanakan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat (Zenker & Kock, 2020). Sebagai salah satu penghasil devisa tertinggi, pariwisata perlu terus dikembangkan dengan pendekatan baru sebab ini merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional yang berkembang cukup pesat saat ini (Brohman, 1996).

Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara semakin eksis dengan ditetapkannya Kawasan Super Prioritas (KSP) Likupang sebagai salah satu destinasi unggulan (Kawulur et al., 2021; Andaria et al., 2018). Kondisi tersebut tentunya perlu didukung dengan pengembangan kawasan sekitar lainnya seperti kawasan Tondano yang merupakan ibukota Provinsi dan memiliki potensi pariwisata danau Tondano (S. A. Wowiling et al., 2013). Menjadi salah satu dari 10 DTW (Daerah Tujuan Wisata) utama di Indonesia, Sulawesi Utara terus mengedepankan pariwisata sebagai salah satu program unggulan daerah. Potensi pesisir pantai menjadi andalan yang ditawarkan kepada wisatawan. Sejak 2009 kegiatan internasional seperti World Ocean Conference (WOC), Coral Triangle Initiative (CTI) dan Sail Bunaken diselenggarakan silih berganti tujuannya untuk mengangkat potensi pariwisata (Siswahto, 2020; T. Wowiling, 2016). Atraksi yang dilaksanakan tersebut turut menggerakkan pertumbuhan sektor-sektor yang terkait erat dengan pariwisata, diantaranya sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa. Pada

tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini Sulawesi Utara masih menjadi daerah tujuan diselenggarakannya acara-acara internasional termasuk tentunya dengan menawarkan potensi wisata Danau Tondano (Kambey & Djati, 2016).

Pariwisata merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia (Mudrikah, 2014). Namun disisi lain sektor pariwisata merupakan salah satu faktor utama kerusakan lingkungan (Wibowo et al., 2017). Oleh karena itu perlu adanya upaya pengendalian dengan penerapan konsep pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (Clarke, 1997). Beberapa area wisata yang telah berkembang tersebut perlu dipahami konsep desainnya agar dalam pengembangan kedepan dapat menunjang keberlanjutan pembangunan (Haque et al., 2020). Konsep pariwisata berkelanjutan, secara keseluruhan dan berdasarkan pada lima komponen wisata yaitu atraksi, amenitas, infrastruktur, aksesibilitas dan kelembagaan (Lane, 2018; Nunkoo, 2017).

Saat ini Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang ke Sulawesi Utara terus meningkat (Koyongian et al., 2021). Peningkatan wisatawan asing yang datang ke Sulawesi Utara sebagian besar turis dari Tiongkok (Amidong et al., 2020). Hal ini berarti jika jumlah wisatawan meningkat maka PDRB Sulawesi Utara akan meningkat pula. Jumlah hotel, Jumlah hunian kamar hotel dan Jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh positif yaitu mampu meningkatkan PDRB Sulawesi Utara (Alouw et al., 2021). Peningkatan jumlah PAD dan jumlah wisatawan yang berkunjung tentu saja perlu diapresiasi sebagai suatu keberhasilan

(Qian et al., 2020). Namun di sisi lain keberhasilan ini juga perlu diwaspadai karena jika tidak dikembangkan melalui pendekatan pariwisata berkelanjutan mengakibatkan konflik sosial, ketimpangan ekonomi dan degradasi lingkungan di sekitar lokasi Daerah Tujuan Wisata(Saarinen, 2019).

Penyediaan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur yang sesuai kon-sep wisata penting dilakukan(Lane, 2018). Hal ini merupakan faktor-faktor penunjang yang penting agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung di suatu objek wisata(Mandić et al., 2018). Hal ini memberikan peluang terbukanya lahan investasi bagi para investor untuk mengembangkan Tondano dengan adanya potensi Danau Tondano sebagai ikon wisata utama. Saat ini bermunculan investor yang menanamkan modalnya dan membuka usaha di Tondano dan sekitarnya, terlebih investor dari luar daerah. Semakin luasnya lapangan kerja di sektor pariwisata ini juga telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan mereka(Higgins-Desbiolles, 2020). Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata juga meningkat dari tahun ke tahun. Namun seiring dengan perkembangan global saat ini dengan adanya pandemi covid-19 berimbas juga pada pengembangan pariwisata(Mayaka et al., 2019).

Identifikasi konsep desain kawasan wisata yang ada di seputaran Tondano dilihat berdasarkan pendekatan arsitektur berkelanjutan(Abdillah, 2020). Arti dari arsitektur berkelanjutan adalah bahwa kawasan wisata dikembangkan tidak hanya secara sosilogis maupun ekonomis melainkan juga ekologis(Cahaya, 2016). Desain konsep ini adalah mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur

potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem pertanian, industri, kehutanan dan menggunakan material/bahan yang memprioritaskan kualitas lingkungan, vitalitas ekonomi dan keuntungan sosial melalui perancangan bangunan, operasional bangunan dan perawatan(Arrahman, 2021). Pendekatan inilah yang dilakukan dalam penelitian ini.

2. Methods

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi konsep wisata yang ada di Tondano dan sekitarnya melalui pendekatan arsitektur berkelanjutan. Selain pendekatan arsitektur berkelanjutan di integrasikan juga pariwisata yang sehat sesuai dengan kebijakan protokol covid-19. Pendekatan pariwisata berkelanjutan kondisi pandemi dilihat dari tiga sisi utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan guna mewujudkan tata kelola wisata berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di lokasi Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara yang juga terdapat salah satu danau terbesar di Indonesia yaitu Danau Tondano. Hasil observasi kemudian distrukturkan dalam bentuk model kemudian diperiksa dengan menggunakan pendekatan kebijakan peraturan daerah menyangkut penanganan pandemi covid 19 di Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian di bulan Juli – Agustus 2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi langsung guna menemukan fenomena pariwisata yang sedang berlangsung. Setelah dimodelkan kerangka tersebut di deskripsikan melalui pendekatan ekonomi, sosial dan lingkungan. Guna memperkuat observasi peneliti juga melakukan wawancara kepada stakeholder terpilih guna mendapatkan masukan tentang kondisi

pariwisata di lokasi penelitian. Mula-mula peneliti menemui informan pangkal yaitu individu yang pertama kali ditemui karena dinilai dapat menjadi 'pembuka pintu' dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya peneliti menemui beberapa informan kunci berdasarkan referensi yang telah diberikan oleh informan pangkal. Informan kunci adalah individu-individu tertentu yang dinilai menguasai permasalahan yang hendak diteliti dan mempunyai keahlian serta berwawasan cukup terkait pengelolaan pariwisata. Selanjutnya hasil wawancara dengan para informan ditranskrip dan dianalisis secara deskriptif disesuaikan dengan hasil model system thinking.

3. Results and Discussion

3.1. Analisis Jenis Wisata Di Seputaran Tondano.

Perkembangan pariwisata yang sangat pesat di seputaran Tondano terdiri atas beberapa jenis kegiatan baik yang berpengaruh pada kondisi sosial, ekonomi maupun lingkungan khususnya Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kawasan wisata yang berkembang dan ditampilkan sebagai berikut:.

Tabel 1. Hasil Observasi Jenis Wisata Di Seputaran Tondano

No.	Bentuk Wisata	Nama Lokasi dan Konsep Desain Penerapan Protokol Kesehatan
1.	Kawasan Wisata Danau Luna' Kitchen,	konsep wisata perpaduan alam danau dan rumah kayu. Penerapan Ketat
2.	Kawasan Wisata Kuliner KFC Tondano,	konsep modern dikelilingi taman dan gereja sentrum yang memberi nuansa religi Penerapan Ketat
3.	Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya Benteng Moraya,	konsep ruang terbuka yang luas dengan menara Penerapan

Sedang

4. Kawasan Wisata Perdagangan (Pasar) Pasar Tondano, konsep pasar tradisional Penerapan Longgar

5 Kawasan Wisata Religi Kampung Jawa Penerapan Sedang

Sumber: diolah dari data primer

Hasil identifikasi peneliti maka ada empat jenis wisata utama yang berada di seputaran Tondano yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Kawasan Wisata Danau Luna's Kitchen

Lunas kitchen dipilih karena dianggap mewakili representasi bentuk wisata alam yang asri dan berada di pusat wisata seputaran danau Tondano. Lunas kitchen merupakan lokasi wisata yang menyediakan sarana kuliner dan wisata pinggiran pemandangan alam danau Tondano. Kita dapat melihat langsung keindahan danau Tondano beserta dengan jajaran pegunungan di bagian seberang danau Tondano. Di lokasi ini juga dibangun beberapa rumah kayu sebagai tempat wisatawan menginap. Ditinjau dari konsep arsitektur berkelanjutan secara sosial kawasan wisata ini bisa dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat namun harus membayar sejumlah harga tiket masuk. Dari sisi ekonomi lokasi ini menyediakan jualan kuliner yang bisa dinikmati oleh wisatawan namun khusus dikelola oleh pemilik sehingga tidak memberi peluang keterlibatan masyarakat. dan dari sisi lingkungan kawasan ini menyuguhkan pemandangan danau Tondano yang asri baik dinikmati dari pagi hingga sore dan malam hari.

2.1.1. Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya Benteng Moraya

Kawasan benteng moraya dipilih

mewakili kawasan wisata sejarah yang ada di seputaran Tondano kawasan benteng moraya ini merupakan icon baru karena berada dekat dengan pusat Kota Tondano dan memiliki hamparan lapangan yang luas. Setiap minggu masyarakat berkumpul di seputaran kawasan ini untuk melakukan kegiatan baik olahraga maupun rekreasi. Ditinjau dari konsep arsitektur berkelanjutan segi sosial maka area ini menjadi sarana interaksi social masyarakat dari berbagai kalangan karena bisa dinikmati secara gratis. Dari sisi ekonomi kawasan ini menawarkan peluang usaha bisnis bagi mereka yang menjajakan makanan dan untuk kemudian dijual di seputaran kawasannya, dari sisi lingkungan dilihat bahwa dengan luasan kawasan yang di mana 60% adalah area hijau memberi dampak yang baik bagi lingkungan. Namun untuk mengembangkan kawasan wisata diperlukan beberapa karakteristik pendukung seperti adanya atraksi atau aktivitas yang akan menjadi andalan untuk dilihat atau dipelajari oleh pengunjung.

2.1.1. Kawasan Wisata Kuliner KFC Tondano

Untuk kawasan wisata kuliner dipilih area KFC Tondano dimana area ini berkembang sebagai area kuliner yang modern. Selain itu area ini ditunjang dengan adanya taman gak beres Pak yang berada tepat di samping KFC. Terdapat juga gereja sentrum Tondano yang menjadi bagian dari kawasan wisata sejarah dan di seputaran area KFC ini berkembang UMKM yang menjual kuliner khas Minahasa. Dari sisi arsitektur berkelanjutan maka secara sosial kawasan ini mendukung interaksi sosial masyarakat, dari sisi ekonomi kawasan ini memberi peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan bisnisnya. Dan dari sisi lingkungan dengan adanya sungai maupun pepohonan di area ini menambah

keasrian kawasan KFC ini tapi tentu perlu arahan pengembangan pengembangan di masa yang akan datang agar area-area terbuka hijau tidak kemudian ditutupi oleh bangunan. Telah menjadi kebiasaan di sebuah kawasan kuliner terutama bagi masyarakat yang melakukan pekerjaan untuk meningkatkan nilai hasil kuliner menjadi bahan olahan. Sama dengan produk-produk perkebunan dan pertanian serta lainnya bahwa nilai barang mentah akan lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai produk setengah jadi atau barang jadi. Dengan adanya upgrading produk maka hasil tangkapan laut akan mendatangkan keuntungan lebih besar juga akan lebih tahan lama. Misalnya mengolah hasil menjadi kerupuk, tepung, bakso, nugget, dan bentuk lainnya yang lebih kreatif.

2.1.1. Kawasan Wisata Perdagangan Pasar Tondano

Kawasan wisata perdagangan yang kemudian dipilih konsep desain bentuk secara arsitektural adalah kawasan pasar Tondano. Kawasan pasar Tondano ini merupakan pasar tempat berinteraksi seluruh lapisan masyarakat dalam menjual belikan hasil bumi dan hasil lainnya yang dapat diperdagangkan. Masyarakat dapat mendukung pengembangan pariwisata perdagangan melalui pengembangan UMKM maupun produk yang memberikan daya tarik bagi wisatawan. Masyarakat dapat juga menjadi suplier dalam menjual hasil produksi lokal di area wisata perdagangan ini. Hal ini sudah dilakukan dengan adanya beberapa toko yang menjual produk khas masyarakat. Termasuk adanya kain Manado, Kain Bentenan, Batik Manado yang diperdagangkan di area pertokoan. Wisata perdagangan di Tondano ini tidak sepopuler pasar ekstrem di Tomohon namun ini juga menjadi

tempat yang berpotensi untuk dijadikan tempat wisata. Ditinjau dari konsep arsitektur berkelanjutan dari sisi sosial maka tinjauan interaksi masyarakat yang terjadi merupakan keunggulan namun dari sisi Tuhan bangunan-bangunan di pasar ini perlu direvitalisasi demikian juga dari sisi ekonomi tentu ini memberi keuntungan bagi warga masyarakat di seputaran Tondano, sedangkan tinjauan dari sisi lingkungan area ini paling urgen untuk ditata karena membutuhkan konsep pengembangan lingkungan yang lebih baik agar mampu mendorong kondisi pengembangan yang sehat dan ramah lingkungan.

2.1.1. Kawasan Religi Kampung Jawa

Kawasan wisata religi terpilih adalah kampung Jawa Tondano. Kampung Jawa Tondano adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki budaya tersendiri diantara suku Minahasa. Budaya tersebut hasil asimilasi antara suku Minahasa dan Jawa yang dipertahankan hingga kini sejak kedatangan Kiay Modjo dan rombongan yang diasingkan oleh kolonial Belanda. Peninggalan budaya dan makam Kiay Modjo adalah daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung di kampung Jawa sebagai tujuan wisata. Konsep desain bentuk secara arsitektural adalah berbentuk perkampungan dengan ikon masjid raya. Kawasan ini merupakan tempat interaksi sehubungan dengan adanya makam Kyai Mojo. Ditinjau dari konsep arsitektur berkelanjutan dari sisi sosial maka tinjauan interaksi masyarakat yang terjadi merupakan keunggulan namun dari sisi ekonomi masyarakat mengembangkan konsep ekonomi berbasis UMKM sedangkan tinjauan dari sisi lingkungan area ini perlu penataan infrastruktur wisata.

4. Conclusions

Konsep desain area wisata di seputaran Tondano memiliki nilai penting dalam kegiatan pariwisata Provinsi Sulawesi Utara apalagi terdapat ikon utama Danau Tondano. Oleh karena itu konsep desain yang berkelanjutan, asri dan indah harus terus dijaga. Agar kondisi pariwisata di tersebut dapat berkelanjutan dan memberi sumbangsi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di masa pandemi saat ini maka penerapan protokol kesehatan menjadi mutlak. Agar dapat dipahami konsep desainnya, peneliti mengidentifikasi kegiatan wisata di seputaran Tondano terdiri dari wisata danau, wisata sejarah dan budaya, wisata kuliner, wisata perdagangan dan wisata religi. Penentuan jenis kawasan diikuti dengan identifikasi potensi wisata dan tantangan penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata seputaran Tondano. Oleh karena itu diperlu kolaborasi, partnership, sinergi antara stakeholder untuk jangka panjang, secara komprehensif, menyeluruh, terpadu. Negara, dalam hal ini pemerintah di semua tingkatannya harus melihat potensi ini dan memaksimalkan peluangnya melalui intervensi positif. Pemerintah dengan kepeduliannya membangun konsep desain sebagai citra Kawasan wisata akan mampu meningkatkan daya saing, yang akan mampu meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui konsep desain kawasan wisata yang berkelanjutan.

5. Acknowledgements

Demikianlah hasil dari penelitian ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian

ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada redaksi jurnal Kajian Manajemen Strategik untuk kesempatan publikasi ini.

6. References

- Abdillah, M. J. (2020). KAWASAN WISATA EKOLOGIS PETERNAKAN SAPI PERAH DENGAN PENEKANAN ARSITEKTUR BERKELANJUTAN. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 373–377.
- Alouw, A. N., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2021). PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB PROVINSI SULAWESI UTARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 22(2), 1–13. <https://doi.org/10.35794/jpekd.34591.22.2.2021>
- Amidong, F., Masinambow, V. A., & Siwu, H. F. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Wisatawan Asing di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02).
- Andaria, K. S., Sendouw, R. H., Lonto, A. L., Lobja, X. E., & Sindua, N. J. (2018). Identification of Potential Tourism in East Likupang Subdistrict Bangka Island North Minahasa.
- Arrahman, R. R. D. (2021). PERANCANGAN BANGUNAN KONVENSI DAN PAMERAN DENGAN PENDEKATAN KONSEP ARSITEKTUR BERKELANJUTAN, DI KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT [PhD Thesis]. Institut Teknologi Indonesia.
- Benjamin, S., Dillette, A., & Alderman, D. H. (2020). “We can’t return to normal”: Committing to tourism equity in the post-pandemic age. *Tourism Geographies*, 22(3), 476–483.
- Brohman, J. (1996). New directions in tourism for third world development. *Annals of Tourism Research*, 23(1), 48–70.
- Cahaya, V. T. (2016). Konsep Perencanaan dan Perancangan Pengemabangan Fasilitas Kawasan Wisata Green Canyon Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Dengan Penekanan Arsitektur Berkelanjutan.
- Clarke, J. (1997). A framework of approaches to sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 5(3), 224–233.
- Haque, A., Astuti, W., & Mukaromah, H. (2020). Jayengan Kampung Permata ditinjau dari kesesuaian terhadap konsep pariwisata berkelanjutan. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(2), 152–171. <https://doi.org/10.20961/region.v15i2.24416>
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). The “war over tourism”: Challenges to sustainable tourism in the tourism academy after COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(4), 551–569.
- Kambey, H. J., & Djati, M. S. (2016). Lakes as Natural Tourism Object in North Sulawesi. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 4(2), 75–80.
- Kawulur, A. F., Mawitjere, N., & Kawulur, H. (2021). Business Competitiveness of Small Medium Enterprise in Pandemic Era Covid-19 (Case Study on Souvenir Business in the Special Economic Area of Tourism Likupang, North Sulawesi Province, Indonesia). *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 4(1), 173–178.
- Koyongian, Y., Katuuk, D. A., Rotty, V. N., & Lengkong, J. S. (2021). Manajemen Wisatawan Asing di Sulawesi Utara: Segmentasi Gaya Hidup. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 10(1).

- Lane, B. (2018). Will sustainable tourism research be sustainable in the future? An opinion piece. *Tourism Management Perspectives*, 25, 161–164.
- Mandić, A., Mrnjavac, Ž., & Kordić, L. (2018). Tourism infrastructure, recreational facilities and tourism development. *Tourism and Hospitality Management*, 24(1), 41–62.
- Mayaka, M., Croy, W. G., & Cox, J. W. (2019). A dimensional approach to community-based tourism: Recognising and differentiating form and context. *Annals of Tourism Research*, 74, 177–190.
- Mudrikah, A. (2014). Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia tahun 2004-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2).
- Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? *Journal of Destination Marketing & Management*, 6(4), 277–285.
- Qian, J., Law, R., & Fan, D. X. (2020). Exploring tourists' experience at private social dining: Dimensionality and satisfaction. *International Journal of Tourism Research*, 22(6), 776–787.
- Saarinen, J. (2019). Communities and sustainable tourism development: Community impacts and local benefit creation in tourism. In *A research agenda for sustainable tourism*. Edward Elgar Publishing.
- Siswahto, E. (2020). Analisis Input Output: Sektor Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara [PhD Thesis]. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Wibowo, S., Rusmana, O., & Zuhelfa, Z. (2017). Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata Tourism. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 1(2), 93–99.
- Wowiling, S. A., Bisri, M., Husain, J., & Hakim, L. (2013). Spatial Management to Enhance Tourism Industrial Ecology and Natural Resources Conservation: A Case Study of Kakas Sub-district, Lake Tondano, North Sulawesi. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 3(393-2016–23970), 346–359.
- Wowiling, T. (2016). The efforts of North Sulawesi government in building international strategic partnership for the 2009 World Ocean Conference= Upaya pemerintah Sulawesi Utara dalam membangun kerjasama strategis internasional untuk World Ocean Conference 2009 [PhD Thesis]. Universitas Pelita Harapan.
- Zenker, S., & Kock, F. (2020). The coronavirus pandemic – A critical discussion of a tourism research agenda. *Tourism Management*, 81, 104164. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104164>

ANALISIS PENYEBAB KURANGNYA STOK PETI KEMAS DI JAKARTA DAN DAMPAKNYA PADA EKSPOR DI SAMUDERA SHIPPING LINE JAKARTA TAHUN 2021

Alta Rega Pratama
Institut Bisnis dan Multimedia

Abstrak

Samudera Shipping Line merupakan anak perusahaan dari PT Samudera Indonesia yang fokus kegiatan bisnisnya adalah pelayaran ocean going atau ekspor dan impor. Samudera shipping line telah berkembang dan memiliki cabang hingga ke Asia Pasifik. Salah satu cabang yang dimilikinya ialah di Jakarta yang mana base port nya adalah Pelabuhan Tj. Priok. Spesifik terhadap penelitian di Jurnal ini, penulis membahas salah satu isu yang terkait dengan kegiatan logistik, yaitu inventory. Isu utamanya adalah kelangkaan inventory yang dalam hal ini adalah petikemas sebagai wadah pengangkut kargo atau barang ekspor maupun impor. Beberapa sebab seperti keterlambatan kapal hingga turunnya volume impor membuat ketersediaan stok petikemas jadi berkurang sehingga solusi yang bisa diberikan dalam isu ini adalah bagaimana seharusnya agar ekspor dan impor bisa dikontrol dan juga melakukan reposisi petikemas dari daerah surplus ke daerah defisit.

Kata kunci: Kelangkaan stok petikemas, Imbalances, Samudera Shipping Line

Abstract

Samudera Shipping Line is a subsidiary of PT Samudera Indonesia which focuses its business activities on ocean going shipping or export and import. Samudera shipping line has grown and has branches to Asia Pacific. One of its branches is in Jakarta where the base port is Tj. Priok. Specific to research in this journal, the author discusses one of the issues related to logistics activities, namely inventory. The main issue is the scarcity of inventory which in this case is the container as a container for transporting cargo or goods for export or import. Several reasons, such as ship delays and the decrease in import volumes have reduced the availability of container stocks, so the solution that can be given in this issue is how to control exports and imports and also reposition of empty container from surplus area to deficit area.

Keywords: Kelangkaan stok petikemas, Imbalances, Samudera Shipping Line

I. Pendahuluan

Pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pelabuhan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menjunjung kegiatan perdagangan dipelabuhan, maka diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, yaitu pengangkutan melalui laut.

Kapal peti kemas adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut barang atau kargo dalam bentuk atau ukuran tertentu. Peti kemas adalah suatu benda atau kemasan yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan

berulang kali untuk menjaga kargo tetap aman didalamnya sekaligus mencegah terjadinya kerusakan pada kargo. Selain pelabuhan dan kapal, terdapat fasilitas lain untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor barang, yaitu depo petikemas. Depo petikemas merupakan tempat penyimpanan kontainer atau peti kemas kosong (*empty container*), tempat pembersihan (*cleaning*), perbaikan (*repairing*) kontainer, serta tempat untuk pelaksanaan survei petikemas pada saat petikemas masuk maupun keluar. Fungsi depo itu sendiri adalah menyiapkan petikemas yang akan dipergunakan oleh para eksportir untuk kebutuhan ekspor barang.

Dalam kondisi normal, memindahkan petikemas kosong (*repo*) sudah cukup untuk mengatasinya. Namun, di masa pandemi COVID-19, ketika aktivitas produksi dan logistik di negara tujuan dibatasi, pergerakan peti kemas di negara itu melambat. Akibat akumulasi ketidakseimbangan perdagangan dan pandemi COVID 19 yang membuat harga freight kargo peti kemas menjadi naik tinggi seperti saat ini. Berikut data imbalances stok petikemas di pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang diambil dari data lifting impor dan ekspor di Samudera Shipping Line Jakarta:

No	Bulan	Imbalances Lifting			TEUs	
		20'	40'	40HC		
1	MAR	31	-39	-100	-247	
2	APR	201	-9	38	259	
3	MEI	-358	40	-75	-428	
4	JUN	-609	14	49	-483	
5	JUL	-430	16	-60	-518	
6	AUG	-565	8	-90	-729	
7	SEP	-1021	36	-96	-1141	

Tabel 1.1 Data Imbalances Lifting Impor vs Ekspor Samudera Shipping Line Tahun 2021.

Sumber: Departemen Logistik SSL

Dari uraian diatas maka dengan ini penulis mengangkat topik penelitian tentang penyebab kurangnya stok petikemas di Jakarta serta dampaknya pada ekspor di Samudera Shipping Line Jakarta 2021. Dari data dan grafik diatas telah diketahui bahwa kurangnya stok petikemas telah dirasakan akibat dampak dari imbalances stok petikemas, yaitu kurangnya impor jika dibandingkan dengan volume ekspor. Dari bulan Maret lalu lanjut lagi dibulan Mei terus mengalami peningkatan imbalances yang membuat stok petikemas menjadi kurang. Hingga pada bulan September telah menyentuh minus 1141 TEUs. Dalam jurnal maritim tersebut, Pakar Maritim dari ITS, Dr Saut Gurning, mendesak pemerintah, eksportir, operator pelayaran serta pelaku jasa logistik untuk segera menemukan solusi. Karena kenaikan ini berdampak langsung pada kerugian eksportir dan turunnya kinerja ekspor nasional. Sejumlah eksportir mengaku merugi akibat kenaikan freight yang begitu cepat dan sering tanpa pemberitahuan. Beberapa terpaksa menunda ekspor hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

Depo memiliki peran penting dalam menjaga kegiatan perekonomian terutama kegiatan ekspor dan impor dalam memperlancar arus kontainer dan lalu lintas angkutan barang serta mengefisienkan jalur rantai pasok (supply chain), terutama dalam perdagangan internasional. Peran depo dalam sistem logistik nasional adalah mendukung efisiensi tata kelola dan tata niaga. Selain itu depo juga berfungsi untuk menjaga stabilitas stock petikemas agar kegiatan ekspor dan impor dapat berjalan baik. Ada atau tidaknya stock petikemas berasal dari depo, jika jumlah rencana ekspor sama atau lebih kecil dari jumlah kesediaan stock di depo, maka hal tersebut cukup baik, namun apabila jumlah rencana ekspor lebih besar dari jumlah stock di

suatu depo, maka hal tersebut merupakan bad news bagi suatu perusahaan pelayaran.

Ketidakseimbangan stok atau imbalances adalah hal yang sangat dihindari oleh berbagai perusahaan pelayaran. Imbalances bisa berdampak pada penurunan ekspor dikarenakan tidak adanya media pengangkut barang atau petikemas untuk kegiatan tersebut.

Dari penjelasan latar belakang diatas, terlihat betapa besarnya pengaruh ketidaktersediaan petikemas terhadap naik atau turunnya volume ekspor di suatu Negara. Untuk itu perlu adanya rumusan masalah yang jelas dari penelitian ini agar mendapatkan tujuan yang diinginkan.

Dengan kondisi tersebut dan berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah dengan kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line dapat menyebabkan volume ekspor jadi menurun?
- b. Apakah yang menjadi sebab kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line Jakarta?
- c. Apakah solusi yang diberikan untuk mengatasi kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line Jakarta ?

II. Tinjauans Teori

Menurut Kamus Populer Transportasi dan Logistik (2012: 94), “transportasi adalah suatu tindakan memindahkan barang (kargo) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain.” Sementara itu, Suharto Abdul Majid (2011: 23) menyatakan, Transportasi adalah sebuah kegiatan perpindahan atau pemindahan manusia dan barang atau sumber daya lainnya dari satu tempat atau tempat asal ke tempat lainnya atau tempat tujuan dengan menggunakan alat angkut. Abbas Salim (2010:6) menyatakan bahwa “transportasi

adalah tindakan memindahkan barang (kargo) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain". Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa transportasi adalah kegiatan memindahkan barang (kargo) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana transportasi.

Manajemen Transportasi

Menurut M Nur Nasution (2004: 104), Manajemen Transportasi, adalah organisasi industri atau komersial dan jasa lainnya (manufaktur) yang secara efektif dan efisien memindahkan barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain, atau mengangkutnya. suatu kegiatan yang dilakukan oleh departemen transportasi atau unit perusahaan dan jasa).

Layanan atau Jasa

Menurut buku karangan Suharto Abdul Majid (2011: 34) yang dikutip dalam buku Sugiarto (2002: 36), Jasa adalah kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang diberikan. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2008) seperti yang dikutip oleh Ririn Tri Ratnasari dan Mastuti H. Aksa (2011 : 3), jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang pada dasarnya tidak berwujud, dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau tidak.

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2011: 6) menyatakan, jasa adalah semua aktivitas ekonomiyanghasilakhirnyabukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya, kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) konsumen. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan dari definisi di atas bahwa jasa adalah suatu kegiatan tidak berwujud yang diberikan oleh satu pihak

kepada pihak lain.

Logistik

Menurut Gunawan (2014:7), logistik merupakan seni dan ilmu yang mengatur dan mengendalikan arus barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti jasa dan produk manusia dari produsen ke pasar. Mengoptimalkan penggunaan modal.

Menurut D.A., Lasse (2014: 358) menyatakan, logistik diartikan sebagai aliran produk dari tempat produsen ke tempat konsumen melalui berbagai simpul/mata-rantai, diantaranya angkutan (transportation) dan pergudangan (warehousing).

Menurut (Bowersox 2002) yang dikutip oleh D.A. Lasse (2014 : 358), Logistik merupakan proses pertambahan nilai dengan cara menyediakan stok barang/ bahan atau komponen dalam jumlah serta waktu yang tepat, sebagai kombinasi penataan permintaan, persediaan, angkutan, pergudangan, pengurusan barang sediaan, dan pengemasan terpadu dalam jaringan fasilitas.

Berdasarkan yang di kutip oleh D.A. Lasse (2014 : 358), (Frazelle 2002) berpendapat dalam rangka membuat pengertian yang kontras antara logistics dengan supply chain, antara lain dikatakan bahwa aktivitas logistik yang mencakup pelayanan terhadap konsumen, pengendalian stok barang sediaan, pasokan, transportasi, dan pergudangan berkaitan dengan mengaktifkan tujuan dari rantai pasokan.

Willem Siahaya (2013 : 65) menyatakan dalam bukunya, manajemen logistik adalah bagian dari Supply Chain Management atau rantai pasok yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan distribusi barang serta layanan jasa dan

informasi terkait secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Menurut Bawersox (2002:13) menyatakan bahwa manajemen Logistik adalah unik karena ia merupakan satu aktivitas perusahaan yang tertua tetapi juga termuda. Aktivitas logistik (lokasi fasilitas, transportasi, inventarisasi, komunikasi, dan pengurusan dan penyimpanan) telah dilaksanakan orang semenjak awal spesialisasi komersil.

Supply Chain Management A Logistic Perspektive menurut John J. Coyle dkk hasil alih bahasa oleh penulis (2017:54):

Logistik dapat dilihat sebagai bagian dari manajemen organisasi dengan empat subdivisi:

a) Logistik bisnis. Bagian dari rantai pasokan yang merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan efisiensi, efektifitas, aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan yang terkait informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

b) Logistik militer: Desain dan integrasi semua aspek dukungan untuk kemampuan operasional pasukan militer (dikerahkan atau di garnisun) dan mereka peralatan untuk memastikan kesiapan, keandalan, dan efisiensi.

c) Logistik acara – Jaringan aktivitas, fasilitas, dan personel yang diperlukan untuk mengatur, menjadwalkan, dan menyebarkan sumber daya untuk sebuah acara berlangsung dan untuk mengundurkan diri secara efisien setelah acara tersebut.

d) Logistik Layanan-Akuisisi, perencanaan, dan pengelolaan fasilitas, aset, personel, dan material untuk mendukung dan memelihara layanan atau operasi bisnis.

Tujuan pengelolaan logistik menurut Lumenta (2013) adalah: 1) Tujuan operasional untuk memastikan bahwa

barang dan bahan tersedia dalam jumlah yang tepat, tergantung pada kualitas dan waktu yang dibutuhkan. 2) Tujuan keuangan untuk memastikan bahwa tujuan operasional tercapai dengan hasil yang optimal dan dengan biaya minimum, dan 3) Kerusakan, pemborosan, penyalahgunaan, pencurian dan penyusutan yang tidak wajar lainnya, dan persediaan karena nilai persediaan yang sebenarnya dalam suatu sistem akuntansi yang bertujuan demi keamanan dan menghindari kesalahan.

Dalam dunia logistik ada istilah persediaan atau inventory, yang mana merupakan kunci dari kegiatan logistik. Menurut Sofyan Assauri dalam buku Marihot Manullang dan Dearlina Sinaga (2005:50), menjelaskan bahwa persediaan adalah sebagai suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal atau persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Selain itu M. Munandar dalam buku Marihot Manullang dan Dearlina Sinaga (2005:50), menjelaskan juga bahwa persediaan adalah sebagai persediaan barang – barang (bahan bahan) yang menjadi objek usaha pokok perusahaan.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Inventory merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan untuk mendukung keseimbangan proses produksi dan mencapai tujuan perusahaan. Dalam dunia logistik dan transportasi khususnya di laut, persediaan sangat penting untuk menunjang proses impor dan ekspor barang dan peti kemas. Jika persediaan peti kemas mencukupi atau seimbang maka proses ekspor dapat dilakukan, tetapi apabila peti kemas ditemukan kurang atau

tidak seimbang di depo atau gudang, maka kegiatan ekspor akan terhambat.

Petikemas

Berdasarkan Konvensi Pabean Peti Kemas tahun 1972, pengertian peti kemas adalah bungkusan baja yang dirancang khusus untuk ukuran tertentu dan sesuai dengan standar internasional, yang dapat digunakan berulang kali untuk menyimpan dan mengangkut kargo dalam waktu yang bersamaan. Kontainer disebut juga dengan peti kemas.

Menurut Suyono (2005:275) peti kemas adalah suatu kemasan yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan berulang kali, disimpan dan sekaligus digunakan untuk mengangkut muatan yang dikandungnya. Sedangkan menurut Soedjono Kramadibrata (2002: 280), petikemas adalah kotak besar yang terbuat dari campuran baja dan tembaga (penghambat karat), dengan pintu yang dapat dikunci, kunci sudut dan kunci ayun pada kedua sisinya.

Menurut Suyono (2005:266-269), jenis peti kemas dapat dibedakan menjadi 5 kelompok.

a) General Kargo atau Kargo umum

Adalah peti kemas atau container untuk mengangkut kargo umum

b) Thermal

Sebuah peti kemas atau container termo dengan kontrol suhu untuk beban tertentu

c) Tank

Adalah tangki yang ditempatkan dalam kerangka peti kemas yang digunakan untuk cairan curah dan gas curah.

d) Dry Bulk

Peti kemas curah kering adalah peti kemas umum yang khusus digunakan untuk pengangkutan barang curah.

e) Platform

Adalah suatu peti kemas jenis tertentu yang terdiri dari lantai dasar. Peti kemas

jenis ini adalah masuk kedalam jenis peti kemas flat track container, yang terdiri dari lantai dengan dinding di ujungnya, dan peti kemas berbasis platform, yang hanya terdiri dari lantai dasar saja.

III. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan studi adalah mempelajari fenomena dengan cermat, cermat, dan teliti untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Agar penelitian memenuhi syarat ilmiah, diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Ringkasnya, sebuah penelitian dikerjakan dengan cara-cara tertentu yang dikehendaki oleh peneliti, mulai dari pendekatan penelitian, kemudian menetapkan pilihan metode, hingga kegiatan teknis yang dilaksanakan dalam penelitian (Ibrahim, 2018:51). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data metode studi kasus observasi (case study).

Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016:19).

3.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Sedangkan data sekunder berupa data penunjang yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan

yang diambil dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

3.1.1 Data yang diperlukan.

a) Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas bahkan secara langsung (Ibrahim, 2018:68). Disebut juga oleh Lofland and Loflan, adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2013:129).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung atau tidak begitu jelas relevansinya (Ibrahim, 2018:68). Data sekunder juga disebut sebagai sumber data tambahan yang artinya segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto, atau sumber data kedua sesudah data primer (Bungin, 2013:129).

3.1.2 Pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi.

Observasi merupakan upaya untuk pengumpulan data yang dilakukan ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu – individu di lokasi penelitian (Creswell, 2016:254). Menurut Bungin (2013:142), observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif.

2. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2017:186). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan kerangka pertanyaan – pertanyaan untuk ditanyakan dan pertanyaan – pertanyaan tersebut dapat berkembang agar peneliti dapat mendapatkan informasi yang sebanyak – banyaknya. Selain itu, wawancara bentuk ini juga dipilih dan digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat menggali permasalahan secara terbuka. Menurut Kaelan (2012:118), wawancara semi terstruktur ini masih termasuk kategori id-depth interview dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka. Dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa pihak yang berasal dari karyawan bagian logistic dan juga bagian marketing di Samudera Shipping Line itu sendiri, tim dari kantor cabang Tanjung Priok dan karyawan di depo peti kemas.

3.1.3 Pemilihan Informan

Pemilihan Informan adalah orang atau pihak pihak yang terkait dengan bidang penelitian ini , yaitu para pihak yang berada di Samudera Shipping Line, Kantor Cabang Tanjung Priok dan juga pihak Depo Peti kemas yang dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data kualitatif. Adapun penentuan informan harus berdasar kriteria sebagai berikut:

a) Pihak individu internal perusahaan atau yang mewakili yang terkait dan terlibat dalam pekerjaan di masing-masing bagian yang telah disebutkan diatas.

b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kapasitas bidang

pekerjaanya, terutama terkait dengan fenomena yang akan diteliti.

c) Mampu dan cakap dalam bercerita dengan baik dan benar.

3.1.4 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Selain itu menurut Moleong (2017:216), dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan dari rekapitulasi dari data perusahaan Samudera Shipping Line Jakarta.

3.2 Teknik Analisis Data

Menurut Echols & Shadily, secara istilah kebahasaan, analisis menurut kamus inggris Indonesia bermakan analisa atau pemisahan, atau pemeriksaan yang teliti (Ibrahim, 2018:103). Karena itu secara sederhana analisis dapat difahami sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu (Ibrahim, 2018:103).

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis antara lain:

3.2.1 Metode Studi Kasus

Metode studi kasus merupakan teknik analisa data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomenafenomena yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat

dilakukan perubahan atas penilaian tersebut. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016:19). Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab imbalances stok peti kemas di Samudera Shipping Line Jakarta dan apakah berdampak pada volume ekspor.

3.2.2 Analisis Fishbone

Pada fish bone analysis ini beberapa kategori yang ada pada penyebab utama, peneliti menemukan 5 kategori sebab utama yang menjadi sebab kurangnya stok petikemas di Jakarta sehingga berpengaruh terhadap volume ekspor yaitu: pengangkut, Lingkungan, Pihak ketiga atau 3rd party, Keamanan dan Manusia.

Berikut kerangka konseptual yang akan digunakan menggunakan fishbone untuk menganalisa sebab akibat terhadap kurangnya stok petikemas dan dampaknya terhadap volume ekspor di Samudera Shipping Line Jakarta. Untuk melihat faktor penyebab yang akan timbul terhadap 5 faktor yang mempengaruhi hal tersebut, berikut Penjelasan terhadap ke 5 faktor menggunakan Fishbone analisis:

a. Pengangkut/carrier: Untuk faktor pengangkut dalam melakukan analisa terhadap faktor pengaruh lainnya, yang berkaitan dengan faktor pengangkut, seperti: shipping schedule, delay vessel.

b. Lingkungan: Untuk Faktor lingkungan dalam melakukan analisa terhadap faktor pengaruh lainnya, yang berkaitan dengan faktor lingkungan, seperti : keadaan pada

saat itu di pelabuhan, depo dan di tempat yang terkait lainnya.

c. Pihak ketiga : Untuk faktor pihak ketiga, dalam melakukan analisa terhadap faktor pengaruh lainnya, yang berkaitan dengan faktor kondisi pada pihak ketiga tersebut dan aktivitas yang dilakukan pada pihak ketiga tersebut.

d. Keamanan (safety) : Untuk Faktor keamanan dalam melakukan analisa terhadap faktor pengaruh lainnya, yang berkaitan dengan faktor safety, seperti : Pandemi COVID-19 yang membuat berbagai pihak harus mengeluarkan pertaturan atau kebijakan dalam rangka pencegahan virus COVID-19.

e. Manusia : Untuk Faktor Manusia dalam melakukan analisa terhadap faktor pengaruh lainnya, yang berkaitan dengan faktor manusia, seperti :skil dan performance.

3.2.3 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Meleong, 2017:330). Selain dengan sumber, peneliti dapat juga menggunakan triangulasi dengan metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber, Triangulasi metode dan Triangulasi teori.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data terdiri dari pemeriksaan kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data. Selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan, misalnya, observasi partisipan, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan

resmi, catatan dan teks pribadi, gambar dan foto. Tentu saja, masing-masing metode ini memberikan bukti atau data yang berbeda, yang pada gilirannya memberikan wawasan yang berbeda tentang fenomena yang sedang dipelajari. Perbedaan pandangan tersebut memunculkan berbagai pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang kredibel.

b) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Telah diketahui bahwa peneliti menggunakan wawancara, observasi dan survei dalam penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan kebenaran dan gambaran yang jelas dari informasi yang dapat dipercaya

Peneliti dapat menggunakan wawancara bebas dan wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang informasi tertentu. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

c) Triangulasi Teori

Teori triangulasi. Hasil akhir dari penelitian kualitatif adalah rumusan informasi atau pernyataan dalam pernyataan tesis. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teoritis yang relevan untuk menghindari bias peneliti individu terkait dengan hasil atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain

itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman selama peneliti dapat melakukannya. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

3.3 Teknik Pengujian Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan teori, sumber data, dan metode. Triangulasi dengan teori menurut Patton (1987; Moleong, 2017:331) yaitu, "Hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (rival explanation)". Triangulasi dengan teori dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara dari narasumber dengan berbagai teori yang ada dan relevan dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pengungkapan data-data yang telah diperoleh.

Triangulasi dengan sumber data, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987; Moleong, 2017:331).

Pada triangulasi dengan metode, menurut (Patton 1987; Moleong, 2017:329) terdapat dua strategi yaitu (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Pemeriksaan kredibilitas data didalam penelitian ini dilakukan setelah peneliti melakukan proses pengolahan dan analisis data seperti yang sudah disebutkan diatas. Setelah beberapa proses telah dilakukan, selanjutnya melakukan langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data diatas diteruskan dengan menguji

kredibilitas data, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti saat menggunakan teknik ini antara lain:

a) Setelah peneliti melakukan pengolahan dan analisis data sehingga didapatnya hal-hal penting dari pengolahan tersebut, kemudian peneliti melakukan perbandingan dengan teori yang ada sertaberkaitan dengan penelitian ini dengan metode triangulasi dengan teori.

b) Setelah kesimpulan didapatkan, kemiripan, dan kepastiannya (baik dengan teori maupun dengan hasil konfirmasi), maka peneliti akan mendeskripsikan atau menginterpretasikan data tersebut dengan kata-kata peneliti sendiri yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah laporan.

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di Samudera Shipping Line dan menjadikan Depot MTKI Jakarta sebagai lokasi penelitian karena disanalah peti kemas disimpan.

2. Waktu Penelitian.

Waktu yang digunakan penulis dalam penelitain baik itu pustaka maupun lainnya dilaksanakan pada September 2021 hingga February 2022.

IV. Hasil dan Pembahasan

Salah satu kegiatan utama Samudera Shipping Line Ltd (SSL) pada saat ini adalah menjalankan bisnis feeder untuk Main Line Operator (MLO) dari pelabuhan spoke ke pelabuhan hub dan sebaliknya. Pelabuhan hub yang dilayani oleh Samudera Shipping Line saat ini adalah pelabuhan Singapura yang dikelola oleh Port of Singapore Authority (PSA).

4.1.3 Kegiatan Usaha Samudera Shipping Line

1) Kegiatan Utama

Kegiatan utama yang dimiliki oleh Samudera Shipping Line Ltd adalah pelayanan angkutan khusus petikemas yang dibagi menjadi dua jenis layanan, yaitu:

a. Feeder service. Adalah jasa angkutan pengumpan (feeder) bagi MLO dari/ke pelabuhan “spoke” ke/ dari pelabuhan transit (hub port) yang menghubungkan antara pre-carriage atau first carrier dengan mother vessel. Jenis pelanggan feeder service adalah pelanggan SOC.

b. Liner service. Adalah layanan angkutan petikemas bagi pelanggan COC yang mengangkut petikemas dari shipper kepada consignee. Ada tiga jenis pelanggan COC yang dilayani, yaitu:

- a) Direct shipper/consignee/manufacture
- b) Trading company
- c) Freight Forwarding
- 2) Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dimiliki oleh Samudera Shipping Line Ltd yang sifatnya mendukung dan terkait dengan kegiatan utama adalah:

a. Keagenan, yaitu dengan kepemilikan saham di beberapa perusahaan di India, Malaysia, Thailand dan Uni Arab Emirat.

b. Kapal tanker, yaitu dengan mendirikan anak perusahaan bernama Foremost Maritime Pte Ltd yang berbasis di Singapura.

c. Logistics, yaitu dengan pendirian perusahaan yang bernama Silkargo Logistics Singapore Pte Ltd yang merupakan sub agen dari Samudera Shipping Line Ltd.

4.1.5 Manajemen

Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan oleh perusahaan dinamakan manajemen. Guna mencapai tujuan perusahaan, Samudera Shipping Line Ltd menerapkan sistem manajemen berdasarkan sasaran (MBS) di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sistem ini memiliki sasaran-sasaran yang diletakkan bagi rencana organisasi yang terukur dan mempunyai batas waktu bagi tiap posisi manajemen. Sasaran-sasaran tersebut ditetapkan dan disepakati pemegang jabatan dengan atasannya atau antara atasan dengan para bawahannya secara bersama-sama. Pada setiap akhir periode tahunan kesepakatan tersebut dievaluasi pencapaian dan bobotnya secara personil disamping sebagai acuan untuk memberikan reward tahunan kepada karyawan.

Dengan sistem ini para karyawan merasa terpacu dan memiliki motivasi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan menambah potensi untuk pengawasan diri serta karyawan merasa dihargai karena ikut menentukan sasaran-sasaran kerjanya. Sistem manajemen berdasarkan sasaran ini merupakan proses peran serta yang secara aktif melihat peran dari manajemen pada setiap tingkat organisasi untuk dapat mengatasi kendala yang terjadi pada perencanaan perusahaan.

4.1.6 Alur Kerja Usaha (Work Flow of Business)

Alur kerja yang dilakukan oleh Divisi SSL diawali oleh departemen marketing & sales COC yang bertugas untuk mencari pelanggan (ekspor/impor). Pelanggan yang bersangkutan akan memberikan permintaan untuk pengiriman penawaran (rates quotation) kepada sales COC. Sales COC kemudian memberikan feedback dengan memberikan penawaran (quotation) kepada pelanggan. Proses selanjutnya adalah negosiasi antara

marketing COC dengan pelanggan. Pada negosiasi tersebut akan dihasilkan beberapa permintaan khusus yang mungkin diinginkan oleh customer (special request) atau permintaan lain seperti free time demurrage/detention. Permintaan-permintaan (special request) tersebut selanjutnya diteruskan kepada customer service untuk ditindak lanjuti. Sedangkan permintaan untuk penangguhan pembayaran (request credit term) di sampaikan dari sales kepada bagian keuangan/finance.

Pelanggan impor/consignee kemudian akan memberikan permintaan informasi kedatangan kapal kepada customer service COC import. Customer service COC import sendiri telah mendapatkan informasi mengenai adanya importshipment tersebut. Agen dipelabuhan keberangkatan (port of loading) akan memberikan manifest, B/L, freight list dan loading report kepada COC import. Berdasarkan informasi dari port of loading tersebut maka bagian COC import akan mengirimkan Notice of Arrival kepada penerima barang/consignee.

SOC memiliki bisnis utama dalam memberikan jasa feeder. Dengan demikian pelanggan utama SOC adalah shipping lines yang lain terutama main line operator (MLO). Pelanggan SOC mengajukan permintaan (request) space dan rate. Rate request yang diajukan oleh pelanggan diteruskan kepada principal SSL di Singapura untuk kemudian menjadi trade rate agreement. SOC memberikan space allocation dan rate agreement kepada pelanggan SOC.

Selain itu SOC di Jakarta juga berhubungan dengan SOC cabang di Indonesia (INA ports). SOC memberikan penentuan space allocationposisi kapal secara harian kepada cabang. Dalam melakukan proses setiap harinya

pelanggan SOC memberikan shipping instruction kepada cabang SOC, kemudian akan memberikan notice of arrival, stacking report dan loading report serta memo B/L.

Dalam proses bisnis COC terdapat tiga bagian utama yaitu bagian marketing, customer service dan traffic&documentation COC. Alur proses COC diawali oleh bagian marketing yang mencari pelanggan. Pelanggan kemudian memberikan permintaan penawaran kepada marketing. Selanjutnya marketing memberikan penawaran kepada pelanggan mengenai service yang dimiliki dan rate yang diberikan dalam bentuk quotation. Pelanggan yang memiliki ketertarikan terhadap service yang ditawarkan akan melakukan negosiasi kepada mengenai permintaan-permintaan tertentu. Permintaan pelanggan terhadap rate yang lebih rendah dari MRG (market rate guidance) disampaikan oleh marketing kepada bagian pricing SSL principal dalam bentuk rate request. Persetujuan dari principal terhadap pengajuan rate tersebut ditunjukkan dengan pemberian rate approval. Selain rate beberapa customer dimungkinkan untuk melakukan permohonan free time demurrage/detention. Permohonan freetime tersebut disampaikan oleh marketing COC kepada bagian logistic SSL yang kemudian memberikan jawaban mengenai persetujuan pemberian free time. Seluruh special request yang diminta oleh pelanggan dan telah mendapat persetujuan dari bagian terkait diinformasikan oleh bagian marketing ke bagian customer service.

Selanjutnya pelanggan ekspor COC memberikan shipping instruction (S/I) dan dokumen lain yang diperlukan sebagai penyerta. Customer service akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan booking number kepada pelanggan. Bagi pelanggan dengan tujuan

yang membutuhkan transshipment, bagian customer service akan mengirimkan connecting vessel request ke bagian Transshipment (T/S) SSL Principal. Selanjutnya T/S memberikan connecting vessel confirmation. Proses selanjutnya adalah customer service memberikan seluruh informasi mengenai customer yang meliputi S/I, booking number dan connecting vessel confirmation kepada bagian Document COC. Selain itu informasi booking number juga diberikan kepada kantor di Tanjung Priok.

Dengan S/I dan booking number dari customer service, pelanggan dapat mengambil SPPCK (Surat Perintah Penyerahan Petikemas Kosong) di kantor Tanjung Priok dan mengambil petikemas kosong di depo. Pada saat yang sama bagian Document COC memproses B/L dengan melakukan transfer informasi dengan pelanggan untuk revisi draft B/L sehingga B/L sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Selanjutnya bagian document COC berhubungan dengan agen di negara tujuan untuk memberikan informasi kedatangan barang. Document COC mengirimkan manifest, B/L, loading report dan freight list pada agen. Sementara loading report untuk direct vessel dikirimkan oleh customer service. SSL agen berhubungan dengan Marketing COC dalam memberikan sales lead untuk menjaga stabilitas kondisi container. Selain itu juga berhubungan dengan pricing SSL untuk memberikan rate request.

4.2 Apakah dengan kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line dapat menyebabkan volume ekspor jadi menurun ?

4.2.1 Triangulasi Sumber

Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan masalah ini Peneliti menggunakan wawancara kepada beberapa orang informan tambahan selain informan

utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama. Dalam penelitian ini informan utama adalah Supervisor Logistik di Samudera Shipping Line, sedangkan informan tambahan datang dari kantor cabang yang ada di Tj. Priok dan juga dari 1 pihak lain dari Depot.

Pertanyaan pertama ini mengenai apakah dengan kurangnya stok petikemas dapat menyebabkan volume ekspor jadi menurun. Pernyataan dari pertanyaan ini didapat dari wawancara dan juga pengamatan langsung untuk mendapatkan informasi yang sebenar benarnya.

Pada sesi pertanyaan ini, pertanyaan mengenai apa itu logistik, ekspor dan impor, lalu apa itu inventory dan beberapa hal terkait dengan logistik.

Selanjutnya pertanyaan menjuru kepada masalah yang akan diteliti yaitu tentang apakah dengan kurangnya stok petikemas menyebabkan volume ekspor jadi menurun ? menurut P1 dalam hasil wawancara, menyatakan pendapatnya, bahwa:

“Logistik itu adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna.” Sedangkan ekspor dan impor menurutnya adalah “Suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri disebut ekspor. Sementara kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut impor (aktivitas perdagangan antar Negara melalui moda transportasi darat, laut, udara, pipa, rail)”.

Selanjutnya pertanyaan tentang apa itu inventory dan dampak dari kurangnya petikemas terhadap volume ekspor. “inventory adalah proses pengelolaan dan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan

oleh perusahaan kepada konsumen. Pengelolaan stok barang sangat berkaitan dengan pencatatan dan administrasi pengelolaan stok. Tentu saja berpengaruh terhadap volume ekspor karena ada eksporitur yang menunda pengiriman ke minggu berikutnya dan ada juga yang membatalkan pengiriman.”

Informan lain yang masih dalam bagian tim Logistik Samudera Shipping Line yaitu Pak Meidi (P2), menjelaskan:

“Logistik adalah proses pengelolaan, pemindahan serta penyimpanan barang produksi, suku cadang ataupun barang jadi dari para penyedia ke konsumen, Ekspor adalah kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Import adalah kegiatan atau aktivitas memasukkan produk dan barang dari negara lain dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku.”

Selanjutnya pertanyaan tentang apa itu inventory dan dampak dari kurangnya petikemas terhadap volume ekspor.

“Inventory/Stock petikemas adalah pengaturan aset bergerak sebagai penunjang kegiatan bisnis perusahaan pelayaran agar terutilisasi maksimal (tidak idle) menghasilkan profit termasuk didalamnya pengaturan agar suatu pelabuhan muat tidak kekurangan stok petikemas. Kerugian dari kurangnya stok petikemas yaitu tim marketing pastinya akan kesulitan untuk berjualan karena ketersediaan stok petikemas itu sendiri yang tidak ada, lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhannya dilakukan reposisi petikemas dari pelabuhan surplus ke pelabuhan yang shortage dan itu semua pasti membutuhkan biaya tambahan.”

Dari tim marketing kantor cabang Tj. Priok P3, menjelaskan:

“Logistik itu adalah suatu proses

pengelolaan bagaimana sumber daya diperoleh, disimpan, dan diangkut ke tujuan akhir mereka atau ke Negara tujuan tertentu dan melibatkan berbagai moda transportasi seperti darat, laut dan udara. Ekspor itu adalah aktivitas perdagangan internasional dengan menjual barang ke luar negeri, sebaliknya impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri.”

Kemudian penulis melanjutkan untuk pertanyaan tentang inventory, imbalance dan dampak dari kurangnya stok petikemas terhadap volume ekspor:

“Inventory merupakan persediaan, jika dikaitkan dengan stok petikemas, adalah persediaan petikemas untuk memenuhi kebutuhannya ekspor. Imbalances stok petikemas adalah keadaan dimana jumlah petikemas yang masuk atau in, tidak sama dengan jumlah petikemas yang out. Jika impor lebih banyak ketimbang ekspor, maka yang terjadi adalah surplus, jika ekspor lebih banyak ketimbang impor maka yang terjadi adalah shortage atau kurangnya persediaan stok petikemas. Inbound atau impor merupakan sumber utama stok petikemas, makin banyak petikemas masuk maka stok akan terpenuhi malah bahkan surplus atau kelebihan stok. Semakin tersedia jumlah stok petikemas maka kecukupan untuk ekspor barang juga siap, jika ditanya berdampak ya pasti berdampak karena mengangkut kargo tersebut kan harus dengan petikemas. Tapi lain ceritanya jika jumlah impornya sedikit, itu malah bisa membuat ketersediaan stok petikemas jadi kurang dan terganggu.”

Masih dengan tim di kantor cabang Tj. Priok tapi dari departemen impor, Pak Bela selaku Supervisor Impor (P4), menyatakan:

“Logistik adalah proses yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan hingga pengawasan perpindahan barang atau sumber daya ke suatu lokasi tujuan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari

daerah pabean/LN, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean/Dalam Negeri”

Kemudian penulis melanjutkan untuk pertanyaan tentang inventory, imbalance dan dampak dari kurangnya stok petikemas terhadap volume ekspor:

“Inventory atau stok Petikemas merupakan pengaturan persediaan stok petikemas untuk keperluan ekspor & impor. Ketidakseimbangan stok petikemas dengan permintaan. Ya sangat berdampak sekali, seperti saat ini permintaan ekspor sedang tinggi namun stok container terbatas.”

Sedangkan menurut Pak Arief selaku tim Marketing di General Agencies (P5) menyebutkan bahwa:

“Logistik adalah kegiatan yang mengatur perdistribusian barang dari manufacutur ke pasar (penjual / pembeli), ekspor mengirim barang atau produk ke luar negeri untuk diperjual belikan, import mendatangkan barang dari luar negeri untuk diperjual belikan atau dikonsumsi sendiri.”

Kemudian penulis melanjutkan untuk pertanyaan tentang inventory, imbalance dan dampak dari kurangnya stok petikemas terhadap volume ekspor:

“Inventory adalah data untuk mengetahui persediaan kondisi container di suatu tempat penumpukan petikemas. Kalau imbalances stok itu adalah keadaan dimana tidak meratanya distribusi container di berbagai tempat. Jika petikemas kurang pastinya sangat berdampak, dikarenakan tidak maksimalnya penjualan pada team marketing yang pada akhirnya budget yang telah ditetapkan oleh perusahaan juga tidak bisa tercapai, dengan kata lain bahwa kerugiannya secara tidak langsung akan berdampak pada profit perusahaan.”

Dari ke 5 informan yang telah diwawancarai, jelas mereka menyebutkan

bahwa keadaan kurangnya stok petikemas akan sangat mempengaruhi atau berdampak pada volume ekspor. Kebutuhan petikemas sangatlah penting bagi tim marketing dalam proses penjualannya.

Selanjutnya penulis mewawancarai tim dari pihak ketiga yaitu pihak Depo guna mencari informasi terkait kurangnya stok petikemas. Pak Baskara (P6) menjelaskan bahwa:

“Logistik adalah kegiatan mulai perencanaan hingga pelaksanaan terhadap berlangsungnya kegiatan pemindahan dan penyimpanan suatu barang dari tempat asal hingga ke tempat akhir. Ekspor adalah kegiatan penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri, begitu juga sebaliknya untuk import adalah kegiatan memasukan barang ke daerah kepabeatan dalam artian Negara Indonesia disini.”

Kemudian penulis kembali bertanya tentang inventory, imbalances dan dampak dari kurangnya stok petikemas terhadap volume ekspor.

“Inventory atau stok petikemas adalah barang yang dikelola oleh suatu pihak (pelayaran) untuk tujuan penjualan baik barang atau jasa. Imbalances stok petikemas adalah tidak seimbangny jumlah petikemas pada satu daerah dengan daerah lain. hal ini mengakibatkan satu daerah mengalami surplus dan satu lagi mengalami shortage sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan logistik. Biasanya imbalances stok petikemas ini diakibatkan oleh ekspor dan impor yang tidak seimbang pada suatu daerah. Sangat berpengaruh. Semenjak era containerize, banyak barang yang packagingnya disesuaikan dengan ukuran standard container dengan harapan pengirimannya lebih gampang. Ketika container tidak tersedia untuk ekspor, banyak shipper yang memilih menunda pengiriman karna tidak ada pilihan lain yang lebih aman dan murah.”

Dari keterangan 6 informan diatas, jelas menyatakan bahwa kurangnya stok petikemas berdampak volume ekspor. Penjualan sangat dipengaruhi oleh kecukupan equipment yang ada, bagaimana kegiatan ekspor bisa berjalan tanpa adanya petikemas yang tersedia.

4.2.2 Triangulasi Metode

Setelah didapatkan kumpulan jawaban terhadap hasil wawancara mengenai pertanyaan apakah kurangnya stok petikemas yang ada saat ini berdampak pada volume ekspor di Samudera Shipping Line Jakarta. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengamatan secara mendalam terhadap pertanyaan masalah diatas.

Hasil Observasi

Terlihat pada tabel dibawah ini, data ketersediaan petikemas dan juga data lifting atau ekspor di Samudera Shipping Line Jakarta pada bulan Maret hingga September 2021. Pada data tersebut, semakin berkurang atau semakin tidak memenuhinya stok petikemas yang tersedia, maka semakin turun volume ekspor yang bisa didapat.

4.2.3 Triangulasi Teori

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui jika volume ekspor menurun diiringi dengan ketersediaan stok petikemas yang menurun juga. Hal ini disebabkan persediaan petikemas yang tidak cukup untuk memenuhi permintaan dari para pelaku ekspor atau eksportir. Persediaan (inventory) adalah suatu istilah umum yang menunjukan segala sesuatu atau sumber daya-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Dari teori ini penulis menyimpulkan persediaan adalah suatu sumber daya yang dapat disimpan untuk mengantisipasi adanya permintaan yang tinggi dari konsumen, Handoko (2015).

Pada akhirnya jika volume ekspor menurun maka keuntungan yang didapat oleh perusahaan tidak akan optimal. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan Winardi (Ali, 2014).

Tabel 4.1 Stok dan Ekspor

Bulan	Stok Petikemas	Volume Ekspor
MAR	1545	1370
APR	1301	1154
MAY	1349	1167
JUN	1598	1440
JUL	1328	1196
AUG	1631	1227
SEP	1409	1257

Sumber: Departement Logistik SSL

4.3 Apakah yang menjadi sebab kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line Jakarta?

4.3.1 Wawancara

Untuk mengetahui penyebab kurangnya stok petikemas di Samudera Shpping Line, maka dalam penelitian ini diperlukan analisis untuk mengetahui sumber permasalahan dan akibatnya. Salah satu cara analisis yang digunakan ialah menggunakan Analisa Fishbone atau diagram sebab akibat.

Sebelum melangkah kedalam analisa tersebut, sebelumnya peneliti melakukan pertanyaan yang ditujukan kepada pihak informan, mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line. Fokus pertanyaan lebih mengenai tentang logistik, ekspor dan inventory kemudian mengerucut kepada faktor-faktor penyebab kurangnya stok petikemas yang ada di Samudera Shipping Line Jakarta.

Menurut informan P1, logistik adalah Suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna, lalu ekspor dan impor adalah Suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri disebut ekspor. Sementara kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut impor (aktifitas perdagangan antar Negara melalui moda transportasi darat,laut,udara,pipa,rail).

Lalu pertanyaan dilanjutkan dengan pertanyaan sebab terjadinya kelangkaan atau kurangnya stok petkemas, menurutnya (P1) adanya kebijakan lockdown dibeberapa Negara karena pandemi yang menyebabkan rantai pasok petikemas terhambat terebih lagi di Singapura sebagai

transshipment port dunia mengalami kongesti.

Kemudian penulis menjelaskan dari wawancara oleh informan P2, dia menjelaskan bahwa penyebab dari kurangnya stok petikemas bisa dikarenakan volume impor yang menurun sehingga jumlah petikemas yang masuk itu berkurang, lalu bisa karena keterlambatan kapal yang akan masuk ke Jakarta juga bisa jadi pemicunya. Selain itu faktor dari pihak depo yang telah untuk mengambil petikemas kosong di pelabuhan. Padahal menurutnya jika seandainya pihak depo bisa tepat waktu menarik petikemas kosong dari pelabuhan, maka ketersediaan petikemas akan cukup menambah dan membantu untuk kegiatan ekspor.

Selain itu informasi yang diberikan oleh kantor cabang Tj. Priok (P3) menjelaskan sebab dari kurangnya stok petikemas di Jakarta yaitu mulai dari volume impor menurun, lalu pandemic covid-19 yang juga berdampak pada kelancaran arus petikemas yaitu impor itu sendiri. Lalu delay vessel dan juga kongesti di pelabuhan- pelabuhan besar seperti contohnya Singapura juga mempengaruhi kelancaran arus petikemas. Selain itu menurutnya, faktor lain seperti human error juga berpengaruh karena kegiatan operasional yang ada sekarang khususnya di perusahaan pelayarang tidak sepenuhnya menggunakan sistem atau robotic, masih menggunakan tenaga manusia untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut informan P4, Inventory atau Stok Petikemas merupakan pengaturan persediaan stok petikemas untuk keperluan ekspor dan impor. Lanjutnya sebab terjadinya kurangnya petikemas adalah terkait pandemi di masa masa saat ini. Masa pandemi ini banyak negara-negara yang melakukan lockdown sehingga kontainer ini agak susah masuk

barang-barang, kecuali barang-barang yang erat dengan kebutuhan kesehatan dan pangan. Menurunnya perdagangan global termasuk aktivitas ekspor yang tidak lagi mengimbangi kondisi importasinya maka mengakibatkan peti kemas eks Impor tertahan yang kemudian mempengaruhi kondisi kelangkaan petikemas secara global.

Sedangkan menurut informan P5, menyatakan bahwa faktor penyebab kurangnya stok petikemas adalah kurangnya volume import yang masuk. Menurunnya volume impor mengakibatkan menurunnya tambahan persediaan petikemas di Depo. Banyak faktor penyebab dari menurunnya volume impor, salah satu faktor terbesar adalah dikarenakan menurunnya permintaan yang diakibatkan karena adanya pandemi. Kemudian dia menambahkan bahwa jika stok petikemas tidak mencukupi kebutuhan ekspor maka seharusnya tim Logistik melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan stok petikemas, sehingga volume ekspor akan tetap stabil.

Dari pihak ketiga yaitu pihak Depo (P6), penulis juga mewawancarai perihal dari sebab kurangnya stok petikemas. Menurutnya stok petikemas seharusnya didapatkan dari impor, namun dikarenakan kondisi ekspor dan impot yang tidak seimbang sehingga muncul usaha dari pelayaran untuk menambah stok baik melalui freeuse, on/off hire container, dan reposisi petikemas kosong.

Selanjutnya dia pun menjelaskan dari sebab kurangnya stok petikemas yaitu menurutnya stok petikemas mengalami kelangkaan dikarenakan imbalances cargo ekspor dan impor sehingga petikemas akan menumpuk di negara yang lebih dominan impor.

4.3.2 Observasi

Sedangkan dalam pengamatan yang

dilakukan peneliti, bahwa sebab dari kurangnya stok petikemas terletak pada jumlah petikemas yang masuk atau petikemas impor. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber dari stok petikemas itu adalah kegiatan impor. Akan tetapi volume impor menurun juga memiliki sebab yang terkait, yaitu salah satu contohnya yaitu keterlambatan kapal atau delay vessel yang menyebabkan berkurangnya volume impor ke Jakarta. Selain itu kongesti di pelabuhan hub juga berpengaruh terhadap volume impor tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan penulis, ditemukan juga penyebab stok petikemas yang kurang yaitu dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan-pembatasan area di setiap pelabuhan sehingga petikemas tersebut harus memakan waktu yang lama untuk bisa keluar dari suatu Negara ke Negara tujuan. Hal hal seperti inilah yang memicu ketersediaan petikemas yang ada di suatu Negara yang dalam hal ini khususnya Jakarta akan semakin berkurang.

Selain impor, sumber stok petikemas juga berasal dari reposisi petikemas kosong. Reposisi ini dilakukan guna untuk membantu ketersediaan stok petikemas yang ada di Depo, karena bisa saja volume impor ternyata tidak cukup untuk membantu ketersediaan stok petikemas yang ada di Depo. Dari kegiatan ini, pihak trucker yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak Depo, terkadang lama untuk menarik petikemas kosong dari pelabuhan sehingga ketersediaan stok petikemas di Depo tidak bertambah.

4.3.3 Analisis Fishbone

Setelah mendapat hasil keterangan wawancara dari ke 6 pihak informan diatas, maka tahap langkah selanjutnya

guna mencari penyebab kurangnya stok petikemas, yaitu menganalisisnya dengan membuat diagram sebab akibat / Fishbone analysis. Diagram Sebab Akibat adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang terjadi. Diagram sebab dan akibat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan penyebab suatu persoalan atau masalah yang terjadi. (Nasution, 2005).

Langkah diawal yaitu mengidentifikasi kategori-kategori sebab utama dari penyebab kurangnya stok petikemas, lalu mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi kategori-kategori. Adapun dalam penulisan ini yang akan di analisis menjadi penyebab utama kurangnya stok petikemas dan dampaknya pada volume ekspor, maka peneliti menggunakan 5 kategori yang lebih mendekati situasi kegiatan atau aktivitas kerja di perusahaan pelayaran yang mana kegiatan utamanya adalah transportasi dan logistik seperti Samudera Shipping Line.

Pada gambar yang akan diterangkan dibawah terdiri dari 5 kategori besar penyebab akibat permasalahan yang terdiri dari:

- a. Pengangkut atau carrier
- b. Lingkungan
- c. 3rd party atau pihak ketiga
- d. Keamanan
- e. Manusia

Alasan pemilihan ke 5 kategori ini adalah karena lebih mendekati situasi, dimana contoh kategori Shipper atau pemasok, adalah pihak yang menyuplai petikemas melalui kegiatan impor. Pengangkut/carrier ini dikaitkan dengan

shipping schedule dan juga keterlambatan kapal yang mengakibatkan terhambatnya petikemas impor yang masuk. Dari beberapa informasi diatas juga salah satu penyebab utama kurangnya stok petikemas. Selanjutnya adalah lingkungan, faktor lingkungan yang kurang bersahabat juga bisa menyebabkan keterlambatan petikemas yang masuk kedalam depo sehingga bisa mengurangi stok petikemas yang ada di depo.

Ada faktor pihak ketiga yang bisa menjadi sebab kurangnya jumlah petikemas di depo, yaitu contohnya lamanya penarikan petikemas kosong di pelabuhan. Pihak depo sebagai pihak ketiga berperan penting sebagai tempat para petikemas berlabuh. Selanjutnya faktor keamanan yang mana memiliki pengaruh dari masalah yang dibahas di penelitian ini. Dan terakhir faktor manusia atau human error juga bisa menjadi penyebab kurangnya stok petikemas.

Berikut dibawah ini gambar diagram analisa fishbone yang terdiri dari 5 kategori : Pengangkut, Lingkungan, Pihak Ketiga, Safety, Man.

Dari hasil diagram analisa fishbone diatas, kemudian peneliti mencoba mengurai akar penyebab masalah dalam bentuk tabel, untuk mendapat gambaran secara detail akar penyebab permasalahan dari sebab kurangnya stok petikemas.

Dari tabel analisa fishbone untuk ke 5 kategori besar diatas tersebut, dapat diperhatikan yang menjadi akar penyebab dan akibat dari kurangnya stok petikemas di Samudeta Shipping Line sebagai berikut:

1. Pengangkut

Beberapa kendala yang disebabkan oleh kategori pengangkut adalah sebagai berikut:

- a. Jadwal pengapalan atau shipment schedule.

Dari sisi shipping schedule salah satu faktor yang menjadi penyebab petikemas impor yang masuk ke Jakarta berkurang. Keterlambatan kapal berangkat dari pelabuhan tujuan menjadi sebab para Shipper terlambat mengirimkan barangnya ke pelabuhan destinasi atau tujuan sehingga membuat petikemas menjadi terhambat pula untuk masuk ke Negara tujuan.

b. Isu lain.

Beberapa isu lain penyebab dari terhambatnya petikemas impor yang masuk adalah kongesti di pelabuhan hub. Menumpuknya petikemas yang di pelabuhan besar membuat antrian panjang sehingga proses di pelabuhan tersebut menjadi terhambat pula.

2. Faktor Lingkungan

Pada sisi faktor lingkungan, ada beberapa hal yang menjadi sebab stok petikemas menjadi kurang, yaitu:

a. Kongesti

Kongesti di pelabuhan hub dapat menyebabkan arus pergerakan petikemas dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar menjadi terhambat. Hal ini yang membuat kurangnya jumlah petikemas yang masuk ke suatu Negara.

b. Alat bongkar muat pelabuhan

Mulai dari kesiapan alat bongkar muat hingga proses kegiatannya dapat menyebabkan kelancaran pergerakan petikemas menjadi terhambat.

c. Kapal sulit sandar

Salah satu penyebab terhambatnya pergerakan petikemas di suatu Negara adalah sulitnya suatu kapal yang ingin bersandar di suatu pelabuhan. Banyak faktor yang menyebabkan kapal tersebut sulit bersandar, salah satunya adalah dermaga yang penuh.

d. Traffic and transport

Disisi traffic beberapa permasalahan yang timbul disebabkan karena kondisi jalan yang

rusak, atau adanya penambahan arteri jalan atau renovasi, yang dapat menimbulkan kemacetan sehingga menghambat arus pengeluaran petikemas yang berdampak terhadap ketersediaan stok petikemas. Beberapa hal lain yang menjadi penyebab pada sisi traffic yaitu pungli atau fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu baik didalam dan diluar pelabuhan, karena bisa saja jika tidak mau memberikan "setoran" maka cargo barang impor kita tidak akan di tangani dengan cepat untuk proses pengeluaran.

3. Pihak Ketiga

Pada sisi pihak ketiga, ada salah satu solusi lain selain meningkatkan volume impor untuk menaikkan jumlah stok petikemas, yaitu dengan reposisi petikemas. Akan tetapi kegiatan reposisi petikemas ini, tidak diindahkan oleh pihak trucking untuk menarik petikemas kosong tadi dari pelabuhan menuju depot. Hasilnya karena keterlambatan penarikan petikemas kosong tadi, ketersediaan petikemas yang ada di depot jadi tetap tidak bertambah.

Banyak hal yang menyebabkan terlambatnya petikemas kosong tadi untuk ditarik dari pelabuhan menuju depo, mulai dari pihak ketiga tadi, hingga pengurusan dokumen- dokumen pendukung yang tidak lengkap.

4. Keamanan.

Pada faktor keamanan, di saat-saat seperti sekarang ini yaitu pandemic covid-19, banyak kegiatan logistik yang menjadi terhambat, salah satu contohnya karena pembatasan area didalam maupun diluar pelabuhan, lalu protocol kesehatan yang memakan waktu lama sehingga menyebabkan kegiatan bongkar dan muat petikemas jadi terhambat.

5. Man

Disisi kategori Human atau manusia

berperan penting sebagai petugas perusahaan yang memonitor kegiatan perusahaan yang dalam kasus ini kaitannya dengan ekspor dan impor, inventory, petikemas in dan out, dan juga para tim di lapangan seperti depot. Kemudian faktor keahlian atau Skill pihak perusahaan membutuhkan seorang yang ahli dalam bidang transportasi dan logistik dan juga mengerti prosedur dan segala ketentuan yang berlaku demi kelancaran proses logistik tadi.

Lalu cabang sebab akibat yang ditimbulkan dari faktor manusia yaitu dari sisi kinerja dari para tim baik di dalam maupun di lapangan. Bagaimana tim logistik harus bisa memonitor inventory di depot dan juga pihak depot turut aktif berperan dalam menginformasikan status inventory yang up to date.

Dari uraian keterangan tabel analisis Fishbone diatas, maka dapat ditarik benang merah permasalahan lebih dalam yaitu hanya ada 2 saja dari 5 kategori diatas yang dominan paling berpengaruh terhadap kurangnya stok petikemas dan berdampak terhadap volume ekspor. Sedangkan ketiga kategori lainnya tidak terlalu dominan dan tidak memiliki pengaruh besar terhadap kurangnya stok petikemas. Dalam hasil analisa fish bone penelitian ini, maka yang sangat dominan dan mempengaruhi adalah faktor pengangkut dan faktor pihak ketiga.

Dua faktor ini yaitu faktor pengangkut dan pihak ketiga seringkali memicu menjadi sebab dari kurangnya stok petikemas. Sebagai contoh dari faktor pengangkut, keterlambatan kapal yang mengakibatkan petikemas impor menjadi terhambat untuk masuk ke destinasi yang dalam hal ini adalah Jakarta. Meskipun keterlambatan kapal tersebut disebabkan oleh berbagai hal yang salah satunya adalah kongesti di pelabuhan, kongesti pelabuhan tadi yang membuat kapal sulit

sandar hingga kegiatan bongkar dan muat petikemas menjadi terhambat pula.

Lalu faktor pihak ketiga, salah satu pemicunya adalah pihak ketiga ini kerap kali lama untuk menarik petikemas yang kosong di pelabuhan sehingga akan mempengaruhi ketersediaan stok petikemas yang ada di depo. Masalahnya mulai dari ketersediaan truck hingga persiapan arrangementnya yang lama membuat kegiatan tersebut menjadi terhambat.

Bila saja penarikan petikemas kosong tadi bisa tepat waktu untuk dilakukan, kurangnya stok petikemas bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihindarkan.

4.4 Apakah solusi yang diberikan untuk mengatasi kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line Jakarta ?

4.4.1 Wawancara

Kurangnya ketersediaan petikemas atau stok petikemas yang kurang sangat tidak sesuai dengan tujuan logistik, yaitu menciptakan efektifitas dan efisiensi terhadap segala bentuk kegiatan operasional. Tiga tujuan manajemen logistik menurut Lumenta 2013 yaitu: 1) Tujuan Operasional agar barang dan bahan tersedia dalam jumlah yang tepat sesuai mutu dan waktu yang dibutuhkan. 2) Tujuan Keuangan agar tujuan operasional tercapai dengan hasil optimal dan biaya serendah rendahnya, dan 3) Tujuan pengamanan, agar gangguan persediaan tidak terjadi disebabkan: kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian dan penyusutan yang tidak wajar lainnya, serta nilai persediaan yang sesungguhnya dalam sistem akuntansi.

Oleh sebab itu setelah mengetahui permasalahan diatas, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan kurangnya stok petikemas. Peneliti telah melakukan

beberapa pertanyaan terhadap para informan untuk mendapatkan beberapa masukan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kurangnya stok petikemas.

Pertanyaan ini dilakukan setelah peneliti mengetahui sebab dari masalah kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line, dan juga bagaimana dampak yang bisa dirasakan terhadap volume ekspor. Fokus pertanyaan lebih kepada saran atau solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang penulis lakukan, ada beberapa solusi untuk mengatasi atau bahkan mampu untuk menghindari kelangkaan kurangnya stok petikemas.

Menurut pandangan informan P1 bahwa untuk mengatasi kurangnya stok petikemas adalah dengan cara melakukan reposisi petikemas dari daerah surplus ke daerah shortage. Dengan itu kebutuhan petikemas akan cukup terpenuhi. Selain itu menurutnya, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan on hire petikemas dari leasing company, akan tetapi hal tersebut sangat tergantung terhadap inventory leasing company itu sendiri. Terakhir informan mengatakan bahwa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kurangnya stok petikemas adalah dengan cara metode free use petikemas, yaitu memindahkan petikemas dengan cara membiarkan petikemas milik sendiri digunakan oleh perusahaan pelayaran lain sehingga posisi petikemas tersebut akan berpindah ke daerah yang kita inginkan untuk di penuhi stoknya.

Informan P2 mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah kurangnya stok petikemas adalah menekan agent di Negara lain untuk menaikkan volume impor yang masuk ke Jakarta, dengan kata lain volume impor harus lebih bisa ditingkatkan agar

arus petikemas yang masuk ke Jakarta bisa terus naik. Selain itu kembali, opsi reposisi yaitu memindahkan petikemas dari daerah surplus ke Jakarta, akan tetapi dengan cara harus sangat memperhitungkan biaya yang timbul dari reposisi petikemas ini. Oleh sebab itu sebenarnya opsi reposisi ini merupakan opsi yang paling akhir digunakan karena kaitannya dengan masalah biaya yang timbul.

Menurut informan P3, untuk mengatasi masalah kurangnya stok petikemas adalah dengan cara meningkatkan volume impor yang masuk ke Jakarta. Solusi ini kurang lebihnya sama dengan informan

P2 dimana dengan menekan volume impor untuk ditingkatkan maka volume petikemas yang masuk ke Jakarta juga akan terus bertambah.

Informan P4, mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah kurangnya stok petikemas dengan melakukan repositioning [repo] petikemas kosong yang masih tertahan di beberapa tempat (luar/dalam negeri), akan tetapi kembali opsi seperti ini harus mempertimbangkan biaya yang timbul.

Informan P5 memberikan solusi yang berbeda dengan dengan yang lainnya, yaitu dengan menambah sales lead di Agent lain guna meningkatkan volume penjualan sehingga petikemas yang keluar dan masuk khususnya ke Jakarta akan terus bertambah. Penambahan personil marketing atau sales sangat membantu para kantor cabang untuk menaikkan angka ekspor dan impor sehingga perputaran petikemas tersebut bisa lebih banyak lagi.

Selain itu informan P5 juga memberikan opsi free use yaitu memindahkan petikemas dengan cara meminjamkannya ke perusahaan pelayaran lain menuju ke tempat yang shortage yaitu Jakarta. Dengan cara ini pemindahan petikemas kosong tidak menimbulkan biaya sebagaimana jika

melakukan reposisi petikemas.

Dan menurut informan P6, opsi yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan petikemas yang kurang adalah dengan cara memperhitungkan penjualan ekspor, apakah petikemas tersebut dapat cepat bergerak lagi setelah sampai di negara tujuan atau malah berhenti dalam waktu lama dikarenakan tidak ada muatan yang nanti pada akhirnya akan di reposisi dan menimbulkan cost lagi bagi perusahaan pelayaran. Artinya adalah ekspor yang berjalan harus bisa dikontrol agar petikemas yang telah selesai digunakan memungkinkan untuk bisa bergerak lagi atau tidak di Negara tujuan, jika sulit untuk bisa kembali bergerak maka perusahaan pelayaran harus mau untuk

menahan volume ekspor nya. Selain itu menurutnya juga, cara free use dan juga reposisi petikemas dipilih olehnya sebagai opsi untuk mengatasi masalah kurangnya stok petikemas.

4.4.2 Observasi

Dalam penulisan ini peneliti telah melakukan pengamatan langsung dilapangan dengan mempelajari faktor penyebab kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line, maka upaya yang harus di lakukan perusahaan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara menaikkan volume impor yang berasal dari berbagai Negara dengan tujuan ke Jakarta agar jumlah petikemas yang masuk ke Jakarta juga semakin bertambah.

Selain itu opsi lain seperti reposisi ataupun free use harus bisa di optimalkan sehingga ketersediaan petikemas sebagai penunjang kebutuhan ekspor bisa terpenuhi.

Berikut ini rangkuman usulan perbaikan beberapa usulan informan bagi perusahaan:

4.4.3 Mencari ide-ide perbaikan

Dari hasil kumpulan akar-akar permasalahan yang diuraikan diatas, kemudian penulis mencoba membuat langkah selanjutnya yaitu berusaha memetakan ide perbaikan nya ke bentuk tabel bagaimana cara untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi dengan metode 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, How). Pengertian 5W 1H merupakan panduan yang memuat pertanyaan, berguna sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu, suatu informasi dianggap baik dan lengkap jika mampu menjawab unsur 5W 1H tersebut:

1) What (apa)

Unsur what (apa) merupakan unsur pertama yang wajib ada dalam sebuah penulisan atau penelitian. Apa yang menjadi masalah.

2) Who (Siapa)

Unsur who (siapa) merupakan pertanyaan yang menjurus kepada pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang diulas. Who yaitu siapa yang harus melakukan perbaikan dari masalah.

3) When (Kapan)

Unsur when (kapan) merujuk pada keterangan waktu dari masalah atau peristiwa yang terjadi. Dengan adanya keterangan waktu, informasi lebih jelas dan akurat, sehingga kebenarannya juga dapat dibuktikan.

4) Where (Di Mana)

Unsur where (di mana) menjelaskan tentang tempat suatu peristiwa terjadi. Dengan adanya unsur where, pembaca dapat memahami alur cerita secara lebih baik. Unsur ini juga bisa memberikan bukti fisik terkait terjadinya suatu peristiwa.

5) Why (Mengapa)

Unsur why (mengapa) menitikberatkan pada alasan atau latar belakang terjadinya

peristiwa atau masalah yang diulas. Dengan adanya unsur why, orang akan lebih mudah memahami situasi atau kondisi atas peristiwa yang terjadi.

6) How (Bagaimana)

Unsur how (bagaimana) menitik beratkan pada penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa. Jawaban atas pertanyaan unsur how dapat mendukung pernyataan unsur why.

Dari penjelasan akar masalah analisa fishbone dapat kita lihat inti masalah utama pada Samudera Shipping Line perihal kurangnya stok petikemas yaitu berkurangnya jumlah petikemas yang masuk ke Jakarta baik itu dari sisi impor, free use maupun reposisi petikemas. Pada diagram Fishbone, fokus utamanya terletak di bagian cabang kategori Pengangkut dan Pihak ketiga. Untuk itu penelitian ini melakukan pemetaan terlebih dahulu upaya perbaikan seperti tabel dibawah ini:

Faktor yang pertama yaitu faktor pengangkut, dimana pengangkut atau carrier terlambat untuk delivery petikemas impor yang akan masuk ke Jakarta. Penyebabnya adalah kongesti yang ada di

dampak dari pandemi COVID-19. Semua hal tersebut memiliki pengaruh bagi kelancara arus petikemas yang masuk ke Jakarta. Selain itu penarikan petikemas kosong di Jakarta yang lamban membuat jumlah petikemas yang masuk ke depo menjadi kurang sehingga mempengaruhi ketersediaan stok petikemas itu juga. Penyebabnya adalah faktor pihak ketiga yang lambat untuk menarik petikemas kosong tersebut dari pelabuhan sehingga petikemas tersebut tidak tersedia di depo.

3) Upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh Samudera Shipping Line agar ketersediaan stok petikemas bisa optimal sehingga volume ekspor bisa terus ditingkatkan adalah dari sisi 2 faktor utama yang telah penulis bahas di bab sebelumnya yaitu dengan:

a) Pengangkut / carrier.

Perbaikan pada sisi pengangkut yaitu dengan cara melakukan berbagai koordinasi dan kerjasama baik itu dengan pihak terminal/pelabuhan setempat dan juga berkoordinasi dengan pihak Agent setempat.

b) Pihak ketiga

Perbaikan pada sisi pihak ketiga agar lebih berkoordinasi juga dengan pihak Samudera Shipping Line dalam hal penarikan petikemas kosong. Hal ini penting dilakukan agar pihak ketiga tidak lambat untuk mendapatkan informasi perihal kedatangan kapal yang nantinya juga akan berpengaruh dengan penarikan petikemas kosong tersebut. Baik pihak ketiga dan juga Samudera Shipping Line harus berkoordinasi dengan baik sehingga penarikan petikemas kosong bisa dilakukan dengan optimal.

V. Kesimpulan Saran

5.1 Kesimpulan

1) Kurangnya stok petikemas mampu mempengaruhi naik dan turunnya volume ekspor bagi Samudera Shipping Line Jakarta. Hal tersebut terbukti jika stok petikemas mengalami penurunan maka berdampak pada turunnya volume ekspor juga. Untuk itu penting untuk mengatur dan mengawasi ketersediaan stok petikemas bagi kelancaran kegiatan ekspor.

2) Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya ketersediaan stok petikemas di Samudera Shipping Line Jakarta. Penyebabnya mulai dari turunnya volume impor yang diakibatkan dari keterlambatan kapal, kongesti di pelabuhan hingga

B. Saran

1) Untuk meminimalisir kurangnya stok petikemas, maka pihak Samudera Shipping Line harus tangga untuk

memonitor ketersediaan stok petikemas di depo lalu kemudian melakukan preventive action untuk mencegah terjadinya penurunan volume ekspor yang dapat merugikan perusahaan.

2) Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi penyebab kurangnya stok petikemas di Samudera Shipping Line harus bisa cepat ditinjau guna untuk mencari jalan keluar dan solusi yang bisa dilakukan. Dalam hal ini penulis menyarankan agar seluruh pihak yang terlibat khususnya dari pihak Samudera Shipping Line itu sendiri, pihak pengangkut/carrier dan juga pihak ketiga yang dalam hal ini adalah trucker, harus bisa berkoordinasi dengan baik demi kelancaran pergerakan petikemas hingga sampai ke depo. Penting sekali untuk terus berkomunikasi antar pihak agar kesalahan sekecil apapun bisa diminimalisir.

3) Upaya-upaya perbaikan yang bisa dilakukan oleh Samudera Shipping Line harus segera bisa dilakukan. Baik dari sisi pengangkut dan juga pihak ketiga yang mana keduanya menjadi faktor utama penyebab kurangnya stok petikemas harus sama sama bisa diperbaiki. Pihak Samudera shipping line yang dalam hal ini diwakili oleh departemen logistic, harus aktif untuk berkomunikasi dan terus mengingatkan para koleganya agar menjaga komunikasi demi kelancara arus petikemas. Sehingga petikemas yang datang ke Jakarta bisa tersedia menjadi stok petikemas di depo yang nantinya akan digunakan sebagai petikemas dalam kegiatan ekspor.

Referensi

A. Sumber Buku

- Amir, M.S. (2004). Strategi Memasuki Pasar Ekspor. Jakarta: PPM.
- Ali, M.A.. 2014. Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di

Samarinda. Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.

- Assauri, Sofyan. 2005. Marihot Manullang dan Dearlina Sinaga. Baridwan, Zaki. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : BPFE.
- Bastuti, S (2017). Analisis Kegagalan Pada Seksi Marketing untuk menurunkan Klaim Internal dengan mengaplikasikan metode PDCA, jurnal Mesin Teknologi
- Budianto, Eko Hariyadi dan Saut, Gurning Raja Oloan. 2017. Manajemen Pelabuhan Surabaya: PT Andhika Prasetya Ekawahana.
- Bungin, Burhan. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chopra, Sunil. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Edisi Ketujuh. Pearson Education.
- Coyle, John J. dkk. (2017). Supply Chain Management: A Logistics Perspective, Tenth Edition. USA : Cengage Learning.
- Creswell, John W. (2016). Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Creswell, John W. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage Publications.
- Creswell, John W. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage Publications.
- Gunawan, Herry. (2014). Pengantar Transportasi Dan Logistik. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kedua. Bandung : Alfabeta.
- Kosasih, Engkos. & Soewedo, Hananto.

- (2007). Manajemen Perusahaan Pelayaran. Edisi Kedua. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kramadibrata, Soedjono. 2002., Perencanaan Pelabuhan, ITB, Bandung
- Lasse, D.A. (2015). Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter, Dan Klaim. Cetakan kesatu. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Lasse, D.A. (2012). Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok di Area Pelabuhan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lasse, D.A. (2014). Manajemen Kepelabuhan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lumenta, N. 1990. Manajemen Logistik Rumah Sakit jilid 2. Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Depkes RI, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi (Cetakan Ketigapuluhenam). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Polancik, G. (2009) Empirical Research Method Poster. Jakarta.
- Susilo, Andi. (2008). Buku Pintar Ekspor- Impor. Jakarta: Trans Media Pustaka.
- Suyono. (2005). Shipping, Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut, Edisi Ketiga. Jakarta : PPM.
- Triatmodjo (2009) Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta : Beta Offset
- B. Sumber Jurnal**
- Alda Dewi Safira, Paniya, Sugiyanta (2020), The influence of Container Availability on Company Performance and Exchange Rate as Moderator Variable at PT. Samudera Agencies Indonesia Semarang Branch. Jurnal Admisi dan Bisnis Volume 21 Nomor 3 Tahun 2020.
- April Gunawan Malau (2019), Pengaruh Servis Free Time dan Overdue Kontainer Ekspor Terhadap Ketersediaan Kontainer Ekspor.
- Aswanti Setiawati, Titi Apriyanto (2016), Persediaan Peti kemas Ekspor PT. Jardine Shipping Service. Jurnal Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 2 No.2 Januari 2016.
- Hendra Gunawan, Suhartono, Martinus Edy Sianto (2008), Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Produktivitas Bongkar Muat Kontainer di Dermaga Berlian Surabaya (Studi Kasus PT. Pelayaran Meratus).
- Jeflien (2018), Pengadaan Peti Kemas Dalam Menunjang Ekspor Impor Non –Migas Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Periode 2011 – 2015.
- Kurniani, Yusmar Ardhhi Hidayat, Achmad Zaenuddin, Suwardi (2017), Pengaruh Nilai Tambah Produksi Dan Jasa Logistik Pada Volume Ekspor Produk Tekstil Di Jawa Tengah. Jurnal Admisi & Bisnis Volume 20 No 1.
- Richa Patiung, Rahim Darma dan Nurdin Brasit (2011), Peranan Petikemas Dalam Menunjang Ekspor Impor Komoditi Hasil Pertanian Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.
- Setyo Nugroho, Achmad Mustakim, Dwi Wahyu Baskara, Alwi Sina Khaqiqi (2020), Optimasi Alokasi Lapangan Penumpukan Petikemas Ekspor Pelabuhan: Studi Kasus Terminal Peti Kemas Banjarmasin.
- Susetyo Darmanto (2011), Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Fasilitas Ekspor Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Jasa Containership Regional Container Line (RCL) Semarang.
- Winiati Pudji Rahayu, Wibisono Adhi (2015), Penerapan Good Logistic Practices sebagai Penunjang Ekspor Buah Tropis. Jurnal Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog) -

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, HARGA TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN YANG BERDAMPAK PADA MINAT BELI ULANG PADA RESTORAN MUJIGAE CABANG SERPONG

Astrid Zusana Logahan 1, Freddy J Rumambi 2, Ratna Prayogi 3, Jerry M. Logahan 4,
IBM asmi

Email acidastridzusana@yahoo.com, jerrymarcellinus59@gmail.com

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, maka persaingan di bidang usaha makanan korea semakin tinggi, maka agar dapat tetap bertahan adalah untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan menciptakan minat beli ulang pada konsumen. TUJUAN PENELITIAN, untuk menguji adanya pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan dan minat beli ulang pada restoran Mujigae. METODE PENELITIAN yang dilakukan yaitu dengan pendekatan penelitian kuantitatif, dimana menggunakan sampel 100 responden untuk mengetahui hasil tujuan. Untuk mengetahui hasil dari tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode partial least square. HASIL PENELITIAN; Dari analisa yang telah dilakukan, didapati variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, harga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan dan variabel kualitas pelayanan, harga, kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang sedangkan kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. SIMPULAN dari penelitian ini adalah dimana hasil dan saran pada penelitian ini dapat di jadikan rekomendasi serta dijadikan strategi bisnis marketing yang baru dan tepat bagi masa depan perusahaan.

Kata Kunci: Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga, Kepuasan Pelanggan, Minat Beli Ulang.

ABSTRACT

Along with the times, the competition in the Korean food business is getting higher, so in order to survive is to create customer satisfaction and create repurchase interest in consumers. RESEARCH OBJECTIVES, to test the influence of product quality, service quality and price on customer satisfaction and repurchase interest in Mujigae restaurants. The research methodology used is a quantitative research approach, which uses a sample of 100 respondents to see the results of the objectives. To see the results of these objectives, researchers used the partial least square method. RESEARCH RESULT; From the analysis, the variables found that product quality, service quality, price have a significant and positive effect on customer satisfaction and service quality variables, price, customer satisfaction have a positive and significant effect on repurchase interest, while product quality has no significant effect on repurchase interest. CONCLUSION

from this research is where the results and suggestions in this study can be used as recommendations and used as new and appropriate business marketing strategies for the future of the company.

Keywords: Product Quality, Service Quality, Price, Customer Satisfaction, Repurchase Interest.

PENDAHULUAN

Restoran menurut Mary B Gregire (2010:1) rumah makan yang dibagi menjadi dua yaitu onsite foodservice yang berarti secara operasional menjual makanan hanya untuk mendukung aktifitas utama yang biasanya bersifat non profit dan commercial foodservice secara operasional menjual makanan adalah prioritas utama dan menginginkan keuntungan. Pertumbuhan restoran di Indonesia juga sangat lah tinggi terlihat dari banyaknya restoran yang bertambah tiap tahunnya. Itu membuat persaingan di bidang restoran semakin tinggi adanya.

Saat ini fenomena industri korea sedang berkembang, gelombang korea atau biasa di sebut hallyu menjalar ke seluruh bagian negeri. Dan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat penyebaran hallyu ini menjadi sangat cepat, mulai dari berbagai tayangan drama di televisi serta dari internet. Yang dengan mudah di akses oleh seluruh dunia. Musik korean pop atau biasa disebut kpop juga merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan korea selatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang terkena atau terjangkau tren dunia hiburan korean wave atau hallyu ini.

Korean wave atau hallyu ini tersebar ke seluruh penjuru negeri, penyebarannya mulai dari bentuk drama, film, musik dan kuliner. Saat ini kuliner korea sedang banyak di gandrungi anak muda bahkan orang tua yang terkena korean wave, tidak heran sekarang ini makanan korea

sudah tidak asing lagi di lidah masyarakat indonesia. Saat ini di indonesia terdapat banyak pilihan untuk makanan korea, walaupun tidak sebanyak masakan eastern dari negara lain. Namun makanan korea sudah mulai banyak di temukan di Indonesia. Berikut adalah daftar top brand masakan korea di indonesia berdasarkan survei yang di lakukan oleh frontier consulting group:

Mujigae Resto adalah restoran korea yang menyuguhkan aneka ragam masakan korea. Mujigae yang artinya pelangi didirikan oleh bapak yunus dan istri, yang sekarang di pegang oleh anaknya bapak Alvin, di bawah PT Anomali prasa. Resto ini merupakan restoran asli dari Indonesia. Mujigae pertama kali berdiri pada maret 2013 di ciwalk bandung. Dan pada tahun 2017 merupakan restoran korea pertama yang memiliki label Halal dari MUI. Dan sekarang ini sudah melebarkan cabangnya di Indonesia dengan memiliki 20 cabang yang berada di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Bekasi dan Depok. Mujigae menjual berbagai macam jenis makanan korea, yaitu tteopokki, ramyeon, bimbimbap dan lain lain. Selain itu ia juga memiliki dessert korea yang sering dikenal dengan pat bing soo dan aneka minuman khas korea lainnya.

Dalam persaingan yang semakin ketat adanya ini, maka Mujigae Resto harus dapat menjadikan kepuasan pelanggan sebagai suatu tujuan dari perusahaan tersebut, karena menurut umar (2005:65) kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan

konsumen setelah membandingkan antara apa yang di harapkan dan apa yang di terima. Dan apabila pelanggan telah merasa puas maka sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu lama.

Minat beli ulang adalah pelanggan yang merasa puas dengan produk ataupun jasa yang telah mereka beli, maka konsumen akan melakukan pembelian kembali. (Griffin 2003:33) karena itu tujuan utama Mujigae yang yaitu mendapatkan kepuasan pelanggan, untuk dapat mendapatkan pembelian ulang dari konsumen. Di karenakan dengan adanya rasa puas dari pelanggan maka kemungkinan untuk timbulnya pembelian ulang tinggi. Dengan minat beli ulang yang tinggi menurut zeithmal dalam butcher (2005) itu adalah salah satu faktor yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan menjadi suatu tolak ukur.

Faktor faktor yang mepengaruhi kepuasan pelanggan menurut Irawan (2004:37) adalah

1. Kualitas produk, pelanggan akan merasa puas apabila setelah membeli ternyata kualitas dari produk tersebut baik. Ini sesuai dengan apa yang berada dalam Mujigae resto, Makanan yang merupakan hal yang sangat fundamental, maka kualitasnya sangat berdampak bagi kepuasan pelanggan dan minat beli ulang.

2. Selain Kualitas produk, kualitas pelayanan adalah pelanggan yang merasa puas apabila mendapat kualitas yang baik. Sama dengan kualitas produk, kualitas pelayanan adalah sesuatu yang sangat berdampak bagi kepuasan dan minat beli ulang. Pelayanan yang di berikan pada Mujigae Resto dengan mengandalkan Ipad sebagai alat pemesanan, dengan segala menu sudah tersedia dan dapat langsung terkalkulasi dapat memudahkan pelanggan

3. Harga, pelanggan yang sensitif biasanya merasakan bahwa harga yang

murah adalah sumber dari kepuasan tersendiri. Harga yang biasanya di tawarkan dirasa sesuai dengan value yang di dapat. Mujigae Resto memberikan harga yang cukup terjangkau untuk kelas makanan korea, yaitu mulai dari Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 61.000

Mengingat persaingan akan semakin ketat adanya, dan walaupun Mujigae menjadi Top Brand pertama selama 3 tahun belakangan, namun tidak menutup kemungkinan Mujigae dapat tersaingi dari Restoran korea lainnya, dapat di lihat dari tabel 1.3 Mujigae mengalami penurunan brand index. Dan brand lain ada yang mulai meningkat. Berdasarkan kejadian yang terjadi ini maka penting untuk mengetahui seberapa besar faktor faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan juga minat beli ulang.

Maka dari uraian diatas penulis ingin mengfokuskan pada kualitas produk, kualitas pelayanan, harga pada Mujigae serta menganalisis kepuasan pelanggan dan minat beli ulang konsumen yang telah pernah datang dan makan di Mujigae. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengangkat judul:

“Analisis Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, terhadap kepuasan pelanggan yang berdampak pada minat beli ulang restoran Mujigae cabang Serpong”

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian jenis asosiatif dimana menurut Sugiyono (2017) Jenis penelitian di bagi menjadi dua, yaitu penelitian asosiatif dan deskriptif. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yg memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan dua variable atau lebih.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Lawrence dalam Sugiyono (2017)

Metode survei merupakan penelitian kuantitatif dimana dalam penelitian survei peneliti menggunakan beberapa pertanyaan yang akan di jawab oleh responden mengenai pendapat, keyakinan, karakteristik pada suatu objek dan perilaku yang sudah pernah di rasakan sebelumnya oleh responden.

Dalam penelitian ini Time Horizon yang digunakan adalah cross sectional. Menurut Kuncoro (2014:147) cross sectional atau data silang tempat adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu. Cross sectional digunakan untuk mengamati responden dalam periode yang sama pendekatan penelitian kuantitatif, dimana menggunakan sampel 100 responden untuk mengetahui hasil tujuan. Untuk mengetahui hasil dari tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode partial least square. (Smart PLS)

HASIL DAN PEMBAHASAN

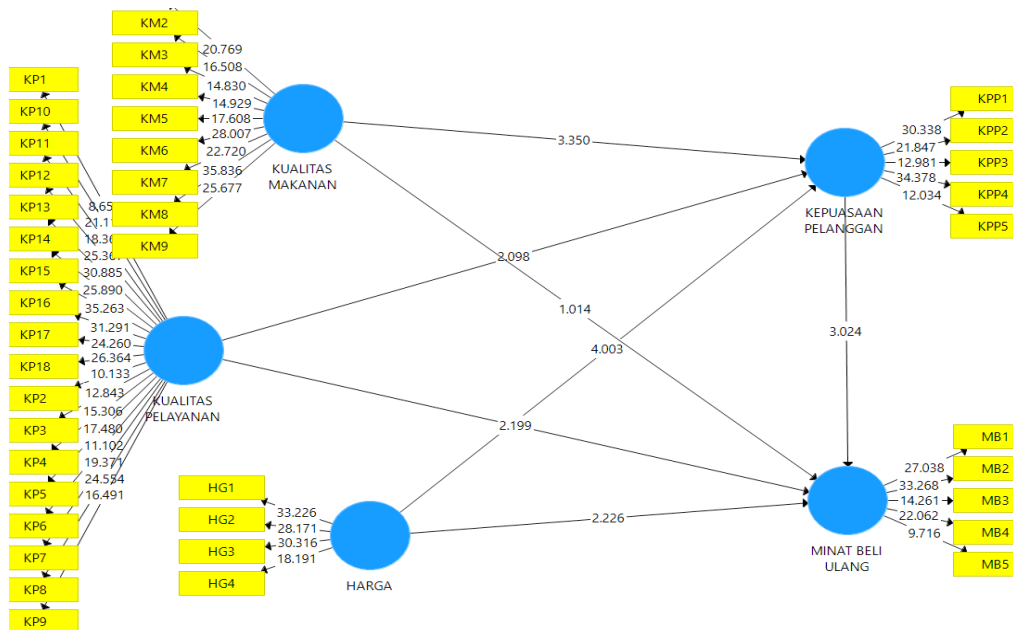
Dari hasil uji validitas atau biasa disebut dalam PLS convergent validity dan reliabilitas atau biasa disebut dalam PLS composite reliability yang diperoleh dari pengolahan data model pengukuran. Dalam penelitian ini ada tiga variable eksogen yaitu kualitas produk/makanan (X1) yang diukur oleh 9 indikator, kualitas pelayanan (X2) dengan 18 indikator, dan harga (X3) yang di ukur oleh 5 indikator. Kemudian terdapat dua indicator endogen, yaitu kepuasan pelanggan yaitu 5 indikator dan minat beli ulang yaitu 5 indikator.

Setelah dilakukannya uji convergent validity, maka tahap selanjutnya adalah perhitungan discriminant validity. Nilai discriminant validity dapat dilihat dari nilai akar kuadrat dari AVE. Nilai discriminant validity di anggap baik apabila nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk lainnya dalam model.

Dalam pengolahan data menggunakan program SmartPLS, untuk menentukan signifikansi keterkaitan antar variable dapat dilihat dalam nilai t-statistiknya. Besarnya nilai t-statistik dihitng dengan metode bootstrapping. Nilai t yang digunakan pada penelitian ini adalah 1,96 (ghozali & Latn,2015). Hipotesis akan dinyatakan di terima apabila t-statistik > 1,96 dan ditolak apabila t-statistik < 1,96. Uji hipotesis ini termasuk dalam evaluasi model structural, selain itu dalam model structural juga di lihat dari R squarenya, R-square ialah untuk melihat total dari perubahan variabel terikat yang di jelaskan oleh variabel bebas, menunjukkan bahwa 0.67 berarti model “baik”, 0.33 berarti “moderat”, dan 0.19 berarti model “lemah” .

Dari hasil uji hipotesis di atas, di peroleh nilai koefisien determinasi ata R kuadrat pada variable Kualitas Produk (KM), Kualitas pelayanan (KP) dan Harga (H) terhadap variable kepuasan pelanggan (KPP) adalah sebesar 0.726. Hal ini mengindikasikan bahwa variable kepuasan pelanggan dapat di jelaskan oleh ketiga variable kualitas produk (KM), kualitas pelayanan (KP) , harga (HG) sebesar 72.6%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 28.4% dijelaskan oleh variable lain.

Selanjutnya, dari hasil uji hipotesis di atas, di peroleh nilai koefisien determinasi ata R kuadrat pada variable Kualitas Produk (KM), Kualitas pelayanan (KP) dan Harga (H) terhadap variable Minat beli ulang (MB) adalah sebesar 0.716. Hal ini mengindikasikan bahwa variable minat beli ulang (MB) dapat di jelaskan oleh ketiga variable kualitas produk (KM), kualitas pelayanan (KP) , harga (HG) sebesar 71.6%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 29.4% dijelaskan oleh variable lain.



Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (KP) Terhadap kepuasan pelanggan (KPP) di tunjukkan nilai koefisien jalurnya sebesar 0.214 dengan nilai t-statistiknya 2.098. karena nilai t.statistik 2.098 > 1.96 maka H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan (KP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (KPP).

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Harga (HG) Terhadap kepuasan pelanggan (KPP) di tunjukkan nilai koefisien jalurnya sebesar 0.367 dengan nilai t-statistiknya 4.003. karena nilai t.statistik 4.003 > 1.96 maka H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga (HG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (KPP).

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa Kualitas produk (KM) Terhadap minat beli ulang (MB) di tunjukkan nilai koefisien jalurnya sebesar -0.146 dengan nilai t-statistiknya 1.014. karena nilai t.statistik 1.014 > 1.96 maka

H4 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas produk (KM) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang (MB).

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (KP) Terhadap minat beli ulang (MB) di tunjukkan nilai koefisien jalurnya sebesar 0.378 dengan nilai t-statistiknya 2.199. karena nilai t.statistik 2.199 > 1.96 maka H5 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan (KP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang (MB).

Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menunjukkan bahwa Harga (HG) Terhadap minat beli ulang (MB) di tunjukkan nilai koefisien jalurnya sebesar 0.265 dengan nilai t-statistiknya 3.024. karena nilai t.statistik 3.024 > 1.96 maka H6 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga (HG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang (MB).

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) menunjukkan bahwa Kepuasan pelanggan (KPP) Terhadap minat beli ulang (MB)

di tunjukkan nilai koefisien jalurnya sebesar 0.416 dengan nilai t-statistiknya 2.226. karena nilai t.statistik 2.226 > 1.96 maka H7 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan (KPP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang (MB).

-Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, besar pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan adalah 0.339. nilai koefisien jalurnya memiliki tanda positif artinya indikator indikator dalam variabel kualitas produk diperbaiki dan ditingkatkan maka kepuasan pelanggan juga akan bertambah.

Hasil ini menjelaskan bahwa kualitas produk yang disajikan oleh restoran Mujigae seperti warnanya yang tidak pucat, porsinya yang sesuai, bentuk, temperature yang sesuai, tekstur, aroma, tingkat kematangan dan rasa makanan yang enak merupakan factor factor dapat memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Hal ini bahwa tinggi atau rendahnya kepuasan pelanggan di pengaruhi oleh kualitas makanan yang di sajikan oleh restoran Mujigae. Hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Jimmy Sugianto dan Sugiono Suharto (2013), yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan variabel kualitas makanan terhadap variabel kepuasan pelanggan.

Karena makanan adalah suatu produk fundamental dari restoran, maka tidak dipungkiri bahwa kualitas makanan yang di sajikan pada restoran Mujigae memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan tanggapan terhadap pernyataan kuesioner variabel kualitas

makanan maka dapat dikatakan bahwa restoran Mujigae mementingkan semua indikator yang terdapat pada penelitian ini. Dapat dilihat dari hasil kuesioner dengan mean >3.5. maka semakin baik kualitas makanan yang disajikan oleh restoran mujigae, maka akan semakin besar pula kepuasan yang di rasakan oleh pelanggan. Maka restoran Mujigae harus memperhatikan dan tetap menjaga kualitas makanan seperti dengan menjaga temperature makanan yang terlihat mean paling rendah dan tetap menyesuaikan cita rasa masakan. Dengan begitu maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Hipotesis kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan adalah 0.214. nilai koefisien jalurnya memiliki tanda positif artinya indikator indikator dalam variabel kualitas pelayanan diperbaiki dan ditingkatkan maka kepuasan pelanggan juga akan meningkat.

Hasil ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh restoran Mujigae seperti penampilan ruangan yang menarik, kebersihan pada restoran, penampilan yang rapih, perhatian karyawan, pelayanan yang di berikan, kesan yang baik, kecepatan pelayanan, harga makanan yang ada, informasi yang diberikan sangat jelas, pelayanan yang cepat, kesediaan karyawan dalam membantu, karyawan yang sopan dan santu, karyawan yang mengerti semua produk yang di tawarkan, pelayanan yang membuat pelanggan percaya dengan apa yang di berikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya kepuasan pelanggan di pengaruhi juga oleh kualitas pelayanan

yang berikan oleh restoran Mujigae. Hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Januar effendi Panjaitan dan Ai Lili Yulianti (2016) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan pelanggan.

Karena dengan memberikan pelayanan yang baik adalah suatu kegiatan inti dari orientasi dan salah satu strategi pembeda dengan pesaing. Maka tidak dapat di pungkiri bahwa kualitas pelayanan yang di berikan oleh restoran Mujigae. Berdasarkan tanggapan dari responden terhadap pernyataan pada kuesioner variabel kualitas pelayanan, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan semua dimensi dan indikator sudah sesuai dengan harapan, namun jika dilihat dari indikator kecepatan pelayanan walaupun termasuk dengan setuju pada mean hasil kuesioner namun merupakan yang paling rendah, maka untuk meningkatkan kepuasan maka indikator kecepatan pada restoran Mujigae juga bisa di tingkatan kembali . Maka semakin baik kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada pelanggan, maka akan semakin meningkatkan rasa puas yang mereka rasakan.

Hipotesis ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, besar pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan adalah 0.367. nilai koefisien jalurnya memiliki tanda positif artinya indikator indikator dalam variabel harga diperbaiki dan ditingkatkan maka kepuasan pelanggan juga akan meningkat.

Hal ini menjelaskan bahwa harga makanan yang di tawarkan oleh restoran Mujigae seperti harga yang sesuai yang di bayangkan, harga yang sesuai dengan

manfaat, harga sesuai dengan daya beli, harga produk tidak berlebihan merupakan factor factor yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Hal ini menandakan bahwa tinggi rendahnya kepuasan pelanggan di pengaruhi oleh harga makanan yang di tawarkan oleh restoran Mujigae. Hasil hipotesis ini sesuai dengan peneliti terdahulu Rendy Gulla, Sem George, Ferdy Roring (2015) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan positif pada variabel harga terhadap variabel kepuasan pelanggan,

Dalam segala perusahaan terutama pada usaha restoran, mayoritas pelanggannya cenderung untuk melihat harga yang harus mereka keluarkan untuk menikmati makanan yang mereka inginkan. Berdasarkan tanggapan responden yang di nyatakan dalam kuesioner semuanya sudah disetujui oleh responden, namun dilihat dari mean terendah dalam variabel harga adalah harga sesuai dengan yang di bayangkan, jika dilihat Mujigae sendiri termasuk restoran korea dengan harga yang terjangkau, sesuai dengan pernyataan pada kuesioner yang menggap harga produk sesuai dengan daya beli. Disini memungkinkan juga untuk Restoran Mujigae untuk memberikan harga yang terjangkau untuk manfaat yang lebih untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Hipotesis ke empat

Hasil pengujian hipotesis pertama (H4) menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, besar pengaruh kualitas produk terhadap minat beli ulang adalah -0.146. nilai koefisien jalurnya memiliki tanda negatif artinya indikator indikator dalam variabel kualitas produk diperbaiki dan ditingkatkan maka kepuasan pelanggan juga tidak akan bertambah.

Hasil penelitian ini berbeda dari hasil

penelitian sebelumnya seperti yang telah di lakukan oleh rahmi Rosita (2016), yang menyatakan bahwa kualitas produk mempengaruhi minat beli ulang konsumen. Penelitian ini menghasilkan hasil yang berbeda yakni minat beli ulang konsumen tidaklah di pengaruhi oleh kualitas produk. Hal ini mungkin di sebabkan oleh kualitas produk yang sudah di anggap baik, serta sudah seusai dengan harga dan kualitas pelayanan yang di berikan oleh restoran mujigae, sehingga konsumen tidak mempertimbangkan kualitas produk yang mereka rasakan, atau dengan kata lain konsumen lebih mementingkan kualitas pelayanan dan juga harga yang terjangkau di bandingkan kualitas produknya dalam memnentukan minat beli ulang mereka di masa mendatang.

Hipotesis ke lima

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan minat beli ulang. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang adalah 0.378. nilai koefisien jalurnya memiliki tanda positif artinya indikator indikator dalam variabel kualitas pelayanan diperbaiki dan ditingkatkan maka minat beli ulang juga akan meningkat.

Hasil ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh restoran Mujigae seperti penampilan ruangan yang menarik, kebersihan pada restoran, penampilan yang rapih, perhatian karyawan, pelayanan yang di berikan, kesan yang baik, kecepatan pelayanan, harga makanan yang ada, informasi yang diberikan sangat jelas, pelayanan yang cepat, kesediaan karyawan dalam membantu, karyawan yang sopan dan santu, karyawan yang mengerti semua produk yang di tawarkan, pelayanan yang

membuat pelanggan percaya dengan apa yang di berikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya minat beli ulang di pengaruhi juga oleh kualitas pelayanan yang berikan oleh restoran Mujigae. Hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Aditya lazuardi hadani (2008) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara variabel kualitas pelayanan terhadap variabel minat beli ulang. Dari hasil yang ada dapat dikatakan bahwa jika kualitas pelayanan yang di berikan oleh restoran sushi tei semakin bauj maka akan semakin tinggi pula minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang.

Hipotesis ke enam

Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, besar pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan adalah 0.265. nilai koefisien jalurnya memiliki tanda positif artinya indikator indikator dalam variabel harga diperbaiki dan ditingkatkan maka minat beli ulang juga akan meningkat.

Hal ini menjelaskan bahwa harga makanan yang di tawarkan oleh restoran Mujigae seperti harga yang sesuai yang di bayangkan, harga yang sesuai dengan manfaat, harga sesuai dengan daya beli, harga produk tidak berlebihan merupakan factor factor yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Hal ini menandakan bahwa tinggi rendahnya minat beli ulang di pengaruhi oleh harga makanan yang di tawarkan oleh restoran Mujigae. Hasil hipotesis ini sesuai dengan peneliti terdahulu mahyarani Tiara Ghassani (2017) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan positif pada variabel harga terhadap variabel minat beli ulang,

Hipotesis ke tujuh

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, besar pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang adalah 0.416. nilai koefisien jalurnya memiliki tanda positif artinya indikator indikator dalam variabel kepuasan pelanggan meningkat maka minat beli ulang juga akan meningkat.

Hasil ini menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan restoran Mujigae seperti puas dengan kualitas, dengan harga, produk, merasa bangga dan berani bayar lebih merupakan faktor faktor yang dapat mempengaruhi minat beli untuk melakukan pembelian ulang. Hal ini menandakan tinggi rendahnya minat beli ulang konsumen di pengaruhi dengan kepuasan yang di rasakan oleh pelanggan tersebut. Hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eun Jung Choi dan Soo Hyun Kim (2013) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan positif variabel kepuasan pelanggan terhadap variabel minat beli ulang konsumen.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa restoran Mujigae telah mampu memberikan pengalaman positif serta menciptakan kepuasan pelanggan sehingga mendorongnya untuk melakukan pembelian ulang di masa mendatang. Karena salah satu kunci kesuksesan perusahaan adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Maka restoran Mujigae harus mampu memahami permintaan pasar, perilaku konsumen serta faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan mereka. Konsumen yang merasa puas umumnya akan memiliki minat untuk melakukan pembelian di masa depan.

Semakin konsumen merasa puas dengan restoran mujigae, maka semakin tinggi pula minat beli ulang mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada bab 4 mengenai analisis pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap minat beli ulang dampaknya pada minat beli ulang pada restoran Mujigae maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada restoran Mujigae sebesar 0.399
2. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada restoran Mujigae sebesar 0.214
3. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada restoran Mujigae sebesar 0.367
4. Kualitas Produk tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap minat beli ulang pada restoran Mujigae sebesar -0.146.
5. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada restoran Mujigae sebesar 0.378
6. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada restoran Mujigae sebesar 0.265
7. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada restoran Mujigae sebesar 0.416.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat di berikan kepada pihak restoran Simpang Raya:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel kualitas produk memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Maka dari

itu pihak restoran harus tetap menjaga kualitas makanan seperti contoh harus memperbaiki dan menjaga temperature makanan yang sudah di rasa cukup namun tetap yang paling rendah. Selain itu juga pihak restoran harus terus menjaga cita rasa yang sudah sesuai dengan selera pelanggan sehingga kepuasan pelanggan tetap terus terjaga.

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan minat beli ulang. Maka dari itu pihak restoran perlu menjaga kualitas pelayanan terutama pada kecepatan dalam penyajian, yang dirasa sudah cukup baik namun perlu di tingkatkan lebih lagi. Selain itu juga sebaiknya restoran Mujigae membuatkan kotak saran atau customer care untuk tetap menjaga dan mengontrol kualitas pelayanan pada restoran Mujigae. Selain itu juga di masa pandemic ini sebaiknya pelayanan dari segi online juga di tingkatkan.

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan minat beli ulang. Maka dari itu pihak restoran disarankan untuk menjaga harga dari restoran Mujigae dan berusaha untuk meningkatkan kembali dengan memberikan harga yang terjangkau dengan value yang lebih. Contoh pada pembelian paket A dan paket B akan gratis side dish. Atau bisa juga memberikan program kesetiaan pelanggan dengan memberikan voucher gratis, setelah melakukan 10x pembelian.

4. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Maka kepuasan pelanggan harus tetap di jaga dari segi kualitas makanan, harga, kualitas pelayanan seperti yang di sebutkan di atas. Dan untuk mengontrol kepuasan pelanggan maka harus di adakannya

survey yang rutin untuk mengontrol kepuasan pelanggan dan tau apa yang harus di tingkatkan dan apa yang membuat pelanggan kurang puas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A (2015). The Effect of Service and Food Quality on Customer Satisfaction and Hence Customer Retention. *Asian Social Science* Vol 11, No 23, 2015
- Ahmed (2014). From Customer Perceived Value to Repurchase Intention in Textile Sector of Bangladesh: A Correlation study. *International Journal of Etgnics in Social Science*. Vol 2, No 1, 2014
- Ali, M., M. Amir, dan M. W. Akram (2016) The factors affecting attitudes and purchase Intent for luxury fashion goods: an empirical study of Pakistani market, *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)* Vol. 5, No.6; January 2016.
- Arifin, Imamul dan Hadi, Gina (2009), *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo
- Canny 2014 . Measuring the Mediating Role of Dining Experience Attributes on Customer Satisfaction and Its Impact on Behavioral Intentions of Casual Dining Restaurant in Jakarta
- Choi dan Kim (2013). The Study of the Impact of Perceived Quality and Value of Social Enterprises on Customer Satisfaction and Re-Purchase Intention. *International Journal of Smart Home* Vol 7, No 1, 2013
- Choi Tung, Lo. (2011). The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention of Engineering Students. (Disertasi). Cityu University of Hongkong
- Claudia et al (2016) .Analisis Strategi Bersaing Dalam Persaingan Usaha Bisnis Document Solution (Studi kasus pada PT.Astragraphia, TBK Manado) .

- Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016
- Dr. Mohammad Reza dan Sara (2014). Investigating the Effect of Perceived Service Quality, Perceived Value, Brand Image, Trust, Customer Satisfaction on Repurchase Intention and Recommendation to Other Case study: LG Company. *Eropean Journal of Business and Managment* Vol 6, No.34 (2014)
- Ghulman et al (2017). Effect of Food Quality on Customer Perceived Satisfaction Level and Mediating Effect of Food Safety on Them. *International Journal of New Technology and Research* Vol 3, No 1, 2017
- Halim et al (2014). Pengaruh Brand Identity terhadap Timbulnya Brand Preference dan Repurchase intention pada Merek Toyota . *Jurnal manajemen Pemasaran Petra* Vol 2, No 1, 2014
- Kisang Ryu et al (2012). The influence of the quality of the physical environment, food, and service on restaurant image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions. *International Journal of Hospitality Management* Vol 24, No 2, 2012
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2009. *Manajemen Pemasaran* : Edisi 13, Jilid I Penerbit Airlangga, Jakarta.
- Martin 2016 .*Global Marketing: Strategies, Definition, Issues, Examples.* <https://www.cleverism.com/global-marketing-strategies/>
- Mustafid, 2012. *Pemasaran Global*: Dipa Blu FE Unila, Lampung
- Olgun et al (2014). The Impact of Service Quality Dimensions on Patient Satisfaction, Repurchase Intentions and Word-of-Mouth Communication in the Public Healthcare. *Procedia. Social and Behavioural Sciences* 148 (2014)
- Steffi (2015), Analisa pengaruh food quality, service customer orientation, dan physical environment terhadap repurchase intention, melalui customer satisfaction. *Ultima Management* Vol 7. No.1. Juni 2015
- Sugiono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono (2012) *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono (2013) *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 2011. *Service Quality and Satisfaction*. Edisi 3. Andi Offset. Yogyakarta.
- Winiy Salim (2013). Analisa Pengaruh Service Quality Terhadap Customer Satisfaction Rempah Indonesian Restaurant. *Jurnal Strategi Pemasaran* Vol 1, No 2 (2013)
- Winny Salim dan Dr Hartono Subagio SE, MM. (2013). Analisa pengaruh Service Quality terhadap customer satisfaction rempah Indonesian Restoran. *Jurnal Pemasaran Petra* Vol 1 no 2 (2013)
- Wirawan (2015). Pengaruh Produk, Harga, Promosi dan Merek terhadap Keputusan Pembelian Ulang. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. Vol 4, No 10, 2015
- Zeithaml, Valarie A., Mary Jo Bitner dan Dwayne D. Gremler. (2009). *Services Marketing ± Integrating Customer Focus Across The Firm* (5 th ed). New York: McGraw-Hill
- PROFIL SINGKAT**
- Astrid Zusana Logahan, lahir di Jakarta 1 Oktober 1996 S1 Fakultas Ekonomi Binus University jurusan Internasional Bisnis dan Manajemen, S2 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Pemasaran Pernah bekerja di PT Dewaweb sebagai Account Executive

Jakarta, PT TAKARI KOKOH
SEJAHTERA sebagai Marketing
Existing dan PT SAMPOERNA
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
sebagai Business Analyst.

PERKEMBANGAN *GREEN CONSTITUTION* DUNIA: MANFAAT DAN IMPLIKASI BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Eka Reza Khadowmi, Andi Hevriansyah, Audrey G Tangkudung

Magister Hukum Peminatan Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Peneliti pada Center For Strategy Public Studies Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.

Pasca Sarjana (S2) Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI)

Email: ekarezakhadowmi@gmail.com, andiehevri@gmail.com, andiehevri@gmail.com

Abstract

The problems that exist in the environmental sector in particular have become complex in this era of globalization, therefore the constitutionalization of environmental norms is important to deal with further environmental damage and in line with sustainable development. As a form of follow-up to the constitutionalization of environmental norms is the existence of a Green Constitution. Green Constitution or green constitution is a concept and idea that implements environmental sovereignty or ecocracy. In Indonesia, the Green Constitution concept began to be accommodated after the 1945 Constitution Amendment. The Green Constitution concept which elevates ecocracy in a country's constitution will certainly become an essential and fundamental foothold in upholding environmental sovereignty. The constitutionalization of environmental norms in the 1945 Constitution can be one way to enforce the law both preventively and repressively. The existence of environmental protection norms in the constitution will not only automatically become a guide in the formulation of laws, but will also automatically become a guide for all kinds of actions and behavior of decision makers, be it the government, private groups or civil society. (civil society).

Keywords : Green Constitution, Environmental Norm, Sustainable Development.

Abstrak

Permasalahan yang ada pada sektor lingkungan hidup secara khusus menjadi kompleks di era globalisasi ini, oleh sebab itu adanya konstitusionalisasi norma lingkungan menjadi penting untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang lebih jauh lagi dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap konstitusionalisasi norma lingkungan adalah dengan adanya *Green Constitution*. *Green Constitution* atau konstitusi hijau merupakan konsep dan gagasan yang menerapkan kedaulatan lingkungan atau *ecocracy*. Di negara Indonesia, Konsep *Green Constitution* mulai diakomodir pasca Amandemen UUD 1945. Konsep *Green Constitution* yang mengangkat ekokrasi dalam konstitusi suatu negara tentu akan menjadi pijakan yang hakiki dan fundamental dalam menegakkan kedaulatan lingkungan hidup. Konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif. Adanya norma-norma perlindungan lingkungan dalam konstitusi tidak hanya secara otomatis

menjadi pedoman dalam perumusan undang-undang, namun secara otomatis juga akan menjadi pedoman bagi segala jenis tindakan dan perilaku pengambil keputusan, baik itu pemerintah, kelompok swasta maupun masyarakat sipil. (*civil society*).

Kata Kunci : Green Constitution, Norma Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam keberlangsungan hidup manusia. lingkungan hidup tidak hanya sebagai objek sederhana yang mencakup alam, tumbuhan dan hewan tetapi juga menyangkut entitas menyeluruh keberadaan makhluk hidup. Peran vital lingkungan tidak diimbangi dengan pemeliharaan secara bijaksana. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan berdampak pada kerusakan lingkungan yg merupakan kaitan langsung dengan keberlangsungan hajat hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang semakin memprihatinkan juga tidak lepas dari pola hidup maupun keserakahan manusia itu sendiri, termasuk aktivitas industri-industri. Padahal masyarakat seharusnya menyadari secara betul akan kewajiban dan tuntutan serta tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan yang menjadi instrumen penting dalam kehidupan masyarakat, jikalau kesadaran masyarakat tinggi terhadap pengelolaan lingkungan maka persoalan lingkungan hidup tidak menjadi masalah yang rumit.

Menurut Mattias Finger, dewasa ini krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti saat ini sedikit-tidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu teknologi yang kurang efisien, kebijakan yang salah dan gagal, baik politik, gagasan, dan ideologi memiliki komitmen yang rendah pada akhirnya merugikan lingkungan, tindakan dan pola hidup yang tidak sesuai atau menyimpang dari para aktor negara, merebaknya pola kebudayaan

seperti konsumerisme dan individualism, serta pola pikir para individu yang belum terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya opsi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah lingkungan hidup harus melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang tepat, teknologi baru dan efisien, penguatan komitmen politik publik untuk menciptakan gagasan baru atau ideologi baru yang pro terhadap lingkungan (*green thinking*), kemudian juga mengubah pola kebudayaan, karakter serta kesadaran masing-masing individu dan penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang.¹

Permasalahan yang ada pada sektor lingkungan hidup secara khusus menjadi kompleks di era globalisasi ini, penanganan terhadap lingkungan hidup tidak sesuai lagi dengan konsepsi doktrinal dari lingkungan hidup itu sendiri. Bahwa dalam kajian hukum lingkungan nasional.² Konsepsi secara teratur dan pasti yang harus diikuti dan ditaati oleh semua pihak terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan atau tempat hidup manusia atau lingkungan hidup kemudian dituangkan dalam instrumen hukum nasional sehingga mencerminkan hukum yang berbasis atau berorientasi kepada kepentingan

1 Pan Mohammad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Konstitusi*, Vol. 13, No. 4 (Desember 2016): 767

2 St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* (Bandung, Bina cipta, 1981), hal. 108.

lingkungan (*environment oriented law*), selain upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap segala sesuatu yang berdampak negative yg disebabkan oleh pemanfaatannya, hal tersebut juga berkaitan langsung dengan pengaturan hukum pada subjek hukum itu sendiri.³

Keterkaitan antara lingkungan dengan kehidupan orang banyak juga memberikan dorongan terhadap negara untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, hal tersebut mengingat lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap orang. Kondisi lingkungan saat ini mendorong keprihatinan akan ancaman ekosistem dan lingkungan yang semakin kritis, oleh sebab itu adanya konstitusionalisasi norma lingkungan menjadi penting untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang lebih jauh lagi dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap konstitusionalisasi norma lingkungan adalah dengan adanya *Green Constitution*. *Green Constitution* atau konstitusi hijau memberikan pemahaman terhadap penerapan kedaulatan lingkungan atau *ecocracy*, dimana lingkungan bukan lagi sebagai objek yang tidak dapat secara sembarangan di pergunakan oleh manusia sehingga dapat dikatakan lingkungan sebagai suatu subjek tersendiri yang memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan untuk menghindar dari kerusakan.⁴ Pada prinsipnya penegasan

3 Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 27.

4 Jimly Asshidiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 3.

kepastian hukum terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan atau dengan kata lain pembangunan berkelanjutan akan memiliki landasan atau pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan wujud dari konstitusionalisasi norma lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan sangat penting bagi keseimbangan alam dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, kecenderungan pembangunan yang lebih berorientasi ekonomis akan menyebabkan dampak negative bagi lingkungan hidup, dengan pergeseran pembangunan yg sebelumnya berorientasi lebih ke arah ekonomis menuju wawasan lingkungan secara bijaksana akan mencapai tujuan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Seiring perkembangannya yang terkait dengan lingkungan hidup, dengan kesadaran dunia internasional akan urgensi dari hal tersebut telah menjadi salah satu konsepsi dari perkembangan generasi Hak Asasi Manusia Ketiga, yang nampak jelas dengan adanya Konferensi Stockholm, Swedia dalam rangka penatalaksanaan Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2 (1970-1980), Konferensi Rio de Janeiro 1992, Konferensi Johannesburg 2002, dan Konferensi Rio+20 pada Tahun 2012, melalui komitmen konferensi tersebut salah satunya mengupayakan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dan dibutuhkannya partisipasi yang lebih luas dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasi di semua tingkat yang simetris dengan kewajiban negara sebagai jawaban atas penurunan fungsi lingkungan untuk membuat pengaturan perlindungan lingkungan nasional

Ketentuan mengenai lingkungan hidup harus dicantumkan secara tegas dalam

konstitusi mengingat bahwa isu mengenai lingkungan yang mengkhawatirkan akibat kegiatan pembangunan yang menyebabkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan lebih parah. Pengaturan dalam konstitusi akan menjadi payung hukum bagi peraturan – peraturan yang dibawahnya sehingga akan berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵

Di Indonesia setelah bergulirnya era reformasi ditandai dengan era legislasi menuju era konstitusionalisasi yang sebelumnya berada pada era legislasi, perkembangan hukum lingkungan nasional yang melalui produk hukum undang-undang ditandai dengan terjadinya dinamika atas konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengalami amandemen sebanyak empat kali dan dalam pengaturan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan jaminan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan telah diakomodirnya perkembangan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang memberikan cerminan diakndungya konsepsi mengenai konsep *Green Constitution* yang dikaitkan dengan Ekokrasi tersebut diadopsi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau yang lazim dikenal sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan dalam Konstitusi Indonesia.⁶

5 Maret Priyanta, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Konstitusi, Vol. 7, No. 4* (agustus 2010): 113-130.

6 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, “Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan

Norma perlindungan lingkungan hidup yang dicerminkan di dalam konsep *green constitution* dan kaitan nya dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebetulnya kini memiliki pijakan yang semakin kuat. Tetapi pada tataran pelaksanaan nya tidak sedikit yang masih belum memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, tidak hanya masyarakat secara umum yang belum memiliki kesadaran tersebut melainkan samapai dengan pembuat kebijakan publik.

Dalam praktiknya, Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk mengatur masalah lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 yang tidak terlepas dari berbagai pertimbangan penting. Salah satu pertimbangan utama terlihat dari semakin maraknya tindakan perorangan maupun badan usaha perusakan lingkungan. Kemudian juga banyaknya peraturan daerah yang tidak sejalan dengan semangat perlindungan lingkungan, Oleh sebab itu, sangat tepat untuk mengangkat isu lingkungan sebagai salah satu butir penting dalam konstitusi.

Ketentuan mengenai masalah lingkungan hidup dalam konstitusi dapat juga diartikan bahwa dari segi lingkungan hidup dalam rangka menjaga lingkungan itu sendiri untuk kelangsungan hidup suatu negara, aspek lingkungan sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai pemegang utama pengelolaan kekayaan alam (termasuk pembangunan lingkungan hidup), negara harus mentaati ketentuan UUD dalam rangka mengembangkan kondisi alam dan lingkungan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.

Masyhur Effendi menyatakan bahwa

Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan,” *konstitusi Vol. 15, No. 2* (Juni 2018):310.

jika kita sepakat mengangkat derajat lingkungan hidup berarti perhatian/komitmen kita kepada lingkungan bukan karena alasan kasihan kepada lingkungan, tetapi lebih ditekankan karena kesadaran. Kesadaran tersebut merupakan hal penting akan lingkungan yang memiliki hak untuk hidup yang harus dijaga dan kesadaran manusia tidak dapat hidup dengan baik jika lingkungan telah hancur. Oleh sebab itu, untuk mengatasi pemikiran bahwa lingkungan dianggap hanya sebagai objek ambisi atau kepuasan manusia harus dicegah untuk menghindari kerusakan lingkungan.⁷

Menempatkan persoalan lingkungan hidup dalam posisi penting/utama, dimaksudkan untuk memberikan peningkatan terhadap kesadaran manusia kepada lingkungan hidup juga untuk mengingatkan manusia akan pentingnya posisi lingkungan, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan budaya menghormati lingkungan dan cinta lingkungan sebagai sahabat manusia dalam tata kehidupan. Selain itu, konsepsi hukum lingkungan menurut Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri diharapkan untuk tidak salah dalam mengambil keputusan dan memperkuat keyakinan pemegang otoritas kekuasaan untuk menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, tentu dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat menghindari krisis dikemudian hari dan memberikan warisan yang tidak dapat digugat oleh anak cucu nantinya.⁸

Lingkungan hidup sebagai sistem tentunya harus tunduk pada sebuah sistem

7 Masyhur Effendi, *Prinsip-prinsip Dasar HAM dan Hukum Lingkungan Hidup* (Malang: FH Universitas Brawijaya, 1986), hal. 35.

8 Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 53.

yang telah ditakdirkan yaitu hukum alam. Jika kualitas komponen dalam sistem tersebut tetap stabil, sistem tersebut dapat beroperasi atau berjalan secara seimbang sebagai sebuah sistem kehidupan. Esensi dari sumber-sumber kehidupan yakni kehidupan yang terdiri dari kehidupan pada masa lalu, kehidupan pada masa kini, dan kehidupan pada masa yang akan datang, hal tersebut dikatkan demikian karena esensi dari lingkungan hidup itu sendiri merupakan tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya dan juga merupakan tata dan nilai yang menjaga keadilan sosial bagi kehidupan seluruh manusia sebagai bagian dari keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan baik bagi lingkungan hidup maupun manusia itu sendiri pada kehidupan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oleh sebab itu, Lingkungan hidup dalam posisinya yang sangat penting bagi kehidupan manusia haruslah diberlakukan sebagai suatu subjek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.⁹

Adanya pengaturan yang memperhatikan aspek lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam konstitusi suatu negara memberikan kewajiban terhadap semua pihak dan segenap lapisan masyarakat termasuk pengambil kebijakan atas pentingnya penataan lingkungan hidup. Amanat konstitusi tersebut juga harus dimaknai sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi lingkungan itu sendiri.

Penghormatan terhadap hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar, bahwa

9 M. Ridha Saleh, *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional)* (Jakarta: Komnas HAM, 2005), hal. 115.

perlu adanya kontrol yang tegas terhadap pola kehidupan manusia atas lingkungan lingkungan mengingat lingkungan juga memiliki segala keterbatasan. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Hubungan yang mutualistik serta toleran antara manusia dengan lingkungan akan menciptakan perlindungan hak asasi atas lingkungan hidup dan menegaskan bahwa antara lingkungan dan manusia memiliki kebutuhan dan ketergantungan yang saling terkait.¹⁰

Pembangunan berkelanjutan tidak lagi hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini, tetapi pembangunan ditujukan selain untuk meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang. Dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan maka pengakuan negara kepada masyarakat atas jaminan untuk memperoleh penghidupan yang layak telah memperoleh pengakuan yang kuat, pengakuan tersebut bahkan tidak hanya terhadap masyarakat saat ini ada melainkan juga untuk masyarakat yang nanti ada (generasi yang akan datang).¹¹ Menurut Heinhard Stienger c.s. sebagaimana yang dikutip dalam Kusnadi Hardjosoemantri, suatu bentuk yang paling ideal dan utama terhadap perlindungan seseorang adalah hak-hak subjektif (*subjective right*) adalah. Hak tersebut memberikan syarat kepada pemangku kepentingan untuk melakukan suatu tuntutan yang sah akan adanya

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dihormati. Tuntutan tersebut merupakan suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum dan dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.¹²

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi satu langkah nyata pemenuhan hak asasi manusia secara global terutama hak asasi manusia yang muncul sebagai bagian dari hak generasi kedua yang fokus terhadap hak-hak Ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana isi dari konvensi internasional tentang hak ekososbud yang memuat tentang uraian kebebasan atas hak, pemantauan dan pelaksanaan hak-hak mengingat bahwa didalam masyarakat global terdapat perbedaan sistem kesajahteraan, ekonomi dan sosial sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang berbeda. Namun harus dipastikan bahwa setiap orang berapapun pendapatannya harus dapat mengakses hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terutama berkaitan dengan hak pendidikan, hak pekerja, hak standart hidup yang layak dengan kemudahan akses terhadap makanan dan air bersih serta hak atas perumahan yang layak.¹³

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang merupakan bentuk dari penelitian melalui studi kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab

10 Richad V. Waas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia," *Sasi Vol. 20, No. 1* (Januari-Juni 2004): 83.

11 Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hal. 75.

12 Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hal. 43.

13 Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 114.

permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴ Jenis data yang digunakan dalam makalah ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau sumber hukum tertulis yang memiliki hubungan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data yang digunakan penulis dalam makalah ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup:

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas dan terdiri dari (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; (b) Peraturan dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan;

Bahan Hukum Sekunder, merupakan penjabaran mengenai bahan hukum secara tertulis.

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun pengakuan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang bertugas untuk menguatkan dan melengkapi data maupun argumentasi yang dituangkan dalam penelitian ini.¹⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif penulis akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian.

PEMBAHASAN

Konsep *Green Constitution* dan Pengaturannya di Indonesia.

Uraian terkait dengan *Green Constitution* dapat dikaitkan dengan kekuasaan bernegara atau kedaulatan atau kekuasaan tertinggi,¹⁶ bahwa konsep Konsep Kedaulatan oleh hukum (nomokrasi) dan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi), dikombinasikan ke dalam konsepsi lingkungan hidup yang memiliki otonomi sendiri dan pula kedaulatan nya sendiri yang dapat diistilahkan dengan *ecocracy* atau keadulatan ekologi.¹⁷

Salah satu negara yang cukup kuat dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kaitan nya dengan *green constitution* adalah Negara Perancis. Pertama kali Negara Perancis mendeklarasikan terkait piagam lingkungan hidup pada tahun 2004 yang mengandung nilai-nilai konstitusi. Piagam Lingkungan Perancis menyatakan bahwa keberadaan umat manusia merupakan syarat atas sumber daya alam dan keseimbangan nya. Piagam lingkungan perancis memberikan pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai suatu kesatuan dan ketergantungan dengan lingkungan hidup dan lingkungan hidup memberikan dampak secara langsung atas keberlangsungan hidup manusia, lingkungan hidup merupakan warisan besar dikemudian hari terhadap kelangsungan hidup manusia di generasi berikutnya, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam merupakan dampak dari kemajuan yang peradaban manusia dalam pola konsumsi dan perilaku nya dan jika tidak diatasi dengan tepat maka keberlangsungan kehidupan

14 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 34.

15 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 113-114.

16 I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara, Dimensi Historis Ketatanegaraan* (Malang: Setara Press, 2012), hal. 90.

17 Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009), hal. 18-19.

generasi berikutnya akan benar-benar terancam, kenakegaraman hayati juga akan sulit dijaga ketika pembangunan manusia melampaui keterbatasan kemampuan lingkungan itu sendiri, pemeliharaan lingkungan harus dicapai dengan cara yang sama seperti pencapaian atas kepentingan mendasar dari bangsa Perancis; serta bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan perlu adanya pemahaman bahwa kemampuan generasi saat ini harus bisa menjaga sumber daya alam dan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang mendatang dalam kebutuhan hidup mereka nantinya.¹⁸

Pengadopsian Piagam Lingkungan sebagai bagian dari konstitusi Perancis dianggap sebagai upaya untuk menjaga prinsip – prinsip pengelolaan lingkungan yang telah diadopsi dalam hukum internasional ke dalam hukum nasional, pengadopsian piagam lingkungan ini juga untuk memberikan batasan pada setiap peraturan perundang – undangan untuk tidak bertentangan dengan piagam lingkungan.

Di negara Indonesia, Konsep Green Constitution mulai diakomodir pasca Amandemen UUD 1945. Konsep Green Constitution yang mengangkat ekokrasi dalam konstitusi suatu negara tentu akan menjadi pijakan yang hakiki dan fundamental dalam menegakkan kedaulatan lingkungan hidup, dengan menempatkan *Green Constitution* dalam Undang – Undang Dasar Suatu Negara dapat dikatakan sebagai bentuk atas perkembangan jaminan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang berkembang

saat ini.¹⁹ Pasca amandemen UUD 1945, telah memuat gagasan dan konsep terakrit dengan kekuasaan dan hak asasi manusia yang juga terakrit dengan konsep demokrasi ekonomi. Kedaulatan rakyat atau yang dikenal juga dengan kekuasaan tertinggi kemudian dikonsepsikan Konsepsi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.²⁰

Menurut Jimly Asshdiqie, Jimmy Ashdic mengatakan: “Perumusan kebijakan lingkungan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah mendorong masyarakat di seluruh dunia untuk lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman pencemaran dan kerusakan. Kebijakan lingkungan adalah Hal tersebut dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi, oleh karena itu telah terjadi trend dunia yaitu legalisasi kebijakan lingkungan atau trend perundang-undangan. Setelah begitu banyak peraturan perundang-undangan yang secara resmi diundangkan ternyata sebagian besar peraturan tersebut tidak mencegah kerusakan dan termasuk tindakan yang kurang efektif, ketidakpuasan semacam ini tersebar luas di banyak negara, sehingga perlu dilakukan penguatan kebijakan perlindungan lingkungan sebagai hukum tertinggi dalam konstitusi. Perkembangan terakhir inilah yang Jimly Asshiddiqie

18 Andri G. Wibisana, “Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004,” *Konstitusi Vol. 8, No. 3* (Juni 2011): 209.

19 I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Perubahan Konstitusi dari sudut Pandang Perbandingan* (Denpasar: Bali Aga, 2006), hal. 28-30.

20 Jimly Assidiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau UUD Negara RI Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 8.

namakan sebagai gelombang kedua atau perkembangan tahap kedua dengan melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan itu ke dalam rumusan UUD 1945.²¹

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan bagian dari hak asasi manusia. oleh karena itu, UUD 1945 sudah sangat jelas pro terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). Sebagai keseimbangan, keberadaan hak asasi setiap orang berarti bahwa negara berkewajiban untuk memastikan terwujudnya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbal-balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu. Oleh karena itu, di satu sisi setiap orang berhak menikmati lingkungan yang baik dan sehat, namun di sisi lain setiap orang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak orang lain untuk memperoleh dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat.

Demikian pula, selain mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan yang baik dan sehat, negara juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain dan, bila perlu, meminta setiap orang untuk tidak merusak atau mencemari lingkungan demi kebaikan bersama. Dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, regulasi terkait lingkungan hidup telah dilembagakan dan menjadi muatan hukum tertinggi konstitusi. Oleh karena itu, segala kebijakan dan tindakan pemerintah dan pembangunan harus sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat.

21 Jimly Asshidiqie, *Ibid*, hal. 159

Tidak ada lagi undang-undang baik berupa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang ramah lingkungan..²²

Konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif. Adanya norma-norma perlindungan lingkungan dalam konstitusi tidak hanya secara otomatis menjadi pedoman dalam perumusan undang-undang organik, Namun secara otomatis juga akan menjadi pedoman bagi segala jenis tindakan dan perilaku pengambil keputusan, baik itu pemerintah, kelompok swasta maupun masyarakat sipil. (*civil society*). Apabila hal tersebut ternyata tetap disimpangi, maka rumusan penegakan hukum yang kemudian berlaku adalah tindakan represif terhadap produk perundang-undangan atau tindakan yang dianggap melanggar atau bertentangan dengan konstitusi.²³

Kemudian Pasal 33 (4) menyatakan Perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas persatuan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, kemandirian, dan persatuan kemajuan dan perekonomian nasional. hal tersebut memberikan penegasan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Norma yang terkandung dalam pasal 33 ayat (4) adalah norma yang mengakui adanya kedaulatan lingkungan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam pembangunan ekonomi dengan tetap memperhatikan lingkungan sebagai

22 Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* Dalam Rangka Eco-Democracy," *Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1* (Juni 2015): 200.

23 Pan Mohammad Faiz, *ibid*, hal. 778.

batu ujinya.²⁴

Nuansa hijau di dalam UUD 1945, memberikan jaminan bahwa pemerintah akan menjunjung tinggi hak-hak tertentu rakyat yang tidak dapat diganggu gugat. Inilah yang inti dari keadilan konstitusional, adapun yang menyatakan bahwa core conception dari keadilan konstitusional terletak pada adanya keharusan konstitusi bagi pemerintah untuk tidak melanggar hak-hak tertentu dari rakyat baik generasi saat ini maupun rakyat generasi mendatang²⁵.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang memuat norma dan peraturan lingkungan hidup telah dilembagakan dan menjadi muatan konstitusi dan menjadi hukum tertinggi (*Green Constitution*). Kemudian pijakan fundamental terhadap perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam pasal tersebut berimplikasi dengan dituangkannya pengaturan mengenai lingkungan dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 3 yang menyatakan “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang.”²⁶ Kemudian

juga terdapat dalam Undang – Undang tersebut mengenai jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan generasi masa depan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 3 huruf f dan huruf g.

Penegasan terhadap segala aturan yang tertuang dalam Undang – Undang ataupun peraturan dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro terhadap lingkungan sebagaimana ketentuan dalam pasal 44 yang menyatakan “Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini”.

Artinya dalam konteks peraturan perundang – undangan, setiap peraturan perundangan wajib memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengamanatkan untuk menuangkan kebijakan lingkungan kedalam setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan merupakan bentuk dari orientasi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah diadopsi dalam konstitusi kemudian juga diadopsi dalam UUPLH yakni sebagai berikut :

Asas tanggung jawab negara,
Asas kelestarian dan keberlanjutan,
Asas keserasian dan keseimbangan,
Asas keterpaduan,
Asas manfaat,
Asas kehati-hatian,

24 Lucas Prakoso, “Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan),” *Hukum dan Peradilan Vol. 3, No. 2* (Juli 2014): 134.

25 Bernard L Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 34.

26 Indonesia, *Undang – Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No . 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, Ps. 1 angka 3.

Asas keadilan,
 Asas ekoregion,
 Asas keanekaragaman hayati,
 Asas pencemar membayar,
 Asas partisipatif,
 Asas kearifan lokal,
 Asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan

Asas otonomi daerah.²⁷

Hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup juga tertuang dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang baik individu, kelompok maupun badan hukum memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam Konsideran Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup huruf a yang telah diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, setiap orang baik individu, kelompok maupun badan hukum berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan seperti yang diamanatkan dalam ayat (2) pada pasal yang sama.²⁸

Kehadiran Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menandai awal pengembangan pembangunan hukum

nasional (perangkat hukum) sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Harus dipahami bahwa pemahaman yang utuh tentang tujuan dan fungsi hukum merupakan sarana reformasi masyarakat yang sangat penting.²⁹

Hukum (termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan yang didasarkan pada anggapan bahwa sejauh menyangkut aturan atau hukum dan regulasi, undang-undang memang dapat bertindak sebagai suatu dalam memberikan arah pada kegiatan manusia kepada pembangunan yang berorientasi terhadap lingkungan, hal tersebut sebagai bentuk dari sarana pembangunan oleh hukum.³⁰

Dapat dipahami bahwa pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan adalah pekerjaan yang sadar dan terencana yang memasukkan lingkungan, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Adanya keterkaitan sumber daya dan tatanan lingkungan hidup tersebut mengharuskan segala upaya dan rencana pembangunan memperhatikan keterkaitan tersebut yang berarti memberikan konsekuensi dimana pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memerhatikan dampaknya

27 Indonesia, *Undang – Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No . 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, Ps. 2.

28 Indonesia, *Undang – Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No . 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, Ps. 65 ayat (1).

29 Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta), hal. 2.

30 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1995), hal. 12-13

pada sektor lain. Sehubungan dengan itu keterkaitan manusia secara pribadi sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sosialnya juga memerlukan perhatian pula. Pun demikian, pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai subjek yang berdiri sendiri dan hanya melakukan pembangunan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dampak yang diakibatkan dari pembangunan sebagai wujud makhluk sosial.³¹

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia telah mengadopsi konsep yang menekankan kedaulatan lingkungan hidup dimana suatu pemerintahan dalam menjalankan suatu pemerintahan memiliki kewajiban untuk taat pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development*). Gagasan ecocracy merupakan upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan nasional. Namun, meskipun Indonesia telah mengakui hak atau kewajiban subjektif negara tersebut dalam konstitusinya, beban model dan arah pembangunan berkelanjutan tidak ditempatkan dalam ketentuan khusus, melainkan dilapiskan atau dicampur dengan hak-hak dasar lainnya.

Oleh karena itu, dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Indonesia wajib menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia agar menjadi peraturan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.³²

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat peraturan tentang perlindungan lingkungan hidup di dalam tubuhnya, namun tidak dapat menyelesaikan masalah dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan tersebut dapat disebabkan oleh tidak efektifnya penegakan hukum dari pihak perusak lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan, kegagalan sanksi yang dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera atau cacat pada peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut perlu terlebih dahulu dilakukan penguatan regulasi lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945, karena UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan dilakukannya penguatan terhadap norma lingkungan hidup yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 maka peraturan perundang-undang dibawahnya akan mengikuti.

Penguatan terhadap norma lingkungan hidup yang ada di undang-undang dapat dilakukan dengan mencantumkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai Peraturan lingkungan apa yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap lingkungan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Selain itu, regulasi lingkungan dapat diperkuat dengan mengadopsi regulasi negara lain, yang secara eksplisit memasukkan regulasi lingkungan dalam konstitusi mereka, seperti konstitusi Ekuador dan Prancis. Diharapkan amandemen undang-undang dasar yang kelima nantinya dapat memuat ketentuan yang lebih spesifik mengenai bentuk perlindungan terhadap lingkungan

31 Ahmad Mas'ari, "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *SN-TIKI* (2017): 717.

32 Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* Dalam Rangka Eco-Democracy," *Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1* (Juni 2015): 200.

hidup yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan merupakan bentuk antisipasi yang dapat dilakukan akibat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup.³³

Manfaat dan Implikasi Green Constitution Bagi Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kondisi lingkungan yang keras dan pentingnya perlindungan lingkungan, isu lingkungan menjadi semakin penting dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi tidak lagi dianggap sebagai tujuan yang tidak dapat diganggu gugat, sebaliknya pertumbuhan ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan.³⁴

Istilah pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah ada sejak 1980-an. Istilah ini pertama kali muncul di "Strategi Konservasi Dunia" dari Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam pada 1980, dan kemudian terus digunakan pada 1981, saat Lester R menggunakan istilah itu. Brown dalam buku "Membangun Masyarakat yang Berkelanjutan (*Building a Sustainable Society*)", kemudian istilah tersebut menjadi sangat populer melalui laporan Brundtland, *Our Common Future* yang diadakan pada tahun 1987 oleh

World Commission on Environment and Development (WCED). Proses Politik dan pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan mencapai puncaknya pada tahun 1992 melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rio de Janeiro Brazil, Paradigma pembangunan berwawasan lingkungan diterima sebagai agenda pembangunan politik seluruh negara di dunia.³⁵

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi paradigma bagi negara-negara yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang, pelaksanaan dengan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada pembangunan dengan tetap memperhatikan kebutuhan bagi generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya, ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang. Istilah ini baru secara resmi dipakai di Indonesia pada tahun 1997 yaitu dengan dicantumkannya dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁶ Kemudian disempurnakan dengan perubahan terakhir yaitu Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie, karena saat ini norma lingkungan hidup telah diadopsikan ke dalam ketentuan konstitusi,³⁵ "Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", <https://new-berkeley.wordpress.com/2011/07/29/makalah-pembangunan-berkelanjutan-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-oleh-dr-abdurrahman/> diakses pada 2 Januari 2021.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hal. 11.

33 Meirina Fajarwati, "Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup," *Rechtsvinding* (Januari-Februari 2016): 7-8.

34 Andri G. Wibisana, "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya," *Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 1* (Januari-Maret 2013): 55

yaitu dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keharusan adanya wawasan lingkungan hidup menjadi bersifat mutlak.³⁷ Konsepsi melindungi dan memelihara kehidupan manusia atau lingkungan atau siklus lingkungan secara teratur dan pasti, dan dipatuhi dan dipatuhi oleh semua pihak, kemudian dimasukkan ke dalam dokumen hukum nasional untuk mencerminkan hukum yang didasarkan atau menghadapi kepentingan lingkungan (*environment oriented law*).³⁸

Surna T. Djajadiningrat berkeyakinan bahwa sumber daya, kualitas lingkungan dan faktor penduduk merupakan prasyarat atas proses pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut memperhatikan aspek yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Kebijakan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada wawasan lingkungan memiliki keharusan untuk memuat pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

Pengelolaan sumber daya alam harus direncanakan sesuai dengan toleransi lingkungan;

Melalui studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek, melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengendalikan proyek-proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan;

Mengutamakan penyelesaian masalah pencemaran air, udara dan tanah. Pengembangan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat bagi kestabilan lingkungan. Kerusakan lingkungan dikendalikan melalui pengelolaan DAS, restorasi dan reklamasi pembangunan

sebelumnya, serta pengelolaan wilayah pesisir dan laut;

Merumuskan kebijakan ekonomi yang mencakup faktor lingkungan, mengembangkan masyarakat, kelembagaan dan tenaga kerja untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan;

Mengesahkan hukum lingkungan dan mendorong lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan; Dany mengembangkan kerja sama luar negeri.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa ada keterkaitan antara “pembangunan berkelanjutan” dan “perlindungan lingkungan”. Ketika para aktor negara berkeinginan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, maka semua strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan membutuhkan tafsir khusus terhadap konstitusi. Hal tersebut harus dipahami semata-mata untuk mencegah terjadinya dampak negative yang lebih besar atas rusaknya alam dan lingkungan.³⁹

Untuk mengelola sumber daya alam dengan tepat, dibutuhkan strategi pembangunan yang memadukan ketiga aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Sehingga perlu adanya perhatian dalam empat pokok sebagai berikut:

Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial;

Pembangunan menuju kesetaraan dan keadilan sosial harus didasarkan pada kondisi sebagai berikut: pemerataan sumber daya lahan dan faktor produksi, pemerataan peran dan peluang perempuan, pertumbuhan ekonomi yang adil dan pemerataan kesejahteraan. Keadilan adalah konsep yang relatif dan

37 Jimly Asshdiqie, *Ibid*, hal. 152

38 Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), hal. 27

39 Surna T. Djajadiningrat, “Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan,” *Hukum Lingkungan Vol. 1, No. 1* (1994): 6-9.

tidak dapat diukur secara langsung. Aspek moral dari pembangunan berkelanjutan bersifat komprehensif, meskipun tingkat kesetaraan di banyak negara meningkat, namun kesenjangan pendapatan antara negara kaya dan miskin semakin lebar. Aspek moral lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan adalah bahwa prospek generasi mendatang tidak dapat dirusak oleh aktivitas masyarakat kontemporer. Artinya perkembangan masyarakat masa kini perlu memperhatikan mereka dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.

Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman;

Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan akses berkelanjutan ke sumber daya alam sekarang dan di masa depan. Keanekaragaman hayati juga menjadi dasar keseimbangan ekosistem. Menjaga keragaman budaya akan mendorong semua orang untuk diperlakukan setara dan memudahkan masyarakat memahami tradisi dari berbagai masyarakat.

Pembangunan dengan pendekatan integratif;

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan hubungan antara manusia dan alam. Gunakan hanya pemahaman konteks hubungan antara sistem alam dan sosial. Menggunakan definisi ini, realisasi pembangunan yang lebih lengkap merupakan konsep pembangunan yang layak, yang merupakan tantangan kelembagaan utama.

Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang;

Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan akses berkelanjutan ke sumber daya alam sekarang dan di masa depan. Keanekaragaman hayati juga menjadi dasar keseimbangan ekosistem. Menjaga

keragaman budaya akan mendorong semua orang untuk diperlakukan setara dan memudahkan masyarakat memahami tradisi dari berbagai masyarakat.⁴⁰

Dengan adanya empat komponen yang diperhatikan termasuk didalamnya aspek mengenai lingkungan sebagaimana amanah konstitusi maka pembangunan berkelanjutan dapat menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan sehingga pembangunan yang ada tetap terjamin bagi kelangsungan hidup generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Pembangunan dengan menjadikan sumber daya alam sebagai pondasi utama dalam upaya mesejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk menujur peradaban yang lebih modern. Tetapi seiring dengan pembangunan yang terus menerus terjadi dengan kebutuhan akan sumber daya meningkat dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas mengakibatkan merosotnya sumber daya alam bahkan kerusakan pencemaran lingkungan yang memperhatikan.⁴¹

Pada dasarnya Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meneruskan prinsip mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, bahkan lebih mempertajam sebagaimana dapat dilihat dalam konsideran Undang – Undang tersebut. Dinyatakan dalam konsideran Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga

40 Askar Jaya, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)* (Bogor: Isnstitut Pertanian Bogor, 2004), hal. 5-6.

41 Suardi B. Dg. Mallawa, "Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Sistem Hukum Lingkungan," *Penegakan Hukum Vol. 3, No. 2* (Juli 2006): 80.

negara Indonesia, begitu pula dengan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 dengan diselenggarakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Baik dalam tataran internasional maupun global, permasalahan mengenai meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dapat memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan perlu menjaga dan mengelola lingkungan secara hati-hati dan konsisten. Dalam penjelasan konsideran Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut diatas, menjelaskan besarnya perhatian negara melalui perwujudan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini juga yang mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan produk hukum, khususnya pada tingkatan teknis. Oleh karena itu, sebenarnya sangat mungkin untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, bukan sekedar konsep tertulis.⁴²

Tidak menutup kemungkinan walaupun negara Indonesia sudah menganut konsep pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan, adanya kelemahan-kelemahan dalam segi aturan maupun pelaksanaannya yang pada akhirnya menimbulkan konflik, kontradiksi, tumpang tindih dan inkonsistensi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain beberapa peraturan perundangan lingkungan hidup cenderung bersifat pragmatis, sekotral, dan parsial. Kemudian juga norma maupun prinsip wawasan lingkungan belum terurai dengan utuh.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat
42 Samsul Wahidin, *Ibid*, Hal. 143-144.

atau dampak negatif dari pembangunan adalah munculnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meski instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perangkat hukum ini dapat meminimalkan risiko ekologis akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan seluruh aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, harus dibarengi dengan upaya serius negara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku usaha lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁴³

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan keterbelakangan dan kemiskinan di Dunia Ketiga, Keterbelakangan ekonomi ini mengarah pada pendapatan rendah oleh karena itu perubahan harus dilakukan dan pertumbuhan ditingkatkan. Negara berkembang seperti Indonesia sangat menginginkan pembangunan industri untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional, sehingga manfaat lingkungan pada akhirnya tampaknya terabaikan.

. Mengenai berbagai dampak pembangunan terhadap kelangsungan hidup lingkungan, Jawahir Tontowi mengatakan: “Kalau tidak ada kemauan politik (*political will*) dari pemerintah dan persoalan kemiskinan, tidak cukup dengan mengumpulkan peraturan perundang-

43 Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hal. 28.

undangan.” Artinya, jika pemerintah tidak memiliki kemauan politik secara empiris, dapat ditegaskan bahwa sekalipun ada sarana hukum, upaya menjaga dan memelihara kualitas lingkungan tidak akan mencapai hasil yang maksimal dan dilengkapi pula dengan prinsip-prinsipnya yang menjadi dasar filosofis dan tindakan-tindakan di lapangan.⁴⁴

Hal ini sejalan dengan pandangan Siti Sundari Rangkuti bahwa keberadaan produk hukum saja tidak cukup untuk menjadi benteng pertahanan pencemaran. Undang-undang ini tetap harus dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang mampu dan sadar akan masalah lingkungan, dan didukung oleh perangkat penegakan hukum yang kuat (sering disebut sebagai “benteng terakhir” hukum yaitu, peradilan). Peran hukum dan peraturan lingkungan, peradilan dan lembaga pemerintah.⁴⁵

PENUTUP

Simpulan

Green Constitution atau yang lebih dikenal dengan pembangunan berwawasan lingkungan merupakan konsep dan gagasan yang menerapkan kedaulatan lingkungan atau *ecocracy*. *Green Constitution* dan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam Pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan untuk menciptakan suatu pembangunan yang berorientasi terhadap keseimbangan lingkungan dan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta mutu hidup generasi masa kini dan

generasi masa mendatang.

Norma yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memang telah di adopsi dalam UUD 1945 tetapi hal tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan ditambah lagi tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang tidak memuat secara optimal materi muatan dalam pengaturan mengenai aturan terkait dengan lingkungan hidup.

Saran

Perlu adanya penguatan terhadap norma lingkungan hidup secara rinci, tegas dan jelas terutama pada UUD 1945, dengan memberikan penguatan norma pada UUD 1945 maka peraturan perundang-undang dibawahnya akan mengikuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atmadja, I Dewa Gede *Hukum Konstitusi, Perubahan Konstitusi dari sudut Pandang Perbandingan*. Denpasar: Bali Aga, 2006.

_____. I Dewa Gede. *Ilmu Negara, Dimensi Historis Ketatanegaraan*. Malang: Setara Press, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009.

_____. Jimly. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Danusaputro, St. Munadjat. *Hukum Lingkungan*. Bandung, Bina cipta, 1981.

Effendi, Masyhur. *Prinsip-prinsip Dasar HAM dan Hukum Lingkungan Hidup*. Malang: FH Universitas Brawijaya, 1986.

_____. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri. *HAM Dalam Dimensi/*

44 Moh. Fadli, et. al, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), hal. 163.

45 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 20.

- Dinamika Yuridis, Sosial, Politik (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Fadli, Moh. Et. al. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Jaya, Askar. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Bogor: Isnstitut Pertanian Bogor, 2004.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987.
- _____. Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1995.
- _____. Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1995.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- _____. Bagir. *Politik Perundang undang dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNLA, 1996.
- MD, Moh Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Reneka Cipta, 2001.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Rajagukguk, Erman dan Ridwan Khairandy. *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Riyadi, Eko. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Saleh, M. Ridha. *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional*. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Soemardi. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syahrin, Alvi et. al. *Dinamika Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi Hijau*. Bandar Lampung: Indepth, 2015.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Jurnal:

- Djajadiningrat, Surna T. "Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan." *Hukum Lingkungan Vol. 1. No. 1* (1994): 6-9.
- Fajarwati, Meirina. "Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup." *Rechtsvinding* (Januari-Februari 2016): 7-8.
- Prakoso, Lucas. "Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan)." *Hukum dan Peradilan Vol. 3. No. 2* (Juli 2014): 134.
- Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Konstitusi Vol. 7. No. 4* (agustus 2010): 113-130.
- Mas'ari, Ahmad. "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *SNTIKI* (2017): 717.
- Mallawa, Suardi B. Dg. "Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Sistem Hukum Lingkungan." *Penegakan Hukum Vol. 3. No. 2* (Juli 2006): 80.
- Mohammad Faiz, Pan. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Konstitusi Vol. 1. No. 4* (Desember 2016): 767
- Ngoyo, Muhammad Fardan. "Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan." *Sosireligius Vol. 1. No. 1* (Juni 2015): 81.
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* Dalam Rangka Eco-Democracy." *Ilmu Hukum Vol. 1. No. 1* (Juni 2015): 200.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Pro Justisia Vol. 25. No.3* (2007): 272.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Waas, Richad V. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia." *Sasi Vol. 20. No. 1* (Januari-Juni 2004): 83.
- Wibisana, Andri G. "Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004." *Konstitusi Vol. 8. No. 3* (Juni 2011): 209.
- Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 1* (Januari-Maret 2013): 55
- Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *konstitusi Vol. 15. No. 2* (Juni 2018): 310.
- Undang-Undang:
Indonesia. *Undang – Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No . 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059.
- Internet:
"Prinsip - Prinsip Pembangunan Berkelanjutan." <https://bangazul.com/prinsip-prinsip-pembangunan-berkelanjutan/>. 2 Januari 2021.
- "Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", <https://newberkeley.wordpress.com/2011/07/29/makalah-pembangunan-berkelanjutan-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-oleh-dr-abdurrahman/> diakses pada 2 Januari 2021.

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Jigsaw Dalam Mata Pelajaran IPA Studi Di Kelas V SD Negeri I Poopo, Bolmong, Sulut

Brianne Eucleysia Jo Komedi^{1*}, Lady Grace Jane Giroth²,

Viktory Nicodemus Joufree Rotty¹, Felly Ferol Warouw¹

¹Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

²Universitas Teknologi Sulawesi Utara, Manado, Indonesia

*brianne.komedi@unima.ac.id¹, ladygiroth@utsu.ac.id², viktoryrotty@unima.ac.id³,
ferolwarouw@unima.ac.id⁴

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peningkatan hasil belajar siswa melalui metode jigsaw. Metode Jigsaw adalah metode belajar kooperatif. Diharapkan setelah diterapkannya metode tersebut dapat berdampak positif terhadap hasil belajar. Konsep pembelajaran inovatif dengan metode jigsaw kelihatannya akan mendorong guru dan peserta didik melaksanakan praktek pembelajaran secara aktif dan kreatif sehingga diharapkan dapat tercapainya peningkatan hasil pembelajaran. Masalah yang diteliti berdasarkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA merupakan indikasi bahwa pelajaran yang dilaksanakan selama ini perlu dikembangkan. Rumusan masalahnya adalah Apakah Penggunaan Model Pembelajaran Jigsaw Dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA studi dilakukan pada kelas V di SD Negeri I Poopo Tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dipelajari melalui proses siklus belajar. Dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi dan metode tes yang di gunakan untuk menunjang penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran jigsaw yang di terapkan pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pada siklus I dan siklus II dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Pada siklus I pertemuan pertama siswa yang mencapai ketuntasan berjumlah 4 siswa dan yang belum mencapai ketuntasan 11 siswa. Pada siklus II siswa yang mencapai ketuntasan berjumlah 9 dan yang belum mencapai ketuntasan 6 siswa. Kondisi ini menunjukkan metode jigsaw dapat digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Kata Kunci: Identifikasi, Kepala Sekolah, Manado

1. Pendahuluan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan (Sunaryo, 2014). Era globalisasi memberikan dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada penyelenggaraan pendidikan, maka literasi sains siswa yang meliputi pengetahuan tentang sains, proses sains, pengembangan sikap ilmiah, dan pemahaman peserta didik terhadap sains dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai akhlak (Mukti, 2018). Salah satu wahana untuk meningkatkan SDM tersebut adalah faktor penentu SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan (Setiawan, 2013). Sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki rasionalitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki Indonesia untuk survive di era globalisasi. Namun demikian kebijakan pembangunan yang selama ini ditempuh Indonesia justru telah menempatkan pengembangan sumber daya manusia dalam area subordinatif dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga upaya pengembangan yang dilakukan tidaklah memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pemaknaan sumber daya manusia dalam hirarki semacam ini tentunya menempatkan Indonesia pada posisi rawan dalam kancah persaingan global. Kondisi inilah yang mendorong beralihnya paradigma pembangunan Indonesia pada paradigma human-centered development yang memberikan penekanan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kritis dan inovatif agar mampu mengaktualisasikan potensi diri sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya (Si-

lalahi, 2003).

Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan semua bidang kehidupan manusia di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, keterampilan, berakhlak mulia, kesejahteraan, budaya dan kejayaan bangsa. Namun jika pendidikan nasional tidak dibarengi dengan nilai-nilai moral, norma dan aturan yang mengikat sebagai proses koreksi atas kemajuan pendidikan serta tantangan yang datang dari dalam maupun luar. Pendidikan nilai sebagai sarana untuk mengontrol, mengevaluasi, yang tidak diinginkan oleh dunia pendidikan. Kurikulum pendidikan seharusnya sesuai dengan perkembangan zaman yang berbasis kehidupan dinamis dan tidak bersifat statis menuju hakekat utama dalam pendidikan yakni memanusiakan manusia (Ilham, 2019). Perumusan sistem pendidikan nasional membutuhkan pemikiran yang mendalam, yaitu sampai ke pertimbangan landasan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (Soeprapto, 2013).

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar, dan lingkungan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru (Hanafy, 2014). Tiga kata kunci dalam pembelajaran begitu penting, yakni: proses interaksi, sumber belajar dan lingkungan, serta pengetahuan dan keterampilan baru.

Merencanakan masa depan intinya adalah pendidikan, dalam pendidikan intinya adalah pembelajaran, dalam pembelajaran yang dibahas adalah kegiatan belajar (Severinus, 2013).

Dari sisi etimologi Jigsaw berasal dari bahasa inggris yaitu gergaji ukir dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah Fuzzle, yaitu sebuah teka teki yang menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini juga mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji (jigsaw), yaitu siswa melakukan sesuatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama (Sasmito, 2020). Jigsaw merupakan merupakan metode dari pembelajaran kooperatif yang didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain (Darmuki & Hariyadi, 2019). Metode jigsaw merupakan metode yang sangat colaborative karena dalam metode ini siswa di haruskan bekerjasama dalam kelompok sehingga dengan metode ini dapat membantu kinerja guru dalam membangun karakteristik kerjasama yang baik antar anggota (Kusuma, 2018).

Model pembelajaran kooperatif model jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil (Suryani & Aman, 2019). Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas empat sampai dengan enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri (Astuti & Widiyana, 2017).

Tugas pendidik atau guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang dapat membuat siswa untuk senantiasa belajar dengan terjadi interaksi dan bersemanga-

t (Hewi & Asnawati, 2020). Guru sebaiknya memiliki kemampuan dalam memilih metode atau strategi pembelajaran yang tepat (Monawati & Fauzi, 2018). Ketidaktepatan dalam penggunaan metode atau strategi pembelajaran akan menimbulkan kejenuhan bagi siswa dalam menerima materi yang disampaikan sehingga materi kurang dapat di pahami yang akan mengakibatkan siswa menjadi kurang aktif. Oleh karena itu guru tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan mengajar tetapi juga mewujudkan kompleksitas peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang di kembangkan secara kreatif (Septiati, 2018). Guru sebagai subjek dalam pendidikan harus mampu mentransportasikan proses belajar mengajar di dalam kelas yang menjadi proses belajar mengajar yang efektif karena dalam proses belajar mengajar guru harus memperhatikan beberapa hal yaitu: “rendahnya hasil belajar siswa pada bidang studi ilmu pengetahuan alam dan penguasaannya terhadap proses belajar mengajar didalam kelas IPA atau sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Pandangan ahli mengenai pengertian IPA atau Sains sendiri cukup beragam seperti IPA adalah pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam semesta dengan segala isinya (Sari & Asmendri, 2020). Ada lagi pandangan bahwa Sains adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap kegiatan tersebut.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan di SD N 1 Poopo dengan seorang guru kelas V, dari jumlah keseluruhan siswa kelas V yaitu 15 orang, 10 orang siswa laki-laki dan 5 orang siswa perempuan, hanya 4 orang siswa yang tuntas dalam mata

pelajaran IPA, itu pun nilai mereka hanya mencapai standar KKM yaitu 3 Orang yang mendapat nilai 75 dan 1 orang mendapat nilai 80. Berdasarkan jawaban yang diajukan peneliti mengenai masalah tersebut dan bagaimana cara guru mengajar terungkap bahwa guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode yang sederhana yaitu metode ceramah di karenakan guru tersebut kurang membaca tentang strategi-strategi pembelajaran bahkan guru disekolah tersebut tidak mengetahui beberapa strategi terbaru dalam proses pembelajaran maka dalam proses belajar mengajar yang mengakibatkan peserta didik kurang aktif dan kejenuhan dalam proses pembelajaran khususnya kelas V. Dirasa guru tersebut khususnya wali kelas V dengan metode yang sederhana ini guru tersebut bisa melihat langsung dan memantau jika ada kebandelan dari peserta didik tersebut khususnya kelas V. Berdasarkan masalah diatas akhirnya peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan untuk mengatasi masalah tersebut melalui penelitian ini.

2. Metode

Tujuan dari tulisan ini adalah melakukan Identifikasi Bentuk Komunikasi Interpersonal dalam meningkatkan Kinerja Kepala SMA Kota Manado. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peneliti dengan upaya meningkatkan hasil belajar. Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari : a) *planning* (perencanaan), b) *action* (pelaksanaan), c) *observing* (observasi/pengumpulan data), d) *reflecting* (penganalisis data/informasi untuk memutuskan sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut).

Tempat penelitian ini adalah SD Negeri 1 Poopo yang beralamatkan di Desa Poopo.

Pelaksanaan penelitian pada bulan februari 2021.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Sekolah SD N 1 Poopo adalah Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, mandiri dan berwawasan global dengan misi Untuk Mewujudkan Visi Sekolah maka menentukan langkah – Langkah dinyatakan dalam misi sebagai berikut; (1) Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. (2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan, (3) Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik, (3) membina peserta didik melalui kegiatan – kegiatan dan pengembangan diri yang terencana. (4) Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga yang terkait. Tujuan Sekolah Mengacu pada rumusan visi dan misi tersebut maka tujuan pendidikan pada SD N 1 Poopo dirumuskan sebagai berikut; (1) Menanamkan perilaku mulia serta kepribadian yang utuh bagi peserta didik, (2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik, (3) Menjadi sekolah yang diminati masyarakat, (4) Mengembangkan keterampilan peserta didik agar mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Menanamkan kesadaran terhadap tenaga pendidik dan peserta didik tentang pentingnya mengembangkan diri agar mampu mandiri dengan memiliki kreatifitas dan bertanggung jawab. (6) Menjalin kerja sama dengan institut lain khususnya dalam hal meningkatkan ketrampilan dan kecakapan peserta didik (7) Menjalin kerja sama antar warga sekolah dan masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang “ bersinar terang (Bersih, Indah, Asri, Tertib, Aman, Nyaman dan Tenang.

Analisis Hasil Pelaksanaan Metode

Jigsaw

Terdapat tiga indikator kinerja, yaitu: (1) hasil kerja individu (*individuals task outcomes*), (2) perilaku yang sering dilakukan (*behaviors*), dan (3) karakter individual (*traits*). Hasil kerja individual tergantung pada perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Perilaku dimaksud ialah perilaku yang berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan. Pada prinsipnya kinerja mengarah pada suatu upaya pencapaian prestasi kerja yang lebih baik. Keberhasilan dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja. Kinerja adalah hasil dari

suatu aktivitas atau pekerjaan. Demikian juga Bernardin dan Russel dalam Ruky, menyatakan "*performance is the record of outcome produced on a specified job function or activity during a specified time period*". Dari pengertian tersebut, terdapat tiga aspek yang perlu dipahami oleh setiap guru kepada siswanya, yaitu: (1) kejelasan tugas yang menjadi tanggung jawab, (2) kejelasan hasil yang diharapkan oleh organisasi, dan (3) waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pelaksanaan penelitian ini merupakan kerjasama peneliti dengan Wali Kelas V SD Negeri 1 Poopo untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Pelaksanaan siklus I

Tabel Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri Poopo Siklus I

No.	N Nama Peserta didik	Nilai		
		KKM	Siklus I	Keterangan
1	VM	70	75	Tuntas
2	LK	70	65	Tidak Tuntas
3	SM	70	80	Tuntas
4	DM	70	65	Tidak Tuntas
5	SL	70	65	Tidak Tuntas
6	GS	70	65	Tidak Tuntas
7	JK	70	65	Tidak Tuntas
8	QL	70	75	Tuntas
9	KM	70	75	Tuntas
10	MR	70	60	Tidak Tuntas
11	NL	70	60	Tidak Tuntas
12	SK	70	65	Tidak Tuntas
13	KA	70	65	Tidak Tuntas
14	TW	70	65	Tidak Tuntas
15	GL	70	60	Tidak Tuntas
Peserta didik yang tuntas				4
Peserta didik tidak tuntas				11

Pelaksanaan siklus II

Tabel Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V
SD Negeri Poopo Siklus II

No	Nama Peserta didik	Nilai		
		KKM	Siklus II	Keterangan
1	VM	70	80	Tuntas
2	LK	70	60	Tidak Tuntas
3	SM	70	75	Tuntas
4	DM	70	65	Tidak Tuntas
5	SL	70	75	Tuntas
6	GS	70	65	Tidak Tuntas
7	JK	70	65	Tidak Tuntas
8	QL	70	75	Tuntas
9	KM	70	75	Tuntas
10	MR	70	80	Tuntas
11	NL	70	75	Tuntas
12	SK	70	80	Tuntas
13	KA	70	75	Tuntas
14	TW	70	65	Tidak Tuntas
15	GL	70	60	Tidak Tuntas
Peserta didik yang tuntas				9
Peserta didik tidak tuntas				6

Perbandingan Siklus I dan II

Berdasarkan refleksi siklus I, direkomendasikan perbaikan untuk pertemuan kedua yaitu sebagai berikut:

Memperhatikan kinerja yang sudah baik pada proses pembelajaran untuk tetap dilakukan pada pertemuan selanjutnya.

Peneliti memberi pemahaman lebih dalam cara kerja kelompok dalam metode pembelajaran jigsaw

Memotivasi peserta didik agar bisa bekerja sama dengan kelompoknya.

Peneliti lebih meningkatkan pengelolaan kelas.

Pada tahap refleksi siklus II,

diidentifikasi kelemahan yang terdapat pada pembelajaran siklus I :

Masih ada beberapa siswa yang mengobrol pada saat Peneliti menjelaskan materi.

Terdapat siswa yang membuka buku catatan pada saat mengerjakan soal individu

Masih ada siswa yang keluar masuk kelas secara berkelompok

Guna peningkatan partisipasi siswa siklus II maka dilakukan kegiatan:

Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang mengobrol sebagai

hukuman.

- Memberikan pertanyaan kepada siswa yang keluar masuk kelas.
- Mengumpulkan buku catatan siswa pada saat akan mengerjakan soal individu dan pos tes.
- Tidak mengizinkan siswa keluar masuk kelas secara berkelompok pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa data membuktikan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Kelas V di SD Negeri I Poopo, dapat di simpulkan sebagai berikut penerapan metode pembelajaran *Jigsaw* dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dapat dari indikasi peningkatan pada setiap siklus, yaitu pada siklus I pertemuan pertama siswa yang tuntas berjumlah 4 sedangkan yang tidak tuntas 11 kemudian meningkat pada siklus II jumlah siswa yang tuntas 6 dan yang tidak tuntas 9 siswa.

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Metode Pembelajaran Jigsaw maka dapat diajukan saran-saran dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi beberapa pihak antara lain jika hasil penelitian ini dijadikan pedoman oleh lembaga pendidikan untuk selalu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik, sebab untuk mencapai hasil belajar siswa secara maksimal perlu adanya motivasi yang tinggi dari peserta didik itu sendiri.

Acknowledgements

Hasil penelitian mengenai Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Jigsaw Dalam Mata Pelajaran IPA Studi Di Kelas V SD Negeri I Poopo, telah dapat tersusun. Atas hasil tersebut, penulis ingin mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah

turut serta dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada mereka yang terlibat dalam rangka merumuskan hasil penelitian dan implikasinya untuk kemajuan proses pendidikan di Indonesia khususnya Sulawesi Utara.

References

- Astiti, D. K. S., & Widiani, I. W. (2017). Penerapan Metode Pembelajaran Jigsaw Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV SD. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.23887/jisd.v1i1.10125>
- Darmuki, A., & Hariyadi, A. (2019). PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MENGGUNAKAN METODE KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA MAHASISWA PBSI TINGKAT I-B IKIP PGRI BOJONEGORO TAHUN AKADEMIK 2018/2019. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 2(2), 256–267. <https://doi.org/10.24176/kredo.v2i2.3343>
- Hanafy, M. S. (2014). KONSEP BELAJAR DAN PEMBELAJARAN. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66–79. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n1a5>
- Hewi, L., & Asnawati, L. (2020). Strategi Pendidik Anak Usia Dini Era Covid-19 dalam Menumbuhkan Kemampuan Berfikir Logis. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 158–167.
- Ilham, D. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122.
- Kusuma, A. W. (2018). Meningkatkan Kerjasama Siswa dengan Metode Jigsaw. *Konselor*, 7(1), 26–30. <https://doi.org/10.24036/02018718458-0-00>

- Monawati, M., & Fauzi, F. (2018). HUBUNGAN KREATIVITAS MENGAJAR GURU DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA. *Jurnal Pesona Dasar*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24815/pear.v6i2.12195>
- Mukti, F. D. (2018). INTEGRASI LITERASI SAINS DAN NILAI-NILAI AKHLAK DI ERA GLOBALISASI. *Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 318–338. <https://doi.org/10.36768/abdau.v1i2.18>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sasmito, L. F. (2020). Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Jigsaw Pada Pelajar IPA Kelas V SD Negeri Malang Jiwan 3 Colomadu 2018/2019. *JURNAL MITRA SWARA GANESHA*, 7(1), 9–18.
- Septiati, E. (2018). PERAN GURU DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013. *Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang*, 0, Article 0. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/prosiding/article/view/2142>
- Setiawan, D. (2013). REORIENTASI TUJUAN UTAMA PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF GLOBAL. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v5i2.1115>
- Severinus, D. (2013, September 29). PEMBELAJARAN FISIKA SETURUT HAKEKATNYA SERTA SUMBANGANNYA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER SISWA. *Lpf2013*. lpf2013. <http://prosiding.upgris.ac.id/index.php/lpf2013/lpf2013/paper/view/121>
- Silalahi, U. (2003). RELEVANSI KEBIJAKAN HUMAN-CENTERED DEVELOPMENT DAN PERBAIKAN KUALITAS PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), Article 1. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/641>
- Soeprapto, S. (2013). LANDASAN AKSIOLOGIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN. *Cakrawala Pendidikan*, 2, Article 2. <https://doi.org/10.21831/cp.v0i2.1485>
- Sunaryo, B. (2014). NILAI PENTING KONSEP AFFIRMATIVE ACTION POLICY DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR BERBASIS MERIT. *Civil Service Journal*, 8(1 Juni), Article 1 Juni. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/75>
- Suryani, E., & Aman, A. (2019). Efektivitas pembelajaran IPS melalui implementasi metode jigsaw ditinjau dari aktivitas dan hasil belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(1), 34–48. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i1.17376>

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ASURANSI TRISAKTI

Ade Irma Hayati, S.E., M.M.¹,
Dr. Mardi Siswoyo, M.M.², Dr. (C) Ir. Jones Zenas Rante, M.M.³
Institut Bisnis dan Multimedia ASMI
adhe011083@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen sumber daya manusia dilakukan dalam upaya untuk mengukur seberapa jauh sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh seberapa baik komitmen organisasi para karyawan. Oleh karena itu Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompensasi terhadap komitmen organisasi secara parsial dan secara simultan di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Jumlah populasi dan sampel seluruh karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang berjumlah 37 orang. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang diolah menggunakan SPSS.25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen Organisasi, sedangkan Lingkungan Kerja secara Parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Komitmen Organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikansi (α) = 0.05 (5%) diketahui nilai t-tabel 2.034, Gaya Kepemimpinan memiliki nilai t-hitung 3.153 dan Kompensasi memiliki nilai t-hitung 2.227 lebih besar dari nilai t-tabel, sedangkan Lingkungan Kerja memiliki nilai t-hitung 0.406 lebih kecil dari nilai t-tabel. Secara simultan Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Komitmen Organisasi, dibuktikan dengan hasil nilai f hitung 17.566 lebih besar dari nilai f tabel 2.88.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kompensasi.

ABSTRACT

Human resource management is done in an effort to measure how far an organization can achieve its goals, it can be influenced by how well the organization's commitment of employees. Therefore, this research was conducted with the aim of knowing the influence of leadership style, work environment and compensation on organizational commitments partially and simultaneously in trisakti Insurance Management College. The method in this study is a quantitative method with the statistical method used is multiple linear regression analysis. The number of population and sample of all employees of Trisakti Insurance Management College amounted to 37 people. Data collection instruments in

the form of questionnaires processed using SPSS.25. The results showed that: Partial Leadership and Compensation Styles have a positive and significant influence on Organizational Commitment, while the Work Environment partially has no significant influence on organizational commitment. This is evidenced by the level of significance (α) = 0.05 (5%) known t-table value 2,034, Leadership Style has a t-count value of 3,153 and Compensation has a t-count value of 2,227 greater than the value of t-table, while the Work Environment has a t-count value of 0.406 smaller than the value of the t-table. Simultaneously Leadership Style, Work Environment and Compensation have a positive and significant influence on Organizational Commitment, evidenced by the result of f calculated 17,566 greater than the value f table 2.88.

Keywords: Human Resources, Organizational Commitment, Leadership Style, Work Environment, Compensation

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan manusia secara tunggal yang memiliki keinginan, keterampilan, dorongan, pengetahuan, akal, perasaan (rasio, karya, rasa). (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, karena merupakan kunci dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam perkembangannya pengelolaan sumber daya manusia saat ini sumber daya manusia tidak lagi dianggap sebagai fungsi penunjang (supporting), tetapi sebagai sumber kunci/aset keberhasilan suatu organisasi (Hariandja,2002).

Karena keberhasilan perusahaan bergantung pada perkembangan para karyawan itu sendiri, maka dari itu sebuah organisasi memerlukan karyawan yang memiliki komitmen tinggi dan loyalitas terhadap pekerjaan dan organisasinya. manajemen sumber daya manusia dilakukan dalam upaya untuk mengukur seberapa jauh sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya, seberapa baik komitmen para pekerja terhadap tugas pekerjaannya, seberapa besar organisasi dapat mentoleransi adanya perubahan perilaku karyawan, dalam membuat keputusan dengan cepat serta mampu mengambil langkah yang tepat dalam

memecahkan sebuah masalah dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi.

Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (STMA Trisakti) adalah lembaga pendidikan tinggi formal di bidang asuransi yang pertama di Indonesia terakreditasi oleh BAN-PT. Dalam proses pengelolaan sumber daya manusia di STMA Trisakti memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia dalam mengatasi permasalahan yang timbul guna meningkatkan Komitmen Organisasi dari para karyawannya

Komitmen Organisasi merupakan keterikatan emosional, pengidentifikasian dan keterlibatan karyawan terhadap organisasi. Komitmen Organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam pencapaian visi, misi, nilai dan tujuan organisasi. Seperti definisi dari (Kurniawan, 2011) bahwa seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Banyaknya jumlah karyawan yang me-

ngundurkan diri atau tidak bertahan di STMA Trisakti setiap tahunnya menunjukkan menurunnya komitmen yang dimiliki karyawan tersebut. Hal ini pastinya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya sehingga karyawan tidak memiliki rasa kepercayaan dan semangat untuk tetap bertahan dan bekerja di STMA Trisakti. Menurunnya tingkat komitmen karyawan pastinya akan menurunkan pula tingkat produktivitas kerja, dan menunjukkan buruknya kualitas manajerial yang ada dalam mengelola sumber daya manusianya. Kurangnya sumber daya manusia berakibat pada pemberian tugas yang berlebih dan diluar kemampuan yang dimiliki karyawan tentunya ini juga akan membuat ketidaknyamanan bagi karyawan dalam bekerja dan menurunkan keyakinan dan keinginannya untuk berkomitmen. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi manajemen untuk dapat mengelola kebutuhan sumber daya manusia secara efektif bukan hanya kebutuhan efisiensi saja tentunya.

Seorang Pemimpin memiliki peranan penting untuk mengendalikan suatu organisasi. Peranan seorang pemimpin sangat menentukan kegagalan atau keberhasilan suatu organisasi. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka seorang pemimpin perlu menerapkan kepemimpinan secara baik dan benar. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengelola, mengarahkan, mempengaruhi, memerintah dan memotivasi bawahannya untuk memperoleh tujuan yang diinginkan organisasi.

Gaya Kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan karyawan dalam sebuah organisasi dengan para pemimpinnya Chiang dan Wang (2012). Menurut (Edison dkk 2017:91) mengatakan bahwa "Gaya Kepemimpinan adalah cara pemimpin bertindak atau bagaimana ia memengaruhi anggotanya untuk menca-

pai tujuan-tujuan tertentu.

Pada dasarnya tidak semua Gaya Kepemimpinan akan memiliki kecocokan untuk semua kondisi. Gaya Kepemimpinan yang ada saat ini di STMA Trisakti belum terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan sehingga tidak adanya kerjasama dalam penyelesaian tugas berakibat banyak tugas maupun pekerjaan yang terlambat penyelesaiannya.

Kondisi Lingkungan Kerja dikatakan baik atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan Kerja yang memuaskan akan dapat meningkatkan Komitmen Organisasi karyawan, dimana karyawan akan tetap setia dan berusaha mempertahankan statusnya sebagai karyawan di STMA Trisakti.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Komitmen Organisasi adalah Kompensasi, karena setiap orang yang bekerja berharap dapat memenuhi kebutuhannya dengan memperoleh gaji dan upah yang diharapkannya. Menurut Simamora (2004) bahwa Kompensasi yang baik adalah sistem Kompensasi yang tanggap terhadap situasi dan sistem yang dapat memotivasi dan memberikan kepuasan kepada para karyawannya. Kompensasi yang adil akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi, yang berdampak pada meningkatnya komitmen pegawai pada organisasinya (Sudarwanti, 2007).

Pemberian Kompensasi di STMA Trisakti dirasa belum Cukup Baik adil dan merata dikarenakan belum adanya pengukuran yang tepat atas pemberian Kompensasi berdasarkan nilai kinerja yang dihasilkan karyawan. Pemberian Kompensasi yang tidak sesuai dan kurangnya penghargaan atas kinerja yang diberikan oleh karyawan pastinya berakibat pada menurunnya semangat yang dimiliki karyawan untuk bekerja secara produktif dan menghilan-

gkan rasa kepercayaan maupun keinginan karyawan untuk berkomitmen. Namun ada kemungkinan juga beberapa karyawan yang memutuskan untuk tetap berkomitmen walaupun Kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan karena sudah tidak memiliki semangat untuk mencari pekerjaan di tempat lain karena kondisi tertentu atau karena merasa kewajiban untuk tetap berada dalam perusahaan tersebut karena ia dibutuhkan dan ada pula yang berkomitmen karena apabila dia meninggalkan tempat kerja yang sekarang akan menambah biaya yang lebih besar dibanding tetap bekerja tempat sekarang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada tersebut, maka penulis ingin mengetahui dan perlu mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Komitmen Organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti.

METODE

Jenis metode yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta hasil yang akan disajikan (Arikunto, 2006:12). Pendekatan metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuisioner. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sensus.

Menurut Arikunto (2006:2) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan STMA Trisakti yang berjumlah 37 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Karena jumlah populasi yang ada relatif sedikit atau mudah

dijangkau maka total keseluruhan populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian, maka jumlah sample yang digunakan dari keseluruhan populasi yang ada sebanyak 37 orang dengan menggunakan metode total sampling atau sensus.

Dalam penelitian ini variabel Independen adalah Gaya kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja (X2), Kompensasi (X3) dan variabel Dependen adalah Komitmen organisasi (Y). Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder melalui Observasi, Penelitian Pustaka, Dokumentasi dan Kuisioner. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden. Data dalam penelitian ini berbentuk skala ordinal, dimana skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada rangking yang di urutkan dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang sampai jenjang yang lebih rendah atau sebaliknya dengan menggunakan skala pengukuran linkert.

Tabel 3.3

Kriteria Skala Linkert

Bobot Nilai	Positif	Negatif
5	Sangat setuju	Sangat tidak setuju
4	Setuju	Tidak setuju
3	Cukup Baik Setuju	Cukup Baik Setuju
2	Tidak setuju	Setuju
1	Sangat tidak setuju	Sangat setuju

Sumber : Diolah peneliti, 2022

Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Dalam perhitungan pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu yang berupa program aplikasi SPSS versi 25.0.

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi, Sugiyono (2012:147). Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kekuatan dari masing masing indikator yang ada dalam variabel itu sendiri.

Analisis statistik yang digunakan yaitu analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel yang berupa pendugaan atau peramalan dari Gaya Kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja (X2), Kompensasi (X3) dan satu variabel Komitmen Organisasi (Y), Analisis Koefisiensi Korelasi untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah antara kedua variabel, Analisis kesesuaian model digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah sangat baik untuk dapat digunakan dan Uji Hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji f).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden diperlukan untuk memberi gambaran umum tentang responden yaitu karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang berjumlah 37 orang dengan rincian data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden

No	Parameter	Jumlah	Presentasi
Jenis kelamin			
1	Pria	23	62.2%
2	Wanita	14	37.8%
Usia			
1	< 25 tahun	1	2.7%
2	25 tahun s/d 35 tahun	16	43.3%
3	36 tahun s./d 45 tahun	6	16.2%
4	46 tahun s/d 55 tahun	7	18.9%

5	> 55 tahun	7	18.9%
Pendidikan			
1	SMA	5	13.5%
2	Diploma	3	8.1%
3	Sarjana	12	32.4%
4	Magister	16	43.3%
5	Doktor	1	2.7%
Lama Bekerja			
1	< 1 tahun	1	2.7%
2	1 tahun s/d 5 tahun	14	37.9%
3	5 tahun s/d 10 tahun	7	18.9%
4	10 tahun s/d 20 tahun	4	10.8%
5	> 20 tahun	11	29.7%

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih banyak kaum pria dengan jumlah 62,2%. Berdasarkan usia, mayoritas berumur 25 – 35 tahun dengan jumlah 43,3% . Berdasarkan pendidikan mayoritas adalah Magister dan Sarjana hal itu sesuai dengan jumlah Latar belakang pendidikan Magister berjumlah 43,3% dan Sarjana sejumlah 32,4%, Sedangkan berdasarkan lama bekerja dapat

dilihat bahwa mayoritas karyawan didominasi oleh karyawan dengan lama bekerja selama 1 tahun s/d 5 tahun sejumlah 37,9%.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran

umum kondisi dari masing-masing variabel pada penelitian ini.

Tabel 4.42
Rekap Nilai Indikator
Masing-masing Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Index	Keterangan
Gaya Kepemimpinan (X1)	Kemampuan Mengambil Keputusan (X1.1)	3.83	Baik
	Kemampuan Mengambil Keputusan (X1.2)	3.46	Cukup Baik
	Kemampuan Memotivasi (X1.3)	3.86	Baik
	Kemampuan Memotivasi (X1.4)	4.08	Baik
	Tanggung Jawab (X1.5)	3.86	Baik
	Tanggung Jawab (X1.6)	4.03	Baik
	Kemampuan Berkomunikasi (X1.7)	3.49	Cukup Baik
	Kemampuan Berkomunikasi (X1.8)	3.70	Baik
	Kemampuan Berkomunikasi (X1.9)	3.76	Baik
	Mengendalikan Bawahan (X1.10)	3.68	Baik
	Mengendalikan Bawahan (X1.11)	3.59	Baik
	Mengendalikan Bawahan (X1.12)	3.70	Baik
	Kemampuan Mengendalikan Emosional (X1.13)	3.81	Baik
	Kemampuan Mengendalikan Emosional (X1.14)	3.70	Baik
Rata-Rata		3.75	Baik

Lingkungan Kerja (X2)	Pencahaya-an Ruangan (X2.1)	4.00	Baik
	Ventilasi Udara (X2.2)	3.92	Baik
	Tingkat Kebisingan (X2.3)	3.78	Baik
	Tata Warna (X2.4)	3.54	Baik
	Penataan Ruang (X2.5)	3.43	Cukup Baik
	Keamanan (X2.6)	3.92	Baik
	Hubungan Karyawan (X2.7)	3.70	Baik
	Hubungan Karyawan (X2.8)	3.78	Baik
Rata-Rata		3.76	Baik
Kompensasi (X3)	Gaji (X3.1)	3.00	Cukup Baik
	Gaji (X3.2)	3.16	Cukup Baik
	Insentif (X3.3)	3.11	Cukup Baik
	Insentif (X3.4)	3.97	Baik
	Bonus (X3.5)	3.27	Cukup Baik
	Bonus (X3.6)	4.27	Baik
	Upah (X3.7)	3.35	Cukup Baik
	Premi (X3.8)	3.35	Cukup Baik
	Premi (X3.9)	3.65	Baik
	Pengobatan (X3.10)	3.76	Baik
	Pengobatan (X3.11)	3.49	Cukup Baik
Rata-Rata		3.49	Cukup Baik
Komitmen Organisasi (Y)	Kemauan Karyawan (Y1)	4.24	Baik
	Kemauan Karyawan (Y2)	3.51	Baik
	Kesetiaan Karyawan (Y3)	3.57	Baik
	Kesetiaan Karyawan (Y4)	2.92	Cukup Baik
	Kebanggaan Karyawan (Y5)	3.76	Baik
	Kebanggaan Karyawan (Y6)	3.54	Baik
	Kebanggaan Karyawan (Y7)	3.62	Baik
Rata-Rata		3.59	Baik

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022

Dari Tabel 4.42 Rekap nilai indikator masing-masing variabel penelitian diatas dapat dikatakan bahwa dari ketiga variabel penelitian tersebut, yaitu Gaya Kepemimpinan (X_1), Lingkungan Kerja (X_2) dan Komitmen Organisasi (Y) seluruhnya dapat dikatakan dalam kategori **Baik** sedangkan untuk Kompensasi (X_3) masuk dalam kategori **Cukup Baik**. Variabel Lingkungan Kerja (X_2) memiliki nilai index rata-rata yang hampir sama dengan nilai 3.76 dari Variabel Gaya Kepemimpinan (X_1) dengan nilai index rata-rata 3.75, namun Variabel Gaya Kepemimpinan (X_1) memiliki index rata-rata yang lebih besar dari Variabel Kompensasi (X_3) yang hanya memiliki nilai index rata-rata 3.49. Karena dalam kondisi pada indikator Variabel Kompensasi (X_3) dikatakan belum optimal (kategori Cukup Baik) maka variabel tersebut dapat menjadi sumber permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh fungsional antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Tabel 4.43

Korelasi Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	Std. Error	Beta		
B				

1	(Constant)	4.101	3.495		.249
	Gaya Kepemimpinan (X1)	.224	.071	.481	.003
	Lingkungan Kerja (X2)	.055	.135	.054	.687
	Kompensasi (X3)	.199	.089	.338	.033
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi (Y)					

Sumber : data diolah peneliti dengan spss.25 (2022)

Berdasarkan Tabel 4.43 diatas dapat dijelaskan bahwa Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan Variabel Kompensasi (X3) memiliki nilai Sig. < 0.05 yang dapat diartikan bahwa Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan Kompensasi (X3) berpengaruh signifikan pada Variabel Komitmen Organisasi (Y) sedangkan Variabel Lingkungan Kerja (X2) memiliki nilai Sig. > 0.05 yang dapat diartikan bahwa Variabel Lingkungan Kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Komitmen Organisasi (Y).

Adapun model Persamaan regresi linear berganda dari tabel diatas adalah $b_1 = 0,224$, $b_2 = 0,055$, dan $b_3 = 0,199$. Karena Variabel X_2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Y maka model dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1(X_1) + b_3(X_3)$$

$$Y = 4.101 + 0.224 (X_1) + 0.199 (X_3)$$

Analisis Koefisiensi Korelasi

Analisis Koefisiensi Korelasi adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel atau lebih dengan symbol huruf R. Besarnya koefisiensi korelasi adalah antara -1;0; dan +1” (Hasanah, 2016).

Tabel 4.44

Hasil Analisis Koefisiensi Korelasi Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.613	.590	2.837
a. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Gaya Kepemimpinan (X1)				

Sumber : data diolah peneliti dengan spss.25 (2022)

Dari Tabel 4.44 Hasil Analisis Koefisien Korelasi Determinan diatas diketahui hasil indeks R adalah sebesar 0.783 dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan secara bersama sama antara Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan Variabel Kompensasi (X3) memiliki hubungan yang kuat terhadap Variabel Y sebesar 0.783.

Analisis Kesesuaian Model

Hasil Analisis Koefisiensi Korelasi Determinan diketahui bahwa model tersebut mampu memprediksi atau nilai terkoreksi dari koefisien determinan (R^2 -adjusted) sebesar 0.590 artinya ketepatan model dalam menjelaskan keragaman data sebesar 59% sedangkan nilai R^2 (R Square) diketahui adalah 0.613, maka nilai koefisien determinasi sebesar $= 0.613 \times 100\% = 61,3\%$. yang artinya bahwa model regresi yang digunakan sudah memadai sebesar 61.3 % dimana Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi mempunyai pengaruh sebesar 61.3 % terhadap Komitmen Organisasi dan sebagian besar lainnya 38.7% dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Hipotesa yang digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh dari Variabel Gaya Kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja (X2) dan Kompensasi (X3) terhadap Variabel Komitmen Organisasi (Y) adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 (H1)

$H_o : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, diduga secara simultan tidak terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, diduga secara simultan terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi

Hipotesis 2 (H2)

$H_o : \beta_1 = 0$, diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi

$H_a : \beta_1 \neq 0$, diduga secara parsial terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi

Hipotesis 3 (H3)

$H_o : \beta_2 = 0$, diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi

$H_a : \beta_2 \neq 0$, diduga secara parsial terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi.

Hipotesis 4 (H4)

$H_o : \beta_3 = 0$, diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi

$H_a : \beta_3 \neq 0$, diduga secara parsial terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi.

Uji Simultan (Uji f)

Pengujian Hipotesis untuk menguji kebenaran akan adanya Pengaruh antara Variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y) secara Simultan atau bersama-sama dilakukan dengan uji F. Uji Simultan ini dilakukan dengan tingkat signifikansi (α) = 0.05 (5%) dengan rumus untuk menetapkan derajat kebebasan yaitu $F_{tabel} = f(k; n-k)$ atau $F_{tabel} = f(3, 34)$, maka diperoleh F-tabel sebesar 2.88. Untuk menilai apakah Hipotesis diterima

atau ditolak, ditentukan kriteri sebagai berikut:

Hipotesa Ho diterima dan Ha ditolak, apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau $-f_{hitung} > -f_{tabel}$

Hipotesa Ho ditolak dan Ha diterima, apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $f_{hitung} < -f_{tabel}$

Tabel 4.45

Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a					dapat dilakukan	
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	434.769	3	144.923	17.566	.000 ^b
	Residual	272.258	33	8.250		
	Total	707.027	36			
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Lingkungan Kerja (X2, Gaya Kepemimpinan (X3)						

Sumber : data diolah peneliti dengan spss.25 (2022)

Berdasarkan Tabel 4.45 Diatas didapatkan hasil bahwa nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($17.566 > 2.88$). Hasil uji F didapatkan nilai F_{hitung} yang dimiliki lebih besar dari nilai F_{tabel} sehingga hipotesis H1 adalah Ho ditolak dan Ha diterima dan ini dapat spss.25 (2022)

artikan bahwa Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi di STMA Trisakti.

Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial dari Gaya Kepemimpinan (X_1), Lingkungan Kerja (X_2) dan Kompensasi (X_3) terhadap variabel Komitmen Organisasi (Y) di STMA Trisakti maka dapat dilakukan pengujian Hipotesis uji t.

Adapun banyaknya sampel pada penelitian ini adalah 37 responden, sehingga peneliti menggunakan uji partial dengan rumus $df = n - k - 1$ atau $df = 37 - 3 - 1 = 33$ dan tingkat kemungkinan pengaruh/signifikansi (α) = 0.05 (5%) maka diperoleh t-tabel sebesar 2.034.

Tabel 4.46

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Sumber : data diolah peneliti dengan

Coefficients ^a					
Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.101	3.495		1.174
	Gaya Kepemimpinan (X1)	.224	.071	.481	3.153
	Lingkungan Kerja (X2)	.055	.135	.054	.406
	Kompensasi (X3)	.199	.089	.338	2.227
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi (Y)					

Dari hasil tabel 4.46 didapatkan hasil uji t pada variabel Gaya Kepemimpinan (X_1) didapatkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.153 > 2.034$) maka hipotesis H2 adalah Ho ditolak dan Ha diterima dan ini dapat artikan bahwa Gaya Kepemimpinan, secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap Komitmen Organisasi di STMA Trisakti.

Sedangkan hasil uji t pada variabel Lingkungan Kerja (X_2) didapatkan hasil $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0.406 < 2.034$) sehingga hipotesis H_3 adalah H_0 diterima dan H_a ditolak dan ini dapat artikan bahwa Lingkungan Kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Komitmen Organisasi di STMA Trisakti.

Dan hasil uji t Pada variabel Kompensasi (X_3) didapatkan hasil $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2.227 > 2.034$) sehingga hipotesis H_4 adalah H_0 ditolak dan H_a diterima dan ini dapat artikan bahwa Kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi di STMA Trisakti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah diketahui nilai $F_{hitung} 17.566 > F_{tabel} 2.88$, maka variabel Gaya Kepemimpinan (X_1), Lingkungan Kerja (X_2) dan Kompensasi (X_3) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen Organisasi (Y). Nilai $t\text{-hitung}$ untuk variabel Gaya Kepemimpinan (X_1) sebesar 3.153 dan nilai $t\text{-tabel}$ sebesar 2.034, maka variabel Gaya Kepemimpinan (X_1) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Komitmen Organisasi (Y).

Keberadaan Variabel Lingkungan Kerja (X_2) tidak berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi (Y) di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, hal ini terbukti dari nilai $t\text{-hitung}$ untuk variabel Lingkungan Kerja (X_2) sebesar 0.406 dan nilai $t\text{-tabel}$ sebesar 2.034, maka variabel Lingkungan Kerja (X_2) serta secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Komitmen Organisasi (Y).

Keberadaan Variabel Kompensasi (X_3) berpengaruh terhadap Komitmen

Organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, hal ini terbukti dari nilai $t\text{-hitung}$ untuk Variabel Kompensasi (X_3) sebesar 2.227 dan nilai $t\text{-tabel}$ sebesar 2.034, maka Variabel Kompensasi (X_3) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Komitmen Organisasi (Y).

Saran

Saran yang diharapkan agar dapat memberikan kontribusi berdasarkan hasil dalam penelitian ini adalah :

Pihak manajemen jika ingin meningkatkan komitmen organisasi karyawannya maka perlu meningkatkan pula gaya kepemimpinannya yaitu dengan memperhatikan beberapa indikator-indikator yang dinilai perlu ditingkatkan. Dalam hal kemampuan pimpinan dalam mengambil keputusan perlu ditingkatkan agar karyawan merasa keputusan yang diputuskan oleh pimpinan dirasa adil dan relevan.

Manajemen juga sebaiknya memperhatikan pemberian kompensasi kepada karyawannya karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawannya seperti memikirkan metode yang tepat dalam pemberian gaji, agar gaji yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Lingkungan Kerja secara parsial memang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, namun manajemen bisa tetap menjaga kondisi lingkungan kerja untuk selalu nyaman, aman dan kondusif. karena pastinya manajemen tetap harus memikirkan strategi yang tepat agar karyawan memilih bertahan dan mau memberikan kesetiiaannya pada Sekolah

Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti.

Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi dapat pula dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 38.7% maka disarankan pada penelitian selanjutnya dapat mencari atau menambahkan variabel lain yang berkontribusi terhadap Komitmen Organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, M. d. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik, Gaya Kepemimpinan Transformasional, dan Person - Organizational fit Terhadap Komitmen Organisasi Studi pada Guru Tetad SMK Ma'arif 9 Kebumen". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Volume 1 Nomor 1.
- Bohlander, G. a. (2010). *Principle of Human Resource Management*. OH : South Western - Cengage Learning.
- Danang, S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Dede Suryanto, W. P. (2016). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan UKM di Wilayah Depok Jawa Barat". *Jurnal Vokasi Indoneia*, Volume 4 Nomor 1.
- Desianty, S. (2005). "Pengaruh" Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Pada PT. POS Indonesia (Persero) Semarang". *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, Volume 2 Nomor 1.
- Dewi, N. F. (2019). "Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan. E-Jurnal Manajemen, Volume 8 Nomor 6(2019 : 3730-3755).
- Didit, D. (2013). *Prinsip - Prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: PT. Temprina Media Grafika.
- Dimas Saifunurmazah, d. (2018). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi Terhadap Komitmen Organisasi". *Magisma : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 6 Nomor 2.
- Dinata, M. F. (2018). "Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja dengan Komitmen sebagai Variable Intervening (Studi pada Staff Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Islam Banjarmasin)". *Jurnal Wawasan Manajemen*, Volume 6 Nomor 2.
- Dodi Prasada, d. (2020). "Pengaruh Etos Kerja dan Kompensasi Terhadap Komitmen Organisasi pada DHL Logistic di Jakarta". *Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia*, Volume 4 Nomor 1.
- Edison, E. d. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Farida, U. d. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia II*. Ponorogo: Umpo Ponorogo Press.
- Hasibuan. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Imam Heryanto, T. T. (2018). *Path analysis Menggunakan SPSS dan Excel - Panduan Pengelolaan Data Penelitian Untuk Skripsi / Tesis*. In Informatika. Bandung.
- Kartono. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Maharani, R. D. (2009). "Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan (Studi pada Divisi Peralatan Industri Argo PT. Barata Indonesia (Peseco) Gresik)". *Jurnal Bisnis dan*

- Manajemen, Volume 1 Nomor 2.
- Marihot. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Marwansyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Mujanah, S. (2019). *Manajemen Kompensasi*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Neolaka. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rivai. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Edisi ke 6*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suciono, A. (2016). “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Yang Berdampak Pada Disiplin Kerja Karyawan”. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 4 Nomor 2.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taryaman, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Umar, H. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori Perencanaan Strategi, Isu-isu Utama dan Globalisasi*. Bandung: Manggu Media.
- Yani, N. W. (2019). “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Karyawan dengan Motivasi Sebagai Variable Intervening”. *International Journal of Social Science and Business*, 3(1) :55.

Songket Palembang, a Captivating Heritage as an Actualization of National Identity in Indonesian Resilience and Defense Mechanisms

Rakhmayanti Novitasari Winata
rakhnov@yahoo.de

Abstract

Indonesia is a country that has a lot of beauty. One of the beauties that Indonesia has is cloth. These typical Indonesian woven fabrics have various patterns and various meanings in them. The kind of cloth owned by our nation, among others, is songket. Songket Palembang has many features compared to other types of woven handmade. The pattern and variety of decoration is one of the things that makes this handmade a prima donna. The technique of making cloth also makes songket different from other types of cloth. Songket Palembang is a typical Palembang woven handmade that is identical to the use of gold and silver threads. This woven handmade is known to be of the best quality, earning it the nickname 'Queen of All sheetss'. Palembang songket also has various types which are distinguished from the shape of the motif and the color of the thread. With its beauty, of course, this beautiful cloth has become a proud local and national identity of the Indonesian nation. A piece of songket can describe and reflect the identity and national identity which is full of philosophy, meaning, and history. But even though it has been recognized as an Intangible Cultural Heritage, it seems that the journey of Palembang Songket's identity as a defense and resilience mechanism in contemporary geostrategy to gain world recognition is still in progress.

Key Words: Songket Palembang, identity, resilience, defense, intangible cultural heritage

I. The Srivijaya Kingdom, the beginning of the origin of the Songket

South Sumatra has a long history, from the glory of the Srivijaya kingdom to the Palembang Sultanate. The Srivijaya Kingdom in its heyday around the 7th century AD became the forerunner of this city located on the banks of the Musi river. Many priceless relics come from that famous kingdom, one of which is the culture of beautiful woven wastra (fabric), songket. The existence of songket shows a high level of culture, because in this cloth various things are stored such as the materials used, the way of working, the

meaning contained in it as well as how to use it and the level of people who wear it. Songket Palembang is said to be one of the evidences of the legacy of the Srivijaya kingdom which was able to dominate trade in the Malacca Strait in its day. The importance of Srivijaya-Palembang both as a trade hub and as a Southeast Asian center for Buddhist practice has been established by Arab and Chinese historical sources spanning a long period of time.

The Srivijaya Kingdom was one of the largest empires that ever triumphed in Indonesia. This kingdom was able to develop itself as a maritime country by controlling

shipping traffic and international trade. The Srivijaya Kingdom was founded in the 7th century AD. The Srivijaya Kingdom was founded by Dapunta Hyang Sri Jayanasa. In the 7th century, Dapunta Hyang made a lot of regional expansion efforts. Sriwijaya continued to expand the area, so that Srivijaya became a great kingdom. To further strengthen its defenses, in 775 AD a base was built in the Ligor area. The Srivijaya Kingdom is a Buddhist-style kingdom founded by Dapunta Hyang Sri Jayanasa in the 7th century.

The Srivijaya Kingdom is located on the banks of the Musi River, in the Palembang area, South Sumatra. In its time, this maritime kingdom had a lot of influence in the archipelago. The Srivijaya Kingdom reached its peak of glory when it was ruled by King Balaputradewa, who ruled in the 9th century. In its heyday, Srivijaya controlled trade on the main route of the Malacca Strait and its territory covered Cambodia, Southern Thailand, the Malay Peninsula, Sumatra, and parts of Java. In addition, his greatness can also be seen from his success in several fields, such as the maritime, political, and economic fields. In Sanskrit, Sriwijaya comes from the word sri which means light and wijaya which means victory.

The people of the Strait of Melaka during the Classical period were not passive recipients of external influences. Chinese and Indians viewed Śrīvijaya as an active participant in the evolution of Buddhist doctrines and rituals. The kingdom of Srivijaya rose to power in the seventh century and maintained control of the abundant spice trade in the archipelago for about 500 years thanks to its strong navy. Sriwijaya developed by maximizing the potential of the sea, utilizing resources, trade routes and sea tribes as royal power in carrying out its business operations.

International trade also contributes a lot in terms of processing songket, especially in combining the materials that will be used as songket cloth. The Tamil cultural influence, especially the Chola school of art, can be noticed in a few artefacts from the island of Sumatra. Palembang, situated in the southern part of Sumatra, was the capital of the Srivijayan kingdom. In between these two important centres is located the central Sumatran port city of Jambi, on the banks of Batang Hari river. Notwithstanding its strategic location, there is no evidence of a Tamil mercantile settlement at Jambi.

In the conventional history of Sumatran Buddhism, the name Śrīvijaya shines so brightly that it tends to blot out references to the other ancient kingdoms and regions of this huge island and the Siam-Malay Peninsula. This is partly due to the frequent references to that name (or names such as Suvaradvīpa, Zabag, and Sanfoqi [Sānfóqí] which have been assumed to refer to Śrīvijaya) in Chinese and Arab texts, and partly to the importance of inscriptions found in Palembang for understanding early Southeast Asian history. Certainly the Palembang inscriptions are important, but they are few in number, and were written in a very brief period during the late 7th century. About all they tell us about religion is that some Buddhist terms which imply espousal of a certain stream of belief were integrated into public proclamations by Jayanāśa, ruler of Śrīvijaya. Tangible remains of Buddhism are scattered over the length and breadth of Sumatra, including many locations in the hinterland that were far from the trading enclaves on the estuaries visited by foreigners.

Both Arab and Chinese documents record that Srivijaya was the source of forest products and aromatics, yet the southeastern Sumatra coast was not strategically located to control the internal

origin of these rich natural resources which came from north and central Sumatra. The importance of these products to the international commercial community would have caused the shift of the center of trade to ports of these other areas if Srivijaya failed to supply the demand. Wolters, by his neglect, has implied that there were no formal political alliances which generated the flow of products to Srivijaya's ports. Yet the nature of the goods required a regular, ongoing relationship with the hinterland to allow goods to reach the ports. The general ambiguity of foreign sources when describing the Sumatra interior suggests that visiting merchants did not make direct contact with the hinterland. Thus it may be assumed that the flow of goods to Srivijaya's ports was organized as either a tribute system in which subordinate chiefs were required to supply the Srivijaya ports with marketable commodities, or that Srivijaya came to control an indigenous trade cycle in which people of the interior exchanged forest products they had collected for the imported goods which were available in coastal ports.

The city of Palembang was the center of the Srivijaya Kingdom which was once the largest and strongest maritime empire in the archipelago. The Srivijaya Kingdom as a trading center gained high prosperity. Because ships and traders are required to stop at ports controlled by Srivijaya and pay taxes or customs. Meanwhile the merchants also paid tribute to the king. The Srivijaya people themselves were also active in trade. Many priceless relics come from the Srivijaya kingdom, one of which is the culture of beautiful woven *wastra* (fabric), *songket*.

The existence of the *songket* tradition originally emerged during the Srivijaya Kingdom in Palembang in the seventh century to the thirteenth century.

According to the Palembang folk saga which is also narrated from generation to generation, the origin of *songket* came from Chinese traders who brought silk, Indian and Middle Eastern traders brought gold, then became *songket* cloth covered with gold in the hands of the Palembang people. The existence of the *songket* tradition in Indonesia is also often associated with the glory of the Sriwijaya Kingdom, which was centered in Palembang. *Songket* Palembang has been known since the time when the Srivijaya kingdom was at its peak. This trade hegemony shows the greatness of the maritime empire in the archipelago at that time.

Songket clothes for the King and his family certainly requires more materials and craftsmanship, gold-coated silk thread is the main and prominent material in making Palembang *Songket* cloth, resulting in a sparkling *songket* cloth, which shows an infinite greatness and glory. Based on the type and quality of the material, Palembang classic *Songket* fabrics are at least divided into three types, namely *Songket Lepus*, *Songket Limar*, and *Songket Tawur*. These three types of Palembang *Songket* cloth are then used as a differentiator between one type of *songket* and another.

Based on historical records, the right and proper to wear *songket* at that time were the king or sultan and relatives of the palace. *Songket* worn by the sultans in Palembang is a complement to the oversized clothes. Previously, this gold-threaded cloth was only used specifically for members of the Sriwijaya kingdom. However, over the times this cloth is used in official events and weddings. Even now Palembang *songket* can be worn at non-formal events.

Initially, weavers from our previous generation only knew cotton thread as the raw material for weaving. However, after

the existence of trade relations with China, India, and Europe, it has also affected the weaving of our nation. It can also be seen from the results of weaving that previously seemed simple, developed into a complex, intricate, and beautiful weave with shimmering gold and colorful threads obtained from silk. This seems to give a new face to the art, both in terms of weaving techniques and colors and decorations. So that the weaving which was originally only using cotton threads with gloomy and faint colors, becomes colorful, has a lively, vibrant, and majestic dynamic.

Palembang songket has many features compared to other types of woven fabrics. The pattern and variety of decoration is one of the things that makes this fabric a *prima donna*. The basic ingredients of songket are materials that are imported from China and India so that the price of songket soars. The technique of making cloth also makes songket different from other types of cloth. How to use songket on men or women has a fundamental difference. Songket cloth for men which is often called *Rumpak* (*bumpak*) has a motif that is not full of *tumpal* (head cloth) behind the body. The songket is worn from the hips down to below the knees (for married men) and hangs above the knees (for unmarried men). As for women, the *tumpal* (head of cloth) must be in front with a position from the hips to the ankles.

After seeing the long history of Palembang songket, it is not surprising that now songket craftsmen are increasingly mushrooming in the city of Palembang. Palembang songket cloth has a characteristic in its motif when compared to other traditional fabrics. Palembang songket motifs look more complicated. To produce Palembang songket, a craftsman can even spend three months working on it or even longer depending on the motif

and difficulty.

Songket Palembang is not just an aesthetic body protective cloth but has a noble meaning, namely prosperity, glory, and courage. Now songket is a clothing that is closer to everyday life, full of modifications, and can be worn across generations, including young people. At present, it is not only young people from South Sumatra who often wear Songket cloth for certain events, but young people from various regions also wear Songket cloth which is usually used in various formal events. Songket fabric for women is usually combined with a top model of *kebaya* for women so that it adds elegance and beauty to the wearer.

The tools used to make Palembang Songket cloth are generally still traditional and are usually used in a sitting position. The basic equipment used to weave Songket cloth is called "DAYAN". Palembang songket weaving, as a traditional heritage from the province of South Sumatra which is generally done by women, has been known since the days of the Sriwijaya kingdom. Made from natural fibers (cotton or silk) which are woven and combined with gold thread as the pattern, making songket a luxurious fabric and giving its own social status to its users. Lately, the creative industry has begun to be encouraged, but Palembang Songket does not appear to the surface, but new creations invite anxiety for the craftsmen and the Palembang Songket users themselves, such as machine songkets and five-color songkets covered with glitter ink.

In today's modern era, of course, the motifs and types and forms of songket are very diverse, not only as cloth, but many innovations have been made to further develop the culture, starting from headbands, shoes, shawls and many more. positive because the community still has a

place for cloth left over from the ancestral culture that still exists today, hopefully this will continue and be preserved by the next generation.

II. Songket Palembang as an Intangible Cultural Heritage of Post-Colonial As a Shield of National Resilience and Defense

The determination of the Intangible Cultural Heritage is proposed by the local government in collaboration with the indigenous community as the party responsible for preserving it after the determination of the Intangible Cultural Heritage. While the nominations were proposed by indigenous communities and local governments through the ministry of education and culture to be submitted to UNESCO for this reason, the Disbudpar of South Sumatra has also collaborated with several relevant agencies and community leaders in preparing submissions to UNESCO, such as the South Sumatra Regional Development and Innovation Research Agency (Balitbangnovda), Department of Industry and Trade (Disperindag) of South Sumatra, as well as culturalists from South Sumatra. The South Sumatra Disbudpar also made a declaration and hoped that the declaration would be a solution to increase the development of the Palembang Songket industry, as well as introduce the unique South Sumatran culture to the wider community.

In conducting the identification and inventory of intangible cultural heritage, the directorate general of culture through the directorate of cultural heritage and diplomacy shall record, determine and determine the intangible cultural heritage. The recording was carried out with the help of 11 (eleven) Centers for the Preservation of Cultural Values throughout Indonesia. Determination of intangible cultural

heritage is proposed by local governments at the national level. The determination of intangible cultural heritage aims to protect and record the culture. Giving appreciation which is a form of government appreciation for cultural objects and human resources as well as efforts to protect intangible cultural heritage through inventory, security, rescue, and publication of cultural objects.

Palembang Songket is one of the cultural works from South Sumatra which has been designated as an Intangible Cultural Heritage of Indonesia in 2013. This cultural work is included in the domain of Traditional Craft Skills and Proficiency with registration number 201300009. Palembang Songket is not just an aesthetic body protective cloth but has a noble meaning, namely prosperity, glory, and courage. While the proposal for the Indonesian Intangible Cultural Heritage to UNESCO was carried out by the local government and indigenous communities to the Ministry of Education and Culture, but they are still waiting for encouraging results, of course.

Cultural heritage is the entire cultural heritage that has important value for history, science and technology, and the arts. Cultural heritage is shared by a community or society in a country and has developed from generation to generation, in the path of a tradition. Intangible cultural heritage is intangible, such as concepts and technology; and its nature can pass and disappear in time with the development of the times such as language, music, dance, ceremonies, and various other structured behaviors.

So far, 7,241 cultural works have been recorded from 34 provinces. The recording was carried out by the assistance of 11 (eleven) Cultural Values Preservation Centers which have their respective working areas, namely BPNB Aceh, BPNB

West Sumatra, BPNB Riau Islands, BPNB West Java, BPNB Yogyakarta, BPNB West Kalimantan, BPNB Bali, BPNB Maluku, BPNB Sulawesi South, BPNB North Sulawesi, BPNB Papua. There are 594 cultural works that have been designated as Indonesian Intangible Cultural Heritage from all parts of Indonesia, with details of 2013 as many as 77 Intangible Cultural Heritage, in 2014 a total of 96 Intangible Cultural Heritage, in 2015 a total of 121 Intangible Cultural Heritage, in 2016 a total of 150 Intangible Cultural Heritage and in 2017 a total of 150 Intangible Cultural Heritage.

Songket is an intangible cultural heritage of the Sriwijaya kingdom. There are 46 songket motifs that describe the caste and position of society in South Sumatra. From the data of 50,142 South Sumatra IKM business units, there are 5,687 songket weaving craftsmen spread across 17 districts/cities throughout South Sumatra. South Sumatra itself has experience as a host in carrying out National and International Events, including: PON XVI in 2004, WIEF (World Islamic Economic Forum) in 2008, Sea Games in 2013, PUIC in 2014, MTQ International in 2014, ASEAN University Games in 2014, 2014, and Preparations to welcome the 2018 ASEAN GAMES Host.

III. Songket Palembang, 'Queen of All Fabrics' Beautiful National Identity Charming Shyly Appears on the International Stage

The use of Palembang Songket was initially only for married women or widows on special occasions such as traditional events, family weddings and child akikah for the Palembang sultanate family. As a traditional cloth, songket is woven by special royal weavers, while for the bride and groom, the girl is woven a few months before her wedding. The economic

development of the community caused this elite style of dress to be followed by the people, songket began to become a trading commodity, special motifs were created for the community. Palembang residents of the Palembang Sultanate Palace group use the Lepus type songket, while ordinary citizens use the Tawur type songket. The motive is for citizens of Chinese descent to use the songket of the Tawur Bungo Cino type, while residents of Arab descent use the songket of the Tawur Bungo Pacik type. Songket today has experienced developments, especially a shift in value in its use. Now Palembang songket can be used by anyone who can afford it because there have been no strict rules since the arrival of the Dutch to Palembang and abolishing the Sultanate in 1823. Then gradually songket was mostly done as a home industry, until finally Palembang was known as a famous songket craft center until to foreign countries.

Indonesia is a country rich in natural and cultural resources. We as Indonesians should be proud. Because Indonesia's cultural wealth has been widely recognized by the world. This recognition is of course not a joke, because many indigenous Indonesian cultures have been recognized as world cultural heritage by the United Nations Educational, Scientific, And Cultural Organization (UNESCO).

Intangible Cultural Heritage based on UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003: Intangible Cultural Heritage is the various practices, representations, expressions, knowledge, skills and instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated with them that people, groups and in some cases, individuals are part of the cultural heritage. This intangible cultural heritage is passed down from generation to generation, which is continuously re-

created by people and groups in response to their surrounding environment, their interaction with nature and their history, and provides a sustainable sense of identity, to respect cultural differences and human creativity.

The Government of the Republic of Indonesia has ratified the UNESCO Convention of 2003 concerning 'Safeguarding Intangible Cultural Heritage' as outlined in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 of 2007 and is a mandate from the Law for the Promotion of Culture Number 5 of 2017. Minister of Culture and Culture Regulation Number 106 of 2013 concerning Intangible Cultural Heritage.

Referring to the 2003 UNESCO convention on safeguarding of intangible cultural heritage, Intangible Cultural Heritage is divided into five domains: a) Oral Tradition and Expression; b) performing arts; c) community customs, rituals, and celebrations; d) knowledge and behavioral habits regarding nature and the universe; and/or e) traditional craft skills and expertise. In the traditional craft skills and expertise consists of Traditional Technology (manufacturing process, design, working tools, objectives, the importance of technology for the surrounding community); Traditional Clothing: (philosophy of form, decoration, color); user status; time and procedures for use; function (sacred, profane); user gender; accessories; Traditional Crafts: materials (clay, iron, wood, stone, rattan, etc.); tools; craftsmen; the work (pottery, wood carving, craft, embroidery, cloth, etc.); craftsmanship (knitting, forging, weaving, carving, weaving, etc.)

Nominations are proposed by indigenous communities and local governments through the ministry of education and culture to be submitted to

UNESCO. For this reason, the Disbudpar of South Sumatra has also collaborated with several relevant agencies and community leaders in preparing submissions to UNESCO, such as the Research Agency for Regional Development and Innovation (Balitbangnovda) of South Sumatra, the Office of Industry and Trade (Disperindag) of South Sumatra, and cultural experts from South Sumatra. The South Sumatra Disbudpar also made a declaration and hoped that the declaration would be a solution to increase the development of the Palembang Songket industry, as well as introduce the unique South Sumatran culture to the wider community.

In the past, songket cloth was usually decorated with real gold fibers and was used as a symbol of the noble social status of the Palembang Sultanate. Intangible culture is a cultural heritage from ancestors passed down from generation to generation which is very valuable and has high usability, just like Songket, therefore it is very important to protect it. Songket Palembang is still and must be maintained because it is a nation's wealth that still must be maintained in order to remain sustainable.

As one of the national and local identities of the nation, Songket Palembang in its preservation requires a sustainable policy in the efforts of national resilience and defense. Therefore, it is interesting to know the policy direction to maintain national identity in the context of Contemporary Geostrategy. National identity, usually based on shared culture, religion, history, language, or ethnicity. "Nation creates national identity", the nation creates a national identity, this is what makes people have a feeling of belonging to a nation.

Basically the songket weaving tradition has been ratified by the UNESCO Convention in 2003 in terms of the quality of human resources engaged in it as well as

knowledge about songket. Continuing on the 2005 UNESCO Convention, songket weaving was also ratified in terms of the use of his work. One of the famous songket craftsmen from Palembang, Zainal Arifin, who is also the owner of the Zainal Songket brand, on the same occasion stated that he is ready to help the government provide evidence of original Indonesian songket so that it is recognized as a cultural heritage by UNESCO like batik.

Songket skills should have covered from the initial basis set by UNESCO. That the skill of making Palembang Songket is included in various practices, representations, expressions, knowledge, skills as well as instruments, objects, artifacts and cultural spaces related to it that communities, groups and in some cases, individuals are part of the cultural heritage. This intangible cultural heritage is passed down from generation to generation, which is continuously re-created by people and groups in response to their surrounding environment, their interaction with nature and their history, and provides a sustainable sense of identity, to respect cultural differences and human creativity. So with optimism, Songket Palembang with its beautiful motifs can certainly get world recognition through UNESCO.

IV. Conclusions and Suggestions

Preservation of cultural heritage is very important because cultural heritage shows national identity. Identity shows that a nation has the majesty and nobility of civilization or glory. Identity can be recognized through various cultural heritages. Songket Palembang must be jointly and earnestly to be maintained and maintained, preserved, developed and utilized. Songket cloth culture is one of the many proofs of national identity

which is also a national identity, as well as a nation's resilience. This of course applies to all kinds of culture, especially intangibles such as Songket cloth. Considering that Indonesia has a variety of diverse cultures, it is therefore an obligation not only to maintain it but as a national identity really needs to be maintained.

Not only is the nation's resilience to the currents of social dynamics of society in this era of globalization, but it is also a resistance to the sustainability and existence of this nation which is indeed formed from a long history and requires struggle to be able to achieve what is felt now. The pride of the Indonesian people for a diverse culture at the same time invites a challenge for all people to maintain local culture so that it does not slowly disappear or even be recognized by other nations. By preserving Palembang Songket, we can protect the nation's culture from foreign cultural influences and help songket craftsmen and entrepreneurs in the economic sector as a form of independence that has a positive impact on national resilience and defense.

Part of the non-military threat is cultural. This culture war is so gentle that the conquered side doesn't feel defeated. Moreover, Indonesia has the advantages of wealth, cultural diversity, and natural beauty. the nation's resilience is in a weak position. In the short term, the state can survive various challenges, threats, obstacles, and disturbances. If there is no significant improvement, in the long term national stability will be shaken. Reflecting on the experiences of many countries, the government's partisanship is absolutely necessary to produce international recognition of the unique quality of Indonesian culture so that those who can participate in building culture and pride as a nation. Moreover, in the international arena, of course, it will be very proud.

Indonesia has had bitter experiences related to natural wealth and is often followed by anxiety from neighboring countries who often try to 'take' Indonesian art and culture. It is necessary to be vigilant and actively move internationally in achieving world recognition of the existence of Songket cloth culture and also other intangible cultural heritages. This is very necessary in the defense and defense of the country. Moving too slowly will be a regret and a loss for the next generation of the nation, of course, because it loses one of the nation's identities, especially if it is left and the government is 'weak', colonialism through culture will be higher. Moreover, the dignity and dignity of Indonesia as a country will be torn apart and considered low by the international community because it is silent even though it is made arbitrarily.

For this reason, the world's recognition of the Palembang songket weaving motifs will strengthen the country's position from the claims of other countries. Without any protection from the government, the Palembang songket weaving motif can be recognized by other countries so it is very important to get world recognition as a form of identity security that reflects resilience and national defense. The government is expected to be more aggressive in increasing international lobbies and focus on achieving targets so that they are not adrift because many of Indonesia's original Intangible Cultural Heritage must also be seriously treated and received world recognition.

REFERENCES

Books :

- Acri Andrea., *Esoteric Buddhism in Mediaeval Maritime Asia* (Singapore: Mainland Press Pte Ltd, 2016)
Ernatip (BPSNT Padang) Penyunting: Yan

Yan Sunarya, SSn., MSn., *Inventarisasi Tenun Tradisional Songket Palembang* (Jakarta : Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010)

Kenneth R. Hall, John K. Whitmore., *Explorations in Early Southeast Asian History* (University of Michigan Press, University of Michigan Center for South EastAsian Studies, 1976)

Kulke Hermann, K.Kesavapany, Sakhuja Vijay., *Nagapatinan to Suvarnadwipa; Reflections on the Chola Naval Expeditions to Southeast Asia.*, (Manohar Publications: Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2010)

Website:

- <https://www.thejakartapost.com/adv/2017/10/29/sriwijayas-trick-of-the-trade-in-maintaining-maritime-sovereignty.html>
<https://www.britannica.com/place/Indonesia/The-Malay-kingdom-of-Srivijaya-Palembang#ref170846>
<https://nasional.kompas.com/read/2011/11/13/13114244/tenun-songket-akan-didaftarkan-ke-unesco>
<https://budaya.co/songket-dari-palembang>
<https://gaya.tempo.co/read/182136/identitas-dalam-selembar-kain/full&view=ok>
<https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/>
<https://babelpos.co/2020/11/10/potensi-warisan-budaya-tak-benda-wbtb-babel-bagian-satu/>
<https://nasional.tempo.co/read/1255997/kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya-tak-benda-indonesia>
<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=pengertian%20dan%20domain%20warisan%20>

- budaya%20takbenda
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2014.927676>
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066198004002003>
<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2260103/sumsel-dorong-songket-palembang-jadi-warisan-dunia-unesco>
<https://www.sumselfprov.go.id/pages/wisatadetail/kain-songket?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=kain-songket>
<https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/menilik-keindahan-kain-songket-palembang-yang-tersohor/>
<https://nasional.kompas.com/read/2011/03/30/0546196/29.songket.palembang.jadi.warisan.budaya?page=all>
- <https://www.griyatenun.com/blog/mengenal-lebih-dekat-sejarah-kain-songket-palembang-yang-sudah-terkenal-akan-keindahannya>
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/30/204231679/kerajaan-sriwijaya-letak-raja-raja-masa-kejayaan-dan-peninggalan>
<https://bappeda.sumselfprov.go.id/berita/582/rapat-persiapan-launching-songket-palembang-sumatera-selatan-sebagai-warisan-budaya-indonesia>
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/15/kerajaan-sriwijaya-sejarah-raja-raja-yang-pernah-memerintah-puncak-kejayaan-dan-peninggalan>

Peluang dan Tantangan Pertanian Perkotaan sebagai Strategi Ketahanan Pangan Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19

Audi P. Sebayang¹⁾, Lita S Barus²⁾

1) Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi

2) Sekolah Kajian Strategik dan Global, Kajian Pengembangan Perkotaan

Abstrak

Pandemi virus Covid-19 mengakibatkan perubahan secara global, khususnya pada kegiatan pertanian perkotaan (*Urban Farming*). Kegiatan *urban farming* di Indonesia masih kurang diminati oleh penduduk kota dan masih sebatas tren gaya hidup. Pada masa pandemi, kegiatan ini tidak lagi semata hanya kegiatan bersifat hobi, namun sudah dapat menjadi salah satu strategi ketahanan pangan keluarga. Tanaman yang digunakan dalam kegiatan *urban farming* umumnya adalah sayuran hijau seperti pak coy, kangkung serta tanaman lain yang memiliki perakaran yang pendek (Sedana, 2020) oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan penanaman tanaman cabai rawit, pak coy dan kangkung. Peluang dan tantangan *urban farming* yang diteliti adalah kegiatan tanaman hidroponik oleh pegawai dari RSPI Prof. Sulianti Saroso, penduduk perkotaan yang mengutamakan tanaman tabulampot (tanaman buah dalam pot) serta terdapat juga yang menggunakan pekarangan rumah sebagai lahan tanaman yang digabungkan dengan peternakan ayam dan bebek petelur maupun pedaging dengan skala kecil. Di taman hidroponik RSPI Prof. Sulianti Saroso terdapat kegiatan aquaponik yaitu antara ikan lele dan tanaman eceng gondok.

Kata Kunci : Pandemi Covid 19, *Urban Farming*, Ketahanan Pangan

PENDAHULUAN

Pertanian perkotaan merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan, serta distribusi pangan maupun produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya, dan menggunakan (kembali) sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak (FAO, 2008; Urban Agriculture Committee of the CFSC, 2003). Bentuk-bentuk dari *urban farming* antara lain adalah pertanian dan peternakan kecil-intensif, produksi pangan di perumahan, land sharing, taman-taman atap (rooftop gardens), rumah kaca di

sekolah-sekolah, restoran yang terintegrasi dengan kebun, produksi pangan pada ruang publik, serta produksi sayuran dalam ruang vertikal (Hou *et al.*, 2009; Mougeot, 2005; Nordahl, 2009; Redwood, 2008). Pertanian perkotaan sudah menjadi praktik umum di banyak kota dengan melibatkan beragam kalangan peran dengan cara yang bervariasi antar negara dan antar kota (Tornaghi, 2014).

Urban Farming pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan situasi dan kondisi dari suatu negara. Amerika merupakan pelopor *urban farming* yang dimulai pada saat masa peperangan terutama dikarenakan tingginya harga sayuran pada

kala itu. Sekitar 20 juta Victory Garden dibuat selama perang dunia kedua. Victory garden berupa kegiatan membangun taman di sela-sela ruang yang tersisa. Hasil dari program tersebut membuat pemerintah Amerika Serikat mampu menyediakan 40% kebutuhan pangan warganya pada waktu itu. Di Indonesia saat ini pertanian perkotaan mulai diminati oleh masyarakat di beragam kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lainnya. Namun di Indonesia belum ada tindakan yang serius yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pertanian perkotaan masih hanya sebatas tren gaya hidup (Nursalikah, 2019). Karena itu kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui peluang dan tantangan kegiatan urban farming.

II. Tinjauan Literatur

Kegiatan Urban Farming dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain:

1. Metode Hidroponik

Hidroponik secara harfiah berarti Hydro yaitu air dan phonic yaitu pengerjaan, sehingga hidroponik dapat diartikan sistem budidaya tanpa menggunakan tanah tetapi menggunakan air yang berisi nutrient. Disisi lain menurut Mulyaningsih *et al.* (2019), hidroponik merupakan metode budidaya tanaman dengan media tanam selain tanah seperti kerikil, pasir, sabut kelapa, busa. Jadi dapat disimpulkan bahwa hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa tanah melainkan menggunakan air dan substrat padat. Budidaya hidroponik biasanya dilaksanakan pada rumah kaca (greenhouse) untuk menjaga agar pertumbuhan tanaman tumbuh secara optimal dan benar-benar terlindung dari pengaruh luar seperti hama dan penyakit, hujan, iklim (Rodiah, 2014). Hidroponik menjadi cara sebagai usaha untuk mengembangkan hasil pertanian atau

kegiatan mandiri dalam satu komoditas tertentu. Perkembangan sistem hidroponik di Indonesia dilatarbelakangi persoalan masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian khususnya tanaman hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, hias dan biofarmaka. Namun pengembangan tersebut terkendala dengan lahan yang terbatas seperti di perkotaan umumnya penduduk tidak memiliki lahan yang cukup untuk bertanam secara konvensional. Sistem hidroponik yang pertama kali dikembangkan di Indonesia adalah sistem substrat, kemudian mulai berkembang sistem nutrisi film technique (NFT). Selanjutnya mulai dikembangkan sistem aeroponik. Disamping itu, sistem yang banyak dikembangkan adalah hidroponik wick (sumbu), hidroponik rakit apung juga *ebb and flow*.

Keuntungan bertanam dengan sistem hidroponik dibanding bercocok tanam menggunakan media tanam tanah menurut Tallei *et al.*, (2017) yaitu meminimalkan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman, budidaya dan pemeliharaan tanaman hidroponik lebih mudah dilakukan hal ini dikarenakan tempatnya yang relatif bersih, media tanam yang digunakan juga bersih dari kotoran dan tanaman budidaya terlindung dari terpaan air hujan, tanaman yang dihasilkan lebih sehat, produktivitas lebih banyak, mutu hasil tanaman berkualitas tinggi dengan harga jual yang tinggi pula. Keuntungan lainnya dari sistem ini ialah dapat memperindah lingkungan dengan kesan pertanian yang bersih dan sehat serta usaha agribisnis tanpa mencemari lingkungan. Namun berbudidaya tanaman dengan menggunakan sistem hidroponik dinilai memerlukan modal yang cukup besar karena untuk menyediakan berbagai macam alat dan bahannya, harus mempunyai keterampilan khusus

untuk menanam tanaman dengan metode hidroponik karena metode menanam dengan sistem hidroponik berbeda dengan menggunakan metode menanam pada tanah, dan juga membutuhkan ketelitian yang lebih, karena nutrisi untuk tanaman harus benar-benar diawasi secara cermat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rodiah (2014), bahwa kekurangan hidroponik yaitu:

- (1). Investasi awal yang mahal
- (2). Memerlukan keterampilan khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia
- (3). Ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit

2. Metode Akuaponik

Akuaponik adalah cara bercocok tanam yang menggabungkan akuakultur dan hidroponik, tujuannya adalah untuk memelihara ikan serta tanaman dalam lingkungan yang tersirkulasi dan sistem yang saling terintergrasi. Interaksi antara ikan dan tanaman menghasilkan simbiosis mutualisme yaitu kotoran ikan memberikan nutrisi pada tanaman sedangkan tanaman berfungsi sebagai filter bagi amonia dan senyawa nitrogen lainnya dari air, sehingga air yang tersirkulasi kembali menjadi aman bagi ikan (ECOLIFE, 2011). Akuaponik pertama kali diteliti di Universitas Virgin Island (UVI) sejak tahun 1971, dilatar belakangi oleh sulitnya memelihara ikan air tawar dan sayuran di Pulau Semiarid, Australia. Penelitian ini menghasilkan ide untuk bercocok tanam dengan tujuan komersil. Dalam perkembangannya sistem ini mengalami banyak kendala tapi pada tahun 1990-an sistem akuaponik berkembang luas yang akhirnya, walaupun banyak kegagalan, sistem ini berhasil mengubah teknologi akuaponik menjadi salah satu sistem untuk memproduksi bahan makanan (Diver, 2006). Akuaponik

merupakan cara bercocok tanam sekaligus pemeliharaan ikan air tawar yang hemat energi, limbah yang berasal dari kotoran ikan akan ditampung dan disalurkan ke media tanam, menghasilkan pupuk organik yang baik untuk tanaman. Sistem akuaponik memanfaatkan kembali air limbah (mencegah limbah keluar ke lingkungan) melalui biofiltrasi dan menjamin produksi bahan makanan bagi tanaman melalui multikultur, oleh sebab itu akuaponik pantas menjadi panutan untuk green technology (Wahap et al., 2010). Akuaponik memiliki beberapa kelebihan dari pada sistem lainnya, berikut beberapa kelebihan akuaponik (ECOLIFE, 2011):

Sistem akuaponik berjalan dengan prinsip zero enviromental impact. Akuaponik menghasilkan pertumbuhan ikan yang baik dan tanaman organik tanpa pemupukan kimia, tanpa herbisida maupun pestisida.

Memanfaatkan air secara bijak. Penggunaan air pada sistem ini 90% lebih sedikit dibandingkan menanam tanaman dengan cara konvensional dan 97% lebih sedikit dari sistem akuakultur biasa.

Sistem akuaponik serba guna dan mampu beradaptasi diberbagai tempat karena dapat dibangun dengan berbagai ukuran.

3. Metode Vertikultur

Vertikultur merupakan sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik indoor maupun outdoor (Lukman, 2017). Sistem budidaya pertanian secara vertikal atau bertingkat ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Persyaratan vertikultur adalah kuat dan mudah dipindahpindahkan. Tanaman yang akan ditanam sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki nilai ekonomis tinggi, berumur

pendek, dan berakar pendek. Tanaman sayuran yang sering dibudidayakan secara vertikultur antara lain selada, kangkung, bayam, pokcoy, caisim, katuk, kemangi, tomat, pare, kacang panjang, mentimun dan tanaman sayuran daun lainnya. Kelebihan sistem pertanian vertikultur antara lain yaitu:

- Efisiensi penggunaan lahan karena yang ditanam jumlahnya lebih banyak dibandingkan sistem konvensional,
- Penghematan pemakaian pupuk dan pestisida,
- Kemungkinan tumbuhnya rumput dan gulma lebih kecil,
- Dapat dipindahkan dengan mudah karena tanaman diletakkan dalam wadah tertentu,
- Mempermudah *monitoring/* pemeliharaan tanaman, dan
- Adanya atap plastik memberikan keuntungan (a) mencegah kerusakan karena hujan, (b) menghemat biaya penyiraman karena atap plastik mengurangi penguapan.

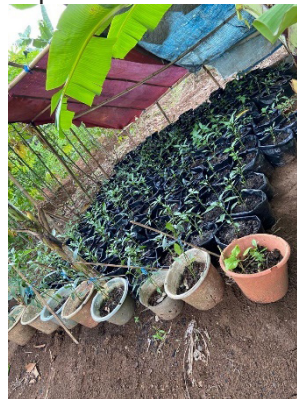
Kelebihan yang dimiliki sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan yang antara lain adalah:

- Rawan terhadap serangan jamur, karena kelembaban udara yang tinggi akibat tingginya populasi tanaman adanya atap plastik,
- Investasi awal cukup tinggi,
- Sistem penyiraman harus kontinu, dan diperlukan beberapa peralatan tambahan, misalnya tangga sebagai alat bantu penyiraman.

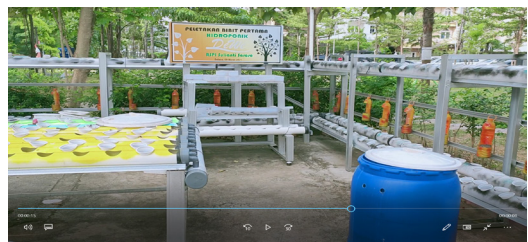
III. METODOLOGI

Metode pengumpulan data dilakukan dengan survey sekunder maupun survey primer. Survei primer dilakukan secara tatap muka langsung terhadap beberapa warga di Kota Bekasi

dan sekitarnya berupa wawancara dan sosialisasi secara langsung. Pada penelitian ini juga dilakukan pekerjaan penanaman tanaman oleh peneliti. Terdapat dua titik lahan yang digunakan yaitu lahan yang terletak disekitar rumah serta lahan yang disediakan oleh Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianto Saroso yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya No.2, RT.2/RW.12, Papanggo, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan daerah beriklim panas, dengan suhu rata-rata 28.8°C, curah hujan setiap tahun rata-rata 142,54 mm² dengan maksimal curah hujan pada bulan September.



Gambar 1. Lahan di Sekitar Rumah



Gambar 2. Taman Hidroponik RSPI Prof. Sulianti Suroso

VI. Analisis dan Pembahasan

4.1 Penanaman Tanaman di Perkotaan

Peneliti melakukan kegiatan penanaman tanaman cabai, pekcoy dan

kangkung. Penyiapan benih merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam budidaya tanaman. Benih yang digunakan pada kegiatan urban farming harus dalam keadaan sehat, karena kondisi benih yang sehat dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit dan produksi tanaman. Benih yang digunakan pada kegiatan budidaya tanaman cabai rawit merah yaitu varietas hibrida CF 3255 atau lebih dikenal dengan varietas sigantung. Benih cabai rawit berwarna coklat kuning terang dan berbentuk pipih. Menurut (Takdir *et al.*, 2015) varietas hibrida merupakan generasi pertama hasil persilangan antara tetua berupa galur inbrida dan dapat dibentuk pada tanaman menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang. Benih tanaman pakcoy yang digunakan merupakan varietas hibrida Sylphy Tx F1 yang dimana memiliki umur panen antara 25 hingga 27 hari setelah tanam. Benih tanaman kangkung darat yang digunakan merupakan benih kangkung varietas LP-1. Umur panen dari tanaman ini yaitu 20-30 hari setelah tanam.

Media tanam yang digunakan untuk tanaman cabai yaitu arang sekam yang dicampurkan dengan pupuk kandang pada polybag. Sedangkan media tanam yang digunakan untuk tanaman pakcoy adalah rockwool yang dipotong sebesar 1x1 cm dan untuk tanaman kangkung media tanam yang digunakan merupakan tissu yang dibasahkan.

Perawatan tanaman cabai diawali dengan penyiraman dua kali setiap hari yaitu pada pagi hari dan sore hari. Setelah memiliki 3-5 helai daun, tanaman cabai dipindahkan ke polybag secara hati-hati agar perakaran tanaman tidak terganggu. Tanaman cabai memiliki karakteristik yang sangat rentan terhadap sinar matahari berlebihan, oleh karena itu diperlukan naungan agar tanaman tetap tumbuh secara optimal. Perawatan yang dilakukan

terhadap tanaman pakcoy dan kangkung dilakukan dengan mengontrol nutrisi yang diberikan pada sistem hidroponik yang digunakan.

Tanaman pakcoy dapat dipanen setelah umur sekitar 1 bulan, tanaman kangkung dapat lebih kurang dari 1 bulan, sedangkan tanaman cabai baru dapat dipanen sekitar 5 bulan. Hasil tanaman dapat dikonsumsi langsung dan juga dapat dijual pada saat panen yang dapat memberikan penghasilan bagi keluarga.

4.2. Peluang dan Tantangan Urban Farming

Kegiatan pertanian perkotaan merupakan kegiatan yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Khusus di RSPI Prof. Sulianti Saroso peneliti melakukan kegiatan edukasi terhadap pegawai disana. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan yaitu proses persemaian hingga perawatan tanaman pakcoy dan kangkung dengan menggunakan sistem hidroponik.



Gambar 3. Pelatihan di RSPI Prof. Sulianti Saroso

Pelaksanaan urban farming yang terdapat disekitar rumah memiliki kegiatan beragam, seperti tanaman tabulampot (tanaman buah dalam pot), menggunakan pekarangan rumah. Ada juga yang menggunakan hidroponik yang hasilnya dapat langsung dikonsumsi. Hasil panen langsung digunakan sebagai produk yang dijual di dalam cafe yang dinamakan bakso kebon yang terletak di Perumahan Galaxy

Bekasi serta menjadi bahan herbal yang dinamakan Daun Mas.



Gambar 4. Produk Herbal PT. OAM

Di taman hidroponik RSPI Prof. Sulianti Saroso terdapat kegiatan aquaponik yaitu antara ikan lele dan tanaman eceng gondok. Kotoran yang dihasilkan oleh ikan lele menjadi nutrisi bagi tanaman eceng gondok sedangkan eceng gondok menyediakan naungan bagi ikan lele agar tidak terkena sinar matahari secara langsung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan di lahan sekitar rumah serta lahan RSPI Prof. Sulianti Saroso dapat disimpulkan bahwa teknik budidaya

tanaman cabai rawit, pakcoy dan kangkung meliputi:

- a. persiapan benih yaitu menggunakan benih hibrida unggul
- b. persiapan media tanam cabai menggunakan arang sekam yang dicampur dengan pupuk kandang serta tanaman pakcoy menggunakan rockwool dan kangkung menggunakan tissu yang dibasahkan
- c. perawatan tanaman, pemupukan, perlu diperhatikan sampai tanaman dapat dipanen agar tanaman dapat tumbuh optimal.

Kegiatan pertanian perkotaan perlu diteruskan karena dapat menyediakan pangan dan bahkan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi warga kota. Kegiatan ini masih perlu diedukasi agar warga dapat lebih paham dan belajar teknik budidaya yang tepat dan menghasilkan tanaman yang sesuai dengan keinginan.

DAFTAR PUSTAKA

Sedana, Gede. 2020. Urban Farming Sebagai Pertanian Alternatif dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid 19. Denpasar. [Repostory.undwi.ac.id](https://repository.undwi.ac.id)

EFEKTIVITAS PROGRAM REDD+ SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN PERUBAHAN IKLIM DALAM STUDI KERJA SAMA REDD+ INDONESIA-NORWEGIA

Okvivio Vergina Gihoni¹

¹Mahasiswa Pascasarjana SKSG Universitas Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of one of the UN programs, REDD+ through bilateral cooperation conducted by Indonesia with Norway from 2010-2021. REDD+ aims to increase carbon reduction efforts in greenhouse emissions through funding provided by UN Annex I countries to developing countries that want to commit to saving forests from deforestation as well as forest degradation. This cooperation is carried out based on the agreement contained in the Letter of Intent between the Republic of Norway and the Republic of Indonesia. With the ending of this cooperation in 2021, the author intends to evaluate the cooperation using the concept of effectiveness by adjusting the criteria for cooperation with the results received from the end of the cooperation. This research is an analytical descriptive qualitative study that uses a review of previous research libraries and provides updates in this research.

Keywords : REDD+, Forest, Framework, Deforestations, Cooperation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keefektifan dari salah satu program PBB yaitu REDD+ melalui kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Norwegia sejak 2010-2021. REDD+ memiliki tujuan untuk meningkatkan upaya pengurangan karbon emisi rumah kaca melalui pendanaan yang diberikan oleh Negara Annex I PBB terhadap negara berkembang yang ingin berkomitmen menyelamatkan hutan dari deforestasi dan juga degradasi hutan. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ada dalam *Letter of Intent* antara Republik Norwegia dan juga Republik Indonesia. Dengan berakhirnya kerjasama ini pada tahun 2021, penulis berniat melakukan evaluasi kerjasama tersebut menggunakan konsep efektivitas dengan menyesuaikan kriteria kerjasama dengan hasil yang diterima dari berakhirnya kerjasama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analitis yang menggunakan tinjauan pustaka penelitian terdahulu dan memberikan pembaruan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Implementasi, Kerjasama Bilateral, Efektivitas, Deforestasi, Pengurangan Emisi Karbon

Pendahuluan

Hadirnya kerjasama REDD+ merupakan salah satu *framework* yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilaksanakan oleh negara-negara secara global dalam bentuk kerjasama bilateral. Terdapat beberapa kerjasama REDD+ yang dilakukan oleh Indonesia, salah satunya adalah REDD+ dengan Norwegia. REDD+ sendiri merupakan singkatan dari program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*, yaitu upaya negara-negara dalam mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh deforestasi, degradasi hutan, dorongan konservasi, pengelolaan hutan dan peningkatan stok karbon hutan. Deforestasi sendiri diketahui menjadi penyebab kedua terbesar atas pemanasan global dan menjadi penyebab utama emisi gas rumah kaca nasional Indonesia (Forest Carbon Partnership, 2022). Pada dasarnya, REDD+ merupakan kerjasama melalui dukungan secara finansial dari negara maju terhadap negara berkembang dalam mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi nasionalnya melalui pelestarian dan pemeliharaan hutan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Dengan demikian, kerjasama REDD+ sangat diperlukan penerapannya di Indonesia, namun perlu dikaji lebih lanjut keefektifan dari kerjasama ini (Satwika, 2020).

Perubahan Iklim telah menjadi perhatian global, salah satunya Indonesia dikarenakan meningkatnya temperatur bumi dari dampak pemanasan global. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak pulau dan banyak hutan serta merupakan salah satu produsen oksigen terbesar di dunia sehingga Indonesia perlu memberikan perhatian khusus bagi isu lingkungan saat ini (CNN Indonesia, 2021). Indonesia telah bergabung dengan program REDD+ sejak tahun 2009.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki komitmen tidak hanya dalam meningkatkan kekuatan ekonominya, namun juga menjaga lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yang terjadi. Norwegia hadir sebagai negara Annex I PBB dengan hutang emisi karbon yang cukup banyak, sehingga bersedia melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui REDD+, yaitu pemberian insentif bagi kinerja Indonesia dalam berkontribusi melakukan pengurangan gas emisi rumah kaca yang disebabkan dari deforestasi dan juga degradasi hutan (Indrarto, dkk, 2013). Kerjasama ini dilakukan berdasarkan *Letter of Intent* yang dimulai pada tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2020 dengan beberapa hasil yang signifikan, ditambah dengan beberapa tantangan yang terjadi hingga kerjasama ini berakhir (Resosudarmo, 2021).

GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan *Letter of Intent* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Norwegia dengan Pemerintah Indonesia pada 26 Mei 2010, terdapat tiga fase yang dijadikan target dari kerjasama ini, yaitu Fase Persiapan, Fase Transformasi dan Fase Implementasi Penuh. Tujuan dari adanya kerjasama ini adalah adanya kontribusi yang signifikan dari negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut. Kerjasama ini dilakukan melalui adanya pembuatan kebijakan terkait perubahan iklim internasional dan berkolaborasi dalam perkembangan dan implementasi strategi kebijakan program, yaitu REDD+.

Fase Pertama (Persiapan)

Fase ini ditargetkan dalam kurun waktu 2 tahun (2011-2013), dengan poin-poin strategi berikut:

Menyelesaikan strategi REDD+ nasional terkait emisi dari deforestasi dan lahan gambut

Menciptakan lembaga agensi yang berhubungan langsung kepada Presiden untuk mengkoordinasi perkembangan dan implementasi REDD+

Menciptakan institusi independen dan membuat strategi dalam melakukan pengawasan, laporan dan melakukan verifikasi terkait perubahan sistem hutan dan lahan gambut yang berhubungan dengan emisi gas rumah kaca

Membuat instrument pendanaan dalam bentuk kolaborasi dengan donatur oleh institusi keuangan yang terpercaya

Memilih provinsi yang akan dijadikan sebagai wilayah percontohan

Fase Kedua (Transformasi)

Fase kedua merupakan fokus upaya Indonesia dalam meningkatkan *capacity building*, perkembangan kebijakan dan implementasi hukum terkait kebijakan lingkungan, ditambah dengan menambah wilayah percontohan REDD+. Hal ini dilakukan untuk menciptakan mitigasi dengan skala besar dan juga menjadi kontribusi Indonesia bagi pengurangan emisi. Dalam fase ini, kurun waktu yang dimiliki agak ketat karena akan menjadi implementasi kebijakan dan fase untuk Indonesia menjadi negara yang siap berkontribusi mengurangi emisi dalam relel yang telah diverifikasi oleh UNFCCC.

Fase Ketiga (Implementasi Penuh)

Fase ini adalah penerimaan hasil bagi Indonesia setelah melakukan implementasi dari program pengurangan emisi. Dalam fase ini Indonesia akan menerima kontribusi tahunan untuk peran pengurangan emisi nasional yang sesuai dengan referensi yang telah diverifikasi oleh UNFCCC, kemudian Indonesia akan menerima

kontribusi finansial dari Norwegia sesuai dengan kinerja yang telah terverifikasi untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan strategi kebijakan REDD+.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini merupakan pembaruan dari penelitian-penelitian terdahulu yang bertemakan kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penelitian terdahulu yang pertama merupakan penelitian yang ditulis oleh Ningsih (2019) membahas tentang analisis kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia berdasarkan pandangan diplomasi lingkungan hidup dan dengan elemen diplomasi yang dikemukakan oleh Webster Hare. Ningsih menjelaskan bahwa hasil penelitian atas kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia merupakan kerjasama yang berjalan dengan baik meskipun memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Kerjasama ini masuk kedalam diplomasi di bidang lingkungan hidup dengan tujuan menyelamatkan hutan dengan kepentingan nasional yang berbeda antara Norwegia dan Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan untuk menyelamatkan hutan, Norwegia memiliki kepentingan untuk menciptakan citra yang baik dalam lingkup internasional dalam menangani isu lingkungan hidup yang terjadi saat ini.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Lady dengan judul Kerjasama Indonesia- Norwegia Melalui Skema REDD+ Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia (2018). Penelitian ini membahas tentang peran REDD+ dan penelitian ini dilakukan pada masa kerjasama ini masih dilakukan. Kerjasama ini memberikan peran yang cukup baik dimana hasil motarium pertama berhasil melestarikan hutan menyumbang

489.000 juta ton CO₂ untuk penyerapan gas rumah kaca. Dari kedua penelitian tersebut, pembaruan yang dituliskan dalam penelitian ini adalah penulis membahas kerjasama ini saat periode kerjasama antara Indonesia – Norwegia telah berakhir sehingga kajian yang dilakukan merupakan evaluasi dari kerjasama REDD+ Indonesia dengan Norwegia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu deskriptif analitis dengan melakukan evaluasi dari perjanjian kerja sama dengan hasil-hasil kegiatan yang sudah dilakukan pada fase 1-3 dengan indikator konsep Efektivitas yang kemukakan oleh Stephen P Robins (2002:112). Dalam jurnal yang ditulis oleh Armia (2002) tentang pembahasan pengaruh budaya terhadap efektivitas organisasi, Armia merangkum konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Robins. Efektivitas sendiri merupakan suatu tingkat pencapaian realisasi tujuan dari organisasi.

Terdapat empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu:

Melalui pendekatan pencapaian tujuan (*The Goal Attainment Approach*)

Pendekatan sistem (*The System Approach*)

Pendekatan konstituenti-strategis (*The Strategic –Constituencies*)

Pendekatan nilai-nilai persaingan (*The Competing-Value Approach*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan condong membahas efektivitas program kerjasama REDD+ dengan menggunakan pendekatan pertama dan kedua yaitu pendekatan pencapaian tujuan dan pendekatan sistem. Dua pendekatan ini menekankan terhadap hasil akhir dari tujuan organisasi dengan proses memasukkan kriteria-kriteria yang menjadi indikator efektivitas organisasi dalam

menjadi kelangsungan organisasi dalam jangka waktu yang panjang.

ANALISIS

Dalam perjanjian kerjasama REDD+ ini terdapat poin-poin yang diuraikan sebagai target dari fase satu, dua dan tiga. Ditinjau setiap poin tersebut terhadap hasil yang telah dilakukan. Jika sudah sesuai maka poin tersebut sudah efektif. Jika belum sesuai atau masih kurang maka belum efektif sehingga menjadi saran untuk program lanjutan. Poin-poin hasil yang diuraikan disesuaikan dengan kriteria yang telah dijelaskan dalam bagian gambaran umum sehingga dapat dianalisis keefektivitasan poin-poin hasil dari program kerjasama ini. Berikut merupakan hasil-hasil dari adanya kerjasama Indonesia-Norwegia dalam program REDD+:

Table 1. Hasil Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia

Sumber: Knowledge Center Perubahan Iklim Indonesia Climate Innovation in Action KCPI – IC ICan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/hasil-kerjasama/254-kerjasama-redd-indonesia-norwegia>)

No	Hasil	Efektif	Tidak Efektif	Kurang Efektif
1.	Tersusunnya Strategi Nasional REDD+	√		
2.	Tersusunnya Strategi dan Rencana Aksi Provinsi di 11 Provinsi	√		
3.	Provinsi percontohan pelaksanaan pertama di Indonesia yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua	√		
4.	Mendorong Moratorium Izin Baru melalui instruksi Presiden No.10/2011 pada 20 Mei 2011 mengenai Penundaan Pemberian Izin Baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut			√
5.	Pembentukan Kelembagaan REDD+ yaitu Badan Pengelola REDD+ pada tahun 2013. Fungsi Badan Pengelola REDD+ pada tahun 2015 dilebur kedalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	√		
6.	MoU Pelaksanaan REDD+ dengan 8 Provinsi dan 78 Kabupaten	√		
7.	Pengumpulan data Dasar dan Peta Kadastral			√
8.	Penguatan Kelembagaan melalui pengembangan sistem FREL dan MRV			√
9.	Pembangunan Sistem Registri Nasional	√		
10.	Pengembangan FREL	√		
11.	Penyiapan Instrumen pendanaan REDD+	√		
12.	Dukungan Verifikasi Pemetaan Wilayah Adat di Kalimantan Tengah			√
13.	Pengembangan Desa Hijau di Provinsi percontohan Kalimantan Tengah	√		
14.	Penguatan Kapasitas Sistem Pemantauan Karhutla: Integrasi dan Institusional Sistem Sipongi – KMS dan Siandini	√		
15.	Pencegahan Karhutla berbasis masyarakat	√		
16.	Audit Kepatuhan (Compliance Audit) pada perusahaan-perusahaan pemegang konsensi	√		
17.	Advokasi Peraturan Presiden tentang penegakan Hukum Pidana Terpadu		√	
18.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Mahkamah Agung RI		√	
19.	Dukungan Peningkatan Mekanisme dan Kebijakan Penanganan Konflik			√
20.	Pengembangan Potensi Perhutanan Sosial Melalui program Livelihood di Sumatera Barat dan Riau			√

Dengan penandaan diatas, maka kerjasama ini dapat dianalisis dan diketahui sebagai kerjasama yang efektif, namun masih memerlukan adanya keberlanjutan sebagai proses menuju kerjasama yang sempurna. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dari kesuksesan kerjasama ini menurut tulisan Aprilia (2016), yaitu;

Adanya kendala teknis dari mekanisme REDD+

Permasalahan kultural dari masyarakat adat provinsi implementasi program REDD+

Bubarnya badan pengelola REDD+

Bubarnya Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)

Moratorium Pengeluaran Izin atas pengelolaan hutan alam dan lahan gambut

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Dengan hasil analisis poin hasil dengan kriteria yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin hasil kerjasama REDD+ Indonesia dengan Norwegia yang bersifat efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Beberapa poin yang efektif memiliki kecondongan terhadap upaya yang terfokus pada pemerintah, sedangkan beberapa yang kurang efektif merupakan implementasi kriteria *letter of intent* terhadap masyarakat yang ada di sekitar provinsi percontohan program REDD+. Dalam poin yang tidak efektif merupakan tindakan mitigasi yang menurut penulis masih merupakan proses yang belum berkesinambungan dengan hasil akhir dari adanya *framework* ini. Kerjasama ini berakhir pada tahun 2021 dengan mengalami keterlambatan pencapaian target dikarenakan beberapa tantangan yang berhubungan dengan mekanisme teknis antara Indonesia dan juga Norwegia, namun kerjasama ini tetap

memberikan hasil yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon gas rumah kaca dengan dukungan finansial yang diberikan oleh Norwegia.

Saran :

Saran penulis bagi penelitian selanjutnya adalah penerusan kegiatan-kegiatan yang telah sesuai kriteria *letter of intent* yang diberikan untuk dapat menyelesaikan target kerjasama REDD+ selanjutnya dan perlunya pengkajian kriteria ulang bagi hasil-hasil yang tidak efektif untuk diganti atau ditambahkan dengan program lain yang lebih condong terhadap lingkungan itu sendiri daripada terhadap teknis kebijakan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Dwi Monica. (2016). "*Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam Skema REDD+ di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (2013-2015)*", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional vol.3 no.2 hlm. 1-15*. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/205789/faktor-faktor-penghambat-implementasi-kerjasama-indonesia-dan-norwegia-dalam-ske>
- Armia, Chairuman. (2002). "*Pengaruh Budaya Terhadap Efektivitas Organisasi : Dimensi Budaya Hofstede*", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia vol.6 no.1 pp.103-116*. Diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/870/797>
- CNN Indonesia. (2021). "*3 Negara Paru-paru Dunia, Brasil hingga RI*". CNNIndonesia.com. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211105180906-113-717321/3-negara-paru-paru-dunia->

- brasil-hingga-ri/2
Forest Carbon Partnership Facility. (2022). "what is REDD+". Retrieved from <https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd#:~:text=REDD%2B%20stands%20for%20countries'%20efforts,enhancement%20of%20forest%20carbon%20stocks>.
- Indrarto, Giorgio Budi, Prayekti Murhajanti, Josi Khatarina, dkk. (2013). "Konteks REDD+ di Indonesia". *Center for International Forestry Research*. Diakses melalui https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP105Resosudarmo.pdf
- Lady, Nadhea. (2018). "Kerjasama Indonesia- Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelematan Hutan Indonesia", *Global Political Studies Jurnal vol.2 no.1*, pp.24-40 <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2007/1351>
- Ningsih, Pramesthi Chyani Hedi. (2019). "Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement", *Insignia Journal of International Relations vol.6 no.2* pp.83-93. Diakses melalui <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/1504/1208>
- REDD Monitor Org. (2010). "Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation". Diakses melalui <https://redd-monitor.org/wp-content/uploads/2010/05/Norway-Indonesia-LoI.pdf>
- Resosudarmo, Ida Ayu Pradnja. (2021). "Lessons from the Indonesia-Norway REDD+ break up". *East Asia Forum*. Diakses melalui <https://www.eastasiaforum.org/2021/11/10/lessons-from-the-indonesia-norway-redd-break-up/>
- Satwika, Wira Fadhil. (2020). "Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia", *Journal of International Relations*, vol 6 no.2 pp.288-298. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/27283/23843>

KETAHANAN PANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Auderey G. Tangkudung¹, Jemmy Kaseger²
Audreygdt2018@gmail.com

Abstrak

Ketahanan pangan Indonesia masih rapuh, salah satunya ditandai dengan tingkat kelaparan yang berkelanjutan. Keadaan ini didorong oleh pangan Indonesia dan upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Perubahan iklim merupakan fenomena anomali iklim yang memerlukan perhatian serius karena saat ini menjadi isu strategis dan dianggap berdampak besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk pertanian. Perubahan iklim terus menyebabkan sektor pertanian mengalami penurunan produktivitas yang masih terkendala oleh berbagai faktor, salah satunya alam atau perubahan iklim. Pengaruh perubahan iklim mempengaruhi sistem pangan, termasuk produksi pangan, penyimpanan, akses dan stabilitas harga. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder dengan metode wawancara, observasi, dan penelusuran kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi ketahanan pangan. Oleh karena itu, mengatasi kerentanan ketahanan pangan memerlukan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim.

Kata Kunci: Ketahanan pangan dan Perubahan iklim

I. Latar Belakang

Penyediaan bahan pangan pokok sangat penting untuk menjaga stabilitas negara. Mengenai dokumen Rencana Pembangunan Pertanian Indonesia 2015-2019, beras merupakan makanan pokok mayoritas (>95%) penduduk Indonesia. Beras memegang peranan penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional sebagai bahan pangan pokok. Beras penting bagi perekonomian Indonesia karena alasan berikut. (1) Sistem agribisnis padi memperkuat ketahanan pangan nasional. (2) Kontributor utama budidaya padi dan sistem pertanian nasional padat karya. (3) Banyak petani padi yang masih dianggap miskin sehingga rentan terhadap kerugian produksi. Sektor pertanian selama lima tahun terakhir (2015-2019)

menganggap sektor pertanian sebagai paradigma pembangunan. Kekuatan pendorong transformasi pembangunan berkelanjutan: transformasi yang seimbang dan komprehensif, termasuk transformasi demografi, ekonomi, lintas sektor, spasial, kelembagaan dan pembangunan. Paradigma ini mengarahkan sektor pertanian untuk mencakup berbagai kepentingan dan multifungsi. Selain sebagai sektor ketahanan pangan utama, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya, antara lain memecahkan masalah lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan, dll) dan menyediakan fasilitas pariwisata (agritourism).

Mengingat posisi beras yang strategis dalam pembangunan nasional Indonesia dan paradigma sektor pertanian masa

depan, produksi beras dalam negeri mendapat banyak perhatian dari pemerintah Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 81,38 juta ton gabah kering giling (CKG) pada 2017. Produksi ini lebih tinggi dari satu dekade terakhir, yaitu 57,15 juta ton GKG pada tahun 2007 (perbaikan pupuk, pupuk organik dan irigasi). Di balik keberhasilan inovasi pertanian tersebut, perubahan iklim, terutama cuaca ekstrem, menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas produksi beras dalam negeri. Pertumbuhan dan perkembangan padi yang mempengaruhi produksi padi juga dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan iklim global berdampak besar pada produksi pangan. Perubahan iklim diproyeksikan untuk mengurangi produksi tanaman di seluruh dunia, terutama di daerah pertanian lintang rendah yang sangat terpengaruh. Dampak negatifnya adalah suhu lintang rendah berada dalam toleransi tanaman (kurang dari 10 ° C dan di atas 29 ° C) 198. Berdasarkan simulasi model tanaman, kenaikan suhu 1°C dan turun hujan 5% akan menurunkan produktivitas padi sebesar 0,33 ton/ha 199.

Di sisi lain, kejadian cuaca ekstrem yang sering menyebabkan banjir dan kekeringan di Indonesia, juga berdampak negatif terhadap produksi pangan. Prediksi pemanasan global dapat meningkatkan frekuensi kejadian El Nino Southern Vibration (ENSO) yang ditandai dengan kejadian El Nino dan Lania. El Nino adalah peristiwa musim panas dan kekeringan yang relatif panjang, sedangkan La Nina ditandai dengan intensitas curah hujan yang tinggi dan dampak banjir. Pahami potensi dampak Perubahan iklim memerlukan langkah-langkah positif atau disebut adaptasi terhadap perubahan iklim. Beradaptasi dengan perubahan

iklim bertujuan untuk memanfaatkan dampak positif perubahan iklim dan meminimalkan dampak negatifnya. Kegiatan adaptasi dapat dilakukan tidak hanya dengan perbaikan infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas petani dan bahan baku. Khusus untuk sektor pertanian, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim (Pedum) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011 untuk langkah-langkah adaptasi perubahan iklim dan pembangunan pertanian terhadap dampak perubahan iklim. Strategi dari Keamanan Pangan Menurut Undang-Undang 2012 No. 18, dari sudut pandang makanan, ketersediaan, kualitas, keamanan, dan agama bergizi, kepercayaan, budaya masyarakat bertentangan tidak terjangkau, tidak terjangkau, tidak terjangkau, tidak terjangkau, tidak terjangkau, tidak terjangkau, tidak terjangkau. Deskripsi Romawi Pemupukan Dunia (Romansa Biro Keamanan Pangan Biro Pupuk Pupuk) diumumkan pada KTT NOOD (Summit Dunia) dunia pada 13 November 1996 dan keamanan pangan sebagaimana didefinisikan,

"Eshahihei, semua orang, akses ke kebutuhan makanan untuk kehidupan yang agresif dan sehat dan akses makanan yang cukup, aman dan bergizi untuk mengisi makanan" setiap kali, setiap individu tercapai. Untuk hidup sehat dan diproduksi, sudah cukup untuk memiliki akses fisik dan ekonomi pangan yang cukup dan bergizi dan bergizi. Setelah itu, masalah ini adalah bahwa perubahan iklim telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, sehingga ada syarat ketahanan pangan nasional. Perubahan iklim tak terhindarkan jika ada Tidak ada strategi untuk pemasokan makanan nasional, terutama beras, terutama. Populasi terus

tumbuh, sehingga orang disertai dengan penambahan makanan dari penambahan makanan sebagai makanan sebagai makanan yang meningkat. Bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi pertanian?

Dampak perubahan iklim

Perubahan iklim yang tercermin dari perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu dan naiknya permukaan air laut mempengaruhi sistem produksi pertanian tanaman pangan. Misalnya, perubahan pola curah hujan telah meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir dan kekeringan, dan naiknya permukaan laut telah mengurangi lahan pertanian pesisir. Dampak perubahan iklim sangat signifikan dan perlu diantisipasi oleh pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan sejak dini. Dampak utama perubahan iklim pada sektor pertanian antara lain perubahan pola curah hujan, iklim ekstrim seperti El Nino (kekeringan) dan La Nina (banjir), kenaikan suhu dan naiknya permukaan air laut. Tanaman pangan (musiman) relatif rentan terhadap perubahan iklim selama periode kelangkaan dan kelebihan air. Akibat iklim ekstrim bagi tanaman pangan termasuk kerusakan sumber daya lahan, berkurangnya luas tanam, berkurangnya indeks panen (IP), meningkatnya kekuatan epidemi hama (organisme perusak tanaman), berkurangnya produktivitas, dan berkurangnya produktivitas, termasuk hama atau gagal panen. Tanpa harapan dan intervensi, akan sulit untuk mencapai tujuan swasembada pangan yang diprogramkan oleh pemerintah di beberapa daerah secara berkelanjutan. Namun dengan prakiraan dan intervensi yang tepat, perubahan iklim memberikan peluang bagi pengembangan sektor pertanian. Kajian ini membahas, meneliti, mengkaji, menganalisis dan menjelaskan

peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perubahan iklim sebagai elemen pembangunan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini perlu menghasilkan konsep dan strategi untuk mendukung kepentingan publik.

II. Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan?
2. Bagaimana mengantisipasi perubahan iklim untuk dapat menjaga program ketahanan pangan di masyarakat?
3. Apakah program ketahanan pangan yang dilakukan sudah sesuai dan dapat berperan efektif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan?

III. Tujuan Penelitian:

1. Menjawab bagaimana pemerintah mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan.
2. Menyusun strategi ketahanan pangan saat ini dan proyeksi rencana yang akan datang.
3. Membuat dan menyusun model & strategi Peran ketahanan pangan dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

IV. Landasan Teori

Definisi Ketahanan Pangan Dari Berbagai Sudut Pandang¹ Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sementara USAID (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai satu kondisi dimana masyarakat

pada satu yang bersamaan memiliki akses yang cukup baik secara fisik maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dietary dalam rangka untuk peningkatan kesehatan dan hidup yang lebih produktif. Perbedaan mendasar dari dua definisi ketahanan pangan tersebut yaitu pada UU No 7/1996 menekankan pada ketersediaan, rumah tangga dan kualitas (mutu) pangan. Sedangkan pada definisi USAID menekankan pada konsumsi, individu dan kualitas hidup. FAO (1997) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Hal ini berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan yang memadai, stabilitas dan akses terhadap pangan-pangan utama. Determinan dari ketahanan pangan dengan demikian adalah daya beli atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi biaya hidup (FAO, 1996)

FIVIMS (2005) mengatakan bahwa ketahanan pangan dimana kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selera (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat. Sementara Mercy Corps (2007) mendefinisikan ketahanan pangan adalah keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan selera untuk hidup produktif dan sehat.

Berdasarkan pengertian dan konsep tersebut di atas maka beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu

”ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan”. Salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik (Arifin, 2004). Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko terhadap akses dan ketersediaan pangan tersebut merupakan determinan yang esensial dalam ketahanan pangan (Von Braun et al, 1992). Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :

1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu
2. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif

Namun sejumlah konsep di atas tidak secara tegas memasukkan keamanan tenurial sebagai unsur ketahanan pangan, padahal produksi pangan dihasilkan dari sistem pertanian. Iwan Isa (Direktur Penatagunaan Tanah BPN-RI) mengatakan bahwa produksi pangan menjadi unsur utama dalam memperkuat ketahanan pangan. Upaya ke arah itu menjadi penting. Upaya produksi dalam memperkuat ketahanan pangan dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu jaminan ketersediaan tanah untuk produksi pertanian dan peningkatan akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian.² Artinya ketahanan pangan akan juga terjadi dengan adanya jaminan keamanan tenurial untuk produksi pangan.

Konsep dan Teori Perubahan Iklim

Perubahan iklim. kita sering mendengar istilah perubahan iklim. Namun, sebenarnya apa itu perubahan iklim? Hal ini akan coba saya bahas dalam post kali ini. Sebelum membahas definisi perubahan iklim, terlebih dahulu kita harus memahami tentang iklim. Apa itu iklim?

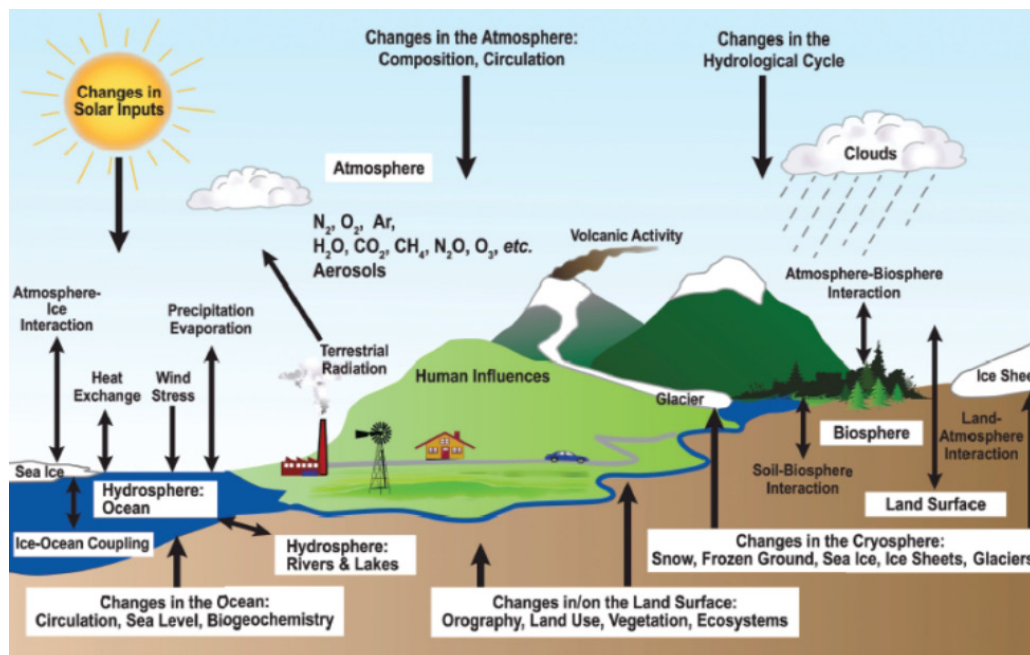
Climate is usually defined as the long-term aggregate weather conditions over a place which displays large variability in space and time (Pant, et al., 2018).

Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa iklim dapat ditunjukkan secara statistik dan digunakan untuk menjelaskan kondisi cuaca pada satuan ruang dan waktu. Iklim dalam statistik biasanya direpresentasikan dalam bentuk nilai rerata, meskipun secara detil, definisi iklim lebih dari nilai rerata. Bayangkan bila dalam suatu tempat memiliki nilai maksimal temperatur yang tinggi pada satu waktu dan diwaktu yang lain memiliki nilai minimal temperature yang rendah akan memiliki nilai rerata yang sama dengan tempat yang tidak memiliki kontras nilai maksimal-minimal yang besar. Oleh karena itu perlu diperhatikan berbagai nilai statistik lain dalam pendefinisian iklim disuatu tempat.

Permasalahan lain dalam mendefinisikan iklim adalah seberapa lama durasi dan pada waktu apa yang harus kita gunakan untuk mendefinisikan iklim suatu tempat. Secara umum para peneliti umumnya menggunakan waktu 30 tahun pada periode 1981-2010 sebagai acuan iklim normal. Namun hal ini bergantung pada kebutuhan dari para peneliti terkait dengan variabilitas dan fenomena yang ingin dikaji. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, definisi iklim juga tidak hanya terbatas hanya pada satu atau dua variabel (umumnya temperature dan curah

hujan), namun juga angin, kelembapan, dan tingkat radiasi matahari. Secara jelas bahwa iklim suatu tempat tidak mungkin 100% sama dengan suatu tempat yang lain, namun untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji iklim, pengkelasan iklim (klasifikasi iklim) dilakukan dengan mengabaikan beberapa detil.

Secara sederhana, beberapa faktor yang mengontrol iklim diantaranya adalah (1) distribusi daratan dan lautan, (2) pengaruh elevasi, dan (3) sirkulasi atmosfer dan laut (Aguado & Burt, 2015). Bergantung pada tiap lokasi, faktor pengontrol iklim tersebut dapat berbeda. Contohnya saja angin yang berhembus dari lautan yang dingin menuju daratan akan memiliki iklim yang berbeda angin serupa yang berhembus dari lautan yang hangat. Contoh lain yaitu gradual iklim pada wilayah dibagian atas sirkulasi angin gunung dan pada wilayah dibagian bawah sirkulasi angin gunung. Beberapa contoh tersebut menyatakan bahwa tiap tempat memiliki iklim lokal tersendiri. Berdasarkan penjelasan diatas, kita tau bahwa iklim memiliki karakteristik yang sangat dinamis, dimana tiap tempat dan waktu memiliki kondisi iklim yang berbeda satu sama lain. Dalam beberapa studi, perubahan iklim dan variabilitas iklim hampir serupa dan harus diperhatikan karena pada dasarnya memiliki pengertian yang berbeda. Sebagai penjelasan bahwa perubahan dan variabilitas iklim merupakan sistem yang kompleks, dapat dilihat pada gambar dibawah skema variabilitas dan perubahan iklim



Skema proses yang mendorong variabilitas dan perubahan dalam sistem iklim. Source: IPCC (2007) dalam Barry & Chorley (2010).

Climate variability, as defined by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), refers to fluctuations in the mean state and other statistics (such as the standard deviation, extremes, or shape of frequency distribution) of climate elements on all spatial and temporal scales beyond those of individual weather events (Barry & Chorley, 2010).

Climate change, by contrast, is viewed by the IPCC as a statistically significant variation in the mean state of the climate or in its variability persisting over an extended period, typically decades or longer (Barry & Chorley, 2010).

Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa variabilitas iklim dapat diasosiasikan dengan proses alami dari dalam sistem iklim itu sendiri atau variasi pada tenaga pengontrol iklim alami maupun antropogenik sedangkan untuk perubahan iklim tidak hanya berasosiasi dengan

kedua faktor tersebut namun ditambah dengan proses eksternal alami maupun antropogenik dan perubahan yang terjadi dilihat dari komposisi atmosfer maupun penggunaan lahan. Meskipun demikian, kedua definisi tersebut masih sulit untuk dibedakan sehingga definisi lain yang dapat digunakan untuk membantu pemahaman terkait perubahan iklim diambil dari UNFCCC yang disebut dibawah ini.

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) define climate change as 'a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable timescales' (Barry & Chorley, 2010).

V. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder dengan metode

wawancara, observasi, dan penelusuran kepustakaan. Menurut Sugiyono (2012, 291), literature review berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi penelitian lainnya terkait ketahanan pangan dan perubahan iklim. Selain itu, tinjauan pustaka sangat penting untuk melakukan penelitian, karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah. Data sekunder dari berbagai referensi terkait dikumpulkan dan dianalisis.

VI. PEMBAHASAN

Perubahan iklim menyebabkan krisis sosial-ekologis yang meluas dan parah di seluruh dunia. Masalahnya diperumit oleh fakta bahwa krisis sosial-ekologis baru tidak merata. Negara-negara miskin lebih rentan terhadap risiko perubahan iklim daripada negara-negara maju. Orang berpenghasilan rendah dan miskin lebih rentan terhadap perubahan iklim daripada orang berpenghasilan menengah dan kaya. Demikian pula, perempuan dan anak-anak, terutama rumah tangga pedesaan yang miskin, adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Pandemi corona (COVID19) yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, telah banyak memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk krisis pangan. Risiko kekurangan pangan telah muncul sebagai dampak buruk dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan kelaparan di banyak bagian dunia. Presiden Joko Widodo juga mencontohkan risiko krisis pangan Indonesia.

Masalah ketahanan pangan Indonesia perlu segera mendapat perhatian. (1) Rata-rata usia petani semakin tua, dan diperlukan upaya untuk menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan yang menarik bagi kaum muda. Untuk itu perlu diperkenalkan berbagai inovasi

teknologi pertanian yang dekat dengan pola pikir dan gaya hidup anak muda. (2) Membangun rantai pasok yang jelas dan efisien untuk memperbaiki rantai pasok, struktur harga dan suplai bahan makanan. Memperkuat komitmen kami untuk memprioritaskan penggunaan makanan lokal (local food) dan (3) melakukan pemborosan. Produksi pertanian harus menganut teknologi produksi nol limbah dengan pendekatan ekonomi sirkular. Kondisi ini mengingatkan perlunya tindakan segera untuk mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan kelestarian lingkungan di sektor pangan. Ketahanan pangan dapat dicapai ketika berinteraksi dengan dan terkait erat dengan toleransi perubahan iklim.

Di era new normal ini, seluruh dunia harus memprioritaskan program ketahanan pangan, energi, dan air sebagai kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan paparan di atas, pembahasan Climate Corner membahas tentang potensi pembangunan gizi sebagai penjamin kehidupan di masa pandemi COVID 19 dan hubungannya dengan ketahanan lingkungan dan iklim sebagai penjamin pembangunan berkelanjutan. "Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman paling serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan," kata Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Tanpa makanan, kehidupan manusia menjadi kacau. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan semakin meningkat setiap tahunnya. Ini berarti bahwa semakin besar populasi, semakin banyak makanan yang harus disediakan negara untuk populasi tersebut. Mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Berdasarkan data BPS, konsumsi beras nasional pada tahun 2017 sebesar 111 kilogram per orang per tahun. Menghitung

jumlah penduduk Indonesia, total konsumsi beras saat ini sekitar 30 juta ton per tahun. Kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi melalui produksi dalam negeri dan impor. Produksi beras dalam negeri yang dihasilkan petani sekitar 32 juta ton, dan luas areal persawahan 7,46 juta hektar. Produksi akan terpenuhi kecuali terganggu oleh faktor-faktor seperti hama dan penyakit. Namun, ada banyak faktor yang mempengaruhi produksi padi, salah satunya adalah dampak dari perubahan iklim. Penurunan produksi beras akibat perubahan iklim mengganggu pasokan beras dan ketahanan pangan negara. Perubahan iklim dikaitkan dengan peningkatan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan pelepasan karbon dioksida dan gas lain yang diklasifikasikan sebagai gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer. Gas rumah kaca yang mengelilingi bumi memerangkap panas dan meningkatkan suhu bumi.

Pada titik ini, peningkatan gas rumah kaca di atmosfer tidak lagi terjadi secara alami, tetapi disebabkan oleh aktivitas manusia (buatan). Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), perubahan iklim disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan dan mempengaruhi komposisi atmosfer bumi dalam segala bentuk iklim yang ada. Tingkat perubahan iklim selama periode waktu tertentu. Di PBB tentang Perubahan Iklim, karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), oksida nitrit (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC) dan sulfur heksafluorida (SF₆) diklasifikasikan sebagai gas rumah kaca penyebab. Sebagai negara agraris, sektor pertanian telah menyerap 33,4 juta tenaga kerja. Jika perubahan iklim mempengaruhi sektor ini, jumlah orang yang bekerja akan menjadi bingung. Hal ini karena pertanian

sangat bergantung pada siklus air dan perubahan iklim untuk mempertahankan produktivitasnya. Tersedia air yang cukup, kesuburan tanah yang baik, pengendalian wabah hama dan penyakit dapat dikendalikan, dan produksi akan menjamin keberlanjutan tanpa adanya kejadian cuaca ekstrim. Perubahan Iklim dan Dampaknya

Terhadap Produksi Pangan.

Perubahan iklim adalah fenomena alam yang mengubah nilai faktor iklim yang dipercepat oleh alam dan aktivitas manusia di planet ini. Dari awal Revolusi Industri hingga saat ini telah menaikkan suhu dunia. Perubahan iklim tidak lagi menjadi perdebatan tentang keberadaannya, tetapi mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan, terutama sektor pertanian, yang dianggap serius di seluruh komunitas, otoritas, negara, dan bahkan di seluruh dunia. ditunjukkan. Produktivitas dan kemajuan di sektor pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama perubahan iklim dan anomali. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak partai politik yang menyatakan bahwa pertanian di sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang tidak menentu. Penurunan produksi pertanian, khususnya sumber pangan pokok, pada hakikatnya tidak hanya disebabkan oleh semakin berkurangnya kesuburan tanah akibat penggunaan lahan yang intensif dan penyempitan lahan pertanian, tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor dan anomali perubahan iklim. Hal ini karena lingkungan tumbuh merupakan satu kesatuan sistem interaksi, sehingga paling tidak satu faktor akan membatasi perkembangan seluruh tanaman. Diperlukan upaya strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan

yang erat kaitannya dengan perubahan dan anomali iklim, salah satunya adalah adaptasi dan perubahan pengelolaan lingkungan untuk budidaya.

Upaya ketahanan pangan Indonesia saat ini menghadapi banyak kendala dan masalah, terutama karena ketersediaan pangan jauh lebih rendah daripada kebutuhan pangan. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,49% dari tahun 1990 hingga 2000, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,70% pada tahun 2009, peningkatan daya beli dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas produksi pangan dalam negeri relatif lambat, stagnan akibat persaingan penggunaan sumber daya lahan dan air, produktivitas lahan stagnan dan jumlah tenaga kerja pertanian yang menurun. Ketidak seimbangan ini mendorong kebijakan impor pangan untuk menjaga dan meningkatkan pasokan pangan negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan ketersediaan pasokan pangan.

Strategi

Setidaknya ada beberapa pendekatan yang bisa diaplikasikan yaitu antisipasi, mitigasi dan adaptasi. Langkah Antisipasi dilakukan untuk menyiapkan berbagai arah dan strategi kebijakan, pedoman dan teknologi adaptif. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi laju perubahan iklim melalui upaya penerapan teknologi rendah emisi gas rumah kaca (GRK) atau sebaliknya yang dapat meningkatkan produksi atau simpanan karbon. Sedangkan strategi Adaptasi dilakukan melalui upaya penyesuaian aktivitas dan teknologi pertanian untuk menekan dampak perubahan iklim tersebut. Secara teknis strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui: (1) optimalisasi pengelolaan lahan dan air, (2) pengaturan pola tanam,

(3) perakitan teknologi adaptif, misalnya melalui penyediaan varietas unggul toleran kekeringan, toleran rendaman, toleran salinitas, tahan hama penyakit dan berumur genjah, (4) pengembangan sekolah iklim, pengembangan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), pengembangan SRI (system of rice intensification), serta (5) pengembangan sistem informasi iklim.

Si KATAM dan Si PERDITAN

Sistem Informasi Kalender Tanam (KATAM) telah lama diperkenalkan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian. Si KATAM berbasis web yang diluncurkan pada tanggal 27 Desember 2011 ini telah lama diketahui dan digunakan secara luas termasuk di kalangan petugas lapangan dan petani. Selain itu juga telah diperkenalkan Si PERDITAN (Sistem Informasi Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian) yang diluncurkan 5 Desember 2018 oleh Pusdatin Kementerian pertanian. Kedua sistem informasi tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam upaya antisipasi dampak perubahan iklim di sektor pertanian. Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang mesti terjadi, dan sektor pertanian yang sangat merasakan dampaknya. Oleh karena itu dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, maka langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi sangat dibutuhkan dan perlu didukung oleh pihak terkait. Peran petani dan penyuluh juga sangat penting dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim ini.

Penyuluh pertanian merupakan mediator yang paling handal dan strategis dalam menyampaikan informasi yang berkaitan perubahan iklim di wilayah kerjanya masing-masing. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pengembangan sistem perlindungan usahatani dari kegagalan akibat perubahan

iklim atau crop weather insurance. Kini saatnya semua pihak yang terkait untuk bersinergi dan berkiprah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangkaantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional.

Dampak pada sektor pertanian

Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari kekeringan, naiknya permukaan air laut dan gelombang panas hingga kejadian cuaca ekstrem yang lebih sering dan parah. Hal ini juga berlaku pada sektor pertanian, terutama pada tanaman pangan. Las dan Surmaini (2011) berpendapat bahwa pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, paling rentan terhadap perubahan iklim karena tiga faktor utama: faktor biofisik, genetik dan administrasi meningkat. Beberapa penelitian telah dilakukan tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap produksi pangan. Perubahan iklim telah mempengaruhi penurunan produksi pangan, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penurunan produksi pangan terutama disebabkan oleh peningkatan suhu dan garam tanah, kejadian cuaca ekstrim dengan kekeringan dan banjir, penyebaran hama dan penyakit, dan penurunan kapasitas produksi karena rusaknya infrastruktur pertanian.

Sebuah studi oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) (2007) di daerah tropis menemukan bahwa kenaikan suhu dan perubahan iklim mengurangi produksi jagung dan beras. Kenaikan suhu 2 derajat Celcius akan menurunkan produksi jagung sebesar 20% dan produksi beras sebesar 10%. Menurut survei Asian Development Bank (ADB), Filipina, Indonesia, Vietnam dan Thailand memperkirakan hasil padi

pada tahun 2100 akan turun rata-rata sekitar 50% dibandingkan tahun 1990 dibandingkan tahun 1990 tanpa perbaikan peralatan teknis. Diperkirakan produksi beras akan turun 34% di Indonesia dan 75% di Filipina. Salah satu Naylor dkk. Sebuah studi tahun 2007 juga menunjukkan bahwa penurunan produksi pangan di Jawa dan Bali disebabkan oleh kekeringan. Penurunan produksi pangan mencapai 18 persen antara Januari dan April. Adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim

Adaptasi diperlukan untuk mengurangi dampak buruk dan penyimpangan perubahan iklim pada sektor pertanian. Pertama, mengadaptasi pola budidaya dan rencana tanam dengan menanam kartu kalender sesuai wilayah masing-masing. Pola tanah dapat diperoleh dengan dukungan penasihat pertanian atau kantor pertanian setempat. Kondisi Cuaca Ekstrem Kedua (Hujan atau Kekeringan) dan Pemilihan Varietas Benih Tahan Penyakit Kumpulkan air hujan pada musim hujan ke-3 dan gunakan pada musim kemarau. Membuat bak untuk penyimpanan air hujan atau penyimpanan dengan bendungan. Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli di tingkat dunia, Asia dan Indonesia, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, terlihat sangat realistis. Jika hal ini tidak segera diatasi, Indonesia tidak bisa mengesampingkan cadangan pangan khususnya beras. Beberapa kasus tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, untuk menentukan langkah-langkah strategis adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah, khususnya di Indonesia. Perubahan iklim adalah fenomena yang ditandai dengan perubahan pola iklim dunia, yang mengakibatkan cuaca tidak stabil dan menghambat kelangsungan

hidup manusia dan tumbuhan. Tujuh dari fenomena El Nino kuat yang terjadi dalam dua dekade terakhir, disertai dengan fenomena La Nina yang hampir bersamaan, telah menyebabkan kekeringan yang cukup parah. Peningkatan emisi dan konsentrasi dari gas rumah kaca (GRK) menyebabkan pemanasan global, diikuti oleh kenaikan permukaan laut akibat pemuain dan pencairan es di kutub. Naiknya permukaan laut meningkatkan energi yang tersimpan di atmosfer, sehingga memfasilitasi perubahan iklim, termasuk El Nino dan La Nina. Fenomena El Nino dan La Nina memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi meteorologi/iklim wilayah Indonesia, dimana letak geografi kepulauan tersebut. Sektor pertanian paling rentan terhadap perubahan iklim karena mempengaruhi pola tanam, waktu tanam, indeks tanam, produksi dan kualitas hasil. Data menunjukkan bahwa perubahan iklim berupa pemanasan global dapat menurunkan produksi pertanian sebesar 5-20% (Suberjo, 2009). Perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan banjir khususnya, yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman.

Hal ini dilakukan melalui pola dan waktu penanaman serta dampaknya terhadap indikator/intensitas perkebunan (IP). Ketiga faktor pertanian tersebut berkaitan erat dengan perubahan curah hujan dan pola (ketersediaan air), perubahan musim (sebelum dan sesudah, dan lamanya musim hujan dan kemarau). Peristiwa El Nino diperkirakan meningkatkan luas areal padi kering dari 0,31,4% menjadi 3,17,8%. Pada kasus La Nina, luasnya 0,0040,41% sampai 0,041,87%. Sebaliknya, pada tahun hujan (La Nina), luas wilayah yang terkena banjir meningkat dari 0,752,68% menjadi 0,972,99%. Penurunan produksi akibat banjir dan kekeringan akan meningkat dari 2,45% menjadi lebih dari 10% (Badan

Litbang, 2011). Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dan merupakan negara yang paling terkena dampak perubahan iklim, terutama kekeringan dan banjir. Fenomena ini mengurangi produksi dan kapasitas pangan. PDB Indonesia, produk domestik bruto, menyumbang 15% dari sektor pertanian, dan 41,5% dari angkatan kerja bergantung pada sektor pertanian. Cuaca ekstrim antara lain menyebabkan:

- Panen dan gagal panen, indeks hasil yang lebih rendah menyebabkan produktivitas dan produktivitas yang lebih rendah.
- Kerusakan sumber daya lahan pertanian.
- Meningkatnya frekuensi, derajat dan intensitas kekeringan.
- Peningkatan kelembaban. Kapan
- Peningkatan intensitas gangguan hama tanaman (OPT). Kekeringan dan banjir mempengaruhi produksi melalui luas tanaman, wabah hama, pertumbuhan tanaman dan produktivitas.

El Nino dan kekeringan berdampak lebih besar pada areal tanaman untuk semua komoditas daripada produktivitas. Perubahan dan perubahan iklim, bersama dengan semua efek itu, dapat menyebabkan hilangnya produksi pangan. Padi 20,6%, jagung 13,6%, dan kedelai 12,4% (Handoko et al. 2008) Banjir dan kekeringan dapat mengganggu tanaman di semua tahap mulai dari pembibitan hingga panen. Gangguan panen dapat berupa hasil panen yang buruk setelah disemai, kerusakan tanaman karena banjir, atau kotoran. Selain itu, peningkatan intensitas banjir secara tidak langsung mempengaruhi produksi melalui peningkatan epidemi karena hama dan penyakit tanaman. Risiko dampak perubahan iklim perlu diprediksi dengan mencoba memanfaatkan iklim sebagai peluang diversifikasi, peningkatan kualitas

produk, dan mitigasi risiko.

Pertanian cerdas, solusi ketahanan pangan untuk mengatasi pandemi dan perubahan iklim.

Ketahanan pangan penting dalam hal ketersediaan, akses, penggunaan, keamanan dan stabilitas pangan di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Tentunya untuk melawan penyakit dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat dari COVID-19, masyarakat membutuhkan ketersediaan makanan yang cukup dan bergizi. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat menjaga stabilitas pangan dalam menghadapi perubahan yang dinamis. Perubahan masalah tersebut tentunya berkaitan dengan iklim. Fenomena global yang ditandai dengan perubahan suhu dan pola curah hujan. Ketika suhu rata-rata permukaan bumi naik, permukaan air laut naik dan terjadi cuaca yang tidak normal. Cuaca ekstrem ditandai dengan perubahan pola curah hujan, kekeringan jangka panjang, dan kekurangan air bersih. Bagaimanapun, itu akan mempengaruhi pertanian dan produksi pangan. Hal ini tentu mempengaruhi ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan yang cukup tersedia baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam dan bergizi untuk menyediakan pangan bagi bangsa adalah suatu syarat. Adil dan terjangkau, sesuai dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat. Cuaca ekstrem dapat mengubah waktu panen, meningkatkan suhu dan suhu air laut, serta mempersulit distribusi makanan dalam rantai pasokan. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari masalah ini?

Kenalan dengan Smart Farming

Tahukah Anda bahwa yang disebut dengan smart farming atau lebih dikenal

dengan smart farming adalah pertanian yang menggunakan teknologi informasi? Ini mencakup data yang lebih kompleks dan akurat tentang proses pertanian yang dapat diakses melalui ponsel dan perangkat lain. Menurut buku "Internet-based Smart Agriculture of Things in Greenhouses", kegiatan pertanian pintar mencakup informasi tentang kondisi cuaca, waktu tanam, dan waktu panen untuk spesies tanaman tertentu. Namun juga dijelaskan waktu panen yang tepat, penyediaan air irigasi sesuai kebutuhan, dan cara budidaya yang tepat dan benar untuk mencapai produksi yang tinggi. Perangkat digital atau aplikasi online memudahkan petani untuk memahami sistem pertanian, pedoman budidaya, dan praktik pertanian yang baik. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan Smart Farming 4.0 menggunakan sensor dan aplikasi. Teknologi ini memberikan informasi untuk membantu petani meningkatkan produksi pertanian. Ini melibatkan pengurangan jumlah pupuk dan air yang digunakan, mengurangi biaya pertanian tanaman dan membuatnya lebih efisien. Untuk itu, ketahanan pangan untuk memerangi pandemi dan perubahan iklim memerlukan mitigasi dan adaptasi. Upaya mengembangkan pertanian cerdas di Indonesia sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, kebutuhan pangan. Pemerintah dan masyarakat harus terus bersinergi untuk mengembangkan teknologi pertanian. Ingat kemauan dan pemikiran baru bahwa Anda lebih pintar dan siap menghadapi perkembangan teknologi.

VII. KESIMPULAN

Masalah dengan pemulihan pangan adalah perubahan iklim, pasokan, penjualan, dan konsumsi makanan.

Pengukuran menghadapi faktor ini yang meningkatkan kapasitas produksi faktor ini yang menyebabkan masalah perubahan iklim. Distribusi menghadapi masalah infrastrukturnya disibintion, insangsusi antara tanah dan pulau, dan saluran penjualan, dan mengubah kapasitas produksi antara daerah dan musim. Tidak puas dengan kebutuhan makanan karena tidak menggunakan konsumsi energi normal (cukup konsumsi protein) dan konsumsi energi (konsumsi protein cukup), biasanya dipenuhi itu bukan preload untuk beras. Arah kebijakan umum ketahanan pangan cukup di tingkat nominal nama rumah, regional dan nasional melalui sumber daya lokal, budaya, dan teknologi inovatif, dan kualitas tinggi dan berkualitas tinggi, konsumsi makanan berkualitas tinggi itu adalah pengetahuan tentang kemerdekaan makanan. Seimbangkan peluang pasar, memperkuat ekonomi manusia, dan mengurangi kemiskinan. Strategi implementasi kebijakan dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi pertanian dan pedesaan, serta implementasi pangan bagi kelompok miskin dan miskin pangan. Dengan arah kebijakan tersebut, ketahanan pangan berfokus pada membantu keluarga dan masyarakat mencapai ketahanan pangan dan mengatasi tantangan gizi yang mereka hadapi. Untuk itu, ketahanan pangan untuk memerangi pandemi dan perubahan iklim memerlukan mitigasi dan adaptasi. Upaya mengembangkan pertanian cerdas di Indonesia sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, kebutuhan pangan. Pemerintah dan masyarakat harus terus bersinergi untuk mengembangkan teknologi pertanian. Ingat kemauan dan pemikiran baru bahwa Anda lebih pintar dan siap menghadapi perkembangan teknologi.

VIII. REFERENSI

- Aguado, E. & Burt, J. E., 2015. Understanding Weather and Climate. 7th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.
- Barry, R. G. & Chorley, R. J., 2010. Atmosphere, Weather and Climate. New York: Routledge.
- IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,, Cambridge, UK and New York, USA: Cambridge University Press.
- Pant, G. B., Kumar, P. P., Revadekar, J. V. & Singh, N., 2018. Climate Change in The Himalayas. Gewerbestrasse: Springer International Publishing.
- Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 1, Juni 2008 26
- Referensi:Kementerian Pertanian | NCBI | OECD Trade and Agriculture Directorate
- P.Simatupang dan I.W.Rusastra, "Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi dalam Ekonomi Padi dan Beras Indonesia", Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, 2004).

JURNAL HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA, Vol. 5 No.1 Tahun 2018

KEBIJAKAN PEMBENDUNGAN AS TERHADAP TAIWAN: DIANTARA IDEOLOGI DEMOKRASI TAIWAN DAN KOMUNIS TIONGKOK

Fajar Kurniawan

Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia

email: fkurniawan74@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini adalah sebuah tanggapan atas kebijakan pemerintah AS dalam melindungi Taiwan dari serangan Tiongkok di perairan Taiwan. Tanggapan ini mengacu pada kebijakan pembendungan yang pernah dilakukan oleh Presiden AS Harry Truman dalam menangkalkan penyebaran ideologi komunis di wilayah Asia dan Eropa dan sekitarnya dimana kali ini kebijakan pembendungan terhadap Taiwan yang dilakukan oleh pemerintah AS adalah dengan cara menaruh kapal-kapal perang Amerika di perairan Taiwan. Isu “Satu Cina” merupakan alasan mengapa Tiongkok ingin mengambil kembali Taiwan ke tangan Tiongkok. Akan tetapi, Taiwan yang sudah memilih untuk lepas dari Tiongkok yang secara otomatis memilih ideologi demokrasi ketimbang komunis, lebih memberikan jaminan terhadap kehidupan orang-orang Taiwan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Taiwan yang kian pesat. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif. Fenomena kebijakan pembendungan yang dilakukan terhadap penyebaran ideologi komunis di Asia seiring dengan kebijakan pemerintah AS dalam melindungi Taiwan terhadap serangan Tiongkok di daerah Taiwan. Pemerintah AS tidak ingin jika Taiwan pada akhirnya harus kembali bersatu dengan Tiongkok karena pemerintah AS dan pemerintah Tiongkok sedang berseteru soal perdagangan dan ekonomi, dan Taiwan adalah salah satu peluang Amerika untuk menjual persenjataan mereka.

Kata kunci: Pemerintah AS., Tiongkok, Taiwan, Kebijakan Pembendungan

Abstract

This study is a response over the US government in protecting Taiwanese against attacks from Tiongkok in the Taiwan waters. This response refers to the containment policy issued by President Harry S Truman in protectinng the spread of communist ideology in the Asian region and roundabout where in this study the containment policy over Taiwan is by letting the American vessels sail over Taiwanese waters. The issue of “One Chinese” is the reason why Tiongkok want Taiwan back to Tiongkok. However, Taiwan, having decided to set apart from Tiongkok, which automatically chose democracy rather than communist ideology, guarantees more to the lives of Taiwanese in accordance with the rapid economic development of Taiwan. Method used in this study is qualitative. The phenomenon between containment policy by US government to protect Asia from communist and the containment policy by letting the American vessels sail over Taiwanese waters is similar. The US government does not want Taiwan to be handed back over to Tiongkok because the US government and is in a dispute with Tiongkok goverment in both trading and economy, and Taiwan is a golden opportunity for America to sell its weapons.

Key Words: U.S government, Tiongkok, Taiwan, Containment Policy

I. Pendahuluan

Perseteruan AS dan Tiongkok belakangan ini telah semakin memanas dengan berlayarnya kapal-kapal perang AS di perairan Taiwan. Terdapat fenomena serupa antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap penyebaran ideologi komunis di Asia dan Eropa dan sekitarnya dengan kebijakan pemerintah AS yang membiarkan kapal-kapal perang AS berlayar di perairan Taiwan. Ada pun tujuan dari kedua kebijakan tersebut adalah untuk membendung invasi ataupun pengaruh-pengaruh ideologi komunis ke Taiwan. Hal ini bertujuan untuk melindungi Taiwan dari serangan Tiongkok. Dalam www.kompas.com dituliskan:

China mengutuk Amerika Serikat (AS) setelah satu unit kapal perusak milik Angkatan Laut “Negeri Paman Sam” berlayar melalui Selat Taiwan. Pada Selasa (22/6/2021), kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke, USS Curtis Wilbur, dilaporkan berlayar di Selat Taiwan. Armada ke-7 Angkatan Laut AS menyatakan, USS Curtis Wilbur sah melakukan pelayaran di Selat Taiwan karena sesuai dengan hukum internasional. “Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Armada ke-7 Angkatan Laut AS sebagaimana dilansir Reuters. (<https://www.kompas.com>, 2021)

Kebijakan pembendungan kemudian dapat diartikan sebagai peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk menyaring ideologi-ideologi yang masuk ke dalam suatu negara (Winarno, 2007:17). Sementara ideologi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang gagasan-gagasan, ide-ide, *science of ideas*, atau ajaran tentang pengertian dasar (Destutt, 1796:30).

Dalam tesisnya yang berjudul Kebijakan Amerika Serikat Sekitar Pembend-

ungan di Eropa Barat, Mbalik Tarigan (1988) menjelaskan bahwa penting bagi Amerika untuk membendung pengaruh komunisme di Eropa Barat. Hal tersebut diwujudkan Amerika melalui kebijakan luar negeri dan juga kebijakan luar negeri negara-negara Eropa Barat. Persekutuan tersebut berlangsung dengan adanya penandatanganan pembentukan NATO pada 1949, yang merupakan organisasi internasional untuk tujuan keamanan bersama. Pembentukan NATO tersebut jelas sama-sama menguntungkan baik pihak Amerika maupun negara-negara yang tergabung di dalamnya karena kapasitas dan stabilitas keamanan di kawasan Eropa Barat dapat lebih stabil.

Tarigan (1988:1) menjelaskan lebih lanjut bahwa ancaman terhadap salah satu anggota NATO adalah ancaman bagi anggota lain. Kesepakatan seperti ini dalam NATO mendorong sesama anggota NATO untuk berkewajiban memberi bantuan bagi sesama anggota. Pada tahun 1979, kesepakatan terkait hal tersebut direvisi, yakni terkait dengan pembatasan penyebaran misil dikenal sebagai “Two Track Decision” atau “kebijakan dua jalur”. Melalui kebijakan atau kesepakatan ini, di satu sisi, Amerika Serikat dapat berkonsentrasi dan memusatkan kekuatannya menghadapi ekspansi Uni Soviet. Di sisi lain, negara-negara Eropa Barat, yang kondisi ekonominya sedang merosot dapat berkonsentrasi memperbaiki ekonomi mereka karena terkait pertahanan dan keamanan telah dijamin oleh Amerika (Tarigan, 1988: 3).

Pengaruh Uni Soviet bagi Amerika adalah sebuah ancaman, terutama karena sejak tahun 1981 Uni Soviet telah memperlihatkan ambisinya untuk memperluas pengaruh komunis di Eropa. Contohnya, dalam kasus Polandia. Uni Soviet tidak saja memberi dukungan

diberlakukannya undang-undang perang oleh pemerintah Polandia, tetapi juga dibentuknya pemerintahan komunis di Polandia. Tentu, jika pengaruh komunis melebar dan meluas di kawasan Eropa, bagi Amerika hal tersebut adalah sebuah ancaman serius (Tarigan, 1988:11).

Studi ini berfokus pada kebijakan pembendungan yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Taiwan dalam membendung pengaruh ideologi-ideologi komunis yang akan masuk ke Taiwan. Oleh sebab itu peneliti ingin mengangkat polemik tersebut sebagai sebuah tulisan ilmiah dengan judul “KEBIJAKAN PEMBENDUNGAN AS TERHADAP TAIWAN: DIANTARA IDEOLOGI DEMOKRASI TAIWAN DAN KOMUNIS TIONGKOK”.

II. Rumusan Permasalahan

Adapun pertanyaan yang muncul dari penelitian ini, berkaitan dengan tema “KEBIJAKAN PEMBENDUNGAN AS TERHADAP TAIWAN: DIANTARA IDEOLOGI DEMOKRASI TAIWAN DAN KOMUNIS TIONGKOK” adalah sebagai berikut:

Bagaimana sikap Taiwan dalam menghadapi Tiongkok dimana Taiwan didukung oleh pemerintah AS melalui kebijakan pembendungannya?

Bagaimana Tiongkok menghadapi pemerintah AS?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan pembendungan pemerintah AS terhadap Taiwan dalam menghadapi Tiongkok.

IV. Landasan Konsep dan Teori

Dalam sub bab ini disajikan konsep dan teori yang menjadi landasan berpikir dari penulisan artikel ilmiah ini.

4.1. Konsep Kebijakan

Sebelum membahas konsep kebijakan pembendungan, penulis kira perlu dikaji dahulu terkait konsep kebijakan (*policy*). Pengertian kebijakan dapat dimengerti seperti yang dijelaskan oleh Carl J. Frederick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:7). Frederick menjelaskan hawa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan. Tindakan atau kegiatan tersebut merupakan hasil dari usulan individu atau kelompok untuk kemudian dilakukan dalam lingkup tertentu demi mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud.

Lebih lanjut, Budi Winarno (2007: 15) menerangkan bahwa istilah kebijakan tersebut dapat diaplikasikan secara luas di berbagai bidang. Oleh karena itu, dapat diketahui, istilah kebijakan tersebut terdapat baik di bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan sebagainya seperti yang sering didengar dengan istilah “kebijakan luar negeri Indonesia” atau “kebijakan ekonomi Jepang”.

4.2. Kebijakan Pembendungan

Pembendungan (*containment*) merupakan kebijakan Amerika Serikat dalam rangka pencegahan menyebarnya pengaruh komunisme di luar negeri. Pasca perang dingin, Uni Soviet melakukan berbagai tindakan atau kebijakan untuk memperluas pengaruh ideologi komunisme di berbagai negara seperti di negara Eropa Timur, Tiongkok, Korea, Afrika dan Vietnam.

Moritz A. Pieper (2012:1) dalam tulisannya yang berjudul “Containment and the Cold War: Reexamining the Doctrine of Containment as a Grand Strategy Driving US Cold War Interventions” menyatakan bahwa perang dingin telah menjadi sebuah pengalaman psikologis dan diskursif yang menjadikan sebuah “*grand strategy*” dalam hal ini dapat

diartikan sebagai sebuah kebijakan luar negeri yang harus dikeluarkan. Yang dimaksud “*grand strategy*” disini adalah arahan kebijakan luar negeri Amerika yang akan membimbing dan menentukan tujuan setiap tindakan-tindakan politik.

Revolusi Cina pada tahun 1949 dan pecahnya perang Korea pada tahun 1950 memberikan pemicu terhadap munculnya pembendungan militerisasi yang telah menjadi sebuah ideologi. Dengan dukungan Amerika terhadap Korea yang berperang terhadap Utara dukungan Cina, sebuah dimensi perencanaan strategi baru telah mulai yaitu Campur Tangan Amerika terhadap Negara Ketiga yang membendung secara militer pengaruh Sovyet (Pieper, 2012:2)

V. Metode Penelitian

Sesuai dengan obyek penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri (Furchan, 1992: 21). Penelitian kualitatif adalah adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 2-13:80).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi. Secara literal, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau gejala yang mencakup penampilan sesuatu atau sesuatu sebagaimana mereka tampil dalam pengalaman manusia, atau cara manusia dalam mengalami sesuatu termasuk didalamnya arti dari sesuatu tersebut yang dimiliki oleh manusia dalam pengalamannya.

VI. Pembahasan

Kebijakan pembendungan (*containment policy*) adalah serangkaian aturan,

arahan dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mencegah masuknya pengaruh ideologi komunis ke Taiwan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara menggerakkan militer AS melalui kapal-kapal perang mereka berlayar di perairan Taiwan.

6.1 Sikap Taiwan Dalam Menghadapi Tiongkok

Taiwan dalam menghadapi Tiongkok memiliki gejala yang sama tatkala negara-negara di Eropa Barat mencoba menolak ideologi komunis dalam rangkaian penyebaran ideologi komunis Sovyet yang dihadap oleh pemerintah AS melalui kebijakan pembendungannya. Wujud dari penghadangan tersebut adalah terbentuknya NATO. Perbedaan mencolok dapat dilihat dalam penolakan Taiwan kepada Tiongkok melalui perdagangan persenjataanannya. Taiwan lebih cenderung berpihak kepada AS dalam jual beli senjatanya yang berfungsi untuk melindungi warganya dari serangan-serangan dari luar, termasuk Tiongkok.

Fenomena ini dapat dilihat dari cara pandang warga Taiwan yang sudah “demokratis” dan enggan untuk “kembali” lagi menjadi “komunis”. Warga Taiwan merasakan banyak manfaat dari keberadaan demokrasi di negaranya. Salah satunya adalah terjaminnya HAM. Kedua adalah persaingan sehat. Dalam persaingan sehat, warga Taiwan lebih percaya diri dalam melakukan aktifitasnya tanpa ada rasa takut untuk diintimidasi. Persaingan sehat ini didukung oleh perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari pada itu, warga Taiwan merasakan adanya jaminan kepastian akan kesejahteraan mereka dalam pendidikan, dan kehidupan yang layak. Hal ini ditandai dengan kemajuan ekonomi Taiwan yang pesat. Taiwan saat ini tergolong salah satu

negara maju di Asia selain Jepang dan Korea. Bahkan Taiwan saat ini sanggup membeli persenjataan mutakhir dari Amerika Serikat.

6.2 Tiongkok Dalam Menghadapi AS

Kegagalan Tiongkok dalam mempengaruhi Taiwan menjadi sebuah ancaman besar bagi Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh kemandirian Taiwan dalam ekonomi dan investasi. Taiwan sekarang ini dikelilingi oleh negara-negara besar yang ingin berinvestasi seperti Australia, Perancis, dan bahkan Amerika. Dengan fenomena yang terjadi, Tiongkok tentunya tidak tinggal diam dan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya, khususnya pengaruh ideologi komunisnya untuk dapat menyerang Taiwan.

Ada banyak yang dilakukan oleh Tiongkok dalam menekan Taiwan melalui Veto di PBB. Apa yang dilakukan oleh Taiwan bersama AS kemudian diveto oleh Tiongkok. Hal inilah yang membuat Tiongkok semakin yakin bahwa suatu saat Taiwan akan dapat ditarik kembali ke Tiongkok. Persenjataan yang dibuat oleh Tiongkok tidak dibeli oleh Taiwan, akan tetapi apa yang dijual oleh Amerika dibeli oleh Taiwan. Hal tersebut yang membuat Tiongkok semakin berang dan ingin habis-habisan menghancurkan Taiwan dan AS.

Sebagai ketidaksesuaian antara kebijakan Trump dengan Tiongkok, Trump telah menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk memainkan "Kartu Taiwan" dan memperkuat hubungan dengan Taipei sebagai pengganti ambiguitas strategis tradisional Washington. Ketika persaingan perdagangan AS-China meningkat pada tahun 2018, hubungan bilateral yang bersaing antara Beijing dan Washington menciptakan peluang bagi pemerintah dari Tsai Ing-wen untuk mengadopsi strategi yang lebih provokatif terhadap Beijing.

(Charles Chong-Han Wu, 2021)

VII. Penutup

Dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, bahwa Amerika akan tetap menjaga mereka-mereka yang berpihak kepadanya. **Kedua**, dukungan tersebut dibuatkan dalam bentuk sebuah kebijakan pembendungan baik secara militer maupun non militer. Ketiga, bahwa dukungan AS terhadap Taiwan membuat Tiongkok semakin berang. Keempat, bahwa perekonomian Taiwan telah berada pada negara-negara makmur di Asia, selain Jepang dan Korea. Dan kelima, bahwa kemakmuran Taiwan ditandai dengan kemampuan daya beli senjata nuklir AS. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi Tiongkok dalam merebut Taiwan dengan konsep "One Chinese" lagi karena warga Taiwan lebih meyakini ideologi demokrasi untuk menyejahterakan mereka ketimbang ideologi komunis Tiongkok.

VIII. Referensi

Buku:

- Destut, Tracy. 1796. *Ideology*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pieper, Moritz A. 2012. *Containment and The Cold War: Reexamining the Doctrine of Containment as a Grand Strategy Driving US Cold War Interventions*. Inquiries journal of Social Sciences.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tesis/Jurnal

Tarigan, Mbalik. Kebijakan Amerika Serikat Seputar Pembendungan di Eropa Barat: 1981-

1985. Tesis Magister Kajian Amerika.

Han Wu, Charles Chong. 2021. The China Review. Vol. 21, No. 2 (May 2021), 177–20. The Chinese University of Hong Kong Press: Hong Kong.

Internet:

Containment and the Cold War: Reexamining the Doctrine of Containment as a Grand Strategy Driving US Cold War Interventions - Inquiries Journal.

Kompas.com. (2021, Juni 23). *China Murka Setelah Kapal Perusak AS Berlayar di Selat Taiwan*. <https://www.kompas.com/global/read/2021/06/23/111037270/china-murka-setelah-kapal-perusak-as-berlayar-di-selat-taiwan>. 23 Juni 2021.

Pengaruh Karakteristik dan Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda Jalan Sudirman DKI Jakarta

Utoyo Harjito

Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

utoyo.harjito@ui.ac.id

Abstrak

Moda transportasi sepeda merupakan kendaraan yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi udara dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Bersepeda menjadi moda transportasi paling baik kedua setelah bus yang akan menjadi mode di masa mendatang. Kota-kota di mana infrastruktur sepeda ditambah, akan meningkatkan pengguna sepeda hingga 48 persen lebih banyak daripada di kota-kota yang tidak menambahkan jalur sepeda. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh karakteristik dan persepsi masyarakat terhadap kenyamanan jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh persepsi masyarakat terhadap tingkat kenyamanan jalur sepeda. Moda transportasi sepeda menjadi paling inklusif dan berkelanjutan adalah yang termudah dan termurah. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Peraturan ini sebagai panduan teknis bagi daerah untuk membuat aturan lebih lanjut dalam mengatur sepeda sebagai alat transportasi jarak pendek.

Kata Kunci: Sepeda, ramah lingkungan, pembangunan berkelanjutan

Abstract

The bicycle mode of transportation is an environmentally friendly vehicle, does not cause air pollution and supports sustainable development. Cycling is the second best mode of transportation after buses which will become a fashion in the future. Cities where cycling infrastructure is added, will increase cyclists up to 48 percent more than in cities that do not add bicycle lanes. This study uses multiple regression analysis to see the effect of characteristics and public perceptions of the convenience of the bicycle lane on Jalan Sudirman DKI Jakarta. The results showed that there was an influence of public perception on the level of comfort of the bicycle lane. The bicycle mode of transportation being the most inclusive and sustainable is the easiest and cheapest. The government through the Ministry of Transportation has issued the Minister of Transportation Regulation Number 59 of 2020 concerning Cycling Safety on the Road. This regulation serves as a technical guide for regions to make further regulations in regulating bicycles as a means of short-distance transportation.

Keywords: Bicycle, environmentally friendly, sustainable development

I. Pendahuluan

Masyarakat khususnya di perkotaan dihadapkan pada pilihan dalam menggunakan moda transportasi sepeda. Secara umum bersepeda dinilai menyehatkan dan berdampak positif mengurangi kemacetan lalu lintas dan ramah lingkungan, di sisi lain harus memperhatikan kenyamanan bersepeda untuk mengurangi risiko kecelakaan. Pada kenyataannya, dari sisi kesehatan bersepeda sangat bermanfaat (Pucher et al., 2010). Kenyamanan dan keselamatan bersepeda harus diperhatikan untuk masyarakat luas "keselamatan secara umum" bagi pengendara sepeda (Jacobsen, 2003), kota menjadi lebih fokus untuk meningkatkan kenyamanan moda transportasi bersepeda.

Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang paling penting di dunia, karena selain ramah lingkungan, sepeda juga menjadi tonggak munculnya kendaraan-kendaraan lainnya (Kurnia, 2015). Sepeda menjadi alat transportasi utama pada abad 18, seiring perkembangan teknologi kini sepeda hanya digunakan sebagai alat transportasi sekunder.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Peraturan ini sebagai panduan teknis bagi daerah untuk membuat aturan lebih lanjut dalam mengatur sepeda sebagai alat transportasi jarak pendek.

Pembangunan jalur sepeda yang dibangun harus terproteksi, pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan. Ada tiga hal yang diatur, yaitu persyaratan teknis sepeda, tata cara bersepeda dan fasilitas pendukung sepeda. Fasilitas harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit pada simpul

transportasi, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah. Sebuah studi yang diterbitkan daring pada 29 Maret lalu di *Proceedings of National Academy of Sciences*, menemukan bahwa di kota-kota di mana infrastruktur sepeda ditambahkan, bersepeda telah meningkat hingga 48 persen lebih banyak daripada di kota-kota yang tidak menambahkan jalur sepeda.

Selain keamanan dalam kuantitas, ada alasan lain mengapa mengendarai sepeda akan menguntungkan masyarakat (Aldred, Elliott, Woodcock, dan Goodman, 2017). Dengan data pemilihan rute GPS untuk mengkonfirmasi bahwa preferensi untuk jalan raya berbeda tergantung pada usia dan jenis kelamin. Kota yang ingin meningkatkan kenyamanan dan fasilitas sepeda, penting untuk mengidentifikasi preferensi dan persepsi antar individu, (Mistra dan Watkins, 2018). Melihat potensi untuk mengevaluasi agar lebih tepat bagi pengguna sepeda yang meningkatkan untuk membangun infrastruktur dengan karakteristik tertentu. Selain itu, pengendara sepeda saat ini memiliki persepsi terhadap tingkat kenyamanan sesuai dengan preferensi individu yang berbeda dari populasi tertentu. Masyarakat pengguna sepeda memiliki persepsi yang sesuai dengan sosiodemografi (termasuk usia, jenis kelamin, pendapatan dan etnis) dalam preferensi fasilitas bersepeda (Branion, Nelson, Fuller, & Gauvin, 2019; Parkin, Wardman, & Page, 2008) Karakteristik ini, berlaku umum dalam mengidentifikasi karakteristik yang membentuk preferensi, (Handy dan Xing, 2011) termasuk untuk mengeksplorasi dampak perilaku sikap bersepeda.

II. Metodologi

Data untuk penelitian ini berasal dari survei terhadap pengendara sepeda saat

ini dan potensial yang tinggal di enam komunitas perkotaan di DKI Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai preferensi berbagai jenis fasilitas sepeda dan dampak dari berbagai jenis tersebut pada kenyamanan bersepeda.

2.1 Desain Survei

Survei dirancang melalui proses pengumpulan data, pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh karakteristik dan persepsi masyarakat terhadap kenyamanan jalur sepeda. Untuk mengurangi potensi bias respons dan non-respons, isi survei sengaja dibuat lebih luas dari sekadar bersepeda, untuk membantu memastikan bahwa peserta tetap tertarik dan tidak keluar dari tema survei kenyamanan bersepeda. Sejauh praktis, pertanyaan digunakan kembali dari survei sebelumnya (Circella, Fulton, Alemi, Berliner, Tiedeman, & Mokhtarian, 2016; Neufeld & Mokhtarian, 2012), baik untuk mengandalkan pertanyaan yang telah diuji dan diperiksa sebelumnya serta untuk memaksimalkan peluang untuk pertanyaan silang, membandingkan hasil.

Metode utama untuk mengukur persepsi dan preferensi dalam survei ini adalah penyajian gambar yang dimanipulasi yang dibuat dalam Adobe Photoshop, seperti yang dijelaskan dalam Clark et al. (2019). Satu pengaturan jalan umum dipilih sebagai gambar dasar untuk mengontrol lingkungan perkotaan, cuaca, dan variabel kontekstual lainnya. Gambar dirancang sedemikian rupa sehingga pemandangan latar belakang dapat dikenali oleh penduduk perkotaan sebagai lingkungan dalam kota dan oleh penduduk pedesaan sebagai lingkungan kecil kota. Setiap skenario menunjukkan lalu lintas mobil dalam jumlah sedang yang memungkinkan

kondisi aliran hampir bebas bersama dengan sejumlah peluang yang wajar untuk interaksi pengendara sepeda otomatis. Variasi dibuat berdasarkan jenis infrastruktur sepeda yang berbeda, ada tidaknya parkir di badan jalan, dan jumlah jalur mobil.

Enam belas gambar infrastruktur di jalan disiapkan. Untuk masing-masing dari empat konfigurasi lajur dasar (dua lajur dengan parkir, dua lajur tanpa parkir, empat lajur dengan parkir, empat lajur tanpa parkir) gambar disiapkan dengan setiap jenis fasilitas sepeda, termasuk *sharrow*, lajur sepeda, lajur sepeda penyangga, dan jalur sepeda yang dilindungi penghalang (juga disebut sebagai jalur sepeda terpisah atau jalur sepeda). Dua jalur sepeda yang dilindungi adalah satu arah, sedangkan dua lainnya dua arah. Gambar untuk jalur multi guna juga dibuat, meskipun karena sifat dari jenis infrastruktur ini, lingkungan jalan yang berbeda harus digunakan.

III. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Data diperoleh melalui angket (kuisisioner) yang disebarkan kepada para responden melalui *platform google form*. Data diperoleh dari responden yang merupakan pengendara sepeda pada hari libur di kawasan Sudirman DKI Jakarta. Deskripsi umum hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 28.0 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Deskripsi Umum Data Penelitian

Descriptive Statistics

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean		Std. Deviation Statistic	Variance Statistic
				Statistic	Std. Error		
Usia (Xa)	29	1	6	3.86	.339	1.827	3.337
Pendidikan (Xb)	29	1	3	2.38	.135	.728	.530
Domisi (Xc)	29	0	1	.69	.087	.471	.222
Pekerjaan (Xd)	29	1	3	1.62	.152	.820	.672
Persepsi (X2)	29	1	3	1.97	.136	.731	.534
Kenyamanan (Y)	29	1	3	1.66	.134	.721	.520
Valid N (listwise)	29						

Sumber: Output SPSS 28.0 (2021)

Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa secara umum, terdapat variasi yang cukup tinggi pada setiap data variabel yang telah diolah. Variabilitas terutama pada rata-rata dan standar deviasi. Adanya variasi tersebut karena perbedaan pemberian nilai pada setiap variabel yang dipengaruhi oleh indikator pengukuran yang digunakan.

Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 29 orang dari total populasi sebanyak 190 orang sesuai dengan teknik penarikan sampel pada bagian sebelumnya. Jumlah sampel tersebut adalah 15,26% dari populasi.

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

4.2.1. Uji Validitas Data

Tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan uji validitas data untuk memastikan bahwa setiap unit data yang diolah tersebut valid. Hasil perhitungan uji validitas data menggunakan SPSS versi 28.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Output Uji Validitas Data

Nilai r-tabel untuk level signifikansi 0,01 dan n sebanyak 29 adalah 0,3550. Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa nilai r-hitung untuk setiap variabel lebih besar dari nilai r-tabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat valid.

4.2.2. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan.

Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Jika nilai $\alpha > 0.7$ artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika $\alpha > 0.80$ ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	29	96.7
	Excluded ^a	1	3.3
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4.3. Output Uji Reliabilitas Data
Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	N of Items
.91	7

Sumber: Output SPSS 28.0 (2021)

Hasil pengujian reliabilitas data menunjukkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,91. Berdasarkan kriteria pengujian, nilai alpha tersebut lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan bersifat reliabel atau handal.

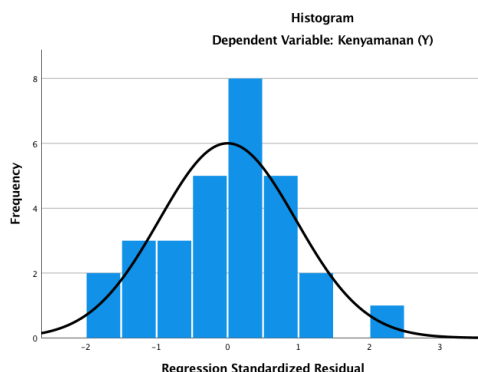
4.3. Uji Asumsi Klasik

Tahap pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari empat jenis pengujian yakni uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multykolineartias dan uji autokorelasi. Setiap jenis pengujian tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

Gambar 4.1. Output Uji Normalitas Data



menggunakan SPSS versi 28.0 sebagaimana yang ditunjukan pada gambar di 4.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan sebaran data yang seluruhnya berada di bawah kurva lonceng dan tidak terdapat *outlier* dalam data tersebut.

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi heteroskedastisitas pada data.

Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel bebas, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05, tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Jika nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode Glejser, Tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasinya untuk kedua variabel bebas masing-masing 0,197 untuk X1 dan 0,444 untuk X2 lebih besar dari ambang batas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.3.3. Uji Multykolinearitas

Uji multykolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel

bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu [variabel bebas](#) atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah [model regresi](#). Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan *Tolerance*, nilai *Eigenvalue* dan *Condition Index*, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi parsial. Dalam penelitian ini, penilaian adanya multikolinearitas menggunakan angka VIF dan *Tolerance*.

Tabel 4.5. Output Uji Multykolinearitas

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	90.0% Confidence Interval for B		Correlations	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial
1	(Constant)	.469	.292		1.609	.120	-.028	.967		
	Karakteristik (X1)	-.001	.001	-.226	-1.749	.092	-.003	.000	-.302	-.324
	Persepsi (X2)	.688	.127	.697	5.402	<.001	.471	.905	.722	.727
							Collinearity Statistics		Tolerance	VIF
									.988	1.012
									.988	1.012

a. Dependent Variable: Kenyamanan (Y)

Sumber: Output SPSS 28.0 (2021)

Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai *Tolerance* lebih dari 0,01 maka dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk kedua variabel bebas sebesar 1,012 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,988. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multykolinearitas pada persamaan regresi.

4.3.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui adanya korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode durbin-watson. Uji Durbin watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) yang nantinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin Watson Tabel, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower

DL).

Tabel 4.6 Output Uji Autokorelasi

Model Summary^a

Model	Durbin-Watson
1	1.813 ^a

a. Predictors: (Constant), Persepsi (X2), Karakteristik (X1)

b. Dependent Variable: Kenyamanan (Y)

a. Predictors: (Constant), Persepsi (X2), Karakteristik (X1)_ab. Dependent Variable: Kenyamanan (Y)_b

Sumber: Output SPSS 28.0 (2021)

Dikatakan tidak terdapat autokorelasi

jika nilai DW > DU dan (4-DW) > DU atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut: (4-DW) > DU < DW. Pengujian autokorelasi durbin-watson, dilakukan dengan ketentuan:

Jika angka D-W dibawah -2 berarti terdapat Autokorelasi positif

Jika angka D - W di antara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat Autokorelasi

Jika D - W diatas 2 berarti terdapat Autokorelasi negatif

Untuk n = 29 dan k = 3 pada tabel durbin-watson diperoleh nilai dL = 1,197 dan dU = 1,649. Tabel 4.6 di atas menunjukkan bawah hasil perhitungan nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1.813 yang berarti berada di antara nilai -2 dan 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam persamaan regresi.

4.4. Interpretasi Model

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang terdiri dari dua variabel bebas (*independent*) dan satu variabel terikat (*dependent*). Masing-masing variabel bebas adalah Karakteristik Masyarakat (X1) dan Persepsi Masyarakat (X2). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Kenyamanan (Y) pengendara sepeda pada jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta.

Tabel 4.7 Output Model Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	90.0% Confidence Interval for B		Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	.469	.292	1.609	.120	-.028	.967			
	Karakteristik (X1)	-.001	.001	-1.749	.092	-.003	.000	-.302	-.324	-.225
	Persepsi (X2)	.688	.127	5.402	<.001	.471	.905	.722	.727	.693

a. Dependent Variable: Kenyamanan (Y)

Sumber: Output SPSS 28.0 (2021)

Berdasarkan output pada tabel di atas, dapat dibentuk persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e \quad (1)$$

$$= 0,469 + (-0,001X_1 + 0,688X_2) + e$$

$$\text{Std error} = (0,292) \quad (0,001) \quad (0,127)$$

$$\text{Sig.} = (0,120) \quad (0,092). \quad (0,001)$$

Mengacu pada model persamaan regresi yang telah terbentuk, telah diketahui bahwa variabel Karakteristik Masyarakat (X1) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kenyamanan (Y) pengendara sepeda, sementara variabel Persepsi Masyarakat (X2) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kenyamanan (Y) pengendara sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta. Nilai konstanta yang terbentuk dalam model persamaan adalah sebesar 0,469 yang artinya bahwa apabila masing-masing variabel bebas bersifat tetap, maka Tingkat Kenyamanan (Y) pengguna jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta bernilai positif namun sangat rendah.

4.4.1. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi merupakan nilai *bheta* dari setiap variabel bebas (*independent*), yang mencerminkan besarnya pengaruh dan arah korelasi terhadap variabel terikat (*dependent*). Arah korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat, bersifat positif atau negatif.

a. Pengaruh Karakteristik Masyarakat (X1) Terhadap Tingkat Kenyamanan (Y) Pengguna Jalur Sepeda

Berdasarkan persamaan regresi yang telah terbentuk, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi dari variabel Karakteristik

Masyarakat (X1) adalah sebesar -0,001 dan signifikan pada level 0,092. Artinya, variabel tersebut berpengaruh negatif Tingkat Kenyamanan (Y) pengguna jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta.

Hal ini dipengaruhi oleh indikator seperti tingkat pendidikan dan alamat domisili dari setiap responden. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula ekspektasi responden terhadap penyediaan jalur sepeda yang lebih baik. Demikian juga dengan indikator domisili. Responden yang dominan berdomisili di daerah DKI Jakarta, memiliki kebutuhan yang tinggi atas fasilitas jalur sepeda untuk mendukung kegiatan berolahraga pada akhir pekan.

b. Pengaruh Persepsi Masyarakat (X2) Terhadap Tingkat Kenyamanan (Y) Pengguna Jalur Sepeda

Berdasarkan persamaan regresi yang telah terbentuk, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk variabel Persepsi Masyarakat (X2) adalah sebesar 0,688 dan signifikan di level 0,001. Artinya, persepsi

masyarakat tentang jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta, yang dipengaruhi oleh indikator pemandangan di sekitar jalur sepeda, garis pembatas dan papan penunjuk jalur sepeda.

Masyarakat pengendara sepeda di Jalan Sudirman menilai bahwa, ketersediaan berbagai indikator tersebut akan menentukan Tingkat Kenyamanan (Y) ketika bersepeda, khususnya pada akhir pekan. Semakin baik fasilitas pendukung yang tersedia di sepanjang Jalan Sudirman DKI Jakarta, maka akan semakin meningkatkan kenyamanan pengendara sepeda di Jalan tersebut.

4.4.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R^2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam regresi linier

Tabel 4.8 Output Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.756 ^a	.572	.539	.490	.572	17.355	2	26	<.001

a. Predictors: (Constant), Persepsi (X2), Karakteristik (X1)

b. Dependent Variable: Kenyamanan (Y)

Sumber: Output SPSS 28.0 (2021)

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,572 sementara *adjusted R Square* adalah sebesar 0.539. Artinya, perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat 53,9% dapat ditentukan oleh variabel bebas yang terdapat dalam model. Sementara sisanya, 46,1% perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat di

dalam model regresi. Ini merupakan nilai residu yang tidak terdapat dalam model persamaan tersebut.

4.5. Uji Signifinkasi Model

4.5.1. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Signifikansi adalah suatu uji statistik dan distribusi sampel dari suatu statistik hipotesis nol. Dalam pengolahan uji statistik bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu.

Uji dilakukan dengan membandingkan nilai t-tabel dan t-hitung untuk setiap variabel bebas yang terdapat dalam model. Nilai t-tabel pada level signifikansi 0,10 untuk $df = n - k = 29 - 3 = 26$ adalah sebesar 1,315. Sementara nilai t-hitung untuk variabel Karakteristik Masyarakat (X1) adalah sebesar -1,749 dengan level signifikansi 0.092 dan Persepsi Masyarakat (X2) sebesar 5,402 dengan level signifikansi 0,001.

Artinya, secara parsial variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel bebas (Y) karena nilai t-hitung sebesar -1,749 < t-tabel 1,315. Sementara variabel Persepsi

Masyarakat (X2) berpengaruh secara parsial terhadap variabel bebas (Y), karena t-hitung sebesar 5,402 > t-tabel sebesar 1,315. Variabel X2 memiliki signifikansi yang sangat kuat terhadap Tingkat Kenyamanan (Y) pengendara sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta.

4.5.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menguji secara bersama-sama ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Pedoman yang digunakan dengan kriteria pengujian:

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$
 H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan $\alpha = 10\%$

Tabel 4.10 Output Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.320	2	4.160	17.355	<.001 ^b
	Residual	6.232	26	.240		
	Total	14.552	28			

a. Dependent Variable: Kenyamanan (Y)

b. Predictors: (Constant), Persepsi (X2), Karakteristik (X1)

Sumber: Output SPSS 28.0 (2021)

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 4.10 di atas, diperoleh nilai F-tabel sebesar 17,355 signifikan di level 0,001. Nilai F-tabel untuk $df_1 = 1$ dan df_2 adalah sebesar 2.91. Oleh karena $F_{hitung} (17,355) > F_{tabel} (2,91)$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan secara bersama-sama dari kedua variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y).

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Kenyaman dalam bersepeda, merupakan harapan dari setiap pengguna jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat pengaruh karakteristik dan persepsi masyarakat terhadap tingkat kenyamanan pengguna jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta

Karakteristik masyarakat berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kenyamanan pengguna jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,001. Persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kenyamanan pengguna jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,688.

Secara simultan, variabel Karakteristik Masyarakat (X1) dan Persepsi Masyarakat (X2) berpengaruh terhadap Tingkat

Kenyamanan (Y) pengguna jalur sepeda di Jalan Sudirman DKI Jakarta.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan, yakni sebagai berikut:

Pemerintah daerah DKI Jakarta diharapkan dapat menyediakan jalur sepeda yang lebih baik kepada pengguna di Jalan Sudirman DKI Jakarta.

Kenyamanan pengguna jalur sepeda dapat ditingkatkan dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkir sepeda dan area beristirahat untuk pengendara sepeda.

VI. References

Priambodo, Raden Pintyo Pratomo, Sutomo Kahar, Haniah, (2015). Pembuatan Peta Jalur Kondusif Kota Semarang.

- Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anonim, (1992). Standar Geometrik Jalan. Jakarta: Peraturan Pemerintahan Pekerjaan Umum.
- Tripoli, Bambang, Rahmat Djamaludin, Jalil Amin., (2018). Efektifitas Kinerja Jalur Sepeda di Kawasan Kota Meulaboh. Aceh: Universitas Teuku Umar.
- Anonim, (2014). London Cycling Design Standar. London: Transport For London.
- Anonim, (2018). Caltrans Highway Design Manual. California: STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
- Anonim, (2019). Laporan Workshop Percepatan Jakarta Ramah Bersepeda. Jakarta: Institute for Transportation and Development Policy.
- Anonim, (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79. Jaringan Lalu lintas an Angkutan Jalan.

PERMASALAHAN KERUSKAN LINGKUNGAN DI PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA

(ENVIRONMENTAL DAMAGE PROBLEMS AT THE BEAUTIFUL BEACH OF KAPUK NORTH JAKARTA)

Rizqita Oktorini

School of Strategic and Global Studies, University of Indonesia

rizqita.oktorini@ui.ac.id

Abstrak

Kasus alih fungsi lahan yang biasa disebut alih fungsi lahan kerap muncul ke permukaan dan menimbulkan masalah. Kawasan Jakarta Utara yang di dalamnya terdapat kawasan Pantai Indah Kapuk menghadirkan permasalahan baru di balik permukiman yang mencirikan eksklusivitas dan kehidupan perkotaan. Lahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang saling berhadapan dan tidak saling mendukung. Kawasan yang semula merupakan suaka margasatwa dan rantai ekosistem yang dinamis kini hanya menjadi aset ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang mencari manfaat dari proyek yang memiliki nilai ekonomi lebih diprioritaskan daripada proyek pelestarian lingkungan dan sumber daya.

Kata Kunci : Konversi Lahan, PIK, Proyek Konservasi

Abstract

Cases of land conversion commonly called land conversion often arise to the surface and cause problems. The North Jakarta area in which there is a Pantai Indah Kapuk area presents new problems behind settlements that characterize exclusivity and urban life. The land in Pantai Indah Kapuk (PIK) area is used for various sectors that are opposite and do not support each other. The area that was originally a wildlife sanctuary and a dynamic chain of ecosystems is now only an economic asset that generates profit for certain parties who seek the benefits of the project which has economic value more prioritized than environmental and resource conservation projects.

Keywords : Land Conversion, PIK, Conservation Projects

I. Pendahuluan

Wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terdiri dari wilayah daratan seluas 661,26 km² dan wilayah perairan seluas 6.997,50 km² termasuk 110 pulau – pulau kecil. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang cukup tinggi baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dampak dari pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berpengaruh pula pada pertumbuhan jumlah penduduk DKI Jakarta mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk permukiman, industri, rekreasi, dan perkantoran.

Secara geografis, Jakarta Utara memiliki keuntungan nilai jual berupa pemandangan Laut Jawa. Selain itu, adanya rencana perluasan terminal 3 Bandara Soekarno Hatta yang sudah jadi, turut mendorong potensi properti di sana. Salah satu lokasi yang dimaksud adalah Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Berlokasi di tengah Kecamatan Penjaringan, merupakan kawasan mandiri yang terkenal elit di Jakarta. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa PIK dijadikan sebagai kawasan paling elit di Jakarta. Di urutan pertama adalah akses jalan. Karena lokasi PIK ini terlihat seperti berada di tengah-tengah antara Jakarta Barat dan Tangerang. Adanya akses jalan tol dari bandara Soekarno Hatta dan Jakarta Outer Ring Road seakan menjadi penarik masyarakat untuk melirik kawasan ini. Alasan mengapa PIK menjadi kawasan elit antara lain fasilitas umum sudah bertaraf internasional seperti hotel, rumah sakit, pendidikan, hiburan dan masih banyak lagi. Selain lokasi dan fasilitas umum, PIK juga sudah menjadi incaran perusahaan nasional dan multinasional untuk memindahkan perkantoran di sana.

Gambar 1 Skema Pembangunan Interchange PIK – Jakarta Outer Ring Road

Sumber : <https://bangazul.com/konversi-lahan-di-pantai-indah-kapuk/>

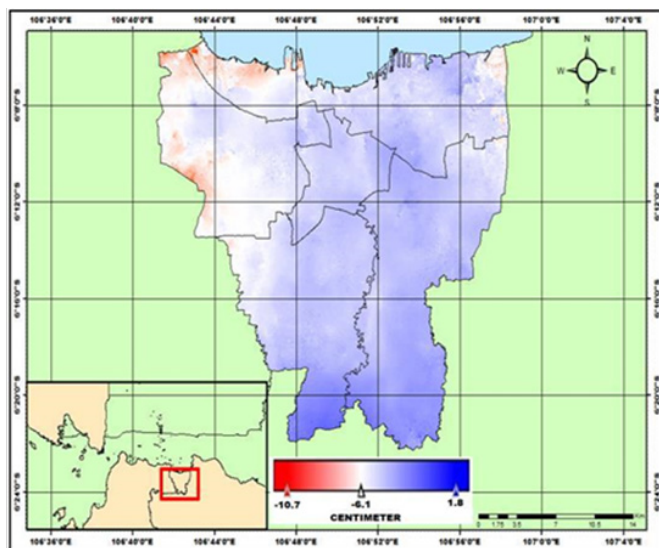
Kasus alih fungsi lahan yang biasa disebut konversi lahan sering muncul kepermukaan dan menimbulkan problematika. Wilayah Jakarta Utara yang di dalamnya terdapat daerah Pantai Indah Kapuk menghadirkan permasalahan baru dibalik permukiman yang mencirikan eksklusivitas dan kehidupan kaum urban.

Lahan di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang bertolak belakang dan tidak saling mendukung. Kawasan yang pada awalnya adalah suaka margasatwa dan ikatan mata rantai ekosistem yang dinamis kini hanya menjadi asset ekonomi yang menghasikan profit bagi pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dari proyek tersebut yang bernilai ekonomis lebih diprioritaskan dibanding proyek pelestarian lingkungan dan sumberdaya.

Padahal dengan mengambil keuntungan dari profit yang justru merusak ekosistem, ekologi dan keanekaragaman hayati justru mendatangkan permasalahan dan kerugian yang lebih besar. Contohnya adalah masalah banjir yang setiap tahunnya melanda Jakarta. Daerah Pantai Indah Kapuk dengan permukiman yang bernama Pondok Indah Kapuk dibangun di wilayah di bawakan permukaan air laut. Akibatnya alih fungsi lahan yang bersifat permanent ini membuat tidak adanya resapan air, akibatnya banjir akan terjadi di sekitar wilayah Pantai Indah Kapuk. Namun kawasan perumahan elite tersebut tidak merasakan masalah ini karena air pada lahan basah ini dialirkan ke wilayah-wilayah sekitarnya. Lahan ini juga mengalami penurunan, dapat dilihat dari

jalan tol menuju bandara Soekarno-Hatta, lahan daerah tersebut semakin rendah bahkan menjadi lebih rendah dari kawasan Pantai Indah Kapuk. Hal ini disebabkan, karena jalan tol yang terletak di dekat kawasan ini harus menampung beban mobil setiap waktu

Pola pemanfaatan lahan masih dianggap permasalahan sektoral sehingga masalah ini menjadi agenda subwilayah yang kadang terabaikan bahkan menjadi suatu masalah yang dibayar dengan sejumlah uang tertentu, padahal kriteria setiap kawasan berbeda. Keadaan tanah dan kondisi lahan harus sesuai dengan pola pemanfaatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemanfaatan lahan yang dapat berakibat fatal.



Masalah yang diangkat adalah mengenai konversi lahan yang terjadi di Pantai Indah Kapuk sehingga terjadi permasalahan bagi wilayah sekitarnya. Bagaimana konversi lahan menjadi alasan utama dalam kurangnya daerah resapan air di wilayah Jakarta yang hampir tiap tahunnya dilanda banjir dan solusi agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan

tidak hanya pada sector hulu saja, akan tetapi juga pada sector hilir.

Untuk mencegah permasalahan yang semakin kronis maka yang harus dilakukan adalah evaluasi sumberdaya lahan, perencanaan pembangunan lahan, penegakan hukum bagi pihak yang melanggar, menjaga dan memperbaiki ekosistem di wilayah Pantai Indah Kapuk, menyusun langkah strategis guna memperbaiki tata guna lahan dan tata ruang wilayah sehingga ada alternative daerah resapan air di Pantai Indah Kapuk dan pencegahan serta langkah alternatif dalam mengantisipasi debit air permukaan yang semakin besar ke wilayah sekitar Pondok Indah Kapuk serta sulitnya pasokan air tanah pada saat musim kemarau.

II. Tinjauan Pustaka

Dalam Ketentuan Umum UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem

darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air

laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk keperluan lainnya memerlukan pemikir seksama dalam mengambil keputusan pemamfaatan yang paling menguntungkan dari sumberdaya lahan yang terbatas, dan sementara itu juga melakukan tindakan konservasinya untuk penggunaan di masa mendatang (Santun.1985). Hal ini menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penggunaan lahan sehingga

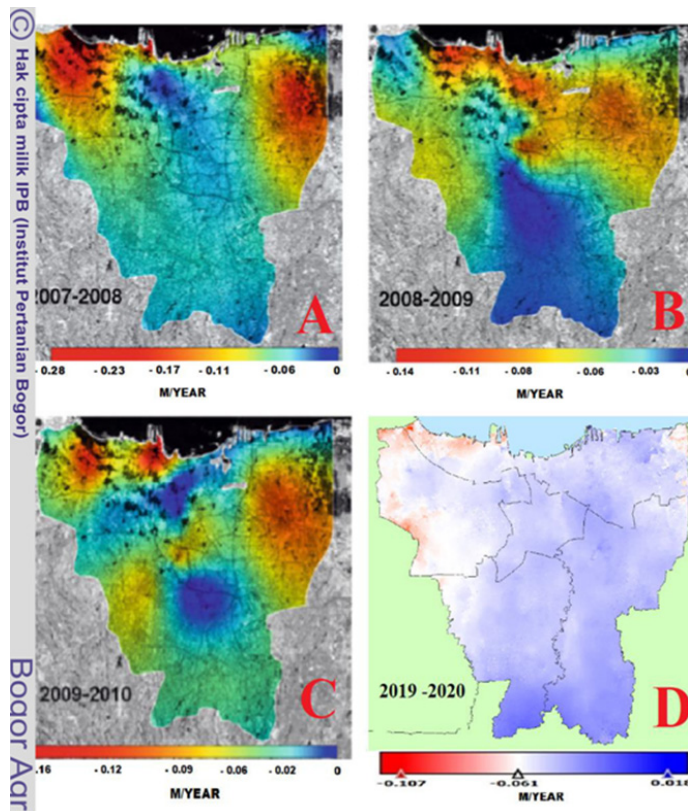
pelaksanaannya dapat efisien. Dalam hal pengambilan kebijakan yang berenaan dengan hajat banyak faktor. Prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemahaman terhadap keterkaitan antara peraturan-peraturan dalam satu sistem yang merupakan suatu kesatuan yang utuh, dan bahwa operasionalisasi suatu peraturan harus dapat dikembalikan pada konsepnya, yakni asas hukum yang mendasarinya (Maria.2001).

Pengalihan fungsi lahan menjadi sumber kerusakan keseimbangan lahan itu sendiri. Banyak Alih fungsi lahan mengandung pengertian perubahan penggunaan lahan oleh manusia (Muhajir.at.al.1992). Kasus yang terjadi melibatkan tingkah laku manusia yang melakukan pengolah lahan secara tidak berimbang. Baik negara maju maupun negara berkembang permasalahan

alih fungsi lahan banyak terjadi.

Gambar 3 Peta Pesebaran Penurunan Muka Tanah di DKI Jakarta

Sumber : Abidin et al, 2015 & David 2020



III. Pembahasan

Pemanfaatan Lahan Pantai Indah Kapuk Pada Awalnya

Pantai Indah Kapuk merupakan salah satu permukiman mewah yang terletak di Jakarta. Pada awalnya area ini merupakan rawa yang terletak di bagian utara Jakarta yang berfungsi sebagai daerah peresapan

air. Bahkan di dalam area ini terdapat hutan konservasi yang seharusnya dilindungi, akan tetapi keadaan hutan konservasi tersebut sangat memprihatinkan dengan adanya sampah-sampah yang berserakan, semak belukar dan warna tanahnya hitam pekat akibat pencemaran minyak. Kawasan Pantai Indah Kapuk juga merupakan Suaka Margasatwa Muara Angke tempat kawasan hutan mangrove.

Suaka Margasatwa Muara Angke merupakan bagian dari hutan Angke Kapuk yang total luasnya 1.154,88 hektar. Sebagian besar hutan Angke Kapuk sudah dikuasai PT Mandara Permai, pengembang yang membangun kawasan permukiman Pantai Indah Kapuk.

Dari 1.154,88 hektar hutan yang ada di kawasan hutan Angke Kapuk, 827,18 hektar di antaranya diambil alih untuk permukiman, lapangan golf, tempat rekreasi dan olahraga, bangunan umum, olahraga air, cottage, hotel, dan kondominium.

Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi DKI, luas kawasan hutan yang dipertahankan tinggal 327,7 hektar, terdiri atas hutan lindung (44,76 hektar), hutan wisata (99,82 hektar), suaka margasatwa (25,02 hektar), kebun pembibitan (10,5 hektar), transmisi PLN (23,70 hektar), Cengkareng Drain (28,39 hektar), serta untuk keperluan jalan tol dan jalur hijau (95,50 hektar). Sebelum dikembangkan kawasan permukiman, Suaka Margasatwa Muara Angke juga tempat atau habitat satwa-satwa liar. Beberapa jenis satwa liar seperti burung kareo padi (*Amaurornis phoenicurus*), kuntul (*Egretta* spp), pecuk (*Phalacrocorax* spp), belibis (*Dendrocygna* spp), dan raja udang (*Todirhampus* spp). Di kawasan ini juga terdapat jenis burung endemik Pulau Jawa, yaitu bubut jawa (*Centropus nigrorufus*). Selain dilindungi undang-undang, burung ini juga dilindungi oleh aturan internasional

karena termasuk dalam kategori rentan. Banyak peneliti dari luar negeri datang ke kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke untuk meneliti jenis burung tersebut. Selain itu juga banyak terdapat satwa lain seperti biawak (*Varanus salvator*) dan berbagai jenis ular seperti sanca (*Python reticulatus*) dan kobra (*Naja sputatrix*). Di tempat itu juga ada monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang saat ini jumlahnya lebih kurang 60 ekor, serta berang-berang (*Aonix cinnerea*). Daerah ini mempunyai fungsi sebagai pengendali banjir. Sebagai upaya melindungi kawasan penyerapan dan perlindungan terhadap abrasi pantai, pemerintah Hindia Belanda saat itu menetapkan kawasan hutan bakau Muara Angke sebagai kawasan konservasi. Suaka Margasatwa Muara Angke bisa disebut sebagai salah satu ruang terbuka hijau yang secara ekologi masih memiliki komponen biotik dan abiotik yang cukup lengkap. Lahan yang terdapat di kawasan Pantai Indah Kapuk merupakan lahan basah atau yang disebut wetland sehingga merupakan tempat ekosistem yang baik bagi populasi burung air dan burung migran yang tidak dapat dilepaskan dari ekosistem hutan mangrove di Pantai. Sedangkan definisi lahan basah menurut Konvensi Ramsar 1991 adalah daerah payau, paya, tanah gambut atau perairan, baik yang bersifat alami maupun buatan, tetap ataupun sementara, dengan perairannya yang tergenang ataupun mengalir, tawar, agak asin ataupun asin, termasuk daerah-daerah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut.

Penyebab Terjadinya Konversi Lahan Pantai Indah Kapuk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi yang cukup besar di Jakarta, diperlukan juga tempat permukiman. Hal ini dimanfaatkan

oleh PT Mandara Permai untuk mengembangkan kawasan permukiman. Tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai kawasan bisnis yang strategis dengan memanfaatkan kawasan peresapan air di utara Jakarta yang sekarang menjadi Pondok Indah Kapuk. Pemanfaatan daerah peresapan air dan rawa untuk permukiman sangatlah tidak bijaksana. Meskipun daerah tersebut berada pada satu meter di bawah permukaan air laut, permukiman Pantai Indah Kapuk (PIK) dianggap sebagai alternatif untuk tempat tinggal dan sentral bisnis di Jakarta. Keadaan topografi yang seperti itu tentunya banyak menimbulkan permasalahan, seperti air pasang dan banjir. Bahkan air di kawasan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi secara langsung. Proyek pengembangan permukiman Pantai Indah Kapuk penuh dengan kontroversi. Kontroversi berpangkal dari izin perubahan fungsi kawasan. Hutan Angke Kapuk yang sejak 10 Juni 1977 ditetapkan Menteri Pertanian sebagai hutan lindung dan sisanya untuk hutan wisata dan pembibitan, diubah menjadi permukiman, kondominium, pusat bisnis, rekreasi, dan lapangan golf, dengan syarat tetap menyediakan hutan lindung. Persetujuan perubahan fungsi tertulis dalam SK Dirjen Kehutanan 31 Juli 1982.



Gambar 4. Konversi Lahan di Pantai Indah Kapuk

Gubernur DKI setuju saja, karena peningkatan nilai ekonomi kawasan itu lebih menggiurkan. Dalam bentuk rawa-rawa dan tambak nelayan, saat itu Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang bisa ditarik hanya Rp 2.000/ha/tahun. Begitu menjadi perumahan, DKI bisa mendapat Rp 2.000.000/ha/tahun. Kalau kawasan yang berubah fungsi 831,63 ha, maka dana yang dihimpun mendekati Rp 2 miliar setiap tahun. Tidak heran bila Gubernur segera mengeluarkan keputusan tanggal 15 Agustus 1984. Isinya menetapkan areal pengembangan hutan Angke-Kapuk.

Gubernur merasa tidak melanggar RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota). Padahal, dalam master plan itu, jelas disebutkan kawasan itu hanyalah untuk hutan lindung dan hutan wisata, sekaligus mencegah banjir di bandara Soekarno-Hatta.

Dengan pertimbangan tersebut, proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk dianggap dapat meningkatkan pendapatan daerah propinsi DKI Jakarta. Sehingga pemprov DKI Jakarta merasa sah-sah saja menyetujui proyek tersebut. Trilogi pembangunan yang meliputi aspek social, ekologi/lingkungan, dan ekonomi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Aspek sosial dan lingkungan diabaikan. Pembangunan hanya diprioritaskan pada aspek ekonomi dengan memandang pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur pembangunan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan tidak dilaksanakan sehingga timbulah berbagai macam musibah dan persoalan yang lebih besar akibatnya daripada penerimaan atau pembangunan yang diharapkan.

Konversi Lahan Terkait Dengan Tata Ruang Lahan di Daerah Pantai Indah Kapuk

Masalah banjir yang setiap tahunnya melanda ibukota Jakarta selalu menjadi bahan pembicaraan. Banjir yang terjadi bukan hanya masalah sampah yang menyumbat saluran air, akan tetapi masalah tata ruang lahan yang tidak benar. Situ-situ atau area peresapan air telah diubah menjadi area permukiman. Bahkan permukiman elite seperti PIK adalah bekas peresapan air dan hutan lindung yang seharusnya dilindungi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga.

Konversi lahan dari area peresapan air menjadi permukiman PIK menimbulkan banyak permasalahan. Area yang seharusnya mencegah banjir di kawasan bandara Soekarno-Hatta sudah hilang fungsinya. Hutan bakau yang berfungsi sebagai penahan gelombang laut telah musnah. Padahal selain berfungsi sebagai penahan gelombang dan abrasi oleh gelombang laut, hutan bakau adalah habitat bagi binatang laut seperti kepiting dan ikan air payau yang mempunyai daya jual tinggi. Alangkah baiknya jika hal ini dimanfaatkan sebagai komoditas dalam perekonomian.

Degradasi lingkungan dapat disebabkan oleh dua factor, yaitu meningkatnya kebutuhan ekonomi (economic requirement) dan gagalnya kebijakan (policy failure). Daya dukung lingkungan (carrying capacity) sangat perlu diperhatikan. Dengan mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan akan berdampak lebih buruk dari apa yang dihasilkan.

Dengan menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya alam dengan bijaksanan, tentunya akan sangat menguntungkan umat manusia. Lahan peresapan air jika digunakan sebagaimana

mestinya akan dapat mencegah bencana. Sangat tidak layak apabila daerah peresapan air digunakan sebagai area permukiman dengan tidak memperhatikan lingkungan.

Untuk membangun suatu perekonomian, tentunya juga harus mempertimbangkan jangka panjangnya. Tidak hanya meraih keuntungan sesaat, tetapi juga harus mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan agar tidak mengalami kerugian yang besar.

Dampak Konversi Lahan Terhadap Keseimbangan Ekosistem di Pnatai Indah Kapuk

Adanya pertambahan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan penduduk di Indonesia mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan lahan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Lahan adalah sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup begitu juga dengan kaitannya dengan kehidupan manusia. David Ricardo, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Inggris menunjukkan bahwa tinggi rendahnya sewa tanah disebabkan oleh perbedaan tingkat kesuburan tanah. Fungsi tanah bagi kegiatan pertanian diantaranya adalah untuk bercocok tanam, beternak maupun budidaya ikan. Kebutuhan akan lahan dipertegas dengan adanya alasan pembangunan dan pengembangan aspek kewilayahan dalam rangka mewujudkan suatu sistem tata ruang urban yang bersifat modern, sentralistik dan cenderung mewah.

Menurut Jayadinata, Johara (1999), Pembangunan adalah mengadakan, membuat, mengatur sesuatu yang belum ada. Sedangkan pengembangan ialah memajukan, memperbaiki, atau meningkatkan yang sudah ada. Pembangunan dan pengembangan

dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tata guna lahan secara sederhana dapat diartikan sebagai pola penggunaan lahan di suatu daerah yang berhubungan dengan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Pembangunan perumahan Pantai Indah Kapuk pada dasarnya mencirikan eksklusivitas dengan menghadirkan konsep berbeda dengan perumahan elite lainnya dengan fasilitas yang serba lengkap dan berciri masyarakat urban dengan segala kemudahan bagi para penghuninya yang notabene merupakan kaum metropolis yang memiliki penghasilan diatas rata-rata. Kemudian para pengembang mengadakan, membuat, mengatur dan ingin menciptakan suatu hunian yang strategis di lahan yang belum di sentuh oleh kepentingan ekonomi.

Namun, dilihat dari sisi topografinya Pantai Indah Kapuk berada satu meter dibawah permukaan laut hal ini mengakibatkan apabila laut pasang maka yang akan terjadi adalah daerah ini akan tergenang bahkan terendam air laut. Ditambah lagi air yang ada tidak dapat digunakan untuk minum. Masalah banjir yang kini menjadi ancaman di ibukota turut menuai berbagai pernyataan dan pertanyaan tentang pembangunan proyek Pantai Indah Kapuk yang telah mengkonversi fungsi lahan yang tadinya sebagai tempat berkoloninya air menjadi tempat berkoloninya rumah-rumah mewah dengan berbagai fasilitas yang ada.

Pihak pengembang menolak tudingan bahwa dengan dibangunnya kawasan Pantai Indah Kapuklah yang membuat Ibukota terutama wilayah Jakarta Utara dilanda Banjir. Pihak lain menyebutkan bahwa dengan adanya pembangunan di wilayah yang merupakan tempat resapan air menyebabkan Jakarta tidak mempunyai penyangga dari air laut. Vegetasi pesisir

yang merupakan pelindung kini telah berubah fungsi menjadi gedung-gedung pencakar langit.

Keseimbangan ekologis dan ekosistem harus dilakukan dengan tindakan atau aksi yang mengarah pada perencanaan tata kota yang baik sehingga tidak hanya menjadi isu dikalangan akademisi ataupun wacana yang menghiasi opini publik saja. Lingkungan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang berlainan jika pembangunan ditingkatkan untuk kemajuan ekonomi maka secara langsung lingkungan menjadi suatu hambatan atau bahkan yang menjadi sasaran negatif dari pembangunan. Namun seandainya dilakukan perencanaan yang meliputi analisis yang berisi kupasan data untuk masa yang akan datang dengan titik tolak proyeksi pada masa sekarang, pemilihan kebijaksanaan dan rancangan terhadap pembangunan yang menyeimbangkan antara aspek pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan maka akan tercipta harmonisasi antara keduanya.

Ekosistem merupakan kesatuan antara organisme dan lingkungannya yang bekerjasama dan saling mempengaruhi dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rusaknya satu populasi dari komunitas dapat mempengaruhi populasi lain sehingga komunitas tersebut mengalami kemunduran.

Selain dampak pada manusia maka yang justru mengalami kerusakan akibat pembangunan pemukiman ini adalah ekosistem lingkungan yang mengalami ketimpangan. Contohnya kini akibat pantai-pantai dan fungsi hutan bakau dan mangrove yang telah berganti fungsi maka akibatnya ratusan burung migran dan burung air yang mendatangi wilayah pantai kini musnah akibatnya mata rantai kehidupan air dan lingkungan hidup terputus dan mengalami

ketidakseimbangan.

Menurut Irianto, Gatot (2006) Bentuk dan pola degradasi lahan bervariasi mulai dari (1) Penurunan kerapatan dan jenis vegetasi (2) Perubahan tipe vegetasi penutup lahan (3) Impermeabilisasi yaitu perubahan lahan budidaya menjadi lahan pemukiman yang permukaannya kedap air. Dampak yang ketigamempunyai dampak yang paling merusak terhadap siklus hidrologi, produksi air dan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya krisis air yang akut dan berkepanjangan. Pola ini sulit untuk dicegah karena menyangkut akses yang kuat terhadap pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dampak konversi lahan antara lain adalah pengurangan cadangan air tanah dan penurunan produksi air DAS, meningkatkan konsumsi air tanaman melalui transpirasi dan yang paling menakutkan adalah banjir.

Pada musim hujan kondisi lahan yang tertutup permanent menyebabkan sejumlah besar air hujan ditransfer menjadi aliran permukaan langsung. Akibatnya besaran banjir, intensitas, frekuensi dan durasinya terus meningkat. Hal ini dikarenakan air berubah menjadi air permukaan yang tidak dapat meresap kedalam tanah yang menjadi cadangan dan menambah jumlah pasokan air tanah.

Pembangunan wilayah Pantai Indah Kapuk yang dilakukan dengan menguruk alur-alur sungai dengan tanah yang sekarang tingginya melebihi jalan bebas hambatan menuju Bandara Soekarno-Hatta merupakan bukti penenggelaman Jakarta.

Selain itu pihak pengembang permukiman elit tidak Karena dengan menutup daerah resapan air secara tidak sadar perumahan tersebut telah membuat genangan-genangan baru yang akan menenggelamkan wilayah disekitarnya.

Selain sebagai pemukiman elite pihak pengembang tidak membiarkan warganya untuk banjir sehingga air yang masuk kedalam pemukiman dikeluarkan ke daerah sekitarnya.

Dampak pendirian Pantai Indah Kapuk selain berakibat pada terjadinya musibah banjir dan tidak adanya daerah resapan air yang mampu melindungi kota Jakarta terutama pada saat musim hujan dari banjir dan musim kemarau dari kekeringan juga merusak ekosistem rawa dan sungai yang memiliki vegetasi berupa tanaman bakau, selain itu penimbunan rawa yang merupakan penampung dan penahan air menjadikan aliran air dari hulu ke hilir tertahan dan menyebabkan genangan. Ditambah lagi adanya penyempitan dan penyumbatan kanal dan sungai utama.

Alternatif Langkah Penyelesaian

Masalah yang paling krusial adalah adanya tuntutan bisnis yang kuat dari satu pihak dan lemahnya penegakan hukum mengakibatkan areal yang merupakan daerah bantaran banjir namun tetap dijadikan pemukiman. Apalagi pengembang pemukiman tersebut mempunyai peran penting dalam urusan pemerintahan.

Evaluasi sumberdaya lahan perlu dilakukan guna menduga potensi sumberdaya lahan dalam penggunaannya. Sehingga lahan dipergunakan sesuai dengan sifat sumberdaya yang ada didalam lahan tersebut.

Menurut Sitorus, Santun, Pada dasarnya evaluasi sumberdaya lahan membutuhkan keterangan-keterangan yang menyangkut tiga aspek utama yaitu lahan, penggunaan lahan dan aspek ekonomis. Karena hampir setiap aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan ditambah dengan jumlah dari aktivitas manusia bertambah pesat maka yang akan

terjadi adalah dibutuhkan pilihan dalam membuat keputusan dalam penentuan pola penggunaan lahan yang sangat dipengaruhi oleh aspek politik yang sangat dipengaruhi oleh keadaan ekosistem, lingkungan, sosial dan ekonomi.

Jika lahan telah dideskripsikan baik mencakup kondisi tanah, sumberdaya yang dapat dioptimalkan dan kondisi sosial dan ekonominya dan dilihat bagaimana dampak pemanfaatan lahan dari segi keuntungan ekonomi, kondisi sosial budaya dan daya dukung lingkungannya barulah dibuat perencanaan tentang pembangunan.

Menurut Irianto, Gatot (2006) dampak alih fungsi lahan terhadap banjir dan kekeringan adalah pembangunan dan parit bertingkat (channel reservoir in cascade) Keunggulan teknologi ini adalah murah dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat, Dampaknya terhadap penurunan debit banjir dapat terlihat langsung, mempunyai dampak ekonomi keluarga yang menjanjikan karena air yang ditampung dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas ekonomi bernilai tinggi .

Peningkatan pembangunan di wilayah kota Jakarta sebenarnya telah menjadi masalah tersendiri bagi lingkungan dan potensi sumberdaya di wilayah tersebut. Tahap revitalisasi wilayah yang telah dijadikan lahan pemukiman oleh pihak pengembang di Pantai Indah Kapuk harus segera dilakukan karena jika tidak musibah banjir akan terus melanda Jakarta terutama wilayah Jakarta Utara.. Sistem pembuangan air yang dilakukan oleh pengembang sebaiknya menggunakan sistem yang baik sehingga pembuangannya tidak merugikan pihak lainnya. Drainase yang menggunakan parit bertingkat yang kemudian air tersebut dapat diolah mungkin menjadi solusi terbaik. Sehingga genangan-genangan besar tidak muncul

saat musim hujan tiba. Dan kekeringan tidak menjadi hal yang menakutkan disaat musim kemarau tiba. Langkah yang akan dilakukan membutuhkan peran serta semua pihak mulai dari pemerintah, pengembang, pemilik lahan, masyarakat, pihak akademisi dan beragam pihak yang terkait. Padahal Kontroversi tealh dimulai sejak Hutan Angke Kapuk yang sejak 10 Juni 1977 ditetapkan Menteri Pertanian sebagai hutan lindung dan sisanya untuk hutan wisata dan pembibitan, diubah menjadi permukiman, kondominium, pusat bisnis, rekreasi, dan lapangan golf, dengan syarat tetap menyediakan hutan lindung. Persetujuan perubahan fungsi tertulis dalam SK Dirjen Kehutanan 31 Juli 1982. Apabila kontroversi yang ada hanya sebatas wacana saja maka pemerintah yang pada awalnya hanya melihat dari segi ekonomi saja akan tergiur dan melupakan aspek lingkungan.

Kebijakan tata ruang secara sederhana dapat dikatakan sebagai perencanaan yang sistematis dan terpadu berkaitan dengan fungsi tanah dan air dalam satu wilayah tertentu. Dalam skala nasional, hal ini merupakan penataan ruang yang berfungsi strategis yaitu untuk menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya baik alam (terutama tanah dan air), manusia, maupun sumber daya buatan. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang ini semestinya disinergikan dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Maka yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan ulang terhadap pengembangan lahan di kota dengan mempergunakan model-model dan teknik yang sesuai selain itu untuk Pengembang di Pantai Indah Kapuk dihentikan izin perluasan pembangunan pemukiman guna mengurangi kerusakan terhadap sistem parkir air. Pengendalian dan pengawasan

pengembangan lahan harus semakin diintegrasikan mencakup kebijaksanaan umum pertanahan (land policy), Rencanatata ruang yang pengembangannya harus melalui kesepakatan bersama rakyat, adanya komitmen rasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk perkembangan sosial dan ekonomi dan harus adanya kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat.

VI. Kesimpulan

Tata guna lahan terkait dengan pola penggunaan lahan dalam hubungannya dengan kegiatan manusia. Alih fungsi lahan yang biasa disebut sebagai konversi lahan pada dasarnya adalah proses yang tidak dapat dicegah sehingga diperlukan pengendalian perencanaan dan pengawasan.

Pantai Indah Kapuk yang pada awalnya berupa rawa yang merupakan daerah peresapan air, telah berubah fungsi menjadi daerah pemukiman elit yang mengedepankan eksklusifitas dan kenyamanan penghuninya padahal dampak konversi lahan pada wilayah ini mengakibatkan masalah berkepanjangan di Jakarta khususnya wilayah Jakarta Utara. Bencana banjir dan sulitnya air bersih menjadi ancaman utama bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi tersebut.

Pantai Indah Kapuk didirikan pada kedalaman satu meter dibawah permukaan air laut yang merupakan lahan basah sehingga saat musim hujan tiba genangan air akan menjadi masalah utama banjir. Apalagi sifat alih fungsi lahan pada daerah ini bersifat permanen. Pihak pengembang tidak membiarkan warga pemukiman Pondok Indah Kapuk mengalami musibah banjir, sehingga air yang berkumpul diwilayah pemukiman ini dialirkan keluar wilayah pemukiman sehingga wilayah disekitarnya terkena

banjir apabila musim penghujan tiba. Lahan yang terdapat di kawasan Pantai Indah Kapuk merupakan lahan basah atau yang disebut wetland sehingga merupakan tempat ekosistem yang baik bagi populasi burung air dan burung migran yang tidak dapat dilepaskan dari ekosistem hutan mangrove di Pantai. Masalah ekosistem dan ekologi bermunculan mulai dari punahnya ekosistem burung di wilayah hutan mangrove dan hutan bakau sampai yang membahayakan bagi manusia seperti banjir dan sulitnya mendapatkan pasokan air bersih.

Kebijakan tata ruang secara sederhana dapat dikatakan sebagai perencanaan yang sistematis dan terpadu berkaitan dengan fungsi tanah dan air dalam satu wilayah tertentu. Dalam skala nasional, hal ini merupakan penataan ruang yang berfungsi strategis yaitu untuk menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya baik alam (terutama tanah dan air), manusia, maupun sumber daya buatan. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang ini semestinya disinergikan dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Saran

Dengan melihat dan memperhatikan pembahasan dalam makalah ini yang pada intinya membahas tentang konversi lahan di Pantai Indah Kapuk dengan menitikberatkan pada alih fungsi daerah peresapan air menjadi daerah pemukiman dengan label metropolitan maka penulis memberikan masukan yang semoga dapat bermanfaat.

Dalam penyelesaian masalah Pantai Indah Kapuk diperlukan adanya langkah strategis guna meningkatkan keadilan distribusi pemanfaatan lahan sehingga tidak mendatangkan permasalahan yang berkaitan dengan ekosistem dan kegiatan

kehidupan manusia.

Selain itu diperlukan sentimen positif dari masyarakat mengenai isu lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari agar meningkatnya aktifitas pembangunan sejalan dengan pemanfaatan potensi alami lahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan dan penegakan peraturan. Koordinasi pemanfaatan ruang harus ditingkatkan sehingga pola pemanfaatan lahan tidak lagi bersifat sektoral dan harus adanya kesinambungan antar berbagi pihak pemerintah, pihak pengembang, masyarakat, kaum akademisi dan seluruh elemen bangsa agar lahan dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik lahan tersebut.

Pola pengendalian dalam perencanaan pembangunan lahan harus ditingkatkan terkait dengan inventarisasi sumberdaya, kelayakan proyek, peninjauan proyek dan evaluasi lahan sehingga penggunaan lahan dapat optimum juga lestari.

V. Referensi

- Irianto, Gatot. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air Strategi Pendekatan dan Pendayagunaannya*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Jurusan Tanah. 1990. *Pengkajian Perubahan Penggunaan Lahan Derah Sekitar Puncak dan Akibat yang Ditimbulkan*. Bogor : Fakultas Pertanian IPB
- Sitorus. Santun R.P. 1985. *Evaluasi Sumberdaya Lahan*. Bandung : Tarsito Sumardjono. Maria S.W. 2001. *Kebijakan Pertanian antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Utomo. Muhajir.at.al. 1992. *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

http://www.penulislepas.com/more.php?id=2097_0_1_0_M. tanggal 7 Mei 2006

<http://kompas.com/kompas-cetak/0408/05/utama/1190748.htm>. tanggal 5 Agustus 2004

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/10/Inspirasi/249018.htm>. tanggal 10 April 2003

<http://jakartabanjir.wordpress.com/tag/sejarah>. tanggal 11 Februari 2007

Pemanfaatan Sampah Makanan dari Sumber Rumah Tangga dalam Upaya Mengurangi Peningkatan Gas Rumah Kaca

Dedeh Kurniasih

Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
dedehkurniasih01@ui.ac.id

Abstrak

Persoalan sampah makanan termasuk salah satu isu global yang serius. Di Indonesia, masalah pengelolaan sampah makanan belum menjadi perhatian yang meluas. Padahal, sampah makanan yang tak terkelola baik, bisa berdampak besar pada lingkungan. Salah satunya, dapat menghasilkan gas metana, yang lebih berbahaya dari karbondioksida. Gas ini berdampak pada peningkatan pemanasan global. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu mengurangi dan memanfaatkan sampah makanan. Penelitian ini memfokuskan pada analisis potensi pengelolaan sampah makanan yang dapat dilakukan sejak dari awalnya, rumah tangga dan masyarakat. Bagaimana memaksimalkan pemanfaatan sampah makanan di lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Seperti apa sistem yang dapat dilakukan agar pengelolaan sampah makanan berkesinambungan. Analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi, melalui studi kepustakaan dengan data literatur dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sampah makanan dari sumber sampah pertama yaitu rumah tangga dapat dilakukan tanpa membutuhkan teknologi canggih. Penanganan sampah makanan rumah tangga dapat berjalan baik dan berkesinambungan karena adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai sampah makanan di rumah tangga, kepedulian dan kemauan, serta kemitraan di lingkungan masyarakat. Kesuksesan penanganan sampah makanan dari lingkungan masyarakat terkecil dapat ditularkan di lingkungan yang lebih luas lagi.

Kata kunci : sampah makanan, gas metana

I. Pendahuluan

Sampah, secara umum sering dianggap sebagai barang tidak berguna. Tidak heran, jika kemudian banyak orang yang tidak peduli dengan sampah. Padahal, sampah bisa menimbulkan persoalan serius. Salah satunya, sampah makanan misalnya, yang merupakan sisa dari bahan pangan yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi. Itu sebabnya, bahan makanan yang rusak ini, kemudian dibuang. Sampah makanan ini, bisa berupa kulit buah-buahan yang dagingnya dikonsumsi, sisa makanan, sayuran, makanan yang basi, dan masih banyak lagi lainnya.

Indonesia termasuk negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Ini diungkapkan the Economic Intelligent Unit (EIU), yang mengeluarkan data tentang *Food Sustainability Index* (FSI). Sampah makanan yang dihasilkan Indonesia sebanyak 300 kg per orang setiap tahunnya.

Kementerian PPN/Bappenas, pernah membuat kajian pada tahun 2000-2019. Hasilnya, setiap tahun, sampah makanan yang terbuang di Indonesia cukup besar. Jumlahnya diperkirakan 23-48 juta ton. Jumlah ini setara 115-184 kilogram per kapita per tahun. Sementara menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan tentang komposisi sampah secara nasional. Tahun 2020, KLH mendapati bahwa sampah makanan itu berasal dari sampah yang dihasilkan rumah tangga.

Sementara masyarakat belum menyadari, bahwa sampah makanan ini bisa memperburuk iklim dunia. Sekitar 4,4 gigaton emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dihasilkan dari gas yang timbul dari sampah makanan. Gas ini dilepaskan ke lingkungan sekitar. Pelepasan gas ini, lebih kuat dari karbondioksida. Akibatnya, gas ini berpotensi meningkatkan panas dan berpen-

garuh pada pemanasan global. Selain itu, pada timbunan sampah yang terkena air hujan, bisa menimbulkan terjadinya air lindi. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, air lindi juga mengandung racun dan berbahaya bagi manusia. Karena air lindi mengandung logam berat, maka bila merembes ke dalam tanah maka dapat terjadi pencemaran air tanah. Bila masuk ke sungai dapat merusak ekosistem sungai.

II. Rumusan Permasalahan

Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Terutama sampah makanan yang termasuk paling tinggi di masyarakat. Penanganannya seolah tampak begitu sulit. Pertanyaan yang muncul dari kajian dengan tema "Pemanfaatan Sampah Makanan dari Sumber Rumah Tangga dalam Upaya Mengurangi Peningkatan Gas Rumah Kaca," adalah :

Bagaimana mengupayakan pengurangan sampah makanan sehingga dapat memberi dampak positif bagi lingkungan?

Seperti apa pemanfaatan sampah makanan di rumah tangga sehingga bisa bermanfaat pada lingkungan?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah makanan untuk dilakukan di masyarakat serta dampaknya bagi masyarakat dan juga lingkungan. Selain itu memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah makanan yang dapat diaplikasikan secara sederhana di setiap rumah tangga. Karena upaya sebagai langkah kecil ini bisa memberi pengaruh positif dan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

IV. Tinjauan Pustaka

Sampah Makanan

Masyarakat belum banyak yang mengetahui, bahwa sektor rumah tangga termasuk penghasil sampah makanan terbesar. Sampah makanan yang dihasilkan berdasarkan waktu dikelompokkan ada tiga (Legrand, 2017), yaitu :1) sebelum dikonsumsi, yaitu bahan-bahan makanan yang belum diolah, makanan basi, dan produk lainnya yang sudah dibuang sebelum selesai diolah. 2). Setelah dikonsumsi, seperti sisa-sisa makanan. 3) Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan, misalnya minyak goreng.

Akibat ketidaktahuan soal dampak dan pemanfaatan sampah makanan dari rumah tangga, seringkali sampah makanan tidak terkelola dan tertangani dengan baik. Tidak heran kalau perilaku seseorang terhadap sampah makanan tidak begitu peduli atau istilahnya *food waste behavior*. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi perilaku tersebut (Hebrok & Boks, 2017, Ilyuk, 2018), disebutkan yaitu faktor aspek material di keluarga seperti kondisi hidup, akses geografis, moda transportasi, serta toko bahan kebutuhan sehari-hari.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang sampah makanan akan berpengaruh pada peningkatan timbulan sampah makanan (Van der Werf et al., 2019). Termasuk pula pengaruh dari perilaku masyarakat mengenai kurangnya perencanaan dalam menu makanan.

Gas Rumah Kaca

Sampah makanan di masyarakat umumnya dikenal pula sebagai sampah organik. Jika sampah organik ini menumpuk dalam jumlah besar, maka akan menimbulkan gas yang bisa membawa efek rumah kaca. Gas Rumah Kaca (GRK) salah satunya metana (CH₄). Efek GRK yang ditimbulkan metana, 20-30 kali lipat

karbondioksida (CO₂), (KLH, 2011).

Keberadaan emisi ini, bisa diketahui dengan apa yang dinamakan sebagai IPCC (*Intergovernment Panel on Climate Change*), dengan menggunakan satuan emisi Gg/tahun atau ton/tahun. Komposisi sampah makanan, akan menentukan gas metan yang dihasilkan. Sementara masyarakat yang belum sepenuhnya sadar tentang akibat metan, akan tetap menjalankan kebiasaannya. Mereka tidak tahu, gas metan yang dihasilkan dari sampah makanan, berkontribusi 15% pada pemanasan yang terjadi di seluruh dunia.

Kalangan akademisi sudah bisa memperkirakan, setiap kilogram sampah makanan, bisa menghasilkan 0.5 m³ gas metan. Gas Metan, bisa terbentuk oleh hasil dekomposisi anaerobik sampah organik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, gas ini juga bisa dihasilkan dari pembakaran bahan organik. Gas metan yang terbentuk, akan menyebar dalam tumpukan sampah, baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian gas akan lepas ke atmosfer.

Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Pemanasan global ini terjadi karena adanya efek rumah kaca di atmosfer bumi. Efek rumah kaca terjadi karena gas-gas GRK, memerangkap radiasi panas matahari yang dipantulkan bumi. Akibatnya, ozon yang melindungi bumi semakin tipis. Tipisnya ozon membuat suhu permukaan bumi menjadi naik.

Publikasi UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*) menyebutkan, kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata sebesar 1°C sejak awal revolusi industri, dan akan mencapai 2°C pada pertengahan abad ini. Secara global, kenaikan suhu menyebabkan terjadi berbagai perubahan pada iklim. Seperti cuaca ekstrim, permukaan air laut

naik, dan gletser mencair.

Jika laju emisi GRK tidak diupayakan dikurangi, maka suhu global akan meningkat, rata-rata dengan laju $0,3^{\circ}\text{C}$ setiap 10 tahun (IPCC, 2006). Maka perlu diupayakan tindakan-tindakan nyata untuk mengurangi laju emisi GRK.

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro yang digelar pada tanggal 3-4 Juni 1992, disepakati soal kerangka kerja perubahan iklim PBB (UNFCCC). Kesepakatan ini mulai diberlakukan pada tanggal 21 Maret 1994. Adapun tujuan UNFCCC, menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Kestabilan itu, dikejar sampai ke tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim. Sistem iklim merupakan sebuah kesatuan yang kompleks. Kesatuan sistem ini melibatkan tujuh komponen. Ketujuh komponen itu saling mempengaruhi satu sama lain. Ketujuh komponen itu adalah kelembaban atmosfer, temperatur atmosfer, komposisi atmosfer, keseimbangan hidrostatik, penampakan daratan, keadaan laut di dunia dan kriosfer.

Manajemen Sampah

Upaya nyata untuk memperlambat kecepatan tercemarnya atmosfer dunia ini, tidak bisa dilakukan sendirian. Bahkan, diperlukan langkah radikal yang melibatkan seluruh penghuni bumi. Kesepakatan dunia untuk mengurangi emisi GRK sudah dibuat, dan seluruh dunia diwajibkan mengurangi emisi GRK. Kewajiban ini, sebelumnya sudah dituangkan dalam kesepakatan Protokol Kyoto tahun 1990. Protokol ini, kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan menuangkannya dalam UU RI 17/2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.

Berbagai negara bersepakat untuk

memperbaiki iklim. Apalagi GRK merupakan efek yang dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Indonesia diharapkan dapat menyumbang menyerap GRK dengan berbagai aktivitasnya. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi bersih yang efisien dan pemanfaatan energi terbarukan, serta mengelola sampah rumah tangga.

Di beberapa negara, pengelolaan sampah makanan telah dilakukan dalam suatu sistem terpadu. Hal ini bisa dijadikan contoh dan diaplikasikan di Indonesia, terutama di perkotaan yang proporsi sampah makanan cukup signifikan. Kunci keberhasilannya, mulai dari sumber sampah dengan dilakukan pemilahan sampah makanan. Selanjutnya, sampah makanan diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dapat lebih dimaksimalkan penanganannya.

V. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penanganan sampah makanan dari sumber sampah di rumah tangga. Keberhasilan dalam pengelolaannya dapat menjadi rekomendasi untuk penanganan selanjutnya. Untuk menjelaskan subjek penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif karena ingin menjelaskan seperti apa langkah-langkah yang dapat dilakukan serta menyikapi bagaimana penanganan sampah makanan ini di masyarakat. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder atau kajian kepustakaan, dari berbagai literatur seperti buku, jurnal-jurnal sebelumnya dengan penelitian yang terkait.

VI. Pembahasan

Masalah sampah makanan, memang menjadi persoalan yang cukup besar di masyarakat. Apalagi, jika sistem pengelo-

laan yang dilakukan tidak bisa menangani sampah makanan dengan baik. Di daerah perkotaan di Indonesia, sampah makanan sering menjadi persoalan yang cukup mengganggu. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Van der Werf et al. (2019). Masyarakat tidak peduli dengan dampak lingkungan akibat sampah makanan. Pandangan ini, tampaknya sejalan dengan hasil penelitian yang digelar Amirudin & Gim (2019).

Meskipun masyarakat, atau seseorang paham dengan nilai-nilai lingkungan, namun tidak otomatis mereka mau berupaya keras untuk mengurangi sampah makanan. Semula, orang-orang yang punya pemahaman baik tentang lingkungan ini, diharapkan akan dapat mengurangi volume sampah makanan.

Jika melihat bagaimana sejumlah negara maju menangani sampah, maka akan terlihat cara menangani sampah makanan di Indonesia seperti tidak serius. Penanganan sampah makanan terkesan seadanya. Untuk itu, sosialisasi tentang penanganan sampah makanan bukan saja ditujukan pada masyarakat, namun juga pada para pengambil keputusan. Apalagi, cara penanganan sampah makanan yang dilakukan di sejumlah negara maju di lingkungan masyarakat sebetulnya tidak terlalu canggih dengan penggunaan teknologi tingkat tinggi. Namun, esensinya dapat dicontoh, dimodifikasi dan ditiru agar dapat dipakai sebagai cara menangani sampah makanan yang lebih baik dan lebih ramah pada alam dan lingkungan.

Strategi Pengelolaan Sampah Makanan

Di Indonesia, pengelolaan sampah makanan belum menjadi hal khusus yang perlu mendapat perhatian. Perlu strategi yang dilakukan dalam mengelola sampah makanan. Pengelolaan sampah makanan di Indonesia sebetulnya sudah dituangkan

dalam aturan yang jelas. Aturan itu berupa UU no: 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada bagian pertimbangan dari UU ini sudah diakui bahwa ada empat masalah yang dihadapi masyarakat terkait sampah makanan.

Pertama, jumlah penduduk yang terus bertambah dan ada pergeseran pola konsumsi masyarakat. Keadaan ini mendorong peningkatan volume sampah makanan. Selain itu, jenis dan karakteristik sampah makanan yang dihasilkan pun sangat beragam.

Kedua, pengelolaan sampah makanan selama ini juga masih buruk. Penanganannya seperti dilakukan apa adanya. Tidak ada cara penanganan yang baik, sehingga sampah makanan yang dihasilkan bisa berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, lingkungan juga menjadi tercemar akibat penanganan sampah makanan secara serampangan.

Ketiga, sampah makanan telah menjadi persoalan nasional. Itu sebabnya, diperlukan keseriusan secara nasional agar penanganan sampah lebih baik. Tentu saja, diharapkan agar sampah dapat ditangani sejak dari sumber penghasil sampahnya, dalam hal ini sampah rumah tangga, hingga menjadi produk lain yang dapat lebih bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan. Selain itu, upaya penanganan sampah ini juga dapat mengubah perilaku masyarakat ke arah lebih baik dalam menyikapi sampah makanan. Mereka bisa lebih peduli pada sampah makanan yang dihasilkan.

Keempat, penanganan sampah makanan secara hukum, dengan adanya UU ini, diharapkan ada pihak yang bertanggungjawab, dan ditunjuk sebagai motor penggerak agar penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional. Selain itu, penanganannya dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

UU tentang sampah juga menyebutkan dengan jelas tentang apa yang disebut sebagai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh serta berkelanjutan dan berkesinambungan. Langkah itu dilakukan untuk pengurangan dan penanganan sampah.

Hal lain yang cukup menarik dari UU sampah adalah adanya sembilan asas yang harus jadi pegangan dalam pengelolaan sampah. Kesembilan asas itu adalah asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomis. Semua langkah yang dilakukan untuk pengelolaan sampah bertujuan pada tiga hal, yaitu kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, dan sampah sebagai sumber daya.

Secara populer, pengurangan sampah dilakukan dengan membatasi timbulan sampah. Selain itu, juga dilakukan daur ulang sampah, serta pemanfaatan kembali sampah yang sudah ditangani dengan baik. Artinya, pengurangan sampah makanan pada sumber sampah menjadi bahasan penting. Karena setiap orang merupakan produsen sampah makanan, maka diperlukan langkah untuk membangun kepedulian tiap orang pada sampah makanan. Mereka didorong untuk lebih peduli pada kondisi makanan yang bisa menambah sampah. Masyarakat didorong agar mewujudkan kebiasaan yang bijak terkait makanan yang dikonsumsi. Hal ini akan berhubungan dengan kebiasaan dalam pembelian makanan, proses penyimpanan dan persiapan makanan sebelum dikonsumsi. Dengan langkah seperti ini diharapkan masyarakat atau setiap individu bertanggungjawab pada proses pengurangan sampah makanan.

Di tingkat rumah tangga, pengelolaan dapat dilakukan secara sederhana dengan

hal-hal mudah dan praktis untuk dilakukan. Selama ini, di masyarakat sudah cukup dikenal istilah 3R. Sebuah langkah untuk mengurangi, menggunakan/pemanfaatan kembali, dan mendaur ulang. Istilah yang sering di gembar-gemborkan yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*.

Selain itu, perlunya diberikan pemahaman dan pentingnya pengetahuan di rumah tangga akan dampak seriusnya dari sampah makanan ini, serta pentingnya upaya pengurangan sampah makanan. Masyarakat diberikan keterampilan dan pelatihan dalam memilah sampah, teknis pengelolaan serta pemanfaatan sampah makanan secara mandiri. Keterampilan yang akan dilatihkan berupa mengelola sampah organik menjadi pupuk, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan mengelola sampah organik ini, juga dapat disebarluaskan kepada rumah tangga lainnya.

Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sampah makanan dalam skala rumah tangga, perlu dilakukan secara konkrit dan disebarkan di masyarakat. Pemahaman yang diberikan ini amat penting untuk memperluas cakrawala berfikir masyarakat agar mereka mau menggeser pola penanganan sampahnya secara mandiri. Kalau itu bisa dilakukan, maka kelestarian lingkungan akan menjadi nyata.

Pengolahan sampah makanan dengan daur ulang diupayakan dengan pemilahan sampah di sumbernya, kemudian untuk sampah makanan dilakukan pewadahan tersendiri. Hasil pemilahan sampah makanan kemudian dilakukan pemanfaatan dengan pembuatan kompos. Pemanfaatannya dapat digunakan untuk kesuburan tanah atau pakan hewan ternak.

Teknologi pengelolaan sampah makanan sebetulnya bisa dilakukan oleh setiap orang, sehingga dapat dilakukan sendiri di setiap rumah tangga. Dalam hal

ini yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan kepedulian untuk menangani sampah rumah tangga.

Pengolahan sampah makanan termasuk yang dapat dilakukan dengan metode produksi yang sederhana, menggunakan waktu sedikit, tidak banyak menggunakan lahan, dan dapat dikendalikan pengelolaannya.

Memang masih ada metode pembuangan lain yang bisa dilakukan untuk penanganan sampah, dengan cara pembuatan lubang di tanah. Namun, pembuatan lubang galian tanah untuk sampah ini, juga harus mengikuti aturan yang ada. Salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ketentuan itu mengacu agar proses pengolahan sampah tidak membahayakan lingkungan sekitar.

Pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, sebetulnya dapat mengembangkan berbagai teknologi terkait pengelolaan sampah makanan. Mereka mempunyai kemampuan untuk menerapkan teknologi itu dalam skala yang lebih besar, dan dapat langsung memikirkan tentang pemanfaatannya secara ekonomi. Mereka tentu mempunyai tim ahli yang menguasai teknis pengelolaan, pakar lingkungan dan pakar sosial yang bisa dipekerjakan untuk menangani sampah. Pemerintah juga punya kemampuan untuk membangun tempat pengolahan sampah yang layak dengan menyiapkan area pemilahan sampah, serap menyiapkan tempat penyimpanan hasil sampah yang sudah diolah, bahkan juga termasuk residu yang dihasilkan dari hasil pengolahan itu.

Sistem Pengumpulan dan Pemilahan

Masyarakat rumah tangga perkotaan di

Indonesia, masih banyak yang mempunyai kebiasaan membuang sampah dalam satu wadah tanpa dipilah. Jika diakumulasikan, maka sampah yang akan sampai di tempat pembuangan akhir akan menimbulkan polusi udara dan menimbulkan gas emisi rumah kaca. Maka, untuk membantu mengurangi sampah tersebut perlu dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagai unit masyarakat terkecil.

Pemilahan sampah makanan ini dilakukan setiap hari di rumah tangga berdasarkan jenis sampahnya. Pemilihan dapat dilakukan dengan memisahkan setiap jenis sampah. Sampah kulit buah atau sayur, dapat dipisahkan dari sampah roti ataupun kantong teh yang masih mengandung plastik. Selain itu, sisa bubuk kopi, sisa daging dan tulang, *seafood*, dan cangkang telur, juga perlu penanganan tersendiri. Bisa juga, sisa pengolahan di dapur dipisahkan dari sampah lain, seperti plastik bekas pembungkusan bahan makanan. Bahan sampah makanan, atau bahan organik ini, dapat dimasukkan dalam tempat yang diberi nama ataupun warna, agar memudahkan pada saat memilah sampah makanan. Langkah seperti ini, sudah diterapkan di Oslo, Norwegia.

Sistem Pemanfaatan Sampah Makanan

Pemanfaatan sampah makanan dapat menjadi alternatif dalam pengurangan sampah makanan itu sendiri. Dalam pelaksanaan pemanfaatan sampah makanan ini perlu pemahaman dan pelatihan keterampilan bagaimana cara pemanfaatannya. Sampah organik yang di dalamnya termasuk yang berasal dari sampah makanan ini, dapat diolah menjadi pupuk kompos (Cundari et al., 2019).

Pembuatan kompos dapat dilakukan dengan dua cara, padat dan cair. Namun dari riset yang ditulis Yovita dkk, 2012, pupuk cair yang dihasilkan dari sampah

makanan mempunyai kandungan hara yang lebih baik. Karena jenis haranya lebih dari satu unsur. Keunggulannya, jika diberikan pada tanah, akan lebih cepat meresap dan diserap tanaman dan praktis penggunaannya. (Handayani, 2015).

Pembuatan pupuk cair berasal dari sisa-sisa sayuran, buah-buahan yang sudah busuk sebetulnya amat mudah dilakukan. Hanya saja, dibutuhkan ketekunan dan pembiasaan. Karena bahan sisa makanan itu sifatnya mudah hancur atau cepat terurai dan membusuk, jadi lebih mudah dalam proses pengolahannya. Bahan-bahan itu dapat dipotong-potong dengan pisau atau bahkan bisa dilumatkan dengan diblender. Setelah dihancurkan, bahan-bahan itu dapat dimasukkan dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian bahan yang sudah dihancurkan dapat diberikan bakteri baik mikro organisme lokal. Sampah makanan tersebut didiamkan paling tidak selama dua minggu. Setelah melewati proses fermentasi ini, maka sampah makanan itu bisa dipergunakan untuk pupuk tanaman baik berupa pupuk cair, maupun pupuk padat hasil saringan dari proses tersebut.

Kesuksesan Pengelolaan Sampah

Kebiasaan di setiap rumah tangga dalam memilah sampah akan mempermudah penanganan sampah selanjutnya. Sampah makanan yang diolah dalam rumah tangga, meski dalam skala kecil, namun langkah ini sangat membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan diangkut dengan truk sampah hingga ke tempat pembuangan akhirnya.

Selain itu, dari segi ekonomisnya dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pembuangan sampah rumah tangga. Bila sampah makanan dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pupuk padat maupun cair maka bisa bernilai ekonomis

dengan menjualnya kepada pengepul yang akan digunakan di pertanian atau peternakan.

Pemerintah bisa pula berperan sebagai pembeli dari produksi kompos yang dibuat masyarakat secara mandiri dan dikumpulkan secara kolektif dari masyarakat. Pemerintah setempat dapat memanfaatkan pupuk kompos tersebut untuk digunakan di taman-taman kota maupun perkantoran pemerintahan.

Kesuksesan dalam penanganan dan pengelolaan sampah selanjutnya, memang akan sangat bergantung pada keterlibatan banyak pihak. Apalagi, sumber sampah rumah tangga itu adalah setiap orang sebagai produsen sampah. Maka, tidak heran jika kesuksesan dalam pengelolaan sampah akan sangat didukung dengan adanya kerjasama semua pihak. Mulai dari individu di setiap rumah tangga, komunitas dan masyarakat dengan tokohnya yang dapat memberikan dukungan dan teladan dalam pengelolaan sampah, serta pemerintah dengan upaya-upaya penanganan sampahnya. Semua perlu ikut terlibat sehingga pengelolaan sampah dapat berkesinambungan.

Masalah sinergitas antara masyarakat dan pemerintah setempat yang tidak berjalan baik, ini bisa menjadi faktor penghambat pula dalam pengelolaan sampah makanan di rumah tangga. (Dewi et al., 2020). Bagaimanapun juga proses pengelolaan sampah secara mandiri di masyarakat perlu mendapat apresiasi dari pemerintah. Misalnya dengan memberi fasilitas maupun stimulus untuk pengolahan sampah makanan mandiri. Pada akhirnya, pemerintah akan terbantu dalam menangani masalah sampah. Meskipun, masyarakat sesungguhnya juga menjadi pihak yang harus lebih peduli pada penanganan sampah. (Hayat, et al., 2018).

VII. Kesimpulan

Langkah kecil sebagai upaya penanganan sampah makanan bisa dimulai dari sumber rumah tangga. Setiap individu merupakan produsen sampah. Perilaku terhadap sampah makanan dipengaruhi pula oleh kebiasaan dan faktor material lainnya. Kepedulian setiap rumah tangga terhadap penanganan sampah makanan tidak terjadi begitu saja. Perlu upaya dalam memberikan pengetahuan akan dampak dan manfaat dari sampah makanan.

Pengelolaan dan penanganan sampah makanan di rumah tangga dapat dilakukan dengan memberi pemahaman serta pelatihan keterampilan dalam cara pengolahan sampah makanan secara sederhana. Kebiasaan penanganan sampah makanan yang baik di setiap rumah tangga dapat ditularkan pada rumah tangga lainnya sehingga bisa berkembang dalam lingkup komunitas dan masyarakat yang lebih luas.

Penanganan sampah makanan selanjutnya bila saling bersinergi antar masyarakat dengan para ahli/akademisi, maupun pemerintah dapat memberi manfaat secara ekonomis bagi kesejahteraan bersama dan juga kelestarian bagi lingkungan.

Pengelolaan sampah makanan yang dilakukan secara baik dalam lingkup masyarakat luas bisa berdampak positif bagi lingkungan. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir, mengurangi lepasnya gas metana di lingkungan, sehingga secara tidak langsung bisa menekan laju pemanasan global.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

- Legrand, W., Sloan, P. & Chen, J.S. (2017). *Sustainability in the hospitality industry* (3rd ed.).

London: Routledge

Jurnal

- Agus, R. N., Oktaviyanti, R., & Sholahudin, U. (2019). 3R: Suatu Alternatif Pengolahan Sampah Rumah Tangga. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 72-76.
- Amirudin, N. and Gim, T.H.T (2019). Impact of Perceived Food Accessibility on Household Food Waste Behaviors: A Case of the Klang Valley, Malaysia. *Resources, Conservation & Recycling*, 151:104335.
- Cundari, L., Arita, S., Komariah, L. N., Agustina, T. E., & Bahrin, D. (2019). Pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos di desa burai. *Jurnal Teknik Kimia*. 25(1). 5–12.
- Dewi, I., N., Royani, I., Sumarjan, & Jannah, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*. 2(1). 12–18.
- Hayat, & Zayadi, H. (2018). Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Ketahanan Pangan*. 2(2). 131–141.
- Utami, B. D., Indrasti, N. S., & Dharmawan, A. H. (2008). Pengelolaan Sampah Rumahtangga Berbasis Komunitas: Teladan dari Dua Komunitas di Sleman
- Yovita, H., Indriani. (2012). Membuat Kompos Secara Kilat. Jakarta: Penebar Swadaya. hal. 65.
- Van der Werf, P and J.A. Seabrook, J.A. Gilliland. 2019. Food for Naught: Using the Theory of Planned Behavior to Better Understand Household Food Wasting Behavior.

Internet

The Economist Intelligence Unit. (2017).

Fixing Food – Towards a More Sustainable Food System. <https://impact.economist.com/projects/food-sustainability/>. Diakses pada 14

Maret 202

Kontribusi Penurunan Emisi GRKNasional, Menuju NDC 2030. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html>.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ASURANSI TRISAKTI

**Ade Irma Hayati, S.E., M.M.¹,
Dr. Mardi Siswoyo, M.M.², Dr. (C) Ir. Jones Zenas Rante, M.M.³
Institut Bisnis dan Multimedia ASMI
adhe011083@gmail.com**

ABSTRAK

Manajemen sumber daya manusia dilakukan dalam upaya untuk mengukur seberapa jauh sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh seberapa baik komitmen organisasi para karyawan. Oleh karena itu Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompensasi terhadap komitmen organisasi secara parsial dan secara simultan di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Jumlah populasi dan sampel seluruh karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang berjumlah 37 orang. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang diolah menggunakan SPSS.25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen Organisasi, sedangkan Lingkungan Kerja secara Parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Komitmen Organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikansi (α) = 0.05 (5%) diketahui nilai t-tabel 2.034, Gaya Kepemimpinan memiliki nilai t-hitung 3.153 dan Kompensasi memiliki nilai t-hitung 2.227 lebih besar dari nilai t-tabel, sedangkan Lingkungan Kerja memiliki nilai t-hitung 0.406 lebih kecil dari nilai t-tabel. Secara simultan Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Komitmen Organisasi, dibuktikan dengan hasil nilai f hitung 17.566 lebih besar dari nilai f tabel 2.88.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kompensasi.

ABSTRACT

Human resource management is done in an effort to measure how far an organization can achieve its goals, it can be influenced by how well the organization's commitment of employees. Therefore, this research was conducted with the aim of knowing the influence of leadership style, work environment and compensation on organizational commitments partially and simultaneously in trisakti Insurance Management College. The method in this study is a quantitative method with the statistical method used is multiple linear regression analysis. The number of population and sample of all employees of Trisakti Insurance Management College amounted to 37 people. Data collection instruments in the form of questionnaires processed using SPSS.25. The results showed that: Partial Leadership and Compensation Styles have a positive and significant influence on Organizational Commitment, while the Work Environment partially has no significant influence on organizational commitment. This is evidenced by the level of significance (α) = 0.05 (5%) known t-table value 2,034, Leadership Style has a t-count value of 3,153 and Compensation has a t-count value of 2,227 greater than the value of t-table, while the Work Environment has a t-count value of 0.406 smaller than the value of the t-table. Simultaneously Leadership Style, Work Environment and Compensation have a positive and significant influence on Organizational Commitment, evidenced by the result of f calculated 17,566 greater than the value f table 2.88.

Keywords: Human Resources, Organizational Commitment, Leadership Style, Work Environment, Compensation

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan manusia secara tunggal yang memiliki keinginan, keterampilan, dorongan, pengetahuan, akal, perasaan (rasio, karya, rasa). (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, karena merupakan kunci dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam perkembangannya pengelolaan sumber daya manusia saat ini sumber daya manusia tidak lagi dianggap sebagai fungsi penunjang (supporting), tetapi sebagai sumber kunci/aset keberhasilan suatu organisasi (Hariandja, 2002).

Karena keberhasilan perusahaan bergantung pada perkembangan para karyawan itu sendiri, maka dari itu sebuah organisasi memerlukan karyawan yang memiliki komitmen tinggi dan loyalitas terhadap pekerjaan dan organisasinya. manajemen sumber daya manusia dilakukan dalam upaya untuk mengukur seberapa jauh sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya, seberapa baik komitmen para pekerja terhadap tugas pekerjaannya, seberapa besar organisasi dapat mentoleransi adanya perubahan perilaku karyawan, dalam membuat keputusan dengan cepat serta mampu mengambil langkah yang tepat dalam memecahkan sebuah masalah dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi.

Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (STMA Trisakti) adalah lembaga pendidikan tinggi formal di bidang asuransi yang pertama di Indonesia terakreditasi oleh BAN-PT. Dalam proses pengelolaan sumber daya manusia di STMA Trisakti memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia dalam mengatasi permasalahan yang timbul guna meningkatkan Komitmen Organisasi dari para karyawannya

Komitmen Organisasi merupakan keterikatan emosional, pengidentifikasian

dan keterlibatan karyawan terhadap organisasi. Komitmen Organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam pencapaian visi, misi, nilai dan tujuan organisasi. Seperti definisi dari (Kurniawan, 2011) bahwa seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Banyaknya jumlah karyawan yang mengundurkan diri atau tidak bertahan di STMA Trisakti setiap tahunnya menunjukkan menurunnya komitmen yang dimiliki karyawan tersebut. Hal ini pastinya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya sehingga karyawan tidak memiliki rasa kepercayaan dan semangat untuk tetap bertahan dan bekerja di STMA Trisakti. Menurunnya tingkat komitmen karyawan pastinya akan menurunkan pula tingkat produktivitas kerja, dan menunjukkan buruknya kualitas manajerial yang ada dalam mengelola sumber daya manusianya. Kurangnya sumber daya manusia berakibat pada pemberian tugas yang berlebih dan diluar kemampuan yang dimiliki karyawan tentunya ini juga akan membuat ketidaknyamanan bagi karyawan dalam bekerja dan menurunkan keyakinan dan keinginannya untuk berkomitmen. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi manajemen untuk dapat mengelola kebutuhan sumber daya manusia secara efektif bukan hanya kebutuhan efisiensi saja tentunya.

Seorang Pemimpin memiliki peranan penting untuk mengendalikan suatu organisasi. Peranan seorang pemimpin sangat menentukan kegagalan atau keberhasilan suatu organisasi. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka seorang

pemimpin perlu menerapkan kepemimpinan secara baik dan benar. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengelola, mengarahkan, mempengaruhi, memerintah dan meotivasi bawahannya untuk memperoleh tujuan yang diinginkan organisasi.

Gaya Kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan karyawan dalam sebuah organisasi dengan para pemimpinnya Chiang dan Wang (2012). Menurut (Edison dkk 2017:91) mengatakan bahwa "Gaya Kepemimpinan adalah cara pemimpin bertindak atau bagaimana ia memengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pada dasarnya tidak semua Gaya Kepemimpinan akan memiliki kecocokan untuk semua kondisi. Gaya Kepemimpinan yang ada saat ini di STMA Trisakti belum terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan sehingga tidak adanya kerjasama dalam penyelesaian tugas berakibat banyak tugas maupun pekerjaan yang terlambat penyelesaiannya.

Kondisi Lingkungan Kerja dikatakan baik atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan Kerja yang memuaskan akan dapat meningkatkan Komitmen Organisasi karyawan, dimana karyawan akan tetap setia dan berusaha mempertahankan statusnya sebagai karyawan di STMA Trisakti.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Komitmen Organisasi adalah Kompensasi, karena setiap orang yang bekerja berharap dapat memenuhi kebutuhannya dengan memperoleh gaji dan upah yang diharapkannya. Menurut Simamora (2004) bahwa Kompensasi yang baik adalah sistem Kompensasi yang tanggap terhadap situasi dan sistem yang dapat memotivasi dan memberikan kepuasan kepada para karyawannya. Kompensasi yang adil akan menumbuhkan

rasa memiliki terhadap organisasi, yang berdampak pada meningkatnya komitmen pegawai pada organisasinya (Sudarwanti, 2007).

Pemberian Kompensasi di STMA Trisakti dirasa belum Cukup Baik adil dan merata dikarenakan belum adanya pengukuran yang tepat atas pemberian Kompensasi berdasarkan nilai kinerja yang dihasilkan karyawan. Pemberian Kompensasi yang tidak sesuai dan kurangnya penghargaan atas kinerja yang diberikan oleh karyawan pastinya berakibat pada menurunnya semangat yang dimiliki karyawan untuk bekerja secara produktif dan menghilangkan rasa kepercayaan maupun keinginan karyawan untuk berkomitmen. Namun ada kemungkinan juga beberapa karyawan yang memutuskan untuk tetap berkomitmen walaupun Kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan karena sudah tidak memiliki semangat untuk mencari pekerjaan di tempat lain karena kondisi tertentu atau karena merasa kewajiban untuk tetap berada dalam perusahaan tersebut karena ia dibutuhkan dan ada pula yang berkomitmen karena apabila dia meninggalkan tempat kerja yang sekarang akan menambah biaya yang lebih besar dibanding tetap bekerja tempat sekarang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada tersebut, maka penulis ingin mengetahui dan perlu mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Komitmen Organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti.

METODE

Jenis metode yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta hasil yang akan disajikan (Arikunto, 2006:12). Pendekatan metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuisioner. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sensus.

Menurut Arikunto (2006:2) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan STMA Trisakti yang berjumlah 37 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Karena jumlah populasi yang ada relatif sedikit atau mudah dijangkau maka total keseluruhan populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian, maka jumlah sample yang digunakan dari keseluruhan populasi yang ada sebanyak 37 orang dengan menggunakan metode total sampling atau sensus.

Dalam penelitian ini variabel Independen adalah Gaya kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja (X2), Kompensasi (X3) dan variabel Dependen adalah Komitmen organisasi (Y). Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder melalui Observasi, Penelitian Pustaka, Dokumentasi dan Kuisioner. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden. Data dalam penelitian ini berbentuk skala ordinal, dimana skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada rangking yang di urutkan dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang sampai jenjang yang lebih rendah atau sebaliknya dengan menggunakan skala pengukuran linkert.

Tabel 3.3
Kriteria Skala Linkert

Bobot Nilai	Positif	Negatif
5	Sangat setuju	Sangat tidak setuju
4	Setuju	Tidak setuju
3	Cukup Baik Setuju	Cukup Baik Setuju
2	Tidak setuju	Setuju
1	Sangat tidak setuju	Sangat setuju

Sumber : Diolah peneliti, 2022

Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Dalam perhitungan pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu yang berupa program aplikasi SPSS versi 25.0.

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi, Sugiyono (2012:147). Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kekuatan dari masing masing indikator yang ada dalam variabel itu sendiri.

Analisis statistik yang digunakan yaitu analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel yang berupa pendugaan atau peramalan dari Gaya Kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja (X2), Kompensasi (X3) dan satu variabel Komitmen Organisasi (Y), Analisis Koefisiensi Korelasi untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah antara kedua variabel, Analisis kesesuaian model digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah sangat baik untuk dapat digunakan

dan Uji Hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji f).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden diperlukan untuk memberi gambaran umum tentang responden yaitu karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang berjumlah 37 orang dengan rincian data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Parameter	Jumlah	Presentasi
Jenis kelamin			
1	Pria	23	62.20%
2	Wanita	14	37.80%
Usia			
1	< 25 tahun	1	2.70%
2	25 tahun s/d 35 tahun	16	43.30%
3	36 tahun s./d 45 tahun	6	16.20%
4	46 tahun s/d 55 tahun	7	18.90%
5	> 55 tahun	7	18.90%
Pendidikan			
1	SMA	5	13.50%
2	Diploma	3	8.10%
3	Sarjana	12	32.40%
4	Magister	16	43.30%
5	Doktor	1	2.70%
Lama Bekerja			
1	< 1 tahun	1	2.70%
2	1 tahun s/d 5 tahun	14	37.90%
3	5 tahun s/d 10 tahun	7	18.90%
4	10 tahun s/d 20 tahun	4	10.80%
5	> 20 tahun	11	29.70%

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih banyak kaum pria dengan jumlah 62,2%. Berdasarkan usia, mayoritas berumur 25 – 35 tahun dengan jumlah 43,3% . Berdasarkan pendidikan mayoritas adalah Magister dan Sarjana hal itu sesuai dengan jumlah Latar belakang pendidikan Magister

berjumlah 43,3% dan Sarjana sejumlah 32,4%, Sedangkan berdasarkan lama bekerja dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan didominasi oleh karyawan dengan lama bekerja selama 1 tahun s/d 5 tahun sejumlah 37,9%.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum kondisi dari masing-masing variabel pada penelitian ini.

Tabel 4.42
Rekap Nilai Indikator
Masing-masing Variabel Penelitian

Varia bel	Indikator	Inde x	Keter angan
Gaya Kepe mimpi nan (X1)	Kemampuan Mengambil Keputusan (X1.1)	3.83	Baik
	Kemampuan Mengambil Keputusan (X1.2)	3.46	Cukup Baik
	Kemampuan Memotivasi (X1.3)	3.86	Baik
	Kemampuan Memotivasi (X1.4)	4.08	Baik
	Tanggung Jawab (X1.5)	3.86	Baik
	Tanggung Jawab (X1.6)	4.03	Baik
	Kemampuan Berkomunika si (X1.7)	3.49	Cukup Baik
	Kemampuan Berkomunika si (X1.8)	3.7	Baik
	Kemampuan Berkomunika si (X1.9)	3.76	Baik
	Mengendalik an Bawahan (X1.10)	3.68	Baik

	Mengendalikan Bawahan (X1.11)	3.59	Baik
	Mengendalikan Bawahan (X1.12)	3.7	Baik
	Kemampuan Mengendalikan Emosional (X1.13)	3.81	Baik
	Kemampuan Mengendalikan Emosional (X1.14)	3.7	Baik
Rata-Rata		3.75	Baik
Lingkungan Kerja (X2)	Pencahaya-an Ruangan (X2.1)	4	Baik
	Ventilasi Udara (X2.2)	3.92	Baik
	Tingkat Kebisingan (X2.3)	3.78	Baik
	Tata Warna (X2.4)	3.54	Baik
	Penataan Ruang (X2.5)	3.43	Cukup Baik
	Keamanan (X2.6)	3.92	Baik
	Hubungan Karyawan (X2.7)	3.7	Baik
	Hubungan Karyawan (X2.8)	3.78	Baik
Rata-Rata		3.76	Baik
Kompensasi (X3)	Gaji (X3.1)	3	Cukup Baik
	Gaji (X3.2)	3.16	Cukup Baik

	Insentif (X3.3)	3.11	Cukup Baik
	Insentif (X3.4)	3.97	Baik
	Bonus (X3.5)	3.27	Cukup Baik
	Bonus (X3.6)	4.27	Baik
	Upah (X3.7)	3.35	Cukup Baik
	Premi (X3.8)	3.35	Cukup Baik
	Premi (X3.9)	3.65	Baik
	Pengobatan (X3.10)	3.76	Baik
	Pengobatan (X3.11)	3.49	Cukup Baik
Rata-Rata		3.49	Cukup Baik
Komitmen Organisasi (Y)	Kemauan Karyawan (Y1)	4.24	Baik
	Kemauan Karyawan (Y2)	3.51	Baik
	Kesetiaan Karyawan (Y3)	3.57	Baik
	Kesetiaan Karyawan (Y4)	2.92	Cukup Baik
	Kebanggaan Karyawan (Y5)	3.76	Baik
	Kebanggaan Karyawan (Y6)	3.54	Baik
	Kebanggaan Karyawan (Y7)	3.62	Baik
Rata-Rata		3.59	Baik

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022
 Dari Tabel 4.42 Rekap nilai indikator masing-masing variabel penelitian diatas

dapat dikatakan bahwa dari ketiga variabel penelitian tersebut, yaitu Gaya Kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja (X2) dan Komitmen Organisasi (Y) seluruhnya dapat dikatakan dalam kategori **Baik** sedangkan untuk Kompensasi (X3) masuk dalam kategori **Cukup Baik**. Variabel Lingkungan Kerja (X2) memiliki nilai index rata-rata yang hampir sama dengan nilai 3.76 dari Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dengan nilai index rata-rata 3.75, namun Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) memiliki index rata-rata yang lebih besar dari Variabel Kompensasi (X3) yang hanya memiliki nilai index rata-rata 3.49. Karena dalam kondisi pada indikator Variabel Kompensasi (X3) dikatakan belum optimal (kategori Cukup Baik) maka variabel tersebut dapat menjadi sumber permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh fungsional antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Tabel 4.43
Korelasi Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	4.101	3.495		.249
Gaya Kepemimpinan (X1)	.224	.071	.481	.003

Lingkungan Kerja (X2)	.055	.135	.054	.687
Kompensasi (X3)	.199	.089	.338	.033
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi (Y)				

Sumber : data diolah peneliti dengan spss.25 (2022)

Berdasarkan Tabel 4.43 diatas dapat dijelaskan bahwa Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan Variabel Kompensasi (X3) memiliki nilai Sig. < 0.05 yang dapat diartikan bahwa Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan Kompensasi (X3) berpengaruh signifikan pada Variabel Komitmen Organisasi (Y) sedangkan Variabel Lingkungan Kerja (X2) memiliki nilai Sig. > 0.05 yang dapat diartikan bahwa Variabel Lingkungan Kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Komitmen Organisasi (Y).

Adapun model Persamaan regresi linear berganda dari tabel diatas adalah $b_1 = 0,224$, $b_2 = 0,055$, dan $b_3 = 0,199$. Karena Variabel X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Y maka model dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1(X_1) + b_3(X_3)$$

$$Y = 4.101 + 0.224 (X_1) + 0.199 (X_3)$$

Analisis Koefisiensi Korelasi

Analisis Koefisiensi Korelasi adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel atau lebih dengan symbol huruf R. Besarnya koefisiensi korelasi adalah antara -1;0; dan +1”(Hasanah, 2016).

Tabel 4.44
Hasil Analisis Koefisiensi Korelasi
Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.613	.590	2.837
a. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Gaya Kepemimpinan (X1)				

Sumber : data diolah peneliti dengan spss.25 (2022)

Dari Tabel 4.44 Hasil Analisis Koefisiensi Korelasi Determinan diatas diketahui hasil indeks R adalah sebesar 0.783 dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan secara bersama sama antara Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan Variabel Kompensasi (X3) memiliki hubungan yang kuat terhadap Variabel Y sebesar 0.783.

Analisis Kesesuaian Model

Hasil Analisis Koefisiensi Korelasi Determinan diketahui bahwa model tersebut mampu memprediksi atau nilai terkoreksi dari koefisien determinant (*R²-adjusted*) sebesar 0.590 artinya ketepatan model dalam menjelaskan keragaman data sebesar 59% sedangkan nilai *R²* (*R Square*) diketahui adalah 0.613, maka nilai koefisien determinasi sebesar $= 0.615 \times 100\% = 61,3\%$. yang artinya bahwa model regresi yang digunakan sudah memadai sebesar 61.3 % dimana Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi mempunyai pengaruh sebesar 61.3 % terhadap Komitmen Organisasi dan sebagian besar lainnya 38.7% dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Hipotesa yang digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh dari Variabel Gaya Kepemimpinan (X1),

Lingkungan Kerja (X2) dan Kompensasi (X3) terhadap Variabel Komitmen Organisasi (Y) adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 (H1)

Ho : $\beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, diduga secara simultan tidak terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi

Ha : $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, diduga secara simultan terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi

Hipotesis 2 (H2)

Ho : $\beta_1 = 0$, diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi

Ha : $\beta_1 \neq 0$, diduga secara parsial terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi

Hipotesis 3 (H3)

Ho : $\beta_2 = 0$, diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi

Ha : $\beta_2 \neq 0$, diduga secara parsial terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Komitmen Organisasi.

Hipotesis 4 (H4)

Ho : $\beta_3 = 0$, diduga secara parsial tidak terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi

Ha : $\beta_3 \neq 0$, diduga secara parsial terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi.

Uji Simultan (Uji f)

Pengujian Hipotesis untuk menguji kebenaran akan adanya Pengaruh antara Variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y) secara Simultan atau bersama-sama dilakukan dengan uji F. Uji Simultan ini dilakukan dengan tingkat signifikansi (α) = 0.05 (5%) dengan rumus untuk menetapkan derajat kebebasan yaitu $F_{tabel} = f(k; n-k)$ atau $F_{tabel} = f(3, 34)$, maka diperoleh F-tabel sebesar 2.88. Untuk menilai

apakah Hipotesis diterima atau ditolak, ditentukan kriteri sebagai berikut:

- Hipotesa H_0 diterima dan H_a ditolak, apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau $-f_{hitung} > -f_{tabel}$
- Hipotesa H_0 ditolak dan H_a diterima, apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $f_{hitung} < -f_{tabel}$

Tabel 4.45
Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Significance
1	Regression	434.769	3	144.923	17.566
	Residual	272.258	33	8.250	
	Total	707.027	36		
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi (Y)					
b. Predictors: (Constant), Kompensasi (X3), Lingkungan Kerja (X2), Gaya Kepemimpinan (X1)					

Sumber : data diolah peneliti dengan spss.25 (2022)

Berdasarkan Tabel 4.45 Diatas didapatkan hasil bahwa nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($17.566 > 2.88$). Hasil uji F didapatkan nilai F_{hitung} yang dimiliki lebih besar dari nilai F_{tabel} sehingga hipotesis H_1 adalah H_0 ditolak dan H_a diterima dan ini dapat artikan bahwa Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi di STMA Trisakti.

Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial dari Gaya Kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja

(X2) dan Kompensasi (X3) terhadap variabel Komitmen Organisasi (Y) di STMA Trisakti maka dapat dilakukan pengujian Hipotesis uji t.

Adapun banyaknya sampel pada penelitian ini adalah 37 responden, sehingga peneliti menggunakan uji partial dengan rumus $df = n - k - 1$ atau $df = 37 - 3 - 1 = 33$ dan tingkat kemungkinan pengaruh/signifikansi (α) = 0.05 (5%) maka diperoleh t-tabel sebesar 2.034.

Tabel 4.46
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	4.101	3.495		1.174
	Gaya Kepemimpinan (X1)	.224	.071	.481	3.153
	Lingkungan Kerja (X2)	.055	.135	.054	.406
	Kompensasi (X3)	.199	.089	.338	2.227
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi (Y)					

Sumber : data diolah peneliti dengan spss.25 (2022)

Dari hasil tabel 4.46 didapatkan hasil uji t pada variabel Gaya Kepemimpinan

(X1) didapatkan hasil $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3.153 > 2.034$) maka hipotesis H2 adalah H_0 ditolak dan H_a diterima dan ini dapat artikan bahwa Gaya Kepemimpinan, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi di STMA Trisakti.

Sedangkan hasil uji t pada variabel Lingkungan Kerja (X2) didapatkan hasil $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0.406 < 2.034$) sehingga hipotesis H3 adalah H_0 diterima dan H_a ditolak dan ini dapat artikan bahwa Lingkungan Kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Komitmen Organisasi di STMA Trisakti.

Dan hasil uji t Pada variabel Kompensasi (X3) didapatkan hasil $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2.227 > 2.034$) sehingga hipotesis H4 adalah H_0 ditolak dan H_a diterima dan ini dapat artikan bahwa Kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi di STMA Trisakti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah diketahui nilai F_{hitung} 17.566 > F_{tabel} 2.88, maka variabel Gaya Kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja (X2) dan Kompensasi (X3) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen Organisasi (Y). Nilai $t\text{-hitung}$ untuk variabel Gaya Kepemimpinan (X1) sebesar 3.153 dan nilai $t\text{-tabel}$ sebesar 2.034, maka variabel Gaya Kepemimpinan (X1) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Komitmen Organisasi (Y).

Keberadaan Variabel Lingkungan Kerja (X2) tidak berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi (Y) di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, hal ini terbukti dari nilai $t\text{-hitung}$ untuk variabel Lingkungan Kerja (X2) sebesar 0.406 dan nilai $t\text{-tabel}$ sebesar 2.034, maka variabel Lingkungan Kerja (X2) serta secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Komitmen Organisasi (Y).

Keberadaan Variabel Kompensasi (X3) berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, hal ini terbukti dari nilai $t\text{-hitung}$ untuk Variabel Kompensasi (X3) sebesar 2.227 dan nilai $t\text{-tabel}$ sebesar 2.034, maka Variabel Kompensasi (X3) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Komitmen Organisasi (Y).

Saran

Saran yang diharapkan agar dapat memberikan kontribusi berdasarkan hasil dalam penelitian ini adalah :

Pihak manajemen jika ingin meningkatkan komitmen organisasi karyawannya maka perlu meningkatkan pula gaya kepemimpinannya yaitu dengan memperhatikan beberapa indikator-indikator yang dinilai perlu ditingkatkan. Dalam hal kemampuan pimpinan dalam mengambil keputusan perlu ditingkatkan agar karyawan merasa keputusan yang diputuskan oleh pimpinan dirasa adil dan relevan.

Manajemen juga sebaiknya memperhatikan pemberian kompensasi kepada karyawannya karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawannya seperti memikirkan metode yang tepat dalam pemberian gaji, agar gaji yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Lingkungan Kerja secara parsial memang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, namun manajemen bisa tetap menjaga kondisi lingkungan kerja untuk selalu nyaman, aman dan kondusif. karena pastinya manajemen tetap harus memikirkan strategi yang tepat agar karyawan memilih bertahan dan mau memberikan kesetiiaannya pada Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti.

Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi dapat pula dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 38.7% maka disarankan pada penelitian selanjutnya dapat mencari atau menambahkan variabel lain yang berkontribusi terhadap Komitmen Organisasi di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, M. d. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik, Gaya Kepemimpinan Transformasional, dan Person - Organizational fit Terhadap Komitmen Organisasi Studi pada Guru Tetad SMK Ma'arif 9 Kebumen". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Volume 1 Nomor 1.
- Bohlander, G. a. (2010). Principle of Human Resource Management. OH : South Western - Cengage Learning.
- Danang, S. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Dede Suryanto, W. P. (2016). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan UKM di Wilayah Depok Jawa Barat". Jurnal Vokasi Indoneia, Volume 4 Nomor 1.
- Desianty, S. (2005). "Pengaruh" Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Pada PT. POS Indonesia (Persero) Semarang". Jurnal Studi Manajemen & Organisasi, Volume 2 Nomor 1.
- Dewi, N. F. (2019). "Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan. E-Jurnal Manajemen, Volume 8 Nomor 6(2019 : 3730-3755).
- Didit, D. (2013). Prinsip - Prinsip Perilaku Organisasi. Surabaya: PT. Temprina Media Grafika.
- Dimas Saifunurmazah, d. (2018). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi Terhadap Komitmen Organisasi". Magisma : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Volume 6 Nomor 2.
- Dinata, M. F. (2018). "Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja dengan Komitmen sebagai Variable Intervening (Studi pada Staff Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Islam Banjarmasin)". Jurnal Wawasan Manajemen, Volume 6 Nomor 2.
- Dodi Prasada, d. (2020). "Pengaruh Etos Kerja dan Kompensasi Terhadap Komitmen Organisasi pada DHL Logistic di Jakarta". Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 4 Nomor 1.
- Edison, E. d. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia (Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi). Bandung: Alfabeta.
- Farida, U. d. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia II. Ponorogo: Umpo Ponorogo Press.
- Hasibuan. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Imam Heryanto, T. T. (2018). Path analysis Menggunakan SPSS dan Excel - Panduan Pengelolaan Data Penelitian Untuk Skripsi / Tesis. In Informatika. Bandung.
- Kartono. (2010). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Maharani, R. D. (2009). "Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan (Studi pada Divisi Peralatan Industri Argo PT. Barata Indonesia (Peseo) Gresik). Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 1 Nomor 2.
- Marihot. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Grasindo.

Marwansyah. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.

Mujanah, S. (2019). Manajemen Kompensasi. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).

Neolaka. (2014). Metode Penelitian dan Statistik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rivai. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Edisi ke 6. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Sopiah. (2008). Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset.

Suciono, A. (2016). " Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Yang Berdampak Pada Disiplin Kerja Karyawan". Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 4 Nomor 2.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT. Alfabet.

Sutrisno. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Taryaman, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Umar, H. (2007). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, S. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori Perencanaan Strategi, Isu-isu Utama dan Globalisasi. Bandung: Manggu Media.

Yani, N. W. (2019). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Karyawan dengan Motivasi Sebagai Variable Intervening". International Journal of Social Science and Business, 3(1) :55.

Jurnal Kajian Manajemen & Strategik

Journal of Management & Strategic Studies

Geopolitik, Geostrategik, dan Geoekonomi

Jurnal Kajian Manajemen & Strategik

Journal of Management & Strategic Studies

Geopolitik, Geostrategik, dan Geoekonomi

ISSN: 2776-208 4

Volume I Nomor 3, Maret 2022

Penerbit:

Yayasan Pembangunan Berkelanjutan bekerja sama dengan
ILUNI Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia